



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional, dan Pasal 263 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Pembangunan Daerah jangka Panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kota Pematangsiantar di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6945);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 133);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
DAN  
WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar.
8. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar.
9. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan Masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan Pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana ...

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervise dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan daerah.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
19. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan Pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional provinsi dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
22. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

BAB II  
KEDUDUKAN RPJPD  
Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan selama periode 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPJPD disusun berdasarkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:

a.calon ...

- a. calon Kepala Daerah dalam perumusan visi, misi, dan program;
- b. penyusunan RPJMD.

BAB III  
SISTEMATIKA RPJPD  
Pasal 3

- (1) Dokumen RPJPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH  
BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH  
BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH  
BAB VI : PENUTUP

BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJPD  
Pasal 4

- (1) Dokumen RPJPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.

BAB V ...

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 2 Mei 2025

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

WESLY SILALAH

Diundangkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 2 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

JUNAEDI ANTONIUS SITANGGANG

LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2025 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR, PROVINSI  
SUMATERA UTARA : ( 1-28/2025 )

**SALINAN Sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**EDI SUTRISNO, S.H.**  
**PEMBINA**  
**196903181989031004**

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025 – 2045

I. UMUM

Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa baik mulai dari tingkat pusat hingga daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan nasional diawali dengan proses perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan yang wajib disusun baik mulai dari tingkat pusat maupun daerah. Perencanaan pembangunan tersebut terangkai dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Telah selesainya perodesasi dari Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 mendorong pelaksanaan penyusunan RPJPD periode selanjutnya yaitu Tahun 2025 – 2045. Penyusunan RPJPD periode Tahun 2025 – 2045 dilakukan guna memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita – cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Hal ini merupakan amanat yang tercantum di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2025 hingga tahun 2045. Pelaksanaan RPJPD terbagi dalam beberapa tahapan perodesasi pembangunan perencanaan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJPD digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi dan program Wali Kota. Untuk selanjutnya RPJMD sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD tersebut merupakan rencana pembangunan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sehubungan dengan hal tersebut RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2025 – 2045 menjadi sangat penting bagi pembangunan di Pematangsiantar. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 perlu untuk ditetapkan.

Pasal 2 ...

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 1

**SALINAN Sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**EDI SUTRISNO, S.H.**

**PEMBINA**

**196903131989031004**

LAMPIRAN :  
 PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2025  
 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
 PANJANG DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
 TAHUN 2025-2045

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I - 1</b>
1.1. Latar Belakang.....	I - 1
1.2. Dasar Hukum .....	I - 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I - 5
1.3.1 Hubungan Antara RPJPD dan RPJMD.....	I - 6
1.3.2 Hubungan Antara RPJPD dengan Renstra OPD. ....	I - 6
1.3.3 Hubungan Antara RPJPD dan RTRW.....	I - 6
1.3.4 Hubungan Antara RPJPD dan RPJPN.....	I - 7
1.3.5 Hubungan Antara RPJPD dan RPJPD Provinsi. ....	I - 7
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I - 7
1.5. Sistematika Penulisan.....	I - 7
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>	
2.1. Aspek Geografi dan Demografi .....	II - 1
2.1.1 Aspek Geografi .....	II - 1
2.1.2 Aspek Demografi .....	II - 13
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II - 21
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi .....	II - 21
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya .....	II - 36
2.3. Aspek Daya Saing Daerah .....	II - 48
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah .....	II - 48
2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	II - 50
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah. ....	II - 54
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi.....	II - 68
2.4. Aspek Pelayanan Umum .....	II - 73
2.4.1 Indeks Reformasi Birokrasi .....	II - 73
2.4.2 Indeks SPBE .....	II - 76
2.4.3 Indeks Infrastruktur .....	II - 78
2.4.4 Indeks Resiko Bencana. ....	II - 80
2.4.5 Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah.....	II - 80
2.4.6 Indikator Bidang Pendidikan.....	II - 82
2.4.7 Indikator Bidang Kesehatan.....	II - 85
2.4.8 Indikator Bidang Perumahan dan Permukiman.....	II - 86
2.4.9 Indikator Bidang Sosial.....	II - 87
2.4.10 Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak....	II - 88
2.4.11 Lingkungan Hidup .....	II - 89
2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025	
II - 65 .....	II - 91
2.5.1 Arah Kebijakan RPJMD I. ....	II - 92
2.5.2 Arah kebijakan RPJMD II.....	II - 92
2.5.3 Arah Kebijakan RPJMD III. ....	II - 93
2.5.4 Arah Kebijakan RPJMD IV. ....	II - 93
2.5.5 Pencapaian.....	II - 94
2.5.6 Rekomendasi Tindak Lanjut. ....	II - 104
2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarpras Pelayanan Publik	II - 106
2.6.1 Proyeksi Kependudukan .....	II - 106

2.6.2	Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana .....	II – 112
2.7.	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah .....	II - 121
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH .....</b>	<b>III – 1</b>
3.1.	Permasalahan Pemabangunan Daerah .....	III – 1
3.2.	Isu Strategis .....	III – 9
3.2.1.	Isu Global .....	III – 10
3.2.2.	Isu Regional .....	III – 12
3.2.3.	Isu Nasional .....	III – 13
3.2.4.	Isu Strategis Nasional Provinsi Sumatera Utara .....	III – 16
3.2.5.	Isu Strategis Dokumen Perencanaan Lainnya. ....	III – 20
3.3.	Potensi dan Inovasi lokal .....	III - 26
3.4.	Isu Strategis Kota Pematangsiantar. ....	III - 26
3.4.1.	Kualitas Infrastruktur Kota dan Permukiman .....	III - 26
3.4.2.	Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat .....	III - 28
3.4.3.	Nilai Tambah Produk Unggulan .....	III – 31
3.4.4.	Tata Kelola Pemerintahan .....	III – 34
3.4.5.	Lingkungan Hidup .....	III – 36
<b>BAB IV</b>	<b>VISI DAN MISI DAERAH .....</b>	<b>IV – 1</b>
4.1.	Visi .....	IV – 1
4.2.	Misi .....	IV – 9
<b>BAB V</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH .....</b>	<b>V – 1</b>
5.1	Arah Kebijakan .....	V – 1
5.1.1	Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029). ....	V – 1
5.1.2	Arah Kebijakan Tahap II (2025-2029). ....	V – 2
5.1.3	Arah Kebijakan Tahap III (2025-2029). ....	V – 3
5.1.4	Arah Kebijakan Tahap IV (2025-2029). ....	V – 4
5.2	Sasaran Pokok .....	V – 4
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>VI – 1</b>
6.1.	Kaidah Pelaksanaan .....	VI – 1
6.2.	Pembiayaan Pembangunan .....	VI – 9

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Topografi Kota Pematangsiantar Menurut Kecamatan .....	II – 2
Tabel 2.2 Sungai Utama Di Kota Pematangsiantar .....	II – 3
Tabel 2.3 Rekap Hasil Uji Sungai .....	II – 5
Tabel 2.4 Kawasan Rawan Bencana di Kota Pematangsiantar .....	II – 8
Tabel 2.5 Capaian Indikator Resiko Bencana .....	II – 9
Tabel 2.6 Penggunaan Lahan di Kota Pematangsiantar .....	II – 9
Tabel 2.7 Proyeksi Sampah .....	II – 11
Tabel 2.8 Proyeksi Air Limbah Domestik .....	II – 12
Tabel 2.9 Proyeksi Lumpur Tinja .....	II – 13
Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	II – 14
Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Kota Pematangsiantar Menurut Umur .....	II – 18
Tabel 2.12 Kepadatan dan Distribusi Penduduk Per Kecamatan .....	II – 20
Tabel 2.13 PDRB Menurut lapangan Usaha ADHB .....	II – 23
Tabel 2.14 PDRB Menurut lapangan Usaha ADHK .....	II – 24
Tabel 2.15 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pematangsiantar .....	II – 28
Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Miskin Kota Pematangsiantar .....	II – 35
Tabel 2.17 Kondisi Seni dan Budaya Kota Pematangsiantar .....	II – 46
Tabel 2.18 Kondisi Keolahragaan Kota Pematangsiantar .....	II – 47
Tabel 2.19 Perkembangan Rata-Rata Pengeluaran Perkapita .....	II – 49
Tabel 2.20 Tingkat Hunian Kota Pematangsiantar .....	II – 49
Tabel 2.21 Literasi dan Numerasi SD dan SMP .....	II – 52
Tabel 2.22 Kondisi Jalan di Kota Pematangsiantar .....	II – 56
Tabel 2.23 Sumber Air Baku Perumda Tirta Uli Kota .....	II – 57
Tabel 2.24 Kondisi Eksisting Mata Air Perumda Tirta Uli .....	II – 58
Tabel 2.25 Jumlah Pelanggan Perumda Tirta Uli Pematangsiantar ..	II – 59
Tabel 2.26 Jasa Lingkungan Penyedia Pangan .....	II – 61
Tabel 2.27 Jasa Lingkungan Air .....	II – 62
Tabel 2.28 Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim .....	II – 63
Tabel 2.29 Kondisi Daya Dukung Penyediaan Air Bersih .....	II – 64
Tabel 2.30 Kebutuhan Air Guna Lahan dan Kebutuhan Air .....	II – 64
Tabel 2.31 Daya Dukung Air .....	II – 65
Tabel 2.32 Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan .....	II – 67
Tabel 2.32 Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan .....	II – 67
Tabel 2.33 Daya Dukung Pangan .....	II – 68
Tabel 2.34 Nilai Investasi PMA .....	II – 69
Tabel 2.35 Nilai Investasi PMDN .....	II – 69
Tabel 2.36 Angka Kriminalitas di Kota Pematangsiantar Tahun .....	II – 71
Tabel 2.37 Jumlah Demonstrasi di Kota Pematangsiantar Tahun ....	II – 71
Tabel 2.38 Rekapitulasi Perizinan di Kota Pematangsiantar .....	II – 72
Tabel 2.39 Nilai SAKIP Kota Pematangsiantar 2020-2023 .....	II – 74
Tabel 2.40 Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi .....	II – 74
Tabel 2.41 Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi .....	II – 75
Tabel 2.42 Nilai Domain SPBE Kota Pematangsiantar Tahun .....	II – 76
Tabel 2.43 Indeks Infrastruktur Kota Pematangsiantar Tahun .....	II – 78
Tabel 2.44 Capaian Indikator Resiko Bencana Tahun 2017-2023 .....	II – 80
Tabel 2.45 Capaian Indikator Kinerja Peny. Pelayanan Publik .....	II – 81
Tabel 2.46 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan .....	II – 83
Tabel 2.47 Capaian Literasi dan Numerasi Sekolah .....	II – 84
Tabel 2.48 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan .....	II – 85
Tabel 2.49 Capaian Indikator Kinerja Urusan PRKP .....	II – 87

Tabel 2.50	Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial.....	II – 88
Tabel 2.51	Capaian Indikator Kinerja Urusan PP dan PA.....	II – 89
Tabel 2.52	Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup.....	II – 90
Tabel 2.53	Capaian Kinerja RPJPD 2005-2025 .....	II – 93
Tabel 2.54	Capaian Sarana Prasarana dan Infrastruktur.....	II – 94
Tabel 2.55	Faktor Pendorong dan factor Pengahambat .....	II – 105
Tabel 2.56	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Pematangsiantar.....	II – 106
Tabel 2.57	Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Pematangsiantar .....	II – 107
Tabel 2.58	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Pematangsiantar.....	II – 108
Tabel 2.59	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia .....	II – 109
Tabel 2.60	Ratio Jenis Kelamin dan Ratio Ketergantungan .....	II – 111
Tabel 2.61	Proyeksi Kebutuhan Hunian (Unit) Tahun 2025-2045.....	II – 113
Tabel 2.62	Proyeksi Kebutuhan baku dan Air Minum Tahun .....	II – 114
Tabel 2.62	Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik (kWH) Tahun.....	II – 116
Tabel 2.64	Proyeksi Kebutuhan Armada Persampahan .....	II – 117
Tabel 2.65	Proyeksi SD/MI di Kota Pematangsiantar Tahun.....	II – 118
Tabel 2.66	Proyeksi SMP/MTs di Kota Pematangsiantar .....	II – 119
Tabel 2.67	Proyeksi SMA/MA di Kota Pematangsiantar .....	II – 119
Tabel 2.68	Proyeksi Puskesmas di Kota Pematangsiantar .....	II – 120
Tabel 2.69	Proyeksi Puskesmas Pembantu .....	II – 120
Tabel 3.1	Identifikasi Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah ..	III – 7
Tabel 3.2	Misi dan Arah Kebijakan Indonesia Emas 2045.....	III – 7
Tabel 4.1	Perumusan Visi RPJPD Kota Pematangsiantar .....	IV – 1
Tabel 4.2	Penyelarasan Visi, Sasaran Visi dan Indikator.....	IV – 14
Tabel 4.3	Perumusan Misi RPJPD Kota Pematangsiantar .....	IV - 9
Tabel 4.4	Penyelarasan Misi RPJP Nasional, Provinsi.....	IV - 12
Tabel 5.1	Penyelarasan Misi Sasaran Pokok dan Arah. ....	V - 5
Tabel 5.2	Arah Pembangunan Indikator dan Target Kuantitas.....	V - 6
Tabel 5.3	Arah Pembangunan Indikator dan Target Penanganan.....	V - 7
Tabel 5.4	Arah Pembangunan Indikator dan Target Pengelolaan .....	V - 7
Tabel 5.5	Arah Pembangunan Indikator dan Target Kesehatan.....	V - 8
Tabel 5.6	Arah Pembangunan Indikator dan Target Pendidikan.....	V - 8
Tabel 5.7	Arah Pembangunan Indikator dan Target Perlindungan ....	V - 9
Tabel 5.8	Arah Pembangunan Indikator dan Target Iptek .....	V - 9
Tabel 5.9	Arah Pembangunan Indikator dan Target Penerapan.....	V - 10
Tabel 5.10	Arah Pembangunan Indikator dan Target Transformasi ..	V - 10
Tabel 5.11	Arah Pembangunan Indikator dan Target Integrasi .....	V - 11
Tabel 5.12	Arah Pembangunan Indikator dan Target Perkotaan .....	V - 11
Tabel 5.13	Arah Pembangunan Indikator dan Target Regulasi.....	V - 12
Tabel 5.14	Arah Pembangunan Indikator dan Target Keamanan .....	V - 12
Tabel 5.15	Arah Pembangunan Indikator dan Target Stabilitas .....	V - 13
Tabel 5.16	Arah Pembangunan Indikator dan Target Kerjasama.....	V - 13
Tabel 5.17	Arah Pembangunan Indikator dan Target Berbudaya .....	V - 14
Tabel 5.18	Arah Pembangunan Indikator dan Target Keluarga .....	V - 15
Tabel 5.19	Arah Pembangunan Indikator dan Target Lingkungan.....	V - 15
Tabel 5.20	Arah Pembangunan Indikator dan Target Berketahanan .	V - 15
Tabel 5.21	Arah Pembangunan Indikator dan Target Resilensi .....	V - 16
Tabel 5.22	Arah Pembangunan Indikator dan Target Pembangunan.	V - 17
Tabel 5.23	Arah Pembangunan Wilayah .....	V - 17

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1.1 Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan.....	I – 5
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administratif Kota Pematangsiantar.....	II – 1
Gambar 2.2 Suhu Udara di Kota Pematangsiantar Tahun .....	II – 6
Gambar 2.3 Rata-rata Kelembaban Udara .....	II – 7
Gambar 2.4 Rata-rata Curah Hujan di Kota.....	II – 7
Gambar 2.5 Jumlah Penduduk Kota Pematangsiantar Menurut.....	II – 15
Gambar 2.6 Piramida Penduduk Kota Pematangsiantar .....	II – 15
Gambar 2.7 Diagram Kepadatan Penduduk Per-Kecamatan .....	II – 19
Gambar 2.8 PDRB Kota Pematangsiantar 2011-2023 .....	II – 22
Gambar 2.9 Kontribusi Tiga Sektor Utama PDRB .....	II – 22
Gambar 2.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi .....	II – 26
Gambar 2.11 Perkembangan PDRB dari Sisi Pengeluaran .....	II – 29
Gambar 2.12 PDRB Per Kapita .....	II – 30
Gambar 2.13 Laju Inflasi .....	II – 31
Gambar 2.14 Indeks Gini.....	II – 32
Gambar 2.15 Perbandingan Indeks Gini .....	II – 33
Gambar 2.16 Tingkat Kemiskinan .....	II – 34
Gambar 2.17 IPM Pematangsiantar, Provsu dan Nasional .....	II – 37
Gambar 2.18 AHH Kota Pematangsiantar dan Provinsi.....	II – 38
Gambar 2.19 HLS Kota Pematangsiantar dan Provinsi .....	II – 39
Gambar 2.20 Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pematangsiantar dan...	II – 40
Gambar 2.21 Pengeluaran Perkapita Kota Pematangsiantar .....	II – 40
Gambar 2.22 Indeks Pembangunan Gender.....	II – 41
Gambar 2.23 Indeks Pemberdayaan Gender .....	II – 41
Gambar 2.24 Indeks Ketimpangan Gender .....	II – 42
Gambar 2.21 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	II – 43
Gambar 2.26 Komposisi Pengangguran Terbuka Kota .....	II – 44
Gambar 2.27 Grafik Angka Melek Huruf.....	II – 45
Gambar 2.28 Kondisi TPAK Kota Pematangsiantar .....	II – 51
Gambar 2.29 Rasio TPAK Antara laki-Laki dan Perempuan .....	II – 51
Gambar 2.30 Tingkat Pendidikan Penduduk Yang Bekerja Tahun ...	II – 53
Gambar 2.31 Rasio Ketergantungan Kota Pematangsiantar .....	II – 54
Gambar 2.32 Grafik Proyeksi Penduduk.....	II – 107
Gambar 2.33 Proyeksi Kepadatan Penduduk.....	II – 108
Gambar 2.34 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok ...	II – 109
Gambar 2.35 Piramida Penduduk.....	II – 110
Gambar 2.36 Piramida Penduduk.....	II – 129
Gambar 2.37 Peta Sistem Jaringan Transportasi.....	II – 110
Gambar 2.38 Peta Sistem Jaringan Energi.....	II – 131
Gambar 2.39 Peta Sistem Jaringan Telekomunikasi .....	II – 131
Gambar 2.40 Peta Pola Ruang .....	II – 139
Gambar 2.41 Peta Penetapan Kawasan Strategis.....	II – 142
Gambar 4.1 Visi RPJPN, RPJPD Provsu, Pematangsiantar .....	IV – 3
Gambar 6.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan.....	VI – 2
Gambar 6.2 Kerangka Kerja MRPN .....	VI – 4
Gambar 6.3 Tahapan Manajemen Risiko Untuk Mencapai Target ....	VI – 5

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kota Pematangsiantar merupakan salah satu Kota di Provinsi Sumatera Utara yang berada di tengah wilayah Kabupaten Simalungun. Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia, Pematangsiantar adalah kawasan kerajaan Siantar yang bermarkas di pulau Holing dan Raja terakhir dari dinasti keturunan marga Damanik yaitu Tuan Sangnawaluh Damanik, yang memegang kekuasaan sebagai Raja Tahun 1906. Saat ini, Kota Pematangsiantar telah berumur 153 Tahun, tepat pada tanggal 24 April 2024. Dalam proses pembangunan didasari pada perencanaan yang baik dan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Pematangsiantar harus menyusun perencanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan, yang dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan, agar menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Daerah. Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka 1 (satu) tahun.

UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD untuk kurun waktu 20 tahun ke depan 1 (satu) tahun sebelum dokumen perencanaan jangka Panjang periode sebelumnya berakhir. RPJPD merupakan kerangka besar perencanaan Pembangunan yang meringkai dan memberikan batasan (koridor) bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam lingkup waktu yang lebih pendek yang berlangsung secara kontinyu dari periode ke periode. Dengan demikian, RPJPD akan berfungsi menjamin keterkaitan dan keberlanjutan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan pendek guna mencapai tujuan utama pembangunan jangka panjang yang telah ditentukan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematangsiantar tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat visi, misi dan arah Pembangunan jangka panjang daerah Kota Pematangsiantar yang disusun dengan mengacu kepada RPJP Nasional tahun 2025-2045. RPJPD Kota Pematangsiantar disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan batas kewenangan pemerintah daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta mengacu pada sasaran Indonesia Emas,

maka disusunlah Visi Indonesia Tahun 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan melalui 8 (delapan) misi atau agenda transformasi, yaitu transformasi sosial; transformasi ekonomi; transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas; sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; serta kesinambungan pembangunan. Secara garis besar, kedelapan misi atau agenda transformasi tersebut dijabarkan dalam 17 (tujuh belas) arah pembangunan yang diukur melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan. Kota Pematangsiantar sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu memberikan sumbangsih pada pencapaian cita-cita nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tidak hanya itu, Kota Pematangsiantar juga perlu memberikan respon yang tepat terhadap mega-trends global berdasarkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki, hal ini guna memanfaatkan peluang-peluang yang muncul di tingkat global bagi pembangunan sosial, ekonomi, industri, teknologi dan hal lainnya bagi Kota Pematangsiantar. Penyusunan dokumen RPJPD Kota Pematangsiantar 2025-2045 mengikuti arahan kebijakan nasional, mengingat Kota Pematangsiantar harus mendukung penuh Visi Indonesia Emas yang dijadikan orientasi akhir guna mendukung cita-cita Indonesia. Selain itu sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017, Pasal 7 bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, juga perlu adanya pendekatan secara substansi HITS (holistik, integratif, tematik dan spasial), dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap factor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kota Pematangsiantar. RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah sehingga arah pembangunan Kota Pematangsiantar menjadi lebih terarah, konsisten dan relevan dengan tujuan yang diharapkan oleh bangsa dan negara serta masyarakat Kota Pematangsiantar. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2025 - 2045 memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Memfokuskan pada identifikasi dan penanganan isu-isu strategis dengan sasaran yang dinamis; 2) Menyesuaikan dinamika perubahan; dan 3) Berorientasi pada tindakan antisipatif.

## **1.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045 memperhatikan beberapa peraturan terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut:

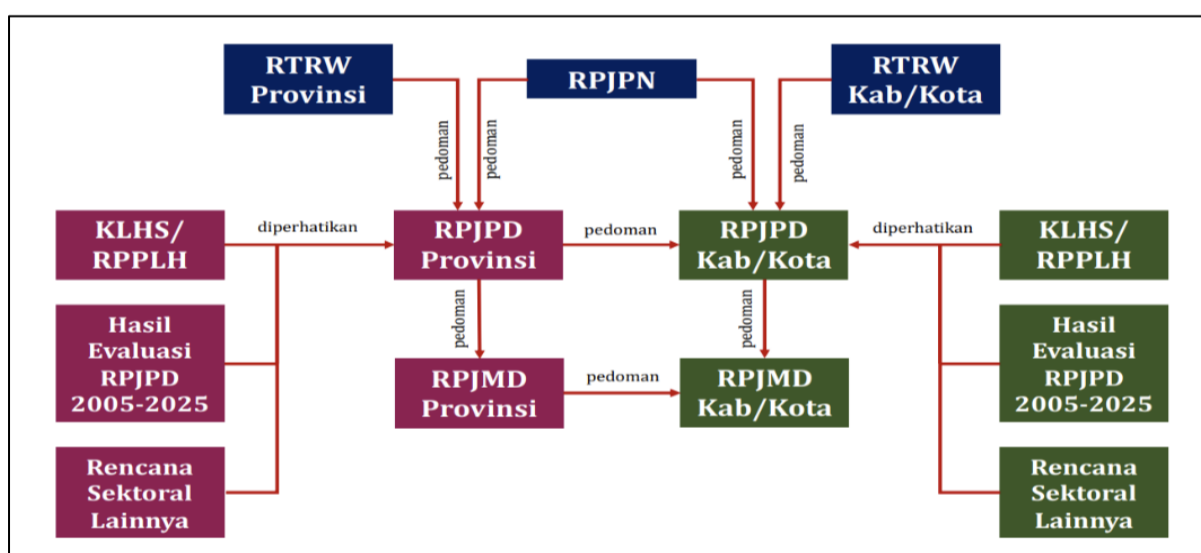
1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
19. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. (Lembar Daerah Tahun 2024 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76)
21. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;

### 1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2025 – 2045 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perencanaan pembangunan Kota Pematangsiantar tidak terlepas dari hierarki Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045 memperhatikan RPJP Nasional Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045, dan sebagaimana pasal 12 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045 memiliki hubungan dan tidak terlepas dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal ini dikarenakan perencanaan pembangunan akan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan sehingga perlu adanya sinkronisasi kebijakan dengan dokumen perencanaan lain yang relevan.



Gambar 1.1  
Hubungan Dokumen RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya  
Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah

Dengan melihat pada gambar 1.1 diatas menunjukkan menyelaraskan perencanaan pembangunan wilayah dengan perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat sehingga RPJP menjadi dokumen yang sinergis dan terpadu berikut penjabaran keterkaitan antar dokumen perencanaan.

Adapun keterkaitan dokumen RPJPD Kota Pematangsiantar dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen Rancangan Awal RPJPD Kota Pematangsiantar merupakan cikal bakal dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematangsiantar periode 2025-2045 yang ditetapkan. Oleh karena itu, rumusan

rancangan Akhir RPJPD Kota Pematangsiantar memiliki keterkaitan dan integrasi dengan beberapa dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RTRW, KLHS hingga RPJPD wilayah sekitar.

- b. Dokumen RPJPD Kota Pematangsiantar merupakan implementasi RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan kondisi, kebutuhan serta tantangan yang ada di Kota Pematangsiantar.
- c. Dokumen RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045 merupakan pedoman umum dalam penyusunan RPJMD dan Renstra OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar pada periode yang sama.
- d. Dokumen RPJPD menjadi dasar gambaran arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah Kota Pematangsiantar.
- e. Dokumen RPJPD Kota Pematangsiantar merupakan Penjabaran operasional lima tahunan yang dilakukan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar.
- f. Penjabaran terhadap dokumen RPJMD adalah Renstra OPD. Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan lima tahunan bagi setiap OPD Kota Pematangsiantar.

#### 1.3.1 Hubungan Antara RPJPD dan RPJMD Kota Pematangsiantar

RPJPD Kota Pematangsiantar selama kurun waktu tahun 2025-2045 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045 dan dibagi menjadi 4 (empat) tahapan periodisasi RPJMD. Sasaran pokok RPJPD pada tahap Pertama akan dijadikan sebagai pedoman pada penyusunan RPJMD Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2030, berbagai evaluasi RPJPD periode sebelumnya juga akan digunakan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan RPJMD Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2030.

#### 1.3.2 Hubungan Antara RPJPD dengan Renstra OPD Kota Pematangsiantar

Renstra OPD adalah penjabaran dari RPJMD dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan. Pada dasarnya RPJMD merupakan gradasi dari Renstra Organisasi Perangkat Daerah. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD dan Renstra OPD.

#### 1.3.3 Hubungan Antara RPJPD dan RTRW Kota Pematangsiantar

Implementasi RPJPD didasarkan pada RTRW Kota Pematangsiantar baik dari aspek kebijakan maupun operasionalisasi dan keselarasannya dengan rencana program pembangunan untuk menjamin keselarasannya dengan rencana program pembangunan untuk menjamin kelangsungan dan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan di Kota Pematangsiantar. Dengan kata lain, pendekatan pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan regional. Suatu pembangunan yang berdimensi kewilayahan juga memperhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memerhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai

dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, strategi dan kebijakan pengembangan wilayah Kota Pematangsiantar dalam RPJPD akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RTRW.

#### 1.3.4 Hubungan Antara RPJPD dan RPJPN

RPJPD harus mempedomani RPJPN terkait sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJPD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan. Dalam penyusunan RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045 telah memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 melalui penyelarasan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan.

#### 1.3.5 Hubungan Antara RPJPD dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara

RPJPD juga harus mempedomani RPJPD Provinsi Sumatera Utara sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Kota Pematangsiantar. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja pada sasaran RPJPD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJPD Provinsi Sumatera Utara. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu strategi pembangunan Provinsi Sumatera Utara untuk sinkronisasi kebijakan. Untuk memastikan dukungan pemerintah Kota Pematangsiantar dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional.

### **1.4 Maksud dan Tujuan**

RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan dan sinergitas pembangunan dalam rangka mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat Kota Pematangsiantar yang pada hilirnya memberikan dukungan agregasi terhadap pencapaian cita-cita Indonesia Emas 2045. Adapun tujuan dari penyusunan RPJPD Kota Pematangsiantar 2025-2045 adalah:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun atau 4 (empat) periode dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Kota Pematangsiantar;
2. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar; dan
3. Menjadi acuan penyelarasan prioritas pembangunan nasional, Provinsi Sumatera Utara dengan Kota Pematangsiantar.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dokumen Ranwal RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Memuat penjelasan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen (RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW, RPJMD, Renstra OPD dan KLHS), maksud dan tujuan; serta sistematika penulisan.

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat penjelasan gambaran umum tentang kondisi daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi: aspek geografi; aspek demografi; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; dan aspek daya saing daerah; evaluasi hasil RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025; trend demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Memuat penjelasan hasil olahan data kinerja dan informasi pembangunan lainnya untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan jangka panjang disertai isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (Nasional dan Provinsi).

## BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Memuat penjelasan dan penjabaran visi dan misi daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama pada akhir periode pembangunan daerah. Visi adalah dibuatnya uraian yang jelas tentang apa dan bagaimana visi yang ingin diwujudkan tersebut (Sinkronisasi dengan Visi dan Misi Indonesia 2045). Misi adalah uraian bagaimana Visi dapat dicapai, memiliki keterhubungan erat dengan Visi yang juga memuat keseluruhan agenda pembangunan yang akan dilakukan.

## BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Memuat penjabaran tentang arah kebijakan pembangunan jangka Panjang untuk menjelaskan keterhubungan sasaran pokok dengan pentahapan pembangunan dilakukan pada setiap 5 tahun selama 4 periode. Sasaran pokok merupakan kuantifikasi (penargetan dengan indikator kinerja) visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20.

## BAB VI PENUTUP

Memuat penjelasan pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi psebagai bagian dari upaya pencapaian sarana pembangunan di daerah.

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

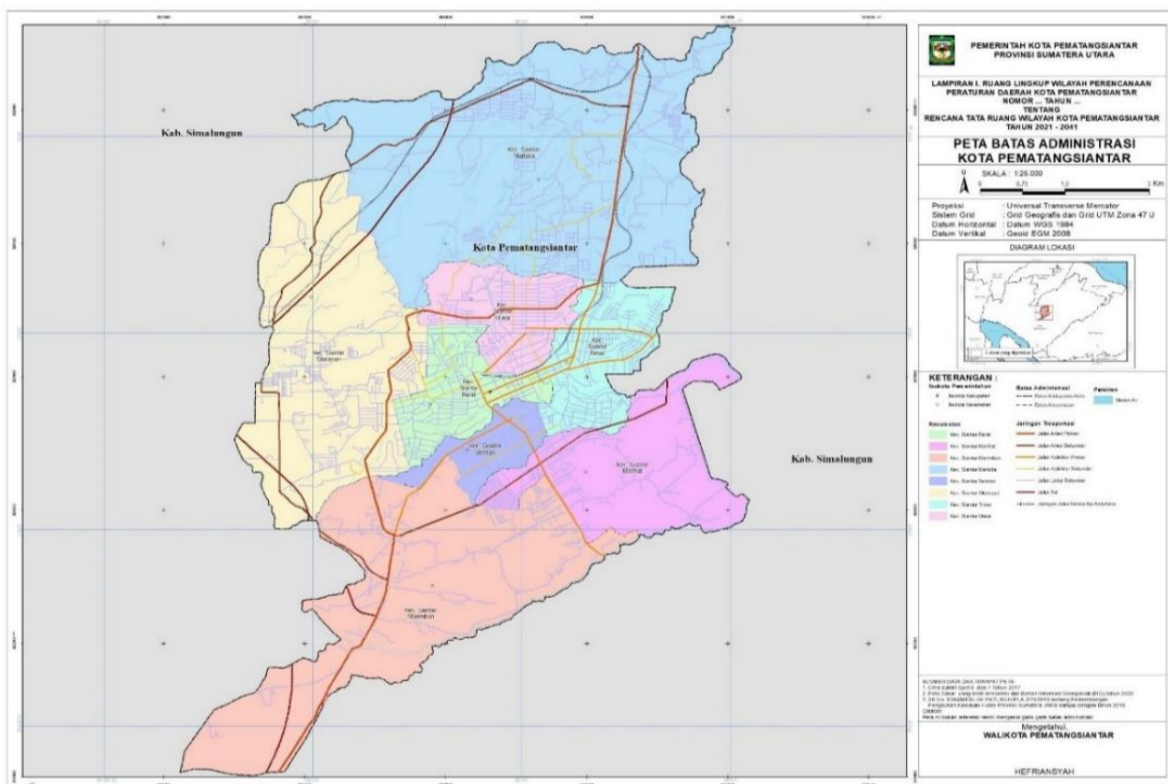
### 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek Geografi merupakan suatu sektor yang membahas mengenai kondisi umum geografi suatu daerah, potensi pengembangan wilayah dan wilayah rawan bencana. Sedangkan Aspek Demografi adalah suatu sektor yang membahas kependudukan dengan fokus utama jumlah, distribusi, komposisi, komponen utama pertumbuhan penduduk (fertilitas, mortalitas dan migrasi, determinan dan konsekuensi dari perubahan penduduk.

#### 2.1.1 Aspek Geografi

##### 2.1.1.1 Wilayah Administrasi

Kota Pematangsiantar merupakan salah satu dari 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Luas daerah Kota Pematangsiantar berdasarkan Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar adalah 75,9186 km<sup>2</sup>. Seluruh wilayah administratif Kota Pematangsiantar berbatasan langsung dengan wilayah administratif Kabupaten Simalungun.



Gambar 2.1  
Peta Wilayah Administratif Kota Pematangsiantar  
Sumber: Permen ATR No. 4 Tahun 2024

Kota Pematangsiantar terletak pada garis 2°53'20"-3°01'00" Lintang Utara dan 99°1'00"-99°6'35" Bujur Timur dan berada di tengah Kabupaten Simalungun, serta jarak menuju Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kota Medan sejauh ±128 km.

Wilayah administratif Kota Pematangsiantar terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dan 53 (lima puluh tiga) kelurahan. Urutan luas wilayah kecamatan di Kota Pematangsiantar mulai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil adalah Kecamatan Siantar Sitalasari (28% dari total luas wilayah Kota Pematangsiantar), Kecamatan Siantar Martoba (23%), Kecamatan Siantar Marimbun (22%), Kecamatan Siantar Marihat (10%), Kecamatan Siantar Timur (6%), Kecamatan Siantar Utara (5%), Kecamatan Siantar Barat (4%), dan Kecamatan Siantar Selatan (2%). Kota Pematangsiantar merupakan pintu gerbang lalu lintas dari arah Medan menuju ke Danau Toba dan Kabupaten sekitarnya, serta gerbang dari arah Kabupaten Karo menuju ke Batu Bara dan sekitarnya. Dengan posisi yang demikian, menjadikan Kota Pematangsiantar menjadi kota yang strategis sebagai pusat pertumbuhan dan aktivitas perdagangan. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2033, Kota Pematangsiantar ditetapkan sebagai Pusat Distribusi Regional yang berada di Kecamatan Siantar Marihat Pematangsiantar. Dengan letak geografis Kota Pematangsiantar yang strategis, sangat mendukung dalam pengembangan sektor perdagangan dan jasa, sektor pariwisata kota dan sejarah, sektor pendidikan, sektor kesehatan dan lainnya.

#### 2.1.1.2 Kondisi Topografi

Kondisi topografi Kota Pematangsiantar terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu datar dan landai. Kondisi topografi Kota Pematangsiantar dapat dikatakan relatif datar secara keseluruhan sehingga hampir seluruh lahan dapat dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya.

Tabel 2.1  
Topografi Kota Pematangsiantar Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Datar	Landai
		(Kemiringan 0–2%)	(Kemiringan 2–8%)
1	Siantar Utara	304,449	93,951
2	Siantar Selatan	205,818	0,305
3	Siantar Barat	311,51	59,279
4	Siantar Timur	323,908	115,022
5	Siantar Martoba	1594,882	1023,831
6	Siantar Sitalasari	802,479	774,056
7	Siantar Marihat	547,625	154,003
8	Siantar Marimbun	1378,796	306,095
Jumlah Luas (Ha)		5469,467	2526,542
Persentase		68,5%	31,5 %

Sumber: Permen ATR No. 4 Tahun 2024

Kondisi topografi yang relatif datar tersebut memberikan potensi untuk membangun ruang yang relatif mudah untuk mengembangkan berbagai aktivitas perkotaan. Berikut ini data topografi Kota Pematangsiantar.

Topografi Kota Pematangsiantar pada umumnya datar, namun pada beberapa wilayah seperti kecamatan Siantar Martoba dan Kecamatan Sitalasari terdapat

wilayah dengan topografi landai. Kawasan dengan kemiringan landai menjadi fokus pengembangan permukiman kecuali yang telah ditentukan sebagai kawasan pertanian, kawasan industri, ruang terbuka hijau dan kawasan lainnya.

Topografi rawan risiko bencana banjir terdapat pada kawasan cekungan yang terdapat pada beberapa wilayah yakni, Kelurahan Proklamasi, Kelurahan Dwikora, Kelurahan Simalungun, Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Baru, Kelurahan Melayu, Kelurahan Banjar, Kelurahan Siopat Suhu, Kelurahan Sukadame, Kelurahan Sigulang-gulang, Kelurahan Sumber Jaya dan Kelurahan Tanjung Tengah. Topografi rawan risiko bencana longsor terdapat pada Kelurahan Setia Negara, Kelurahan Simarito, Kelurahan Timbangalung, Kelurahan Teladan, Kelurahan Simalungun, Kelurahan Tomuan, Kelurahan Sigulang-gulang, Kelurahan Naga Pitu dan Kelurahan Pondok Sayur. Potensi optimalisasi penggunaan lahan Kota Pematangsiantar untuk pertanian seluas 1.965 Ha. Kawasan peruntukan industri seluas 200 Ha, kawasan pariwisata 6 Ha, kawasan permukiman seluas 3.637 Ha, kawasan perdagangan dan jasa seluas 781 Ha, kawasan perkantoran seluas 58 Ha, kawasan transportasi seluas 12 Ha, kawasan pertahanan dan keamanan seluas 56 Ha, badan jalan seluas 164 Ha, ruang terbuka hijau seluas 437 Ha, kawasan perlindungan setempat seluas 188 Ha, dan badan air seluas 88 Ha.

#### 2.1.1.3 Kondisi Geologi dan Hidrologi

Kondisi geologi Kota Pematangsiantar merupakan batuan berumur tersier berupa batuan sedimen, batuan gunung api, dan endapan. Potensi hidrologi Kota Pematangsiantar bersumber dari sungai-sungai yang mengalir dan air bawah tanah. Potensi hidrologi tersebut dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk air bersih serta jaringan irigasi yang mengairi area persawahan. Pola aliran sungai di Kota Pematangsiantar pada umumnya didominasi oleh pola aliran dendritik. Namun, pada beberapa bagian, terutama pada bagian selatan Kota Pematangsiantar tampak pola aliran trellis. Pola aliran tersebut pada umumnya dikontrol oleh struktur geologi serta jenis litologi dan topografi permukaan di daerah aliran sungai. Berikut ini informasi mengenai sungai-sungai utama yang mengalir di wilayah Kota Pematangsiantar.

Tabel 2.2  
Sungai Utama di Kota Pematangsiantar

No	Nama Sungai	Kecamatan	Klasifikasi	Lintasan
1	Bah Bolon	Seluruh Wilayah Kota	Besar	Seluruh Kecamatan
2	Bah Kapul	Siantar Sitalasari	Besar	Kec. Siantar Sitalasari dan Kec. Siantar Martoba
3	Bah Sibarambang	Siantar Marimbun	Besar	Kec. Siantar Marimbun dan Kec. Siantar Selatan
4	Bah Sigulang-Gulang	Siantar Utara	Besar	Kec. Siantar Martoba, Kec. Siantar Utara, dan Kec. Siantar Barat

Sumber: Permen ATR No. 4 Tahun 2024

Selain adanya sungai, didalam suatu wilayah juga terdapat DAS (Daerah Aliran Sungai) ataupun WS (Wilayah Sungai). WS yang terdapat di Kota Pematangsiantar ialah WS Bah Bolon. DAS yang terdapat di Kota Pematangsiantar adalah DAS Bah Bolon dan DAS Bah Kapul. WS ini pada dasarnya tidak hanya terdapat atau melalui Kota Pematangsiantar, karena WS ini terdiri dari beberapa sungai yang terdapat di beberapa wilayah kabupaten di Sumatera Utara, yaitu Sungai Kuala Tanjung, Sungai Suka, Sungai Kiri, dan Sungai Bah Bolon.

Wilayah sungai dan daerah aliran sungai (DAS) memiliki peran strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam mendukung sistem tata air perkotaan dan mitigasi bencana. Sungai Bah Bolon, yang mengalir di pusat Kota Pematangsiantar, berfungsi sebagai pengumpul air dari sistem drainase wilayah tengah kota serta sebagai pengendali banjir. Selain itu, keberadaan sungai ini juga mendukung upaya penghijauan yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas udara, pengurangan polusi, mitigasi risiko bencana, serta pelestarian habitat biota.

Demikian pula, DAS Bah Kapul memiliki fungsi serupa sebagai pengumpul air dari sistem drainase di wilayah sekitarnya dan sebagai pengendali banjir. Selain perannya dalam pengendalian banjir, DAS ini juga berfungsi sebagai kawasan penghijauan yang berkontribusi pada ketersediaan udara segar, pengurangan polusi, pengurangan risiko bencana, serta kelestarian ekosistem.

Berdasarkan hasil pengukuran, kualitas air sungai mengalami peningkatan dari nilai 50 pada tahun 2022 menjadi 65 pada tahun 2025. Meskipun demikian, langkah-langkah perbaikan masih perlu dilakukan agar kualitas air mencapai standar yang lebih aman bagi penggunaan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang mencakup pengelolaan limbah, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pencemaran sungai.

Tabel 2.3  
Rekap Hasil Uji Sungai tahun 2021 – 2023

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Tahun 2021						Tahun 2022						Tahun 2023					
				Hilir (Jl. Simanuk-manuk kebun binatang)	Hulu (Jembatan Bah Berambang)	Tengah (Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari)	Hulu (SMPN 10 Jl. Sisingamangaraja) Titik Koordinat: N=02°56' 32,20" E=099°02' 32,34"	Tengah (Jl. Pattimura) Titik Koordinat: N=02°57' 29,37" E=099°04' 26,47"	Hilir (Jl. Kertas) Titik Koordinat: N=02°58' 01,91" E=099°04' 54,58"	Hulu (SMPN 10 Jl. Sisingamangaraja) Titik Koordinat: N=02°56' 32,20" E=099°02' 32,34"	Tengah (Jl. Pattimura) Titik Koordinat: N=02°57' 29,37" E=099°04' 26,47"	Hilir (Jl. Kertas) Titik Koordinat: N=02°58' 01,91" E=099°04' 54,58"	Sungai Bahapal (Hulu) Belakang perumahan tanjung pinggir Titik Koordinat: N=03°00' 06",68" E=099°03' 47,64"	Sungai Bahapal (Tengah) jl. Taralamsyah Saragih Titik Koordinat: N=03°00' 43,00" E=099°04' 509,73"	Sungai Bahapal (Hilir) Jembatan sigagak Titik Koordinat: N=03°00' 55,54" E=099°05' 06,23"	Hulu (SMPN 10 Jl. Sisingamangaraja) Titik Koordinat: N=02°56' 32,20" E=099°02' 32,34"	Tengah (Jl. Pattimura) Titik Koordinat: N=02°57' 29,37" E=099°04' 26,47"	Hilir (Jl. Kertas) Titik Koordinat: N=02°58' 01,91" E=099°04' 54,58"	Sungai Bahapal (Hulu) Belakang perumahan tanjung pinggir Titik Koordinat: N=03°00' 06",68" E=099°03' 47,64"	Sungai Bahapal (Tengah) jl. Taralamsyah Saragih Titik Koordinat: N=03°00' 43,00" E=099°04' 509,73"	Sungai Bahapal (Hilir) Jembatan sigagak Titik Koordinat: N=03°00' 55,54" E=099°05' 06,23"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Temperatur	oC	-	27,6	27,2	27,7	27,2	27,2	27,7												
2	TDS	mg/L	1.000	73,5	65	59,5	46,5	47	54,5												
3	TSS	mg/L	50	1,2	1	1,2	0,8	1	1	2,2	2,5	2,85	2,12	2,7	2,42	62,6	37,8	32,2	23,4	17,6	16,8
4	PH	-	6-9	6,87	6,64	6,56	7,12	7,04	6,87	6,89	6,91	6,78	6,85	6,69	6,95	7,69	7,51	7,36	7,34	6,73	6,58
5	BOD	mg/L	3	2,05	0,29	2,09	2,75	0,13	2,25	7,32	6,65	6,42	6,78	7,12	6,98	5,74	2,23	2,73	1,27	7,75	14,58
6	COD	mg/L	25	13,25	12,05	12,05	18,07	20,48	15,66	21,3	20,6	18,8	20,8	21,1	19,6	17,16	6,72	8,21	3,73	23,13	44,03
7	DO	mg/L	4	6,87	7,46	6,69	6,81	6,93	7,06	6,12	6,56	6,65	6,48	6,38	6,69	6,86	6,57	6,79	6,69	6,67	6,72
8	Sulfat (SO4)	mg/L	300	23,43	23,32	23,2	60,15	54,38	53,22												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
9	Klorin Bebas (Cl2)	mg/L	0,03	0,03	0,01	0,03	0,01	0,03	0,03												
10	Besi (Fe)	mg/L	-	<0,11	<0,11	<0,11	<0,11	0,03	<0,11												
11	Zink (Zn)	mg/L	0,05	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02												
12	Tembaga (Cu)	mg/L	0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01												
13	Timbal (Pb)	mg/L	0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03												
14	Minyak Lemak	mg/L	1	1	0,9	0,9	0,8	0,8	0,1	1,6	1,1	1,15	1,85	1,25	1,35						
15	Amoniak (sebagai N)	mg/L	0,2	0,03	-	0,02	-	-	0,02												
16	Total Coliform	Jml/100 ml	5.000	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif							30	70	210	35	46	230
17	Fecal Coliform	Jml/100 ml	1.000	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif							<13,85	<13,85	<13,85	<13,85	<13,85	<13,85
18	Total Fosfat (sebagai P)	mg/L	0,2							0,015	0,013	0,014	0,018	0,021	0,018	<0,01	<0,01	<0,01	0,01	<0,01	<0,01
19	Nitrat (NO3)	mg/L	10							1,11	1,08	1,56	1,48	1,32	1,41	1,25	1,47	1,69	1,1	1,33	1,42
20	Warna	Pt-Co	50													12,14	13,53	14,32	13,12	13,89	14,22
21	Total Nitrogen	mg/L	15													1,38	1,66	1,95	1,31	1,56	1,7

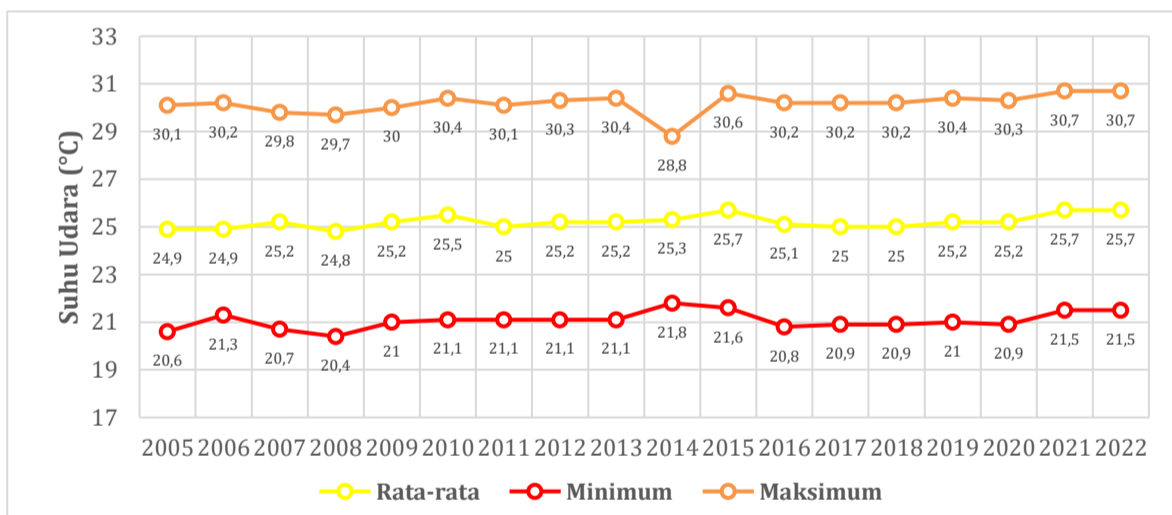
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Untuk menjamin ketersediaan air bersih di Kota Pematangsiantar, Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui PDAM Tirtauli mengelola dan mengoperasikan sumber air dari mata air serta sumur pompa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2023, akses masyarakat terhadap air minum telah mencapai 99,72%. Berdasarkan proyeksi ke depan, kapasitas debit air minum yang dikelola oleh PDAM Tirtauli diperkirakan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, tantangan utama yang perlu diantisipasi adalah upaya pelestarian sumber air dari ancaman pencemaran lingkungan serta dampak perubahan iklim guna menjamin keberlanjutan pasokan air bersih.

Dalam mendukung sektor pertanian, Kota Pematangsiantar dilintasi oleh delapan sungai yang berfungsi sebagai sumber irigasi. Dengan luas lahan sawah mencapai 1.279 hektare, keberadaan sungai-sungai tersebut dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Namun, diperlukan pengelolaan sumber daya air yang optimal, termasuk perbaikan infrastruktur irigasi, pengendalian erosi, serta penerapan teknologi pertanian berkelanjutan guna memastikan ketersediaan air irigasi secara efisien dan berkelanjutan.

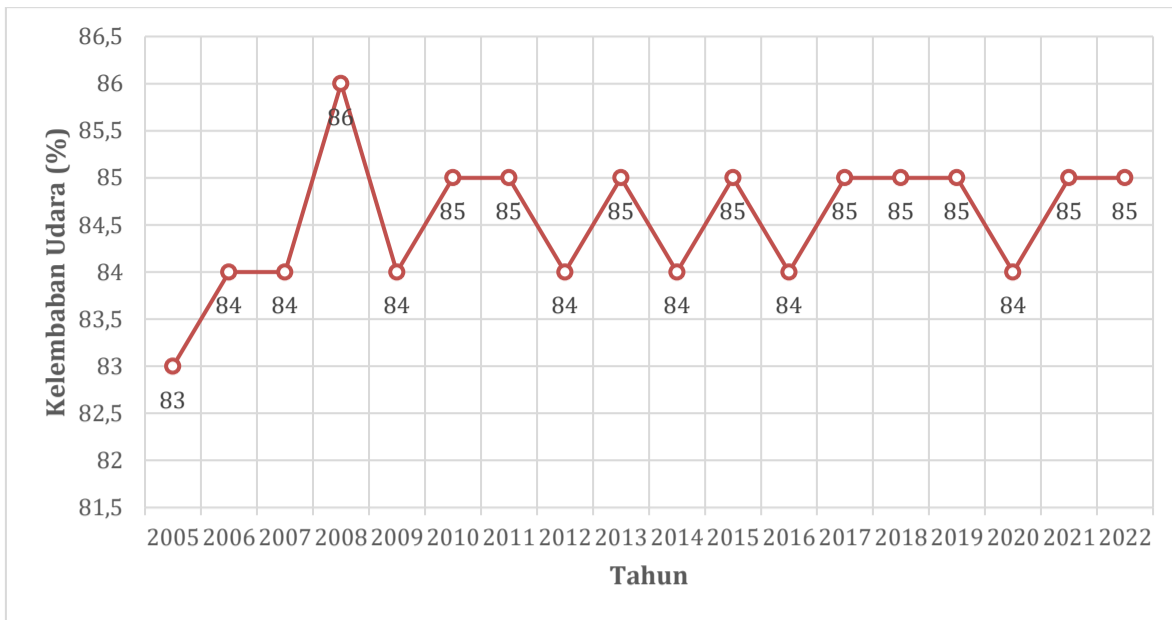
#### 2.1.1.4 Kondisi Klimatologi

Selama tahun 2022, suhu maksimum di Kota Pematangsiantar, yaitu 30,7°C, suhu minimumnya 21,5°C, dan suhu rata-ratanya 25,7°C.



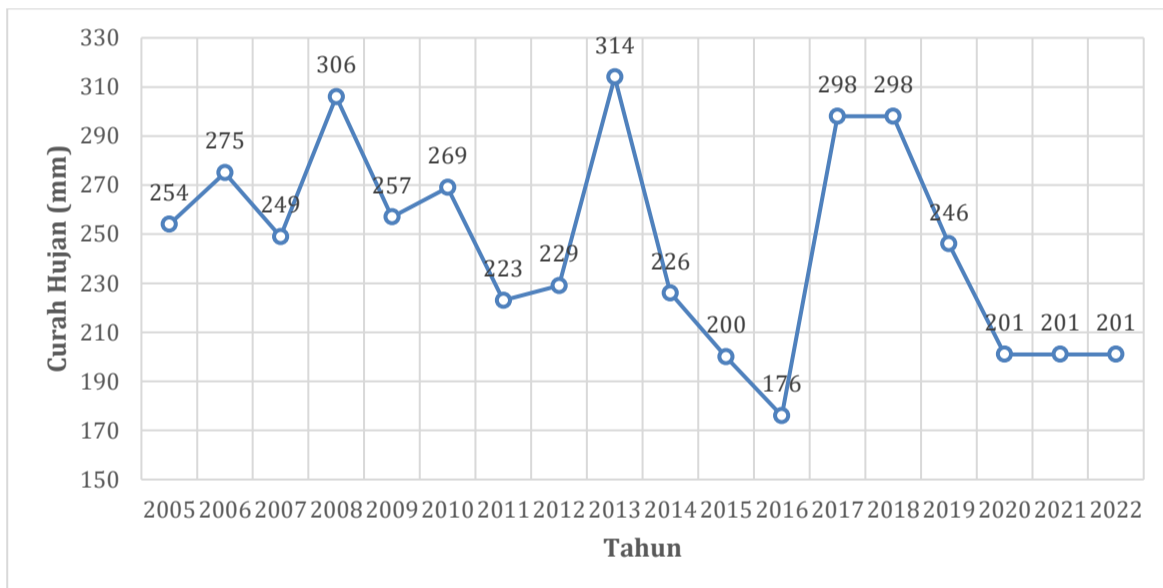
Gambar 2.2  
Suhu Udara di Kota Pematangsiantar Tahun 2005–2022  
Sumber: BPS Kota Pematangsiantar

Data suhu udara di Kota Pematangsiantar tahun 2005–2022 menunjukkan Rata-rata kelembaban udara di Kota Pematangsiantar tahun 2022 adalah 85%. Berikut ini data rata-rata kelembaban udara di Kota Pematangsiantar tahun 2005–2022.



Gambar 2.3  
Rata-Rata Kelembaban Udara di Kota Pematangsiantar Tahun 2005–2022  
Sumber: BPS Kota Pematangsiantar

Rata-rata curah hujan di Kota Pematangsiantar tahun 2022 adalah 201 mm. Berikut ini data rata-rata curah hujan di Kota Pematangsiantar tahun 2005–2022.



Gambar 2.4  
Rata-rata Curah Hujan di Kota Pematangsiantar Tahun 2005–2022  
Sumber: BPS Kota Pematangsiantar

Berdasarkan data suhu dan kelembaban udara, Kota Pematangsiantar tidak mengalami perubahan yang signifikan sejak tahun 2005 hingga saat ini. Namun, terdapat tren penurunan curah hujan dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan pola curah hujan ini berpotensi mempengaruhi daya dukung wilayah, yaitu kapasitas suatu wilayah dalam menopang kehidupan manusia dan ekosistemnya. Seiring dengan perubahan iklim, diperlukan strategi pengelolaan risiko yang komprehensif. Pengelolaan ini tidak hanya difokuskan pada mitigasi bencana, tetapi juga mencakup upaya pencegahan terhadap peningkatan risiko penyebaran

penyakit, penurunan produktivitas pertanian, serta percepatan degradasi infrastruktur.

Untuk meningkatkan efektivitas mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, dapat diterapkan berbagai kebijakan strategis, antara lain: peningkatan persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai upaya pengelolaan lingkungan, pengurangan emisi gas rumah kaca melalui penerapan teknologi rendah karbon, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam aksi iklim, pengembangan sistem peringatan dini untuk menghadapi potensi bencana, penerapan teknologi pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan, peningkatan kualitas dan ketahanan infrastruktur terhadap dampak perubahan iklim, optimalisasi sistem pengelolaan limbah untuk mengurangi pencemaran lingkungan, serta pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan rawan bencana guna meminimalkan risiko terhadap hunian dan infrastruktur..

#### 2.1.1.5 Wilayah Rawan Bencana

Jika dilihat dari potensi bencana alam yang mungkin terjadi di Kota Pematangsiantar, maka secara umum adalah bencana banjir, longsor, dan gempa. Karena kondisi topografi dan morfologi Kota Pematangsiantar relatif datar dan dilalui banyak sungai dan anak sungai, ada kemungkinan terjadi banjir dan longsor ketika curah hujan tinggi. Bencana alam yang terjadi juga dapat diakibatkan oleh adanya gerakan tanah dan adanya gunung berapi di luar wilayah Kota Pematangsiantar yang mungkin menyebabkan terjadinya gempa. Berikut ini kawasan rawan bencana di Kota Pematangsiantar.

Tabel 2.4  
Kawasan Rawan Bencana di Kota Pematangsiantar

Longsor	Banjir	Kebakaran
Kelurahan: Setia Negara, Simarito, Timbang Galung, Teladan, Simalungun, Tomuan, Sigulang-Gulang, Nagapitu, dan Pondok Sayur.	Kelurahan: Proklamasi, Dwikora, Simalungun, Pahlawan, Baru, Melayu, Banjar, Siopat Suhu, Sukadame, Sigulang-Gulang, Sumber Jaya, dan Tanjung Tengah	Kelurahan dengan perumahan berkepadatan tinggi

Sumber: Permen ATR No. 4 Tahun 2024

Untuk resiko bencana yang disebabkan perubahan iklim (cuaca yang ekstrem; hujan lebat, angin kencang dan kekeringan) di Kota Pematangsiantar didominasi oleh potensi bahaya banjir seluas 683 Ha yang tersebar di beberapa kecamatan dengan kelas bahaya rendah seluas 570 Ha, kelas bahaya sedang seluas 111 Ha, dan kelas Bahaya tinggi seluas 2 Ha (Sumber Dokumen Kajian Resiko Bencana Sumatera Utara Tahun 2020-2024).

Tabel 2.5  
Capaian Indikator Resiko Bencana Tahun 2017-2023

No	Indikator	Satuan	Realisasi						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Resiko Bencana	Indeks	167,2	167,2	167,2	167,2	167,2	167,2	167,2

Sumber : inaRISK

Dari data indeks resiko bencana di atas Kota Pematangsiantar termasuk pada resiko sedang, Strategi mitigasi bencana dikawasan rawan bencana berupa penguatan kelembagaan, pemetaan kawasan rawan bencana, pemantauan tingkat kerawanan secara dini, penyebaran informasi, sosialisasi dan penyuluhan tentang aspek kebencanaan, pelatihan dan pendidikan tanggap darurat, dan sistem peringatan dini.

Kebutuhan infrastruktur tahan bencana dan pemanfaatan ruang untuk mengurangi dampak bencana melalui perlindungan terhadap sempadan sungai ditujukan untuk melindungi sungai dari aktivitas manusia yang dapat mengganggu dan merusak air sungai, kondisi fisik daerah pinggiran dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai, penyediaan hidran dan revitalisasi gang kebakaran pada kawasan padat penduduk, penetapan jalur evakuasi dan penyediaan tempat evakuasi bencana.

#### 2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Pematangsiantar berdasarkan rencana pola ruang wilayah meliputi kawasan lindung seluas ±713,02 ha (9,39%) serta kawasan budidaya seluas ±6.878,81 ha (90,61%). Berikut ini data penggunaan lahan di Kota Pematangsiantar berdasarkan rencana pola ruang wilayah.

Tabel 2.6  
Penggunaan Lahan di Kota Pematangsiantar Berdasarkan Rencana Pola Ruang Wilayah

Kawasan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1. Kawasan lindung:	713,02	9,39
a. Badan air	88	1,16
b. Kawasan perlindungan setempat	188	2,48
c. Ruang terbuka hijau	437	5,76
2. Kawasan budidaya:	6472,06	90,61
a. Badan jalan	164	2,16
b. Kawasan pertanian	1965	25,88
c. Kawasan peruntukan industry	200	2,63
d. Kawasan pariwisata	6	0,08
e. Kawasan permukiman	3.637	47,91
f. Kawasan perdagangan dan jasa	781	10,29
g. Kawasan perkantoran	58	0,76
h. Kawasan transportasi	12	0,16
i. Kawasan pertahanan dan keamanan	56	0,74

Sumber: Permen ATR No. 4 Tahun 2024

Sebagai salah satu kota yang sedang berkembang, Pematangsiantar mengalami peningkatan kebutuhan akan permukiman. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam beberapa tahun terakhir terjadi alih fungsi lahan dari kawasan pertanian menjadi kawasan permukiman. Namun, alih fungsi lahan ini dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama berkurangnya kawasan resapan air, yang berpotensi memicu permasalahan lingkungan seperti banjir dan penurunan kualitas tata air. Kemudian meningkatnya polusi udara dan berbagai masalah lingkungan lainnya yang perlu dikelola secara berkelanjutan. Penggunaan lahan di Kota Pematangsiantar menunjukkan dinamika yang mencerminkan kebutuhan pembangunan. Berdasarkan data, luas lahan pertanian sebesar 1965 Ha menjadi elemen penting dalam mendukung ketahanan pangan. Akan tetapi, luas lahan tersebut belum mencukupi konsumsi pangan masyarakat Kota Pematangsiantar yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Hal ini menimbulkan ketergantungan terhadap pasokan pangan dari wilayah lain, yang dapat mengancam ketahanan pangan kota apabila tidak dikelola dengan baik.

Selain itu, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman seluas 3637 Ha turut mempengaruhi kemampuan kota dalam mendukung ketahanan air. Berkurangnya kawasan resapan air dan degradasi badan air seluas 88 Ha dapat menimbulkan resiko penurunan kualitas dan ketersediaan air bersih. Dalam konteks ketahanan energi, kawasan perdagangan dan jasa seluas 781 Ha serta kawasan industri seluas 200 Ha perlu diarahkan pada pemanfaatan sumber daya secara efisien termasuk penerapan teknologi terbarukan.

Pengelolaan ruang wilayah yang berkelanjutan perlu diterapkan agar ketahanan pangan, air, dan energi di Kota Pematangsiantar dapat terjamin dalam jangka panjang.

Alih fungsi lahan dari kawasan pertanian dan kawasan lindung menjadi kawasan permukiman memberikan dampak signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan di Kota Pematangsiantar. Berkurangnya kawasan resapan air mengurangi kemampuan wilayah dalam fungsi ekologi, seperti mengelola siklus hidrologi dan menyerap karbon.

Untuk mengatasi permasalahan ini, kebijakan RTRW Kota Pematangsiantar harus diarahkan untuk:

a. Optimalisasi Lahan Produktif

Memastikan lahan pertanian yang tersisa dimanfaatkan secara optimal dengan teknologi intensifikasi dan diversifikasi petanian untuk meningkatkan produktivitas.

b. Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Menerapkan regulasi ketat terhadap konversi lahan pertanian dan kawasan lindung.

c. Rehabilitasi Kawasan Resapan Air

Menjaga dan melindungi kawasan resapan air serta ruang terbuka hijau sebagai bagian dari pengelolaan tata air.

d. Integrasi dengan Strategi Ketahanan Pangan

Menyelaraskan kebijakan penggunaan lahan dengan program ketahanan pangan, seperti urban farming atau pengembangan lahan pangan di kawasan sekitar kota.

e. Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Mengintegrasikan aspek ketahanan air dan energi dalam pembangunan kawasan permukiman baru, seperti penerapan sistem drainase berwawasan lingkungan dan teknologi hemat energi.

2.1.1.7. Risiko dan Dampak Lingkungan Hidup

Analisis perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup mencakup proyeksi air limbah, proyeksi lumpur tinja, dan proyeksi timbulan sampah akibat aktivitas kehidupan manusia.

a. Timbulan Sampah

Menurut SNI (1995), timbulan sampah untuk kota kecil dengan penduduk < 100.000 jiwa adalah sebesar 2,5 L/orang/hari atau setara dengan 0.7 kg/orang/hari, dan kota sedang dengan penduduk antara 100.000-500.00 jiwa sebesar 3L/orang/hari atau setara dengan 0.8 kg/orang/hari. Kota Pematangsiantar memiliki kondisi topografi sebagian besar datar, yaitu kemiringan antara 0-2%. Ritasi pengangkutan sampah hanya 2 trip per hari, hal ini dikarenakan Kota Pematangsiantar tidak mempunyai rute atau jalur khusus pengangkutan sampah ke TPA, dan saat ini pengangkutan sampah menggunakan jalur jalan nasional yang selalu padat dan sering terjadi kemacetan. Jika mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, target SPM untuk tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan yaitu pengangkutan sampah sebesar 70%. Artinya tingkat pelayanan yang diberikan pemerintah sangat rendah, dan masih terdapat 88,85% penduduk di Kota Pematangsiantar yang belum terlayani pengangkutan sampah.

Tabel 2.7.  
Proyeksi Sampah 2025-2045

Kota Pematangsiantar Tahun n	Penduduk	Timbulan Sampah (kg/hari)
2025	276,046	220,836.80
2026	279,528	223,622.40
2027	283,011	226,408.80
2028	286,493	229,194.40
2029	289,978	231,982.40
2030	293,460	234,768.00
2031	296,942	237,553.60
2032	300,424	240,339.20
2033	303,907	243,125.60
2034	307,390	245,912.00
2035	310,871	248,696.80
2036	314,355	251,484.00

Kota Pematangsiantar Tahun n	Penduduk	Timbulan Sampah (kg/hari)
2037	317,838	254,270.40
2038	321,319	257,055.20
2039	324,804	259,843.20
2040	328,285	262,628.00
2041	331,768	265,414.40
2042	335,250	268,200.00
2043	338,735	270,988.00
2044	342,215	273,772.00
2045	340,379	272,303.20

Sumber : KLHS

Total timbulan sampah yang dihasilkan setiap hari di Kota Pematangsiantar pada tahun 2043 dengan jumlah penduduk sebesar 704.219 jiwa adalah sebesar 563,375,2 kg/hari atau 205.631.948 kg/tahun atau 806.399,79 m<sup>3</sup>/tahun.

#### b. Air limbah Domestik

Air bersih yang dikonsumsi domestik akan dibuang kembali menjadi air limbah hasil dari pencucian makanan, mandi dan cuci, sebesar 70-80 % dari penggunaan air bersih. Proyeksi air limbah di Kota Pematangsiantar menggunakan standar produksi lumpur tinja 0,3 L/org/hari pada tahun 2022, berdasarkan hasil proyeksi didapat bahwa pada tahun 2025 lumpur tinja di Kota Pematangsiantar sebesar 82,814 L/org/hari dan diakhir rencana tahun 2045 sebesar 102,114 L/org/hari. Satu unit truk tinja diperkirakan dapat menampung air limbah yang dihasilkan dari 10.000 jiwa penduduk dan timbulan tinja yang dihasilkan adalah 0,3 L/org/hari (KepMen No. 534 Tahun 2001). Lumpur tinja mencapai 82,814 L/org/hari pada tahun 2025 dan pada 2045 mencapai 102,114 L/org/hari. Kebutuhan mobil tinja di Kota Pematangsiantar tahun 2022 berjumlah 6 unit dan direkomendasikan pada tahun 2042 akan menjadi 18 unit mobil tinja. Mengenai rancangan dan Skema mengikuti FSM Bappenas Kementerian PPN pembangunan IPLT RPJMN Provinsi, Kelayakan saat ini 82% (tahun 2022) akses sanitasi layak dan pengolahan Tinja 60% dan mengikuti arahan dari Peraturan Wali Kota Pematangsiantar No. 13 Tahun 2018. Untuk air limbah domestik, berdasarkan hasil proyeksi didapat bahwa pada tahun 2025 air limbah domestik di Kota Pematangsiantar sebesar 290.090 m<sup>3</sup>/tahun dan diakhir rencana tahun 2045 sebesar 391,322 m<sup>3</sup>/tahun.

Tabel 2.8.  
Proyeksi Air Limbah Domestik 2025-2045 Per 5 Tahun

Kota Pematangsiantar Tahun n	Penduduk	Air Limbah Domestik (m <sup>3</sup> /tahun)
2025	276,046	290,090
2030	293,460	315,397
2035	310,871	310,871
2040	328,285	366,015
2045	340,379	391,322

Sumber : KLHS

Tabel 2.9.  
 Proyeksi Lumpur Tinja 2025-2045 Per 5 Tahun

Kota Pematangsiantar Tahun n	Penduduk	Lumpur Tinja (L/org/hari)
2025	276,046	82,814
2030	293,460	88,038
2035	310,871	93,261
2040	328,285	98,486
2045	340,379	102,114

Sumber : KLHS

### 2.1.2 Demografi

Demografi adalah studi tentang penduduk yang dilihat dari jumlah, struktur/komposisi, distribusi, dan bagaimana perubahan jumlah penduduk akibat kelahiran, kematian, dan migrasi. Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu wilayah, oleh karena itu data statistik kependudukan mutlak diperlukan dalam perencanaan pembangunan.

Indikator kependudukan yang penting dalam perumusan kebijakan pembangunan diantaranya indikator dependency ratio atau rasio ketergantungan dan kepadatan penduduk. Rasio ketergantungan merupakan indikator yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif dengan jumlah penduduk usia produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan, semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai usia non-produktif. Kepadatan penduduk merupakan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Angka kepadatan penduduk yang tinggi menunjukkan bahwa wilayah tersebut padat penduduk. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan berbagai masalah seperti : degradasi lingkungan, permasalahan sosial ekonomi, masalah kesejahteraan, masalah keamanan, masalah ketersediaan lahan, masalah ketersediaan air bersih dan masalah kebutuhan pangan.

Kebijakan pembangunan terkait rasio ketergantungan yang tinggi terutama dalam aspek sosial diantaranya peningkatan sarana prasarana pendidikan dan keterampilan, sarana prasarana kesehatan.

Sedangkan kebijakan pembangunan terkait rasio ketergantungan yang tinggi terutama dalam aspek ekonomi yakni peningkatan kerjasama daerah dan investasi dalam rangka menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan, penguatan UMKM, pengembangan riset dan inovasi, peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Kebijakan pembangunan terkait kepadatan penduduk yang tinggi terutama dalam aspek sosial diantaranya penguatan program keluarga berencana untuk pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan perlindungan perempuan dan anak, penanggulangan kemiskinan, peningkatan keamanan dan ketertiban.

Kebijakan pembangunan terkait kepadatan penduduk yang tinggi terutama dalam aspek ekonomi diantaranya menciptakan pusat ekonomi baru pada kawasan yang

jarang penduduk sebagai bentuk pemerataan penduduk, peningkatan kualitas tenaga kerja.

Kebutuhan pembangunan jangka panjang terkait dinamika kependudukan diantaranya pemenuhan sarana prasarana pendidikan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan, penyediaan hunian yang layak, penciptaan pusat-pusat ekonomi yang baru, peningkatan kualitas tenaga kerja dengan pendidikan vokasi.

#### 2.1.2.1 Jumlah dan Struktur Penduduk

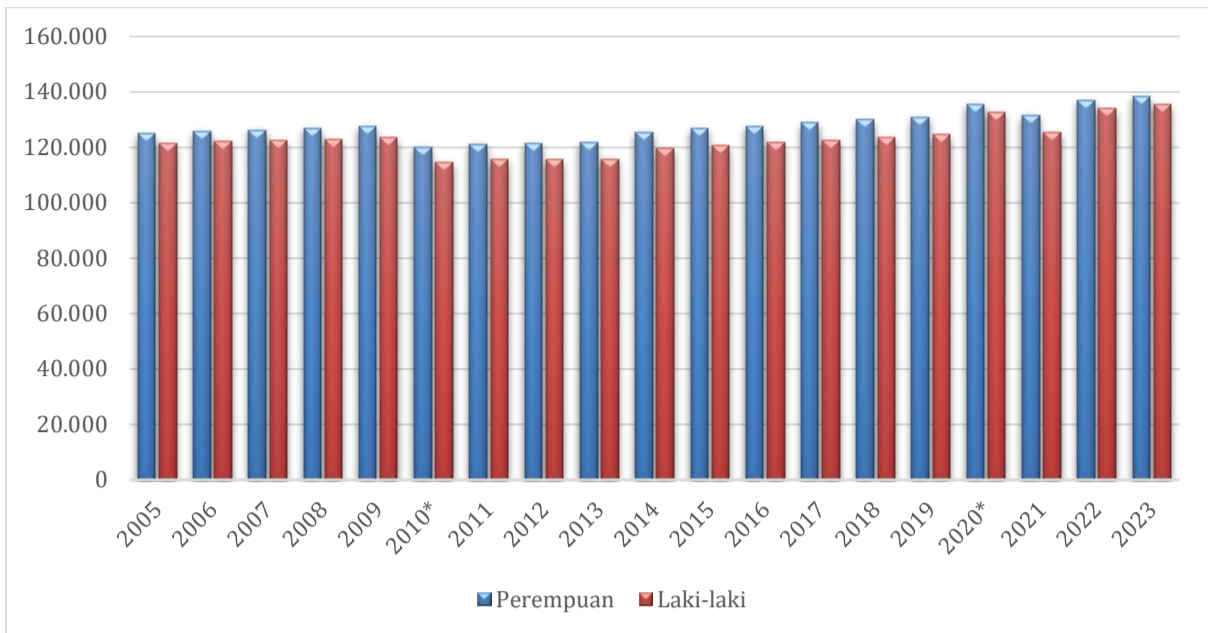
Jumlah penduduk Kota Pematangsiantar dari tahun 2005 – 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.10  
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (jiwa)

NO	TAHUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PEREMPUAN	LAKI-LAKI	
1	2005	124.923	121.354	246.277
2	2006	125.739	122.098	247.837
3	2007	126.277	122.548	248.825
4	2008	126.999	122.986	249.985
5	2009	127.516	123.481	250.997
6	2010*	120.137	114.561	234.698
7	2011	121.214	115.679	236.893
8	2012	121.459	115.488	236.947
9	2013	121.647	115.787	237.434
10	2014	125.522	119.582	245.104
11	2015	126.814	120.597	247.411
12	2016	127.505	121.684	249.189
13	2017	128.887	122.626	251.513
14	2018	129.922	123.578	253.500
15	2019	130.784	124.533	255.317
16	2020*	135.639	132.615	268.254
17	2021	131.680	125.430	270.768
18	2022	136.868	133.900	274.056
19	2023	138.490	135.566	274.838

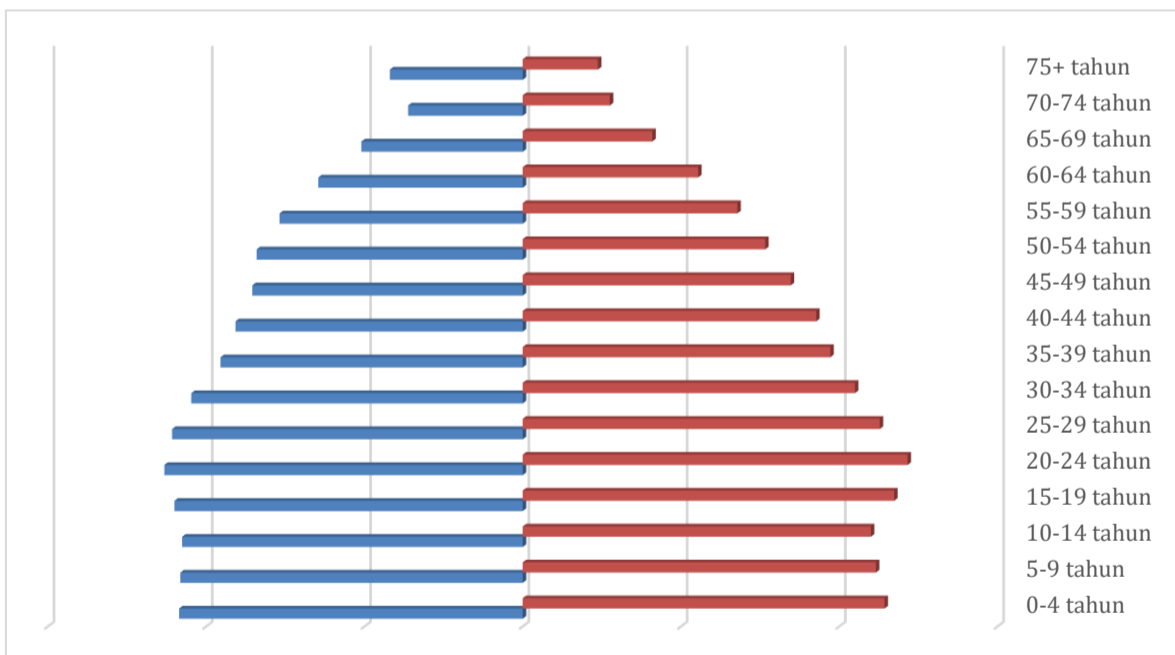
Sumber : Kota Pematangsiantar dalam Angka, 2024

Jumlah penduduk Kota Pematangsiantar cenderung meningkat setiap tahunnya. Namun pada tahun 2010 terjadi penurunan jumlah penduduk sebanyak 16.299 jiwa atau -6,49 %. Penurunan ini terjadi disebabkan penyesuaian dengan hasil sensus penduduk. Peningkatan jumlah penduduk yang tertinggi terjadi pada tahun 2020, yaitu sebanyak 12.937 jiwa atau 5,07 % dari tahun 2019. Namun secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk Kota Pematangsiantar sebesar 2,42%.



Gambar 2.5  
 Jumlah Penduduk Kota Pematangsiantar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2005 – 2022  
 Sumber : BPS Kota Pematangsiantar, diolah

Dari grafik yang disajikan, jumlah penduduk Kota Pematangsiantar pada tahun 2023 mencapai 274.838 jiwa dengan jenis kelamin perempuan 135.918 jiwa dan jenis laki-laki 135.556 jiwa, dengan sex ratio (rasio jenis kelamin) sebesar 97,83, yang berarti dalam 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Struktur penduduk adalah susunan jumlah penduduk berdasarkan kelompok data tertentu. Struktur penduduk Kota Pematangsiantar berdasarkan pada kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 2.7.



Gambar 2.6  
 Piramida Penduduk Kota Pematangsiantar  
 Sumber : BPS Kota Pematangsiantar, diolah

Perubahan struktur penduduk menurut umur mempengaruhi besarnya angka ratio ketergantungan (dependency ratio), yaitu perbandingan antara jumlah penduduk tidak produktif terhadap penduduk produktif. Dari pidamida

penduduk pada Gambar 2.9 dapat dilihat bahwa komposisi penduduk Kota Pematangsiantar didominasi oleh penduduk usia produktif.

Pada Tahun 2023, penduduk usia non produktif Kota Pematangsiantar berjumlah 88.146 jiwa atau 32,07% dan penduduk usia produktif sebanyak 186.692 jiwa atau 67,92%. Dari struktur usia tersebut, dependency ratio Kota Pematangsiantar Tahun 2023 sebesar 47,21%. Dependency ratio memiliki potensi untuk mendukung ataupun menghambat pembangunan Kota Pematangsiantar. Dependency ratio pada usia sekolah akan mendukung pembangunan jika dibekali dengan pendidikan dan keterampilan yang baik, sebaliknya jika tidak disediakan fasilitas pendidikan dan pelatihan yang baik, cenderung akan menimbulkan permasalahan sumber daya manusia yang tidak produktif kedepannya. Dependency ratio pada kelompok umur 65 tahun keatas akan mendukung pembangunan jika didukung dengan kebijakan pemerintah untuk menjamin produktifitas usia lanjut.

Beberapa alternatif cara yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dominasi usia produktif Kota Pematangsiantar adalah dengan meningkatkan kesempatan kerja, melakukan pelatihan kerja, menempatkan tenaga kerja muda pada sektor-sektor lapangan usaha potensial. Salah satu sektor lapangan usaha potensial seperti lapangan usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan, konstruksi dan pariwisata. Tantangan dari populasi usia tidak produktif pada kelompok usia sekolah diarahkan pada peningkatan rata-rata lama sekolah yang diharapkan hingga ke jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tantangan dari usia tidak produktif pada kelompok umur 65 tahun keatas diarahkan pada peningkatan keterampilan untuk menjamin perlindungan finansial.

Struktur penduduk Kota Pematangsiantar akan berpengaruh terhadap kebijakan dan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan untuk mendukung struktur penduduk usia sekolah diarahkan pada peningkatan sarana prasarana pendidikan dan keterampilan, sarana prasarana kesehatan. Sedangkan prioritas pembangunan untuk mendukung usia produktif yakni peningkatan kerjasama daerah dan investasi dalam rangka menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan, penguatan UMKM, pengembangan riset dan inovasi, peningkatan kompetensi tenaga kerja. Prioritas pembangunan untuk mendukung usia lansia yakni penyediaan sarana prasarana kesehatan baik preventif maupun kuratif.

Berdasarkan piramida penduduk Kota Pematangsiantar menunjukkan dominasi kelompok usia produktif (15–64 tahun), dengan kelompok usia 20–24 tahun sebagai yang terbesar, diikuti oleh 15–19 tahun dan 25–29 tahun. Hal ini menandakan bahwa saat ini kota ini memiliki tenaga kerja yang melimpah, yang menjadi potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan menengah.

Dominasi kelompok usia produktif di Kota Pematangsiantar memberikan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perencanaan infrastruktur

harus difokuskan pada pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, dengan adanya potensi pergeseran menuju penuaan penduduk yang dapat dilihat dari meningkatnya proporsi usia non produktif pada usia 65 tahun keatas berdasarkan proyeksi penduduk hingga 2045 mendatang, perlu ada peningkatan fasilitas kesehatan dan infrastruktur ramah lansia yang harus diperhatikan dalam perencanaan kota di masa depan.

Tabel 2.11  
Penduduk Kota Pematangsiantar Menurut Kelompok Umur (jiwa)

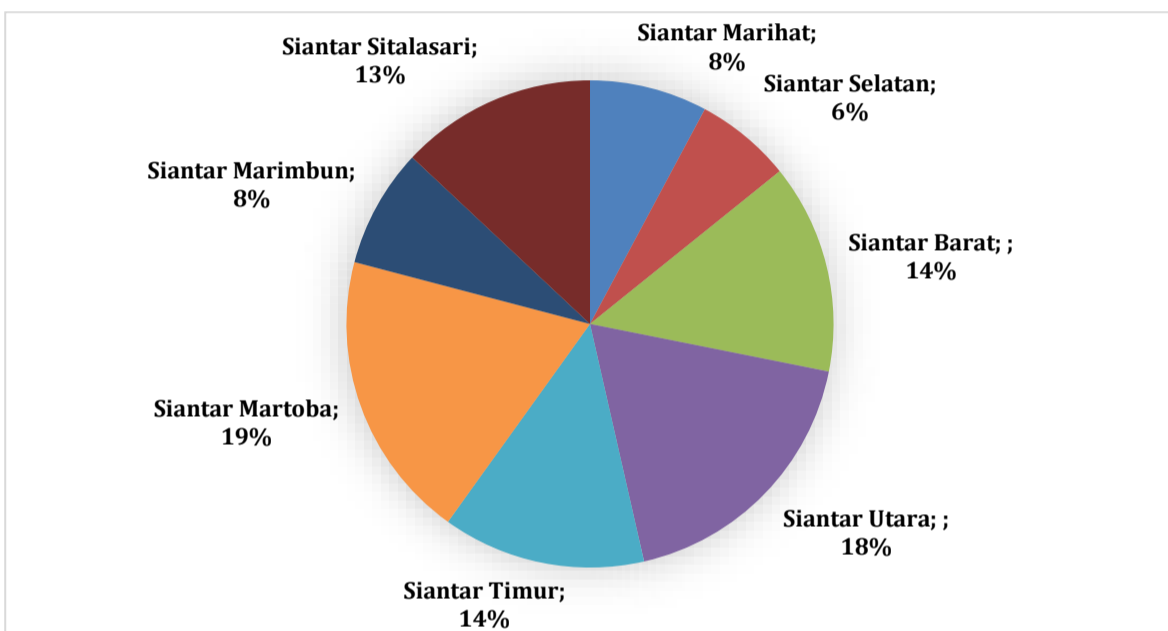
NO	KELOM- POK UMUR	2005			2010			2015			2020			2022			2023		
		PEREM PUAN	LAKI- LAKI	JUMLAH	PEREM PUAN	LAKI- LAKI	JUMLAH	PEREM PUAN	LAKI- LAKI	JUMLAH	PEREM PUAN	LAKI- LAKI	JUMLAH	PEREM PUAN	LAKI- LAKI	JUMLAH	PEREM PUAN	LAKI- LAKI	JUMLAH
1	0 – 4	11.637	12.304	23.941	10.730	11.184	21.914	11.400	11.668	23.068	10.944	11.545	22.489	10.862	11.472	22.334	11.430	10.855	22.285
2	5 – 9	12.494	13.167	25.661	11.366	11.920	23.286	11.553	11.945	23.498	10.885	11.102	21.987	10.859	11.057	21.916	11.157	10.815	21.972
3	10 – 14	14.269	14.613	28.882	11.655	12.044	23.699	11.303	11.567	22.870	10.750	11.281	22.031	10.773	11.247	22.020	10.998	10.758	21.756
4	15 – 19	16.129	16.711	32.840	13.004	12.663	25.667	13.246	13.057	26.303	11.421	12.469	23.890	11.299	12.395	23.694	11.734	11.003	22.737
5	20 – 24	10.211	9.875	20.086	10.694	9.370	20.064	11.157	10.082	21.239	11.250	11.656	22.906	10.946	11.460	22.406	12.159	11.321	23.480
6	25 – 29	10.130	9.052	19.182	9.228	9.227	18.455	8.891	8.977	17.868	10.915	11.066	21.981	10.868	11.119	21.987	11.280	11.076	22.356
7	30 – 34	9.783	8.788	18.571	8.374	8.339	16.713	8.643	8.450	17.093	9.818	10.102	19.920	9.905	10.239	20.144	10.495	10.472	20.967
8	35 – 39	8.967	8.352	17.319	8.307	7.967	16.274	8.661	8.281	16.942	9.499	9.682	19.181	9.658	9.880	19.538	9.719	9.547	19.266
9	40 – 44	7.890	7.653	15.543	8.349	7.672	16.021	8.809	8.115	16.924	8.761	8.946	17.707	8.933	9.204	18.137	9.272	9.074	18.346
10	45 – 49	6.004	5.883	11.887	7.310	6.866	14.176	7.988	7.497	15.485	8.657	8.116	16.773	8.961	8.481	17.442	8.468	8.543	17.011
11	50 – 54	4.516	4.213	8.729	6.412	5.916	12.328	7.345	6.550	13.895	8.192	7.370	15.562	8.536	7.752	16.288	7.660	8.405	16.065
12	55 – 59	3.706	3.404	7.110	4.518	4.229	8.747	5.923	5.343	11.266	7.117	6.369	13.486	7.528	6.774	14.302	6.782	7.681	14.463
13	60 – 64	3.169	2.847	6.016	3.111	2.660	5.771	4.330	3.994	8.324	5.925	4.953	10.878	6.368	5.337	11.705	5.543	6.458	12.001
14	65 – 69	2.317	1.893	4.210	2.610	1.923	4.533	2.958	2.333	5.291	4.520	3.663	8.183	4.996	4.059	9.055	4.094	5.097	9.191
15	70 – 74	3.700	2.597	6.297	4.469	2.581	7.050	4.607	2.738	7.345	3.060	2.291	5.351	3.595	2.771	6.366	2.751	3.619	6.370
16	75+										3.925	2.004	5.929	4.403	2.319	6.722	2.376	4.196	6.572
	JUMLAH	124.922	121.352	246.274	120.137	114.561	234.698	126.814	120.597	247.411	135.639	132.615	268.254	138.490	135.566	274.056	135.918	138.920	274.838

Sumber : Kota Pematangsiantar dalam Angka, 2024

### 2.1.2.2 Kepadatan dan Distribusi Penduduk

Kepadatan penduduk diformulasikan berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk dapat menunjukkan distribusi penduduk per satuan luas (Tabel 2.8).

Pada Tahun 2023 kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Siantar Martoba disusul Kecamatan Siantar Utara. Sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Siantar Utara, kemudian Kecamatan Siantar Barat. Sebaran penduduk Kota Pematangsiantar cenderung di tengah kota, yang menandakan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat masih terkonsentrasi di tengah kota. Sebaran penduduk di wilayah yang padat perlu diarahkan ke wilayah yang tingkat kepadatan penduduknya lebih rendah sehingga aktivitas ekonomi juga semakin meningkat di daerah pinggiran.



Gambar 2.7  
Diagram Kepadatan Penduduk Per-Kecamatan Kota Pematangsiantar Tahun 2023  
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar, diolah

Tabel 2.12  
Kepadatan dan Distribusi Penduduk Per Kecamatan

NO	KECAMATAN	LUAS AREAL	2005		2010		2015		2020		2022			2023
			JUMLAH PENDUDUK	KEPADAT-AN PENDUDUK	JUMLAH PENDUDUK	KEPADAT-AN PENDUDUK	JUMLAH PENDUDUK	KEPADAT-AN PENDUDUK	JUMLAH PENDUDUK	KEPADAT-AN PENDUDUK	JUMLAH PENDUDUK	KEPADAT-AN PENDUDUK	JUMLAH PENDUDUK	KEPADAT-AN PENDUDUK
1.	Siantar Marihat	7.825	32.285	4,126	17.872	2,284	19.096	2,44	20.933	2,675	21.425	2,738	21.484	2,744
2.	Siantar Selatan	2.020	21.094	10,443	17.101	8,466	17.859	8,841	17.447	8,637	17.386	8,607	21.684	1,204
3.	Siantar Barat	3.205	47.769	14,905	34.984	10,915	37.125	11,583	37.896	11,824	38.204	11,92	17.588	8,707
4.	Siantar Utara	3.650	50.691	13,888	46.423	12,719	48.539	13,298	49.886	13,667	50.213	13,757	38.249	11,934
5.	Siantar Timur	4.520	43.603	9,647	38.454	8,508	40.202	8,894	36.744	8,129	36.481	8,071	50.300	13,781
6.	Siantar Martoba	18.022	49.375	2,74	38.368	2,129	40.466	2,245	50.350	2,794	52.679	2,923	37.041	8,195
7.	Siantar Marimbun	18.006			14.642	0,813	15.607	0,867	20.675	11,478	21.940	1,218	52.705	2,924
8.	Siantar Sitalasari	22.723			26.854	1,182	28.517	1,255	34.323	1,51	35.728	1,572	35.787	1,575
	Jumlah	79.971	244.817	3,061	234.698	2,935	247.411	3,094	454.254	5,68	274.056	3,427	274.838	6,383

Sumber : BPS Kota Pematangsiantar

Kepadatan penduduk di Kecamatan Siantar Utara dan Siantar Barat memberikan tantangan besar dalam perencanaan tata ruang dan penyediaan infrastruktur di Kota Pematangsiantar. Oleh karena itu, penting untuk mendorong penyebaran penduduk ke wilayah pinggiran dengan cara mengembangkan infrastruktur transportasi, perumahan terjangkau, dan peluang ekonomi. Di sisi lain, pengelolaan kepadatan harus dilakukan sesuai dengan RTRW untuk menghindari alih fungsi lahan yang merugikan dan menjaga keberlanjutan pembangunan kota secara keseluruhan.

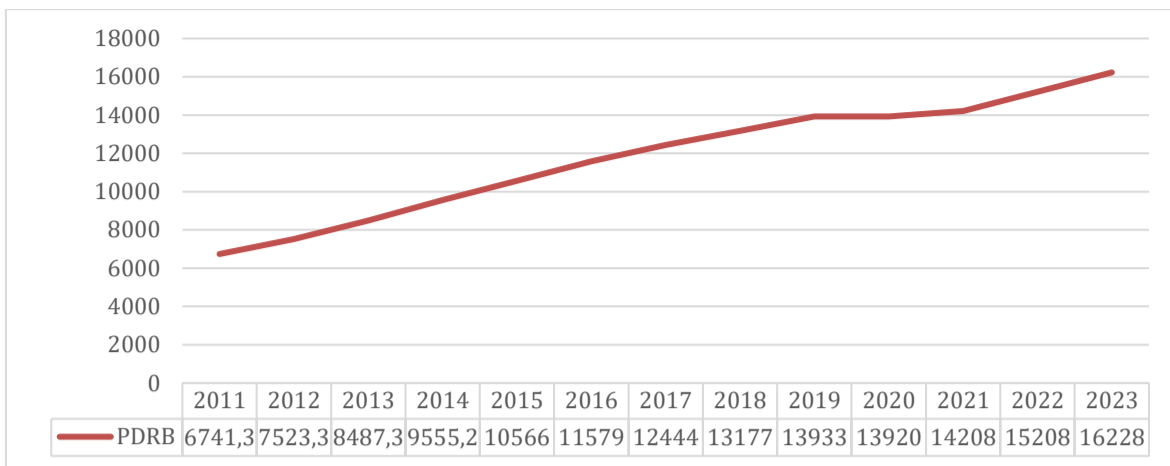
## **2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

### **2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi**

#### **2.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

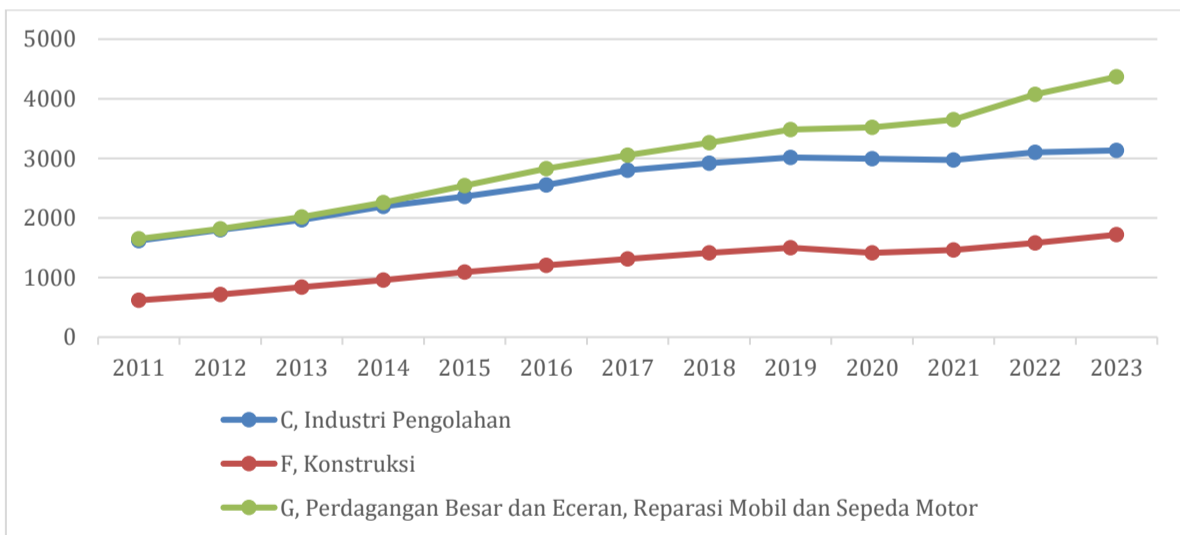
PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) yang terdiri dari 17 lapangan usaha dan sebagian besar lapangan usaha dirinci lagi menjadi sub lapangan usaha. Pemecahan menjadi sub lapangan usaha atau sub lapangan usaha ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Pengertian PDRB adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi memiliki residen atau non residen. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah sedangkan PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Pada tabel 2.9 dapat dilihat PDRB ADHB Kota Pematangsiantar dari Tahun 2011-2023.

Secara umum PDRB Kota Pematangsiantar selalu bertumbuh setiap tahunnya pada periode tahun 2011-2019. Akibat pandemi Covid-19 PDRB Kota Pematangsiantar atas dasar harga berlaku (ADHB) pada Tahun 2020 mengalami kontraksi dibandingkan Tahun 2019 sebesar 13,610 milyar namun dapat bangkit kembali di Tahun 2021 menjadi 14,208 trilyun. Memasuki Tahun 2023, PDRB Kota Pematangsiantar mengalami kenaikan kembali menjadi 16,228,05 Milyard. Lapangan usaha yang paling dominan sebagai penyumbang PDRB adalah Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan lapangan usaha yang memegang andil terbesar dalam perekonomian Pematangsiantar dalam 5 tahun terakhir sebesar 4,367,24 milyar atau 26,91%. Kemudian terbesar kedua adalah Industri Pengolahan yang peranannya mencapai 3,132,70 milyar (19,30%) dan terakhir adalah sektor Konstruksi sebesar 1,717,72 milyar (10,58%).



Gambar 2.8  
PDRB Kota Pematangsiantar 2011-2023  
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar, diolah

Dari tiga sektor utama sebagai penyumbang PDRB Kota Pematangsiantar berdasarkan harga berlaku, ada kecenderungan bahwa kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terus mengalami pertumbuhan, namun disisi lain sektor industri pengolahan terus mengalami penurunan. Sedangkan sektor konstruksi memberikan sumbangan yang cenderung stagnan terhadap PDRB Kota Pematangsiantar. Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor mengalami pertumbuhan yang pesat mengindikasikan bahwa sektor ini menjadi andalan masyarakat dalam aktivitas ekonominya. Kontribusi yang terus menurun dari sektor industri terhadap PDRB mengindikasikan bahwa sektor ini cenderung tumbuh lambat.



Gambar 2.9  
Kontribusi Tiga Sektor Utama PDRB Kota Pematangsiantar 2011-2023  
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar, diolah

Tabel 2.13  
 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 – 2023

Kategori / Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)												
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	151,9	166,57	181,06	192,09	198,33	204,99	206,67	208,3	219,39	228,28	226,8	234,97	248,01
B, Pertambangan dan Penggalian	0,83	0,95	1,08	1,16	1,22	1,34	1,28	1,28	1,29	1,28	1,3	1,35	1,41
C, Industri Pengolahan	1619,28	1802,69	1966,06	2194,52	2361,59	2553,66	2800,31	2917,98	3014,93	2994,56	2974	3099,66	3132,7
D, Pengadaan Listrik dan Gas	44,91	43,3	36,58	35,18	34,36	33,77	38,96	40,55	42,23	43,14	45,4	47,82	49,21
E, Pengadaan Air, Penge-lolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20,93	23,46	25,98	29,46	32,61	35,6	38,97	40,22	41,02	41,51	44,7	45,79	47,08
F, Konstruksi	617,08	712,69	837,98	959,73	1090,96	1205,63	1310,48	1412,56	1497,31	1412,89	1464,3	1579,22	1717,72
G, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1649,02	1817,87	2014,22	2258,06	2539,71	2824,79	3052,8	3260,18	3480,28	3518,53	3647,9	4073,95	4367,24
H, Transportasi dan Pergudangan	434,03	484,98	576,94	667,26	747,42	822,19	869,02	922,13	1002,44	1029,33	1039,4	1117,11	1251,39
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	359,25	415,18	483,95	561,1	627,02	683,65	724,01	774,04	821,28	783,53	783	845,52	917,1
J, Informasi dan Komunikasi	133,58	147,67	158,16	170,09	181,14	190,29	198,94	216,25	224,9	229,5	245,4	258,19	273,86
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	255,65	308,26	359,97	391,94	428,93	465,23	489,75	500,93	541,38	544,1	578,5	635,95	662,72
L, Real Estate	456,37	488,24	599,27	680,08	766,96	859,54	909,16	963,71	1011,9	1022,02	1052,5	1102,28	1162,73
M, N, Jasa Perusahaan	57,34	65,72	76,13	87,17	97,39	108,59	118,28	126,83	131,9	133,32	138,7	147,89	158,56
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	353,87	402,81	447,51	513,1	576,6	630,52	681,28	723,51	761,58	786,18	786,6	795,34	898,57
P, Jasa Pendidikan	479,7	520,3	579,97	650,86	700,97	758,24	790,37	840,96	899,83	914,12	938,7	966,72	1064,02
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	70,63	81,64	93,76	107,31	119,45	131,43	138,38	147,26	157,57	156,37	157,8	169,12	181,84
R, S, T, U, Jasa Lainnya	36,92	40,99	48,68	56,13	61,68	69,83	75,29	80,01	84,01	81,42	83,2	87,43	93,89
PDRB	6741,29	7523,32	8487,29	9555,16	10566,33	11579,29	12443,96	13176,71	13933,25	13920,09	14208,2	15208,31	16228,05

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 2.14  
 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 – 2023

Kategori / Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)												
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	139.58	143.26	147.87	150.34	152.02	153.63	154.90	155,03	155,47	161,8	163,4	162,1	164,15
B, Pertambangan dan Penggalian	0.69	0.75	0.80	0.86	0.91	0.94	0.98	0,95	0,95	9,54	0,9	1	0,98
C, Industri Pengolahan	1457.79	1504.07	1599.83	1641.41	1749.95	1761.48	1824.54	1924,91	1977,09	1989,31	1944,1	1915	1929,87
D, Pengadaan Listrik dan Gas	29.87	35.64	31.09	26.98	26.60	25.19	25.50	26,95	27,85	28,68	29,3	30,6	32,43
E, Pengadaan Air, Penge-lolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.61	19.79	20.80	21.98	23.31	24.66	25.83	26,59	27,25	27,27	27,4	29,3	30,30
F, Konstruksi	535.64	580.97	619.73	667.21	712.48	760.28	791.92	815,29	856,06	890,3	834,3	847,2	926,17
G, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1449.18	1555.30	1676.49	1775.03	1885.01	2011.57	2134.77	2245,83	2377,14	2572,06	2523,7	2606,6	2894,54
H, Transportasi dan Pergudangan	373.04	407.47	438.15	474.71	513.23	552.83	587.06	625,57	658,24	710,52	706,2	707,6	778,79
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	316.35	343.05	366.10	394.70	420.49	451.76	475.31	497,9	530,21	557,68	531.16	531,2	601,90
J, Informasi dan Komunikasi	123.07	135.33	147.22	158.67	170.15	180.25	188.13	195,37	211,84	220,11	224,5	236,4	255,62
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	221.18	240.29	264.72	291.37	299.66	314.88	326.57	334,08	340,77	364,93	361,3	376,8	402,89
L, Real Estate	382.46	419.40	448.59	479.71	511.33	549.00	586.64	605,38	635,65	654,72	649,2	650,9	697,78
M, N, Jasa Perusahaan	48.87	54.09	57.36	61.19	65.33	70.12	74.37	76,99	81,92	84,38	83,6	84,2	91,45
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	305.45	332.71	341.13	352.51	376.90	405.19	412.10	419,88	443,39	459,03	456,3	456,9	501,58
P, Jasa Pendidikan	438.55	459.55	482.23	522.42	555.71	590.81	624.34	645,22	683,93	720,19	727,2	744,4	803,17
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	58.00	67.29	74.41	82.96	88.73	94.32	99.39	103,63	109,02	114,47	113,5	113,7	124,80
R, S, T, U, Jasa Lainnya	31.53	34.36	37.05	39.82	42.62	45.46	48.42	50,56	53,39	55,35	53	53,9	59,42
PDRB	5929.88	6333.31	6753.56	7141.86	7594.43	7992.37	8380.77	8750,15	9170,19	9611,74	9430,0	9547,7	10295,84

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sementara, PDRB berdasarkan harga konstan (penghitungan menggunakan tahun dasar 2010), menunjukkan angka yang cukup fluktuatif dari tahun 2019 sampai dengan 2022 berada pada kisaran 9 milyar dan di tahun 2023 mencapai 10.295 Milyar. Sektor lapangan usaha yang memberikan kontribusi dominan pada PDRB Kota Pematangsiantar berdasarkan harga konstan, masih didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor sebesar 2.894,54 Milyar disusul sektor industri pengolahan sebesar 1.929,87 Milyar.

Pertumbuhan ekonomi Kota Pematangsiantar didorong oleh beberapa faktor yakni posisi geografis Kota Pematangsiantar sebagai pintu masuk kawasan strategis pariwisata Danau Toba yang sangat mendukung sektor perdagangan dan jasa. Selain itu Kota Pematangsiantar berdiri pabrik rokok terbesar diluar Jawa sebagai penopang perekonomian sektor industri. Infrastruktur kota yang memadai dalam menopang pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kota Pematangsiantar yang cenderung stagnan disebabkan karena hanya mengandalkan satu sektor perekonomian saja yakni sektor perdagangan dan jasa. Selain itu keterbatasan lahan juga cukup membatasi investasi yang masuk sehingga menghambat perekonomian bertumbuh. Penerapan riset dan inovasi untuk mendukung pengembangan ekonomi masih tergolong rendah.

Sektor industri pengolahan tidak lagi menjadi sektor unggulan disebabkan menurunnya produktifitas terutama dari sub sektor pengolahan tembakau. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan harga cukai sehingga menurunkan daya beli masyarakat terhadap rokok.

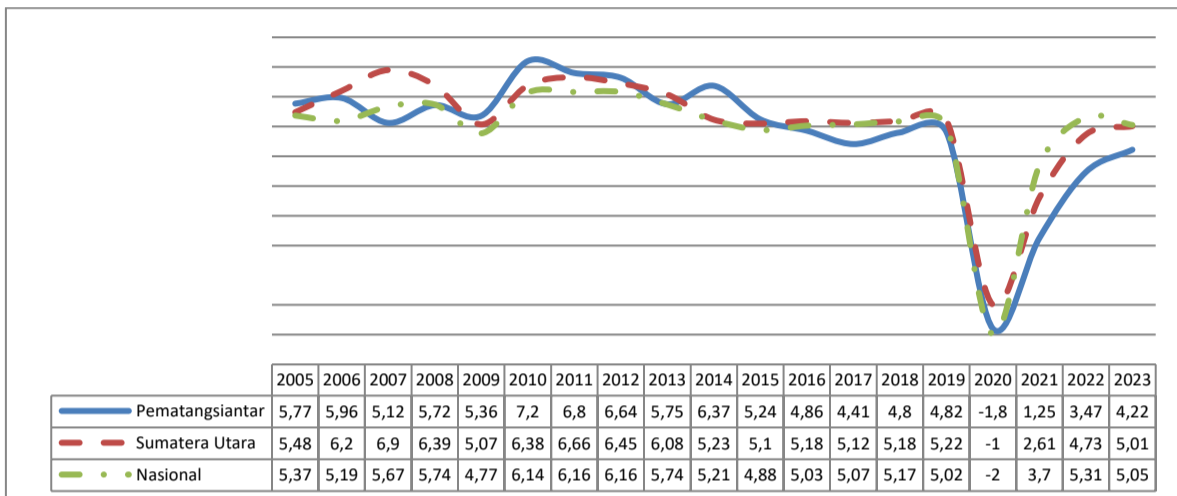
Peluang strategis pengembangan industri diarahkan pada pengembangan UMKM pengolahan makanan dan minuman untuk menyediakan kebutuhan Kota Pematangsiantar dan kawasan sekitarnya. Kawasan yang ditetapkan untuk kawasan industri berdasarkan Permen ATR Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar adalah Kecamatan Siantar Martoba, Kecamatan Siantar Timur, Kecamatan Siantar Sitalasari dan Kecamatan Siantar Barat.

Kawasan Perdagangan dan Jasa untuk mendukung pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa ditetapkan tersebar diseluruh kecamatan tepatnya di 43 kelurahan. Kawasan ini diarahkan untuk mengadopsi kreativitas dan menggunakan teknologi digital.

#### 2.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Selama periode 2005-2022, pertumbuhan ekonomi di Kota Pematangsiantar mencapai kondisi tertinggi pada Tahun 2010 sebesar 7,20 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah di Kota Pematangsiantar terjadi pada Tahun 2020 sebesar -1,89 persen yang disebabkan dampak ekonomi dan sosial dari pandemi Covid-19. Secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi Kota Pematangsiantar pada periode 2005-2023 mencapai 4,22 persen yang mana jika dibandingkan dengan

rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan Nasional pada periode yang sama, maka pertumbuhan ekonomi Kota Pematangsiantar masih lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional (5,05%) dan Sumatera Utara (5,01%). Berdasarkan pendekatan produksi, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,83 persen, diikuti oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 7,04 persen, serta lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,77 persen, serta lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,75 persen.



Gambar 2.10  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2005-2023  
Sumber : Evaluasi RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025

Struktur perekonomian Kota Pematangsiantar pada tahun 2023 dari sisi produksi masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu : Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 26,91% ; Industri Pengolahan sebesar 19,30%; serta Konstruksi sebesar 10,58% persen. Peranan ke tiga lapangan usaha tersebut mencapai 56,79% dari total PDRB Kota Pematangsiantar.

Pertumbuhan ekonomi Kota Pematangsiantar bila dilihat dari pendekatan pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 6,17 persen, disusul oleh komponen Pengeluaran Rumah Tangga sebesar 4,76 persen, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 4,60 persen, dan komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRRT sebesar 4,58 persen. Sedangkan berdasarkan sisi pengeluaran, tiga komponen yang memberi peran dominan yakni komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memberi kontribusi terbesar yaitu sebesar 57,92 persen; disusul oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 24,23 persen; dan komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 10,61 persen.

Perdagangan antarwilayah yang direpresentasi oleh komponen Ekspor dan Impor, menunjukkan ekspor yang cenderung lebih tinggi dari impor. Komponen Net Ekspor dalam kurun waktu 2018-2021 menunjukkan kondisi “defisit”, yang

berarti komponen Ekspor lebih rendah dari Impor. Namun, pada tahun 2023 komponen Net Ekspor mengalami surplus, yakni nilai Ekspor lebih besar dari Impor.

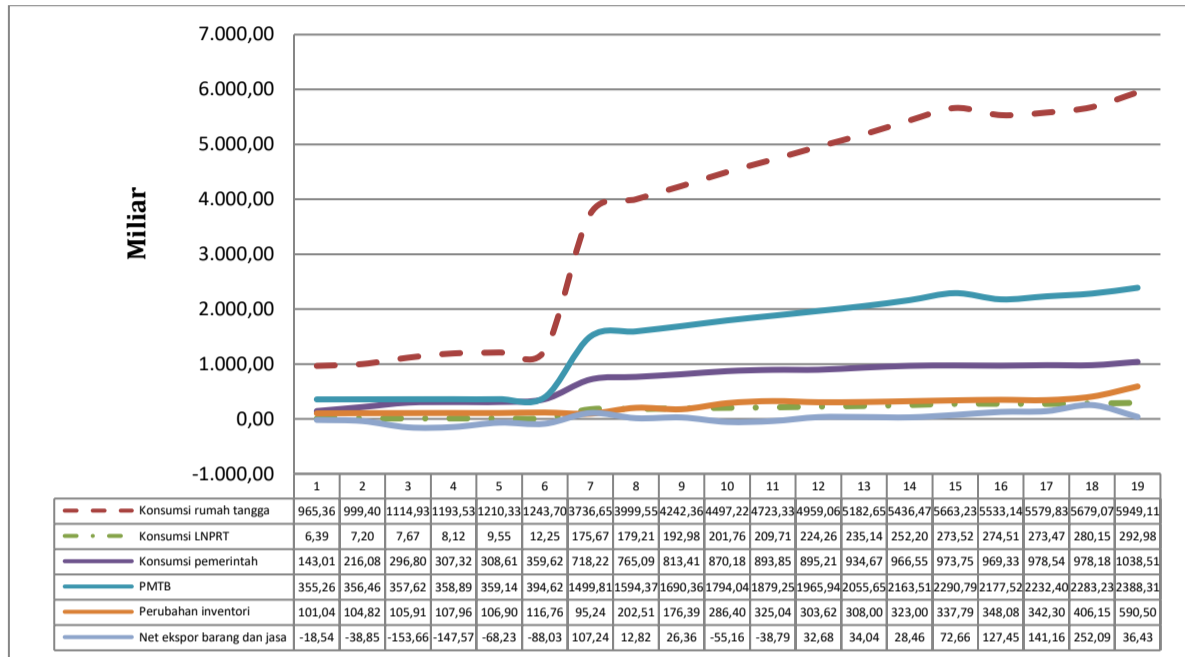
Lapangan usaha sebagai pembentuk ekonomi Kota Pematangsiantar cenderung tumbuh tidak signifikan yang menunjukkan terjadi kejenuhan perekonomian di Kota Pematangsiantar. Lapangan usaha unggulan tidak terlalu atraktif pertumbuhannya. Perekonomian Kota Pematangsiantar yang bertumpu pada Lapangan Usaha Perdagangan, Industri Pengolahan dan Konstruksi mulai tergerus dengan adanya perkembangan teknologi perdagangan, dan pusat-pusat pertumbuhan baru di sekitar Kota Pematangsiantar, seperti KSPN Danau Toba dan KEK Sei Mangke.

Tabel 2.15  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pematangsiantar Dirinci Menurut Sektor Atas Dasar Konstan Tahun 2010-2023

Kategori / Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (Persen)												
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.64	3.22	1.67	1,12	1,06	0,83	0,09	0,28	4,07	1,05	-0,77	1,31	0,06
B, Pertambangan dan Penggalian	7.58	7.57	7.60	5,02	3,57	4,19	-2,59	-0,05	0,05	-1,52	1,7	0,02	2,58
C, Industri Pengolahan	3.17	6.37	2.60	6,61	0,66	3,58	5,5	2,71	0,62	-2,27	-1,49	1,78	0,98
D, Pengadaan Listrik dan Gas	19.33	-	-	-1,4	-5,32	1,25	5,68	3,34	2,97	2,24	4,41	4,06	1,81
E, Pengadaan Air, Penge-lolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.30	5.13	5.68	6,04	5,81	4,71	2,96	2,5	0,05	0,64	6,76	1,82	1,56
F, Konstruksi	8.46	6.67	7.66	6,79	6,71	4,16	2,95	5	4	-6,29	1,54	2,13	7,04
G, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.32	7.79	5.88	6,2	6,71	6,12	5,2	5,85	8,2	-1,88	3,28	5,77	4,99
H, Transportasi dan Pergudangan	9.23	7.53	8.34	8,12	7,72	6,19	6,56	5,22	7,94	-0,6	0,19	3,07	6,79
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.44	6.72	7.81	6,53	7,44	5,21	4,75	6,49	5,18	-4,6	-0,16	6,15	6,75
J, Informasi dan Komunikasi	9.96	8.79	7.78	7,23	5,94	4,37	3,85	8,43	3,91	2	5,31	2,66	5,30
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	8.64	10.17	10.07	2,85	5,08	3,71	2,3	2	7,09	-1	4,3	3,57	3,23
L, Real Estate	9.66	6.96	6.94	6,59	7,37	6,86	3,2	5	3	-0,85	0,27	2,92	4,16
M, N, Jasa Perusahaan	10.68	6.04	6.68	6,76	7,33	6,07	3,52	6,4	3	-0,88	0,64	4,19	4,28
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	8.93	2.53	3.34	6,92	7,51	1,71	1,89	5,6	3,53	0,59	0,13	-0,04	9,83
P, Jasa Pendidikan	4.79	4.94	8.34	6,37	6,32	5,67	3,34	6	5,3	0,97	2,37	2,80	4,96
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16.00	10.58	11.49	6,96	6,3	5,38	4,26	5,2	5	-0,81	0,13	4,62	4,93
R, S, T, U, Jasa Lainnya	9.00	7.83	7.45	7,04	6,66	6,51	4,42	5,6	3,67	-4,29	1,74	4,08	5,92
PDRB	6.80	6.64	5.75	6,34	5,24	4,86	4,41	4,8	4,82	-1,89	1,25	3,47	4,22

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari sisi pengeluaran, perekonomian Kota Pematangsiantar dalam kurun waktu 2005-2023 dominan ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan rata-rata proporsi sebesar 59,13% disusul pembentukan modal tetap bruto rata-rata sebesar 23,28% dan Konsumsi pemerintah rata-rata sebesar 11,04%. Konsumsi pemerintah yang berada pada rata-rata 11,04% menunjukkan peran pemerintah dalam PDRB tidak terlalu besar.



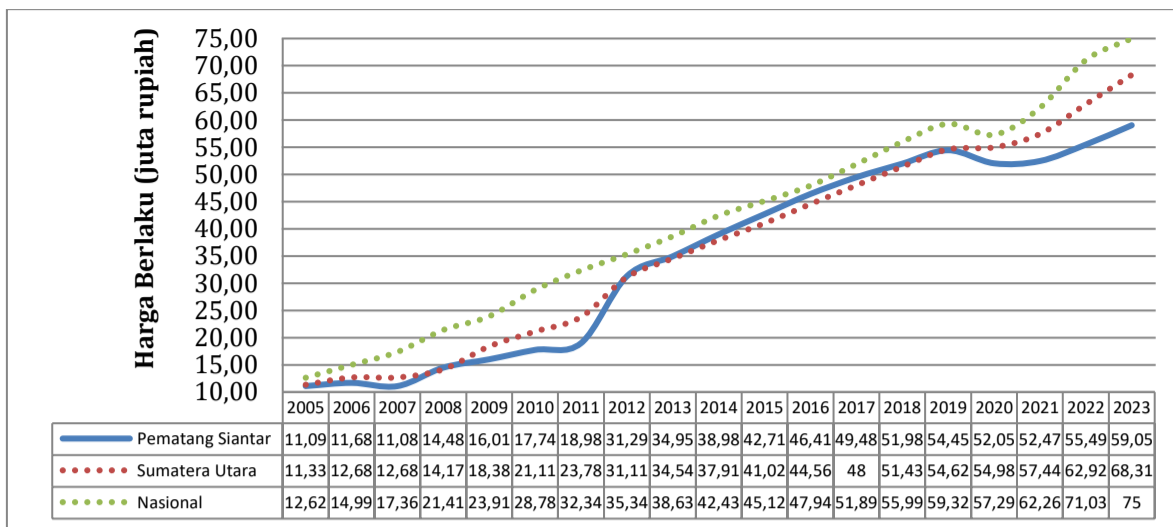
Gambar 2.11  
Perkembangan PDRB Kota Pematangsiantar 2005-2023 dari Sisi Pengeluaran  
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar, diolah

Perdagangan antar wilayah yang direpresentasi oleh komponen Ekspor dan Impor, menunjukkan ekspor yang cenderung lebih tinggi dari impor. Komponen Net Ekspor dalam kurun waktu tahun 2018-2021 menunjukkan kondisi “defisit”, yang berarti komponen Ekspor lebih rendah dari Impor. Namun, pada tahun 2022 dan 2023 komponen Net Ekspor mengalami surplus, yakni nilai Ekspor lebih besar dari Impor.

Lapangan usaha sebagai pembentuk ekonomi Kota Pematangsiantar cenderung tumbuh tidak signifikan yang menunjukkan terjadi kejenuhan perekonomian di Kota Pematangsiantar. Lapangan usaha unggulan tidak terlalu atraktif pertumbuhannya. Perekonomian Kota Pematangsiantar yang bertumpu pada Lapangan Usaha Perdagangan, Industri Pengolahan dan Konstruksi mulai tergerus dengan adanya perkembangan teknologi perdagangan, dan pusat-pusat pertumbuhan baru di sekitar Kota Pematangsiantar, seperti KSPN Danau Toba dan KEK Sei Mangke.

### 2.2.1.3 PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Nilai PDRB Perkapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.



Gambar 2.12  
PDRB Per Kapita Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2005-2023  
Sumber : Evaluasi RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025

Indikator ini dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk disuatu wilayah, walaupun sebenarnya nilai PDRB Perkapita ini belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk secara riil. Perbandingan rata-rata pendapatan per kapita kurun waktu 2005-2023 menunjukkan trend peningkatan dari periode ke periode. Dimana pada periode 2005-2010, rata-rata pendapatan per kapita Kota Pematangsiantar sebesar Rp. 14,01 juta yang kemudian meningkat menjadi Rp. 30,78 juta pada periode 2010-2015 dan kembali meningkat menjadi Rp. 52,65 juta di periode 2015-2020. Pada periode 2021-2023, rata-rata pendapatan per kapita Kota Pematangsiantar naik kembali menjadi sebesar Rp. 55,67 juta. Namun peningkatan pendapatan per kapita secara rata-rata dari periode ke periode Kota Pematangsiantar ini belum mampu membuat rata-rata pendapatan per kapita Kota Pematangsiantar lebih tinggi dibandingkan rata-rata pendapatan per kapita Sumatera Utara maupun Nasional untuk setiap periode.

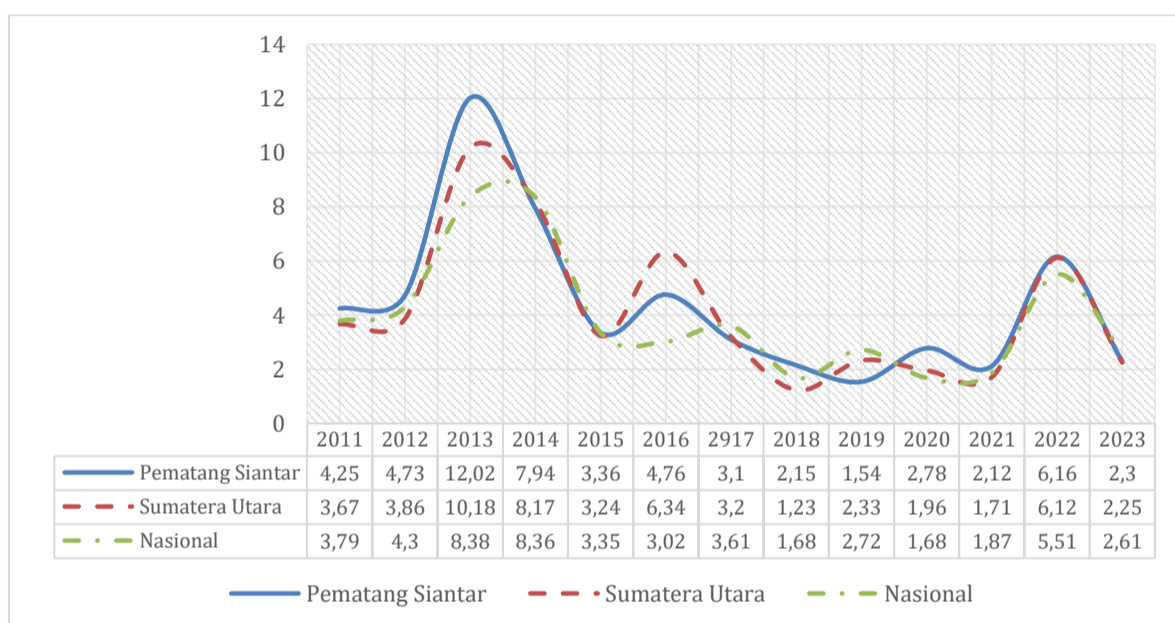
Pemerintah Kota Pematangsiantar secara umum mampu meningkatkan pendapatan per kapita secara rata-rata selama kurun waktu 2005-2023, sehingga ini merupakan sebuah pencapaian yang baik dan harus bisa dipertahankan dan juga semakin ditingkatkan sehingga mampu mencapai pencapaian yang lebih baik dibandingkan Sumatera Utara maupun Nasional ke depannya.

#### 2.2.1.4 Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga

berada di bawah angka 10% pertahun; inflasi sedang antara 10% - 30% pertahun; berat antara 30% - 100% pertahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% pertahun.

Tidak semua inflasi berdampak negatif terhadap perekonomian, terutama jika terjadi inflasi ringan dibawah sepuluh persen. Inflasi ringan justru dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena inflasi mampu memberi semangat pada pengusaha, untuk lebih meningkatkan produksinya. karena dengan kenaikan harga yang terjadi pengusaha mendapat keuntungan yang lebih banyak. Selain itu, peningkatan produksi memberi dampak positif lain, yaitu tersedianya lapangan kerja baru. Inflasi akan berdampak negatif jika nilainya melebihi sepuluh persen. Kota Pematangsiantar pada periode Tahun 2023 berada pada 2,3% lebih tinggi dari dari Provinsi Sumatera Utara sebesar 2,25 % dan lebih rendah dari inflasi Nasional sebesar 2,61%.

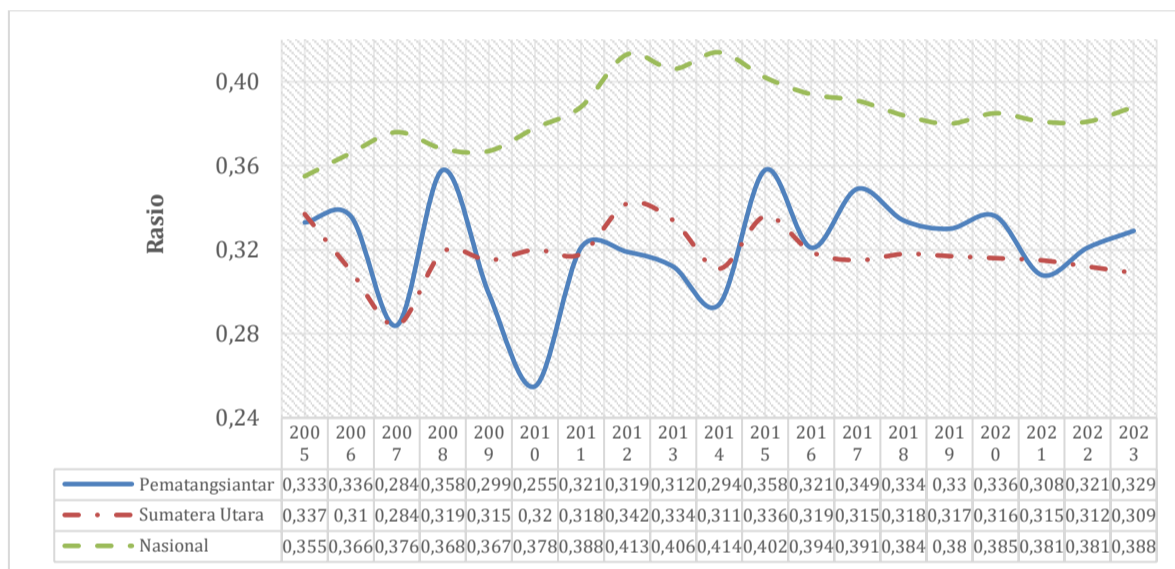


Gambar 2.13  
Laju Inflasi Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2011-2023  
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar, diolah

Inflasi di Kota Pematangsiantar terutama dipengaruhi disebabkan kenaikan harga bahan pokok makanan, transportasi, peralatan rumah tangga. Sesuai dengan karakteristik wilayah Kota Pematangsiantar yang perkotaan mengakibatkan pasokan bahan pangan tergantung dari luar daerah. Kondisi ini tentunya akan terus dimonitor dan dikendalikan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Kerjasama dengan daerah produsen perlu dijajaki untuk menjamin keberlangsungan stok pangan di Kota Pematangsiantar. Pada Tahun 2023 kondisi inflasi di Kota Pematangsiantar sebesar 2,3% menurun jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar 6,16%. Capaian inflasi tahun 2023 berada di atas Provinsi Sumatera Utara dan dibawah Nasional. Inflasi di Kota Pematangsiantar dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau. Kondisi ini akibat dari ketergantungan Kota Pematangsiantar terhadap kelompok konsumsi tersebut yang dipasok dari luar wilayah.

### 2.2.1.5 Indeks Gini

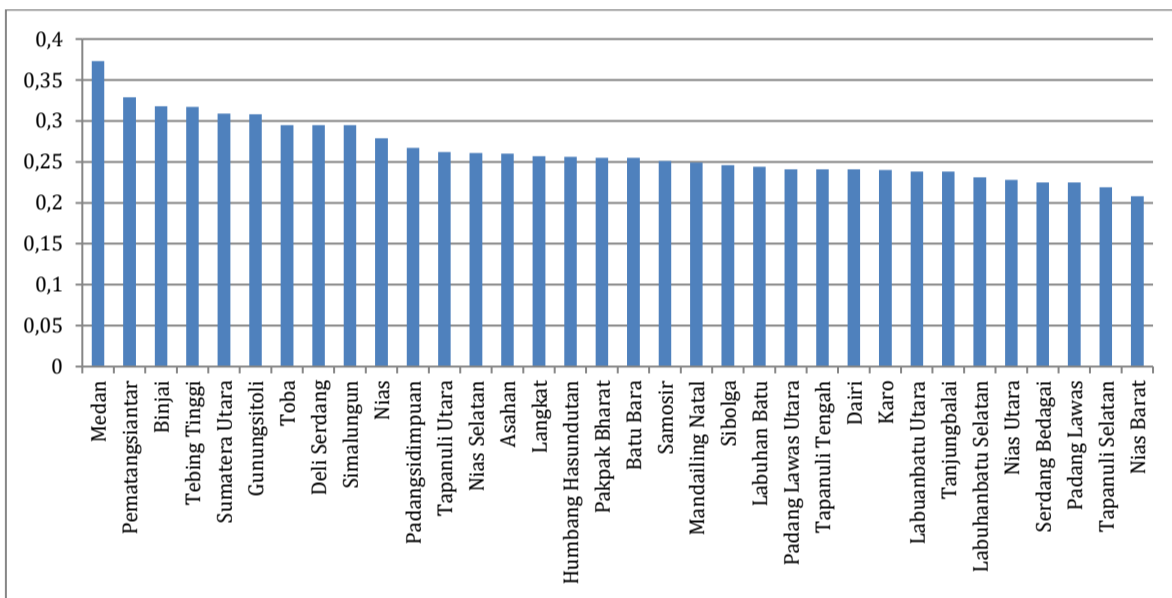
Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai koefisien gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Nilai indeks Gini Kota Pematangsiantar tahun 2023 adalah angka perhitungan BPS sebesar 0,329. Capaian sebesar 0,329 masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,309 namun lebih baik daripada tingkat Nasional sebesar 0,388. Berdasarkan posisi peringkat indeks gini, dapat disimpulkan Kota Pematangsiantar berada pada ketimpangan rendah, yang artinya tidak terdapat kesenjangan yang besar terhadap distribusi pendapatan ekonomi masyarakat Kota Pematangsiantar ( $0,321 \leq 0,4$  : ketimpangan rendah).



Gambar 2.14  
Indeks Gini Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2005-2023  
Sumber : Evaluasi RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025

Kondisi ketimpangan pendapatan Kota Pematangsiantar Tahun 2023 meningkat jika dibandingkan tahun 2022. Pandemi covid menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat kelompok pendapatan tinggi karena pembatasan pada Tahun 2021 diiringi dengan tidak maksimalnya usaha yang dijalankan. Kondisi ini menyebabkan angka gini ratio juga menurun. Seiring dengan dibukanya pembatasan dan berjalannya sektor usaha pada Tahun 2022 dan 2023, menyebabkan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi mengalami pemulihan dari sisi pendapatan. Akibat dari meningkatnya pendapatan, gini ratio di Kota Pematangsiantar juga ikut meningkat. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk menurunkan ketimpangan yakni dengan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat bawah diantaranya dengan peningkatan kerjasama daerah dan investasi dalam rangka menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan, penguatan

UMKM, pengembangan riset dan inovasi, peningkatan kompetensi tenaga kerja. Peluang strategis pengembangan industri diarahkan pada pengembangan UMKM pengolahan makanan dan minuman untuk menyediakan kebutuhan Kota Pematangsiantar dan kawasan sekitarnya. Kawasan yang ditetapkan untuk kawasan industri berdasarkan Permen ATR Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar adalah Kecamatan Siantar Martoba, Kecamatan Siantar Timur, Kecamatan Siantar Sitalasari dan Kecamatan Siantar Barat. Kawasan Perdagangan dan Jasa untuk mendukung pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa ditetapkan tersebar diseluruh kecamatan tepatnya di 43 kelurahan. Kawasan ini diarahkan untuk mengadopsi kreativitas dan menggunakan teknologi digital. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Sumatera, gini ratio Kota Pematangsiantar berada pada urutan kedua setelah Kota Medan. Gini ratio Kota Pematangsiantar lebih tinggi jika dibandingkan Provinsi Sumatera Utara dan lebih rendah jika dibandingkan Nasional.



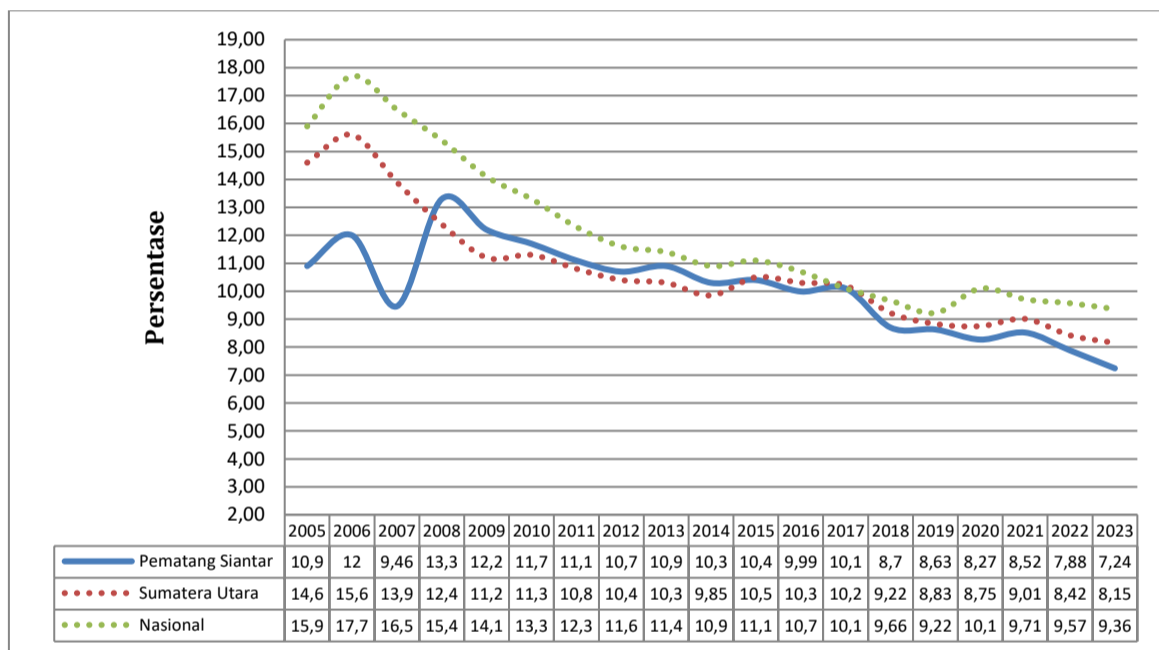
Gambar 2.15  
Perbandingan Indeks Gini Kab/Kota Se Sumatera Utara Tahun 2023  
Sumber : BPS Kota Pematangsiantar Tahun 2022

### 2.2.1.6 Kemiskinan

Secara ekonomi, kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Kemiskinan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain yaitu: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi geografis dan lainnya. Selanjutnya standar kehidupan atau kebutuhan minimal itu juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung kebiasaan/adat, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya. Dalam upaya perumusan kebijakan dan intervensi program penanggulangan kemiskinan, secara nasional data yang digunakan adalah data hasil pendataan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015 dengan hasil berupa Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT)

Tahun 2015 yang telah diserahkan kepada Kementerian Sosial dan dirilis oleh Tim Nasional Koordinasi Percepatan. Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. PBDT Tahun 2015 disepakati untuk digunakan sebagai single data/data tunggal dalam program penanggulangan kemiskinan oleh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Konsep BPS untuk mengukur kemiskinan, menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Berikut perkembangan persentase penduduk miskin di Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2023.



Gambar 2.16  
Tingkat Kemiskinan Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2005-2023  
Sumber : Badan Pusat Statistik

Ditinjau dari trend kemiskinan di Kota Pematangsiantar, tingkat kemiskinan di Kota Pematangsiantar menunjukkan trend penurunan dari 10,96 persen pada tahun 2005 menjadi 7,24 persen di tahun 2023 atau bisa dikatakan Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam 2 (dua) dekade terakhir mampu menekan atau mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 3,72 persen. Secara runtun waktu, pada periode 2005-2007 dan 2015-2023 tingkat kemiskinan di Kota Pematangsiantar menunjukkan kondisi yang lebih baik jika dibandingkan kondisi tingkat kemiskinan secara Nasional maupun di Sumatera Utara, dimana tingkat kemiskinan di Kota Pematangsiantar lebih rendah jika dibandingkan tingkat kemiskinan Nasional maupun Sumatera Utara pada periode tersebut.

Tingkat kemiskinan tertinggi di Kota Pematangsiantar terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 13,36 persen sedangkan tingkat kemiskinan terendah di Kota Pematangsiantar terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 7,24 persen.

Hal yang perlu menjadi perhatian dalam penanganan kemiskinan di Kota Pematangsiantar adalah tingginya masyarakat yang terdaftar pada data DTKS Kementerian Sosial. Per Juli 2023 tercatat jumlah masyarakat yang tercatat pada DTKS mencapai 113.470 jiwa. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa penurunan kemiskinan masih tergantung pada program-program pemberdayaan sosial dari pemerintah.

Berdasarkan data Hasil Susenas Maret Tahun 2020 menunjukkan jumlah penduduk miskin sebanyak 21,23 ribu dengan garis kemiskinan sebesar 536,49 ribu rupiah per kapita per bulan. Periode 2023, batas garis kemiskinan semakin meningkat dari 583.588 perkapita per bulan pada Maret 2021 menjadi 670.183 perkapita perbulan pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa beban penduduk miskin meningkat seiring dengan peningkatan pengeluaran rumah tangga di Pematangsiantar tahun 2023 dalam pemenuhan kebutuhan pokok minimumnya mencapai Rp. 670.183 perkapita perbulan, dengan rata-rata anggota rumah tangga sebesar 4 jiwa.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. P1 sebesar 1 menunjukkan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan tidak berubah dari tahun lalu, sedangkan Indeks keparahan kemiskinan (P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Menurunnya P2 sebesar 0,02 menunjukkan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin mengecil. Kemiskinan menjadi prioritas bersama seluruh pemerintahan daerah dan diperlukan upaya konkrit untuk penanganan masyarakat miskin di Kota Pematangsiantar.

Tabel 2.16  
Jumlah Penduduk Miskin Kota Pematangsiantar Tahun 201– 2023

Uraian	Tahun													
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) P0	27,5	26,4	26	26,6	25,4	25,83	24,88	25,34	22,01	22,18	21,33	21,06	20,53	18,96
% Penduduk Miskin	11,72	11,15	10,79	10,93	10,35	10,47	9,99	10,1	8,7	8,63	8,27*	8,52**	7,88	7,24
Indeks Kedalaman Kemiskinan P1	1,55	1,62	2,29	1,43	1,39	1,39	1,23	1,3	1,69	0,7	1,1	1,12	1	1
Indeks Keparahhan Kemiskinan P2	0,31	0,46	0,67	0,28	0,32	0,32	0,3	0,28	0,53	0,1	0,26	0,24	0,22	0,2

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar

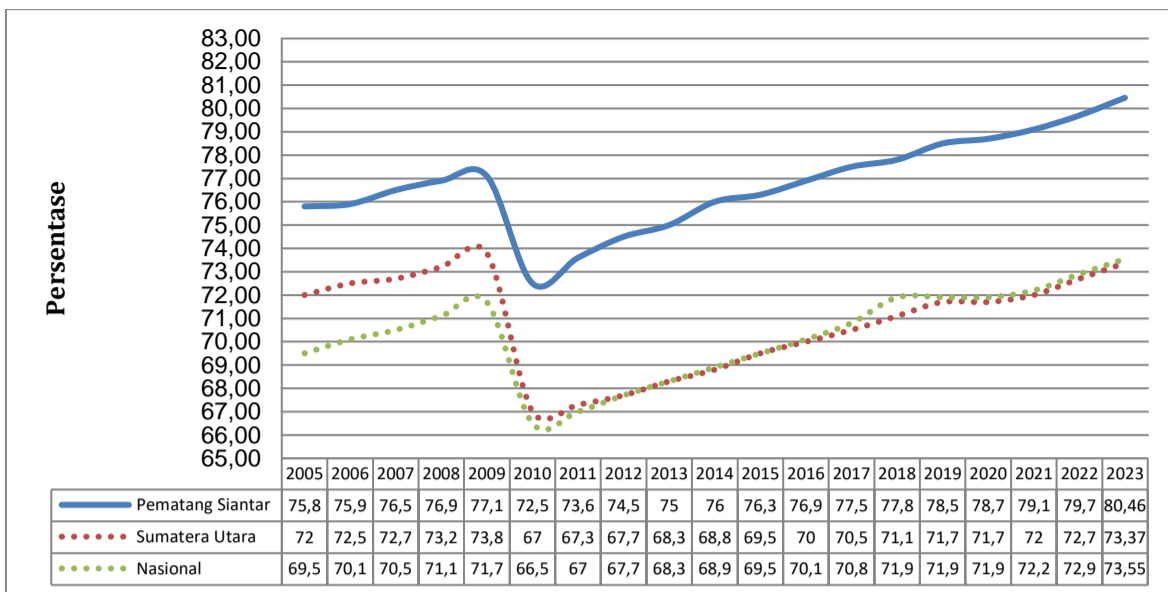
Penyebab menurunnya angka kemiskinan di Kota Pematangsiantar yakni membaiknya posisi ekonomi masyarakat bawah. Selain membaiknya lapangan pekerjaan, pemberian bantuan yang dilakukan pemerintah juga turut memperbaiki pengeluaran masyarakat. Untuk dapat menjaga agar penurunan angka kemiskinan ini terus berlanjut, perlu penguatan kebijakan diantaranya dengan peningkatan kerjasama daerah dan investasi dalam rangka menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan, penguatan UMKM, penguatan akses permodalan, pengembangan riset dan inovasi, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja terutama masyarakat miskin.

## 2.2.2 Kesejahteraan Sosial dan Budaya

### 2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sebagai indikator komposit, jika IPM disajikan tersendiri maka hanya dapat menunjukkan status pembangunan manusia suatu wilayah. Manfaat IPM dapat diperluas jika dilakukan perbandingan antar waktu dan antar wilayah. Menurut BPS, manfaat IPM antara lain: IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); IPM dapat menentukan peringkat/level pembangunan suatu wilayah/negara; IPM menjadi data strategis sebagai ukuran kinerja Pemerintah; IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan DAU. Kategori nilai poin IPM adalah Nilai < 60 Rendah,  $60 \leq \text{IPM} < 70$  Sedang,  $70 \leq \text{IPM} < 80$  Tinggi dan nilai  $\geq 80$  Sangat Tinggi. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, antara lain: (1) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life); (2) Pengetahuan (knowledge); (3) Standar hidup layak (decent standard of living).

Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Secara umum IPM Kota Pematangsiantar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan selalu lebih tinggi daripada pencapaian IPM secara Nasional maupun Sumatera Utara. Pada tahun 2005 IPM Kota Pematangsiantar mencapai 75,80 dan meningkat menjadi 77,18 di tahun 2009. Penerapan metode perhitungan yang baru diterapkan mulai tahun 2010 menyebabkan terjadinya koreksi pencapaian IPM Kota Pematangsiantar menjadi 72,52 dan terus meningkat menjadi 80,4 di tahun 2023, dengan capaian tersebut Kota Pematangsiantar berada pada status pembangunan manusia kategori “sangat tinggi” dan merupakan Capaian IPM nomor 2 tertinggi di Provinsi Sumatera Utara setelah Kota Medan.



Gambar 2.17  
IPM Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2005-2023  
Sumber : Badan Pusat Statistik

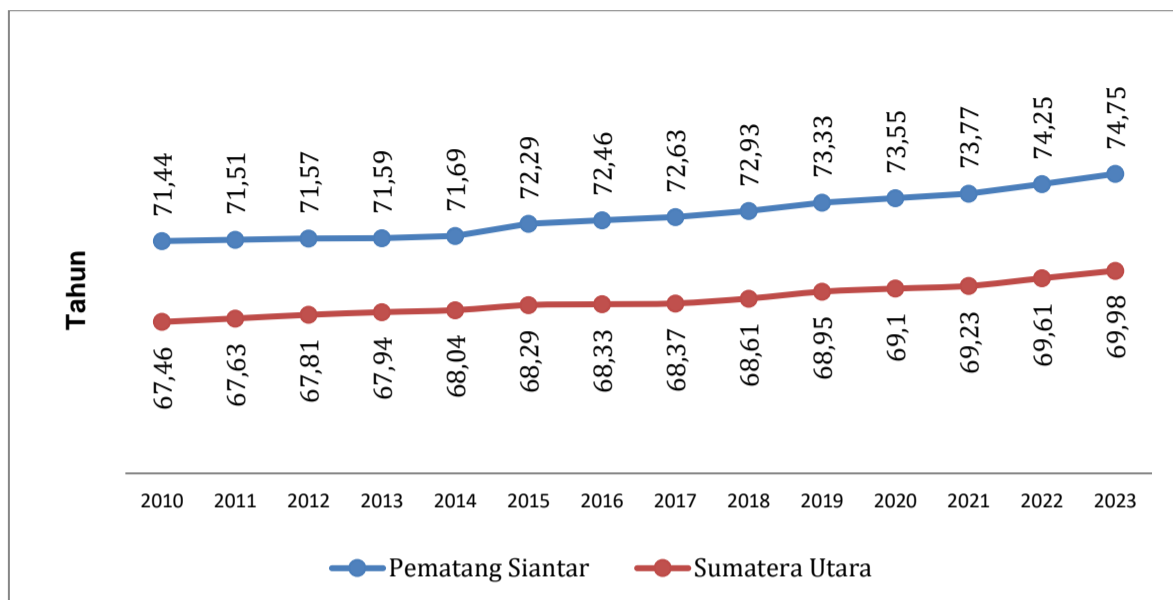
Kondisi IPM yang cukup tinggi menggambarkan kualitas hidup yang sangat baik di Kota Pematangsiantar, baik dari sisi pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu kekuatan Kota Pematangsiantar dalam menopang pembangunan yang dilakukan. Kedepannya target Kota Pematangsiantar adalah terus meningkatkan capaian IPM dengan arah kebijakan berupa peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan melalui penguatan perekonomian.

Perkembangan indeks pembentuk IPM Kota Pematangsiantar meliputi; angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita. Dari keempat indeks pembentuk IPM Kota Pematangsiantar yang menjadi tantangan untuk ditingkatkan adalah angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita. Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan angka harapan hidup adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan upaya promotif, preventif dan kuratif. Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah diantaranya peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan, pemberian beasiswa prestasi dan beasiswa masyarakat miskin, peningkatan pendidikan kesetaraan, perluasan akses pendidikan pada penyandang disabilitas. Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengeluaran perkapita melalui kebijakan kemudahan investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk menambah penghasilan disamping itu menjaga kebijakan fiskal daerah.

Perkembangan indeks pembentuk IPM Kota Pematangsiantar meliputi; angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita sebagai berikut:

### 2.2.2.2 Angka Harapan Hidup (AHH)

Perkembangan AHH Kota Pematangsiantar dari tahun ketahun mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan mencapai 74,75 tahun. Perkembangan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan AHH Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 69,98 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.21 :

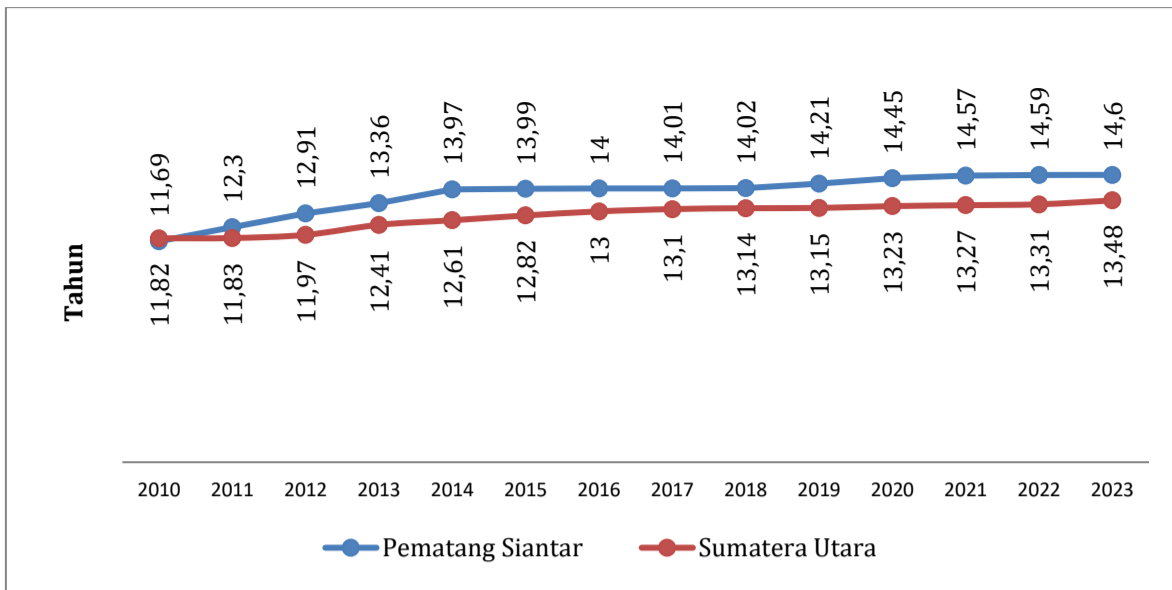


Gambar 2.18  
AHH Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2023  
Sumber : Badan Pusat Statistik

Angka Harapan Hidup Kota Pematangsiantar merupakan yang tertinggi di Provinsi Sumatera Utara dengan capaian Tahun 2023 sebesar 74,75 tahun meningkat dari 71,44 tahun pada 2010. Derajat kesehatan masyarakat yang cukup baik tergambar dari ketersediaan sarana kesehatan, tenaga medis dan kualitas lingkungan yang masih baik di Kota Pematangsiantar. Untuk memperkuat capaian Angka Harapan Hidup ini, maka fokus utama kedepannya adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Pematangsiantar. Kebersihan lingkungan juga menjadi perhatian.

### 2.2.2.3 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan Batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0.

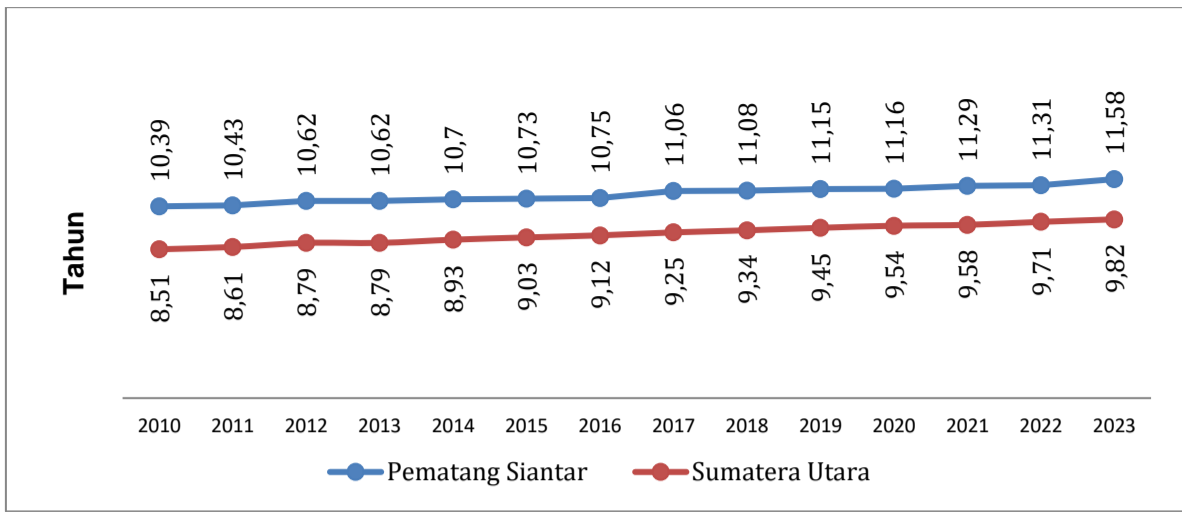


Gambar 2.19  
HLS di Kota Pematangsiantar dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik

HLS Kota Pematangsiantar berada di atas rata-rata Provinsi Sumatera Utara dengan capaian tahun 2023 sebesar 14,6 tahun meningkat dari tahun 2010 sebesar 11,69 tahun. HLS Kota Pematangsiantar menempati urutan kedua setelah Kota Medan. Capaian ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap sarana pendidikan sudah cukup memadai, sehingga kedepannya kebijakan pada Urusan Pendidikan adalah peningkatan kualitas pendidikan berupa peningkatan kualitas pendidik, kualitas kompetensi lulusan dan prestasi dunia pendidikan Kota Pematangsiantar.

#### 2.2.2.4 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP, Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Pematangsiantar Tahun 2010-2023 terus menunjukkan peningkatan. Rata-rata lama sekolah, pada tahun 2010 sebesar 10,39 tahun meningkat hingga 11,58 tahun pada tahun 2023.

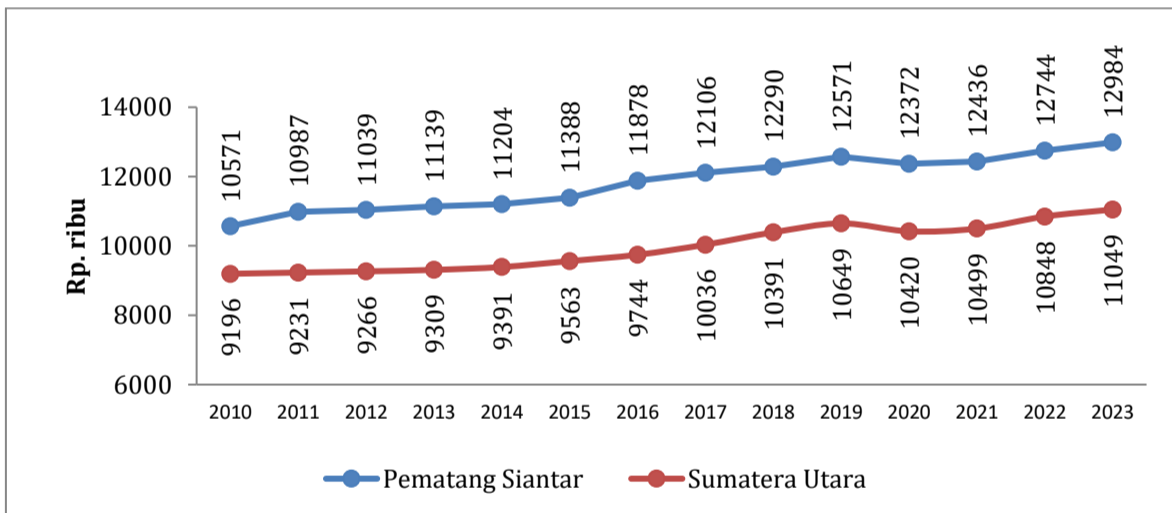


Gambar 2.20  
Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Pematangsiantar dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2023  
Sumber : Badan Pusat Statistik

Sama halnya dengan capaian HLS, RLS Kota Pematangsiantar juga menempati urutan kedua di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini kembali menunjukkan bahwa permasalahan akses pendidikan telah teratasi di Kota Pematangsiantar.

#### 2.2.2.5 Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan

Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa.

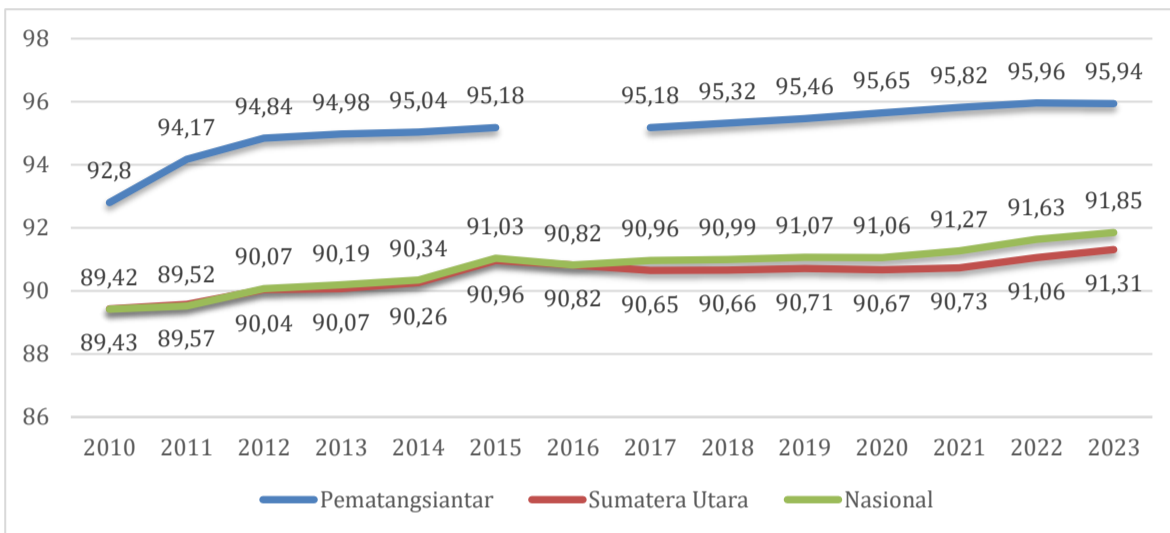


Gambar 2.21  
Pengeluaran Per Kapita Kota Pematangsiantar Tahun 2010-2023  
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar

Kemampuan ini berbeda antar wilayah, karena nilai tukar antar wilayah juga berbeda bergantung kepada harga riil pada masing-masing wilayah. Pada tahun 2010 tingkat daya beli masyarakat yang disesuaikan Kota Pematangsiantar sebesar 10,571 juta pertahun, meningkat menjadi sebesar 12,984 juta perkapita di tahun 2023. Pengeluaran perkapita masyarakat Kota Pematangsiantar masih berada di atas level Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat Kota Pematangsiantar masih cukup baik. Untuk mempertahankan kondisi ini maka kebijakan pengendalian harga dan pengembangan perekonomian menjadi hal yang prioritas.

2.2.2.6 Indeks Pembangunan Gender

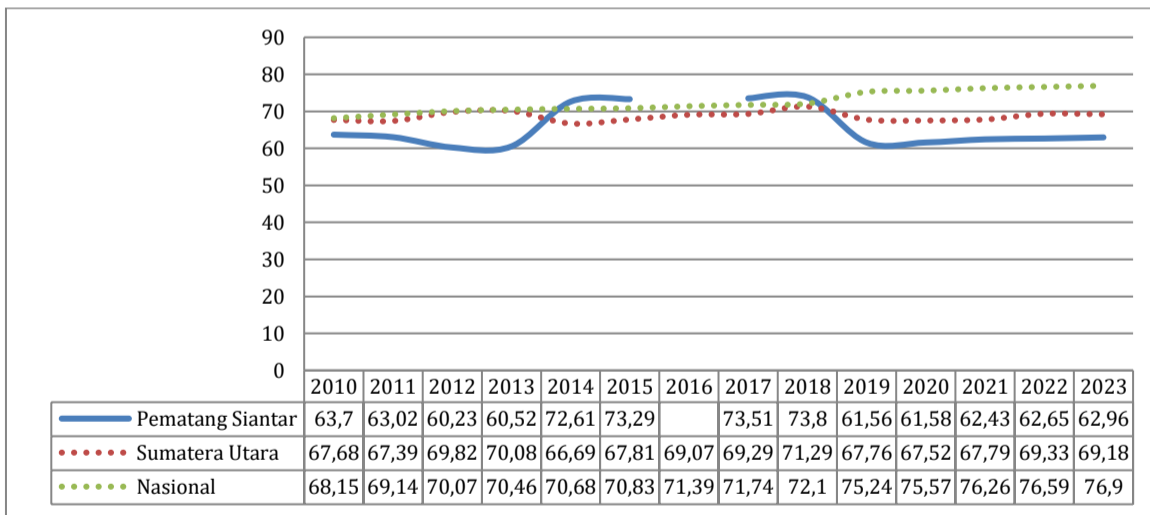
Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama seperti IPM, namun terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan tidak ada kesenjangan pembangunan apabila nilai IPG sama dengan IPM. Pada kurun waktu 2010-2023 capaian IPG Kota Pematangsiantar mengalami peningkatan. Pada tahun 2010-2023 IPG Kota Pematangsiantar selalu berada di atas capaian Provinsi Sumatera Utara dan Nasional



Gambar 2.22  
Indeks Pembangunan Gender Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2010-2023  
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

2.2.2.7 Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi.



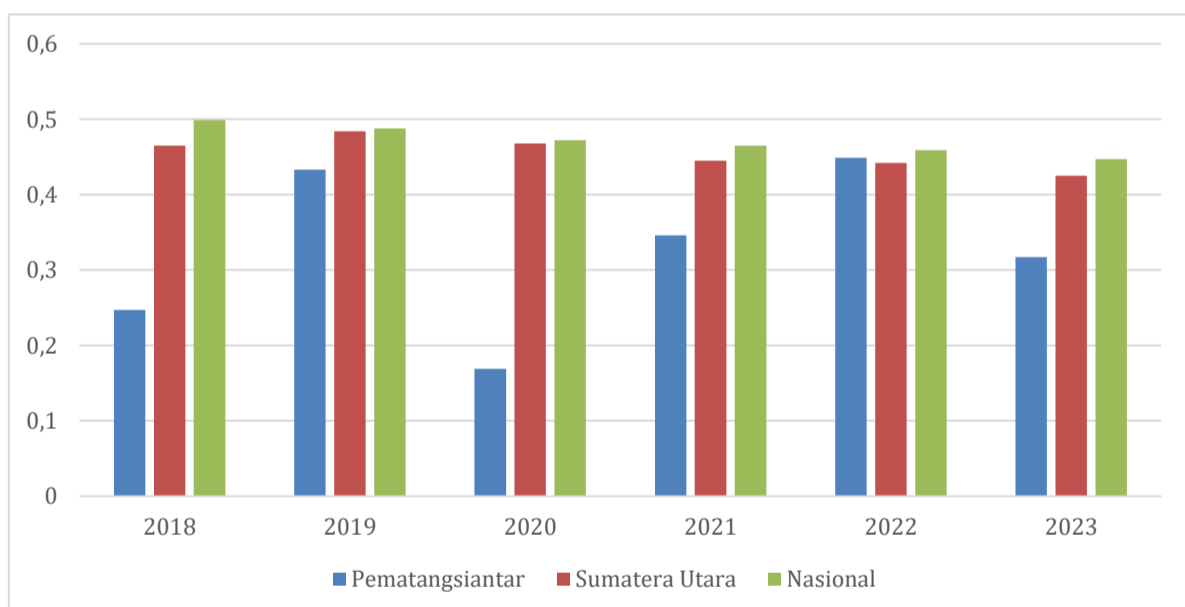
Gambar 2.23  
Indeks Pemberdayaan Gender Kota Pematangsiantar Tahun 2010-2022  
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar, diolah

Capaian IDG Kota Pematangsiantar dari tahun 2010 sampai 2013 mengalami tren menurun, lebih rendah dibandingkan capaian IDG Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Kurun waktu 2014 sampai 2018, capaian IDG Kota Pematangsiantar

berada diatas Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Namun sejak 2019 hingga 2023 capaian IDG Kota Pematangsiantar kembali berada dibawah Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Hal ini menunjukkan peran perempuan dalam pembangunan lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam kehidupan ekonomi dan politik.

#### 2.2.2.8 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender menunjukkan adanya potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi kesehatan, reproduksi, dan pasar tenaga kerja. IKG memiliki rentang nilai dari 0 hingga 1, dimana nilai IKG sebesar 0 mencerminkan adanya kesetaraan gender yang sempurna dan nilai IKG 1 mencerminkan adanya ketimpangan gender yang sempurna. Dari data BPS tersebut, dapat dilihat bahwa IKG Kota Pematangsiantar selama 5 tahun terakhir masih fluktuatif dan bahkan menunjukkan tren ketimpangan gender yang semakin besar dan kesetaraan yang semakin kecil. Indeks ketimpangan gender (IKG) menggambarkan kerugian akibat pembangunan yang tidak responsive gender ditinjau dari aspek kesehatan, pemberdayaan dan akses terhadap pasar kerja. Ketimpangan gender Kota Pematangsiantar sejak tahun 2018 hingga 2023 naik dan turun secara fluktuatif, pada tahun 2020 IKG berkurang sebesar 0,264 poin tetapi pada tahun berikutnya naik hingga mencapai angka 0,317 persen di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan ketimpangan gender yang tidak semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin menurun

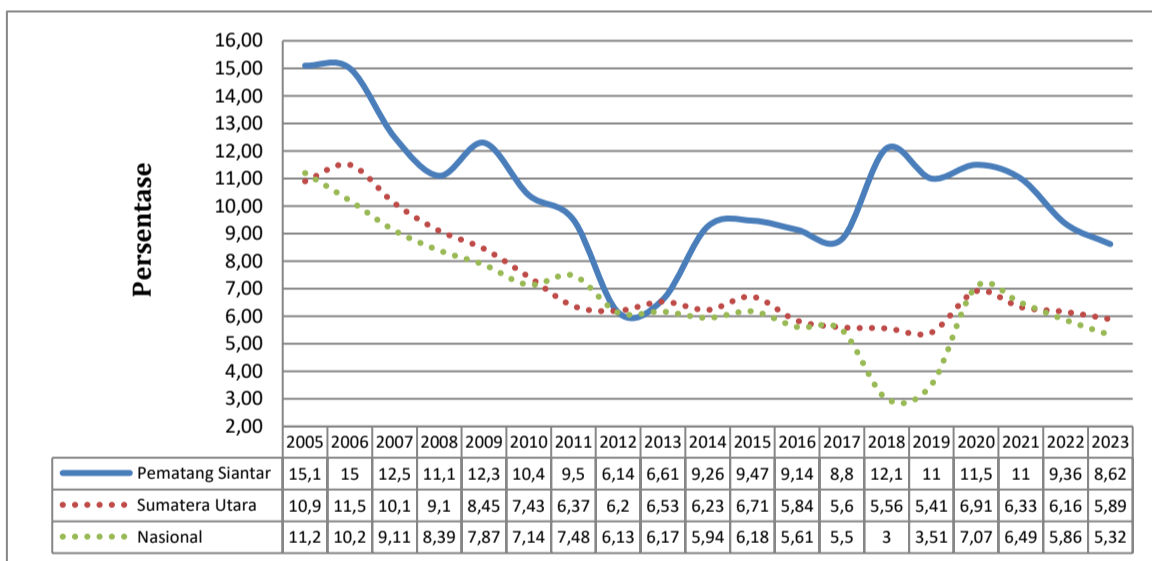


Gambar 2.24  
Indeks Ketimpangan Gender Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018-2023  
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Strategi responsif gender yang dapat dilakukan diantaranya peningkatan akses perempuan ke pasar kerja, pemberdayaan perempuan dalam politik, peningkatan keterampilan digital, perencanaan responsif gender, perluasan sasaran sosialisasi pengarusutamaan gender.

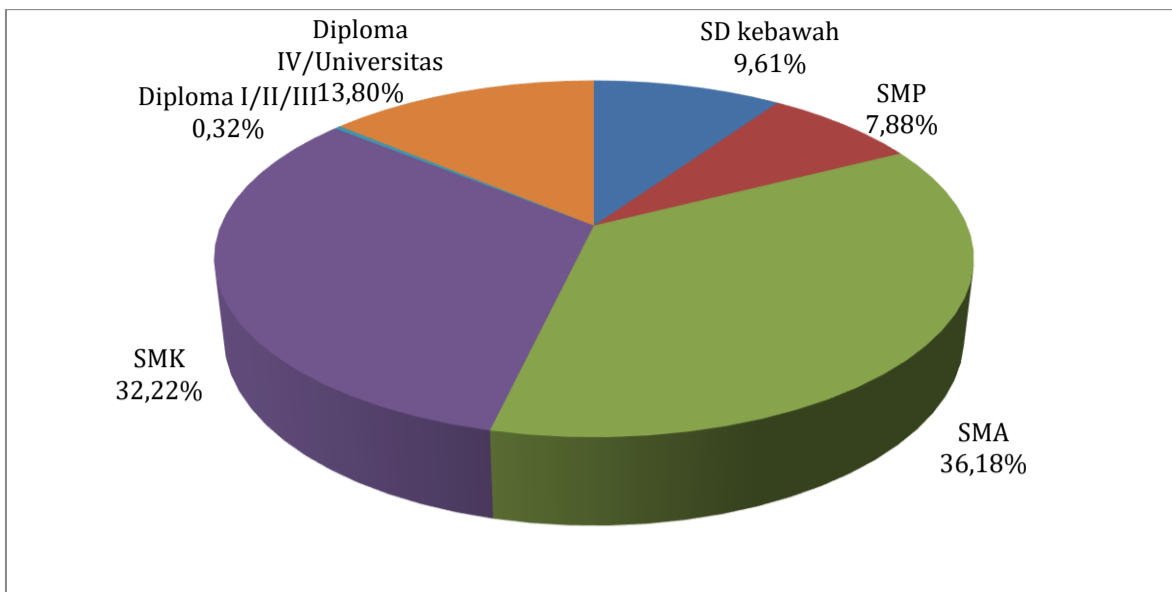
### 2.2.2.9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, angkatan kerja yang masuk pada pasar kerja mengalami peningkatan. Permasalahan akan muncul ketika jumlah para pencari kerja tidak seimbang dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia. Mengingat urgensi dari aspek ketenagakerjaan, di mana manfaat langsung dari pembangunan dapat diukur melalui tingginya kesempatan kerja, setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja. Dengan kata lain, salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru untuk menyerap angkatan kerja. Pengangguran terbuka dibedakan atas 2 (dua) kelompok yaitu; pengangguran yang pernah bekerja dan pengangguran yang tidak bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pematangsiantar menunjukkan trend yang berfluktuasi, dimana pada periode 2005-2012 mengalami penurunan yang kemudian pada periode 2013-2020 menunjukkan peningkatan sebelum pada 2 tahun terakhir (2021-2022) kembali menunjukkan penurunan. Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi di Kota Pematangsiantar terjadi pada tahun 2005 yaitu mencapai 15,12 persen, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka paling rendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 6,14 persen. Pada periode dari tahun 2005-2022, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pematangsiantar selalu berada lebih tinggi dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka secara Nasional maupun Sumatera Utara kecuali di tahun 2012.



Gambar 2.25  
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2023  
Sumber : Evaluasi RPJPD Kota Pematangsiantar 2005-2025

Ditinjau dari pendidikan yang ditamatkan, pengangguran di Kota Pematangsiantar tahun 2023 didominasi oleh lulusan SMA sebesar 36,18%, disusul SMK sebesar 32,22%. Pengangguran lulusan Diploma IV/Universitas sebesar 13,80%.



Gambar 2.26  
Komposisi Pengangguran Terbuka Kota Pematangsiantar berdasarkan Pendidikannya Tahun 2023  
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar, diolah

Jumlah Angkatan Kerja Periode Agustus 2023-Agustus 2024 sebesar 151.861 yang bekerja 139.719 dan yang tidak bekerja 12.142 orang, dengan distribusi berdasarkan pendidikan :

- Tamatan SD ke Bawah 1.229 orang ( 9,61 %)
- Tamatan SMP 1.008 orang ( 7,88%)
- Tamatan SMA 4.629 Orang ( 36,18%)
- Tamatan SMK sebanyak 4.122 orang ( 32,22%)
- Tamatan Diploma I/II/III 41 Orang ( 0,32%)
- Diploma IV,S1,S2,S3 1.766 orang (13,80%)

Berdasarkan data tersebut yang diperoleh dari BPS bahwa pengangguran tertinggi disumbang oleh Tamatan SMA sebesar 36,18 %, SMK sebesar 32,22% dan diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 13,80%. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi pengangguran di Kota Pematangsiantar pada kelompok pendidikan SMA dan SMK diarahkan pada pelatihan vokasi bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja, dan dunia Industri. Sedangkan kelompok tamatan diploma IV,S1, S2,S3 diarahkan pada pembekalan untuk menjadi wira usaha baru.

Beberapa rekomendasi untuk mengatasi pengangguran di Kota Pematangsiantar adalah :

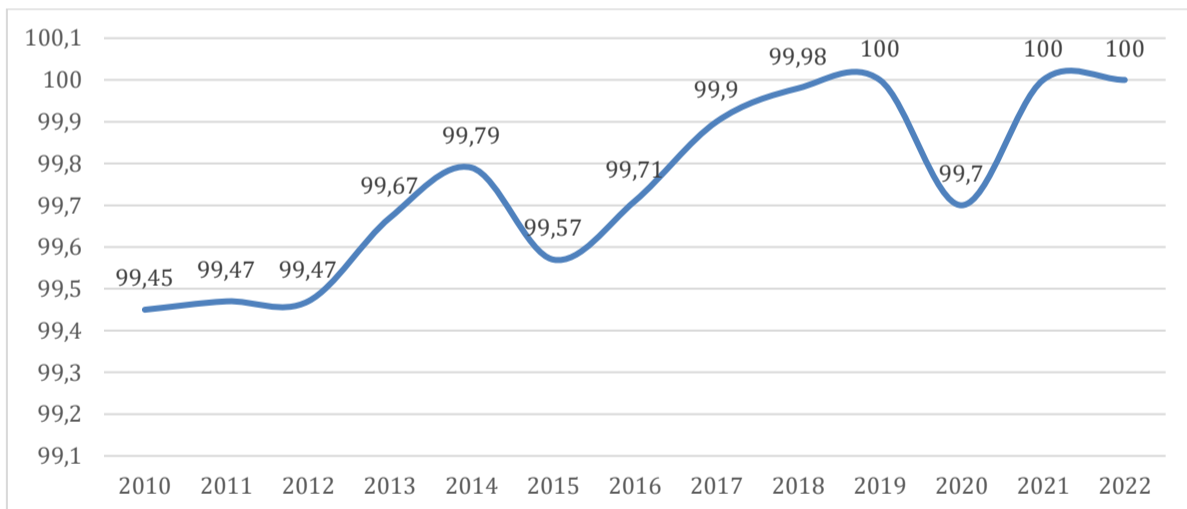
- Penguatan kurikulum pendidikan dan pelatihan serta fasilitas agar lulusannya memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- Peningkatan kemampuan tenaga kerja agar selaras dengan perkembangan teknologi.
- Mendorong kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk menciptakan program magang yang berkualitas.
- Memperluas cakupan program pelatihan dan magang.

- Mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan kewirausahaan sebagai sumber lapangan kerja baru.
- Penguatan UMKM agar dapat tumbuh dan menyerap tenaga kerja ditingkat lokal.
- Kebijakan ketenagakerjaan yang proaktif dan responsive terhadap perubahan ekonomi (kreatif) dan teknologi.
- Memperluas kesempatan kerja di sektor publik melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah.

#### 2.2.2.10 Angka Melek Huruf

Definisi Angka Melek Huruf adalah Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca atau ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka melek huruf dapat menjadi indikator melihat perkembangan pendidikan penduduk. Semakin tinggi angka melek huruf atau kecakapan baca tulis, maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas SDM. Penduduk yang bisa baca tulis diasumsikan memiliki kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap informasi baik itu lisan maupun tulisan.

Trend angka melek huruf di Kota Pematangsiantar kurun waktu Tahun 2010 hingga Tahun 2022 menunjukkan kenaikan. Tahun 2010 angka melek huruf Kota Pematangsiantar sebesar 99,45% naik menjadi mencapai 100% tahun 2022. Dari data ini dapat diambil kesimpulan bahwa penduduk Kota Pematangsiantar yang berusia 15 tahun ke atas telah dapat membaca semua.



Gambar 2.27  
 Grafik angka melek huruf Kota Pematangsiantar Tahun 2010 - 2022  
 Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar

#### 2.2.2.11 Seni Budaya

Pembangunan bidang seni budaya terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Kota Pematangsiantar yang memiliki slogan berbahasa Simalungun, "Sapangambe Manotok Hitei" yang berarti Saling Bergotong Royong Untuk Satu Tujuan hidup damai dengan beragam suku/etnis dari Simalungun, Batak Toba,

Suku Jawa dan sebagian kecil Tionghoa, Batak Karo dan suku lainnya. Sebagai pintu masuk ke objek pariwisata Danau Toba, dengan jarak tempuh kira-kira 46 Km, Kota Pematangsiantar perlu mengembangkan sarana dan prasana pendukung pariwisata.

Tabel 2.17  
Kondisi Seni dan Budaya Kota Pematangsiantar Tahun 2017-2023

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Kawasan Cagar Budaya	Keg	13	13	13	13	13	13	13
2	Jumlah Grup Kesenian	Kel	10	14	14	14	14	14	14
3	Jumlah Gedung Kesenian	Unit	1	1	1	1	1	1	1
4	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kali	0	4	4	4	4	4	4
5	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Unit	1	2	2	2	2	2	2
6	Jumlah Situs Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit	0	1	1	1	1	1	1
7	Jumlah Kawasan Cagar Budaya	Kawasa n	13	13	13	13	13	13	13
8	Jumlah Benda Cagar Budaya	Unit	13	13	13	13	13	13	13
9	Jumlah Peningkatan Sarpras Objek Wisata Sejarah	Unit	1	5	5	5	5	5	5

Sumber :Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar

Kota Pematangsiantar yang multi etnis memiliki kekuatan yang sangat besar dalam bidang Seni Budaya. Kawasan strategis sosial-budaya yang terdapat di Kota Pematangsiantar berdasarkan RTRW 2013-2032 adalah Kawasan Pusat Pemerintahan Kota di Kelurahan Timbang Galung yang berisikan bangunan-bangunan lama bekas kantor pemerintahan pada masa lalu, baik pada masa pemerintahan Belanda masa pendudukan Jepang dan masa kemerdekaan. Kawasan ini terdapat di Kawasan Jalan Merdeka, Jalan WR Supratman dan Jalan Jendral Sudirman. Pemeliharaan situs cagar budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar sudah dilakukan dari 13 kawasan cagar budaya. Sedangkan pagelaran festival seni dan budaya masih empat kali dilakukan dalam setahun. Namun ditinjau dari pelestarian dan pemanfaatan budaya masih perlu ditingkatkan karena tim ahli cagar budaya di Kota Pematangsiantar baru terbentuk. Tim ini nantinya bertugas menilai situs dan cagar budaya di Kota Pematangsiantar untuk didaftarkan dan dilestarikan. Setelah situs cagar budaya dilestarikan selanjutnya perlu ditingkatkan pemanfaatan budaya untuk dikemas menjadi objek wisata. Pengelolaan situs sejarah dan kebudayaan juga masih minim dilakukan oleh pemerintah dan

masyarakat yang ada di Kota Pematangsiantar. Dilihat dari kualitas dan kuantitas destinasi dan sarpras pendukung wisata dapat dilihat dari minimnya objek wisata alam, budaya, dan kuliner khas Kota Pematangsiantar yang menjadi daya tarik wisatawan. Disamping itu, sarana dan prasarana pendukung pariwisata juga masih kurang dilihat dari akses ke lokasi wisata yang masih belum baik, dukungan promosi juga yang masih minim. Objek wisata yang menjadi tujuan wisatawan dari luar kota masih bertumpu pada wisata Taman Hewan.

#### 2.2.2.12 Olahraga

Pemuda merupakan komponen bangsa yang sering dijadikan indikator keberhasilan suatu bangsa. Dalam struktur demografi Kota Pematangsiantar, kelompok usia muda merupakan bagian terbesar dari total penduduk. Itu berarti kurun waktu 5-10 tahun ke depan dimana terdapat lebih banyak kelompok penduduk usia muda (produktif) di banding usia tidak produktif. Selain prestasi, pembangunan olah raga juga memberikan andil yang sangat baik untuk kesehatan dan kebugaran yang selanjutnya akan meningkatkan produktifitas masyarakat.

Sarana dan prasarana olah raga milik Pemerintah Kota Pematangsiantar terdiri dari gedung dan lapangan olah raga tergolong minim, karena hanya terdiri dari satu gedung olah raga dan tiga lapangan olah raga yang kondisinya dalam tahap perbaikan. Pembinaan atlet, selama ini dilakukan oleh pihak organisasi olah raga bekerjasama dengan masyarakat.

Tabel 2.18  
Kondisi Keolahragaan Kota Pematangsiantar Tahun 2017 – 2023

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Jumlah Klub Olahraga	Klub	24	24	24	24	24	56	56
2	Jumlah Gedung Olahraga	Unit	1	1	1	1	1	1	1
3	Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda	Org	60	60	60	60	60	48	48
4	Jumlah Organisasi Olahraga	Org	14	14	14	14	16	4	4
5	Jumlah Lapangan Olahraga	Unit	3	3	3	3	3	4	4

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar

Fasilitas olahraga yang memadai dapat mendukung kesehatan dengan memberikan kesempatan untuk beraktifitas fisik. Memperbanyak fasilitas olah raga akan memberikan stimulus bagi masyarakat untuk berolah raga. Peningkatan sarana olahraga yang terintegrasi dengan rekreasi diarahkan tersedia pada setiap kecamatan. Selain itu memperbanyak even olah raga baik olah prestasi, olah raga rekreasi dan even olah raga pelajar.

### **2.3 Aspek Daya Saing Daerah**

Daya saing merupakan kemampuan kabupaten/kota untuk mengembangkan kemampuan ekonomi sosial wilayahnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Daya saing ditentukan oleh keunggulan bersaing suatu daerah dan sangat bergantung pada tingkat sumber daya relatif yang dimilikinya atau disebut juga keunggulan kompetitif. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menelaah aspek daya saing Kota Pematangsiantar, baik dari sisi kemampuan ekonomi daerah, spasial dan infrastruktur wilayah, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

#### **2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah**

Perekonomian Pematangsiantar tahun 2023 jika dibandingkan tahun sebelumnya tumbuh sebesar 4,22 persen. Berdasarkan pendekatan produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial publik sebesar 9,83 persen disusul konstruksi sebesar 7,04 persen. Berdasarkan pendekatan pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi rumah tangga (Lembaga non Profit yang Melayani rumah Tangga) mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 4,98 persen.

Tiga lapangan usaha yang memberi peran dominan terhadap PDRB Pematangsiantar dari sisi produksi pada tahun 2023 yaitu: Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 26,91 persen, Industri Pengolahan sebesar 19,30 persen dan Konstruksi sebesar 10,58 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) memberi kontribusi terbesar yaitu sebesar 57,92 persen, menyusul komponen PMTB sebesar 24,23 persen sebagai komponen dengan kontribusi terbesar kedua.

##### **2.3.1.1 Konsumsi Perkapita**

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga maka semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga perkapita, yaitu rata – rata pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Selain itu, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama sehingga pada

kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan.

Tabel 2.19  
Perkembangan Rata – Rata Pengeluaran Perkapita Kota Pematangsiantar  
Tahun 2017-2023

No.	Jenis Pengeluaran	Tahun (Rupiah)						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Non Makanan	481.028	673.506	566.979	663.572	613.364	650.150	663.572
2	Makanan	536.649	697.987	528.283	662.849	627.821	654.677	662.849
T O T A L		1.017.677	1.371.493	1.095.262	1.326.421	1.241.185	1,304.827	1.326.421

Sumber : BPS Kota Pematangsiantar Tahun 2023

Pengeluaran konsumsi perkapita masyarakat Kota Pematangsiantar pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dari Rp. 1.304.827 menjadi Rp. 1.326.421. Pengeluaran pada kelompok non makanan relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran pada kelompok makanan yang menunjukkan sebagian besar dari masyarakat Kota Pematangsiantar sudah tidak lagi memprioritaskan kebutuhan makanan (primer) namun sudah bergeser pada pemenuhan kebutuhan sekunder.

#### 2.3.1.2 Jumlah Hotel dan Restoran

Jumlah Hotel berbintang di Kota Pematangsiantar Tahun 2023 berjumlah 11 unit dan Hotel Non Bintang sebanyak 44 unit dengan jumlah kamar sebanyak 595 unit (Bintang) dan 839 unit (Non Bintang). Jumlah tempat tidur 845 buah (Bintang) dan 1073 buah (Non Bintang). Tingkat penghunian kamar hotel dan akomodasi lainnya relatif tetap jika dibandingkan data 2017 sebesar 34,62% dengan 34,88% pada Tahun 2022. Namun terjadi penurunan tingkat hunian kamar hotel pada tahun 2020 sampai 2021 akibat dari pandemi covid. Sektor pendukung lainnya adalah ketersediaan 5 jasa pelayanan wisata dan Restoran/Rumah Makan berjumlah 120 unit.

Tabel 2.20  
Tingkat Hunian Kamar Kota Pematangsiantar Tahun 2017-2022

Rata - Rata Inap (hari)	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tamu Nusantara (hari)	1,22	1,27	1,12	1,06	1,09	1,07	1,44
Tamu Mancanegara (hari)	4,48	2,10	2,10	12,43	0	0	0
Tingkat Penghunian Kamar (%)	34,62	33,73	35,43	32,57	32,44	34,88	34,00

Sumber : BPS Kota Pematangsiantar Tahun 2024

#### 2.3.1.3 Potensi Unggulan Daerah

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Pematangsiantar No. 500/580/IX/Wk Tahun 2017 menyatakan bahwa produk unggulan Kota Pematangsiantar adalah ;

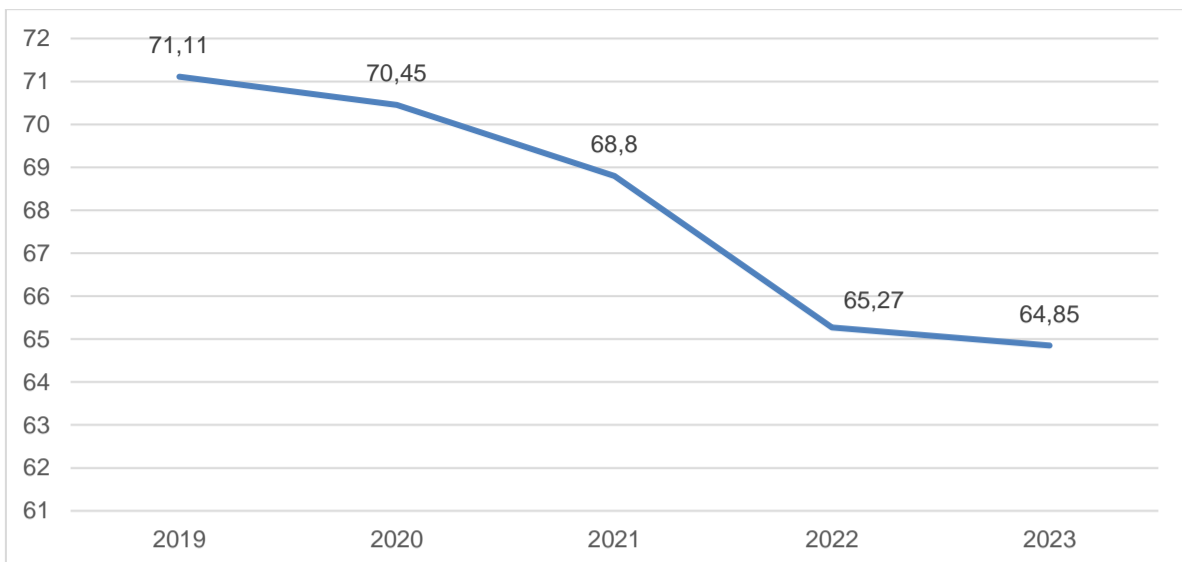
1. Tenun Ulos : Merupakan ciri khas Kota Pematangsiantar, perlu dijaga, dilestarikan dan ditingkatkan mutu produknya agar mampu berdaya saing di pasar lokal maupun nasional.
2. Batik Tenun Ulos : Sebuah inovasi baru dalam pembuatan tenun karena motifnya menunjukkan kearifan lokal Kota Pematangsiantar dan memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi salah satu produk batik tenun ulos unggulan yang berciri khas di Kota Pematangsiantar.
3. Roti Ketawa : Sebuah jajanan/oleh-oleh khas Kota Pematangsiantar yang sudah variatif dan inovatif yang berdaya saing dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
4. Bawang Goreng : Merupakan produk diversifikasi terbuka dan berdaya saing. Jenis produk antara lain bawang goreng original, bawang goreng ikan teri, bawang goreng ebi, dan bawang goreng jengkol.
5. Keripik Opak : Bahan bakunya mudah di dapat dan sangat digemari masyarakat serta menjadi makanan khas Kota Pematangsiantar.

Kelima produk unggulan diatas masih menggunakan teknologi tradisional/manual. Modal usaha yang digunakan masih bersifat modal pribadi dan sebagian berasal dari bantuan pemerintah maupun pinjaman bank. Kontribusi industri kecil yang menghasilkan produk tersebut masih tergolong kecil terhadap PAD Kota Pematangsiantar. Saat ini dukungan Pemerintah terhadap produk unggulan tersebut adalah pembinaan. Pangsa pasar produk unggulan tersebut masih terbatas di dalam negeri.

### 2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

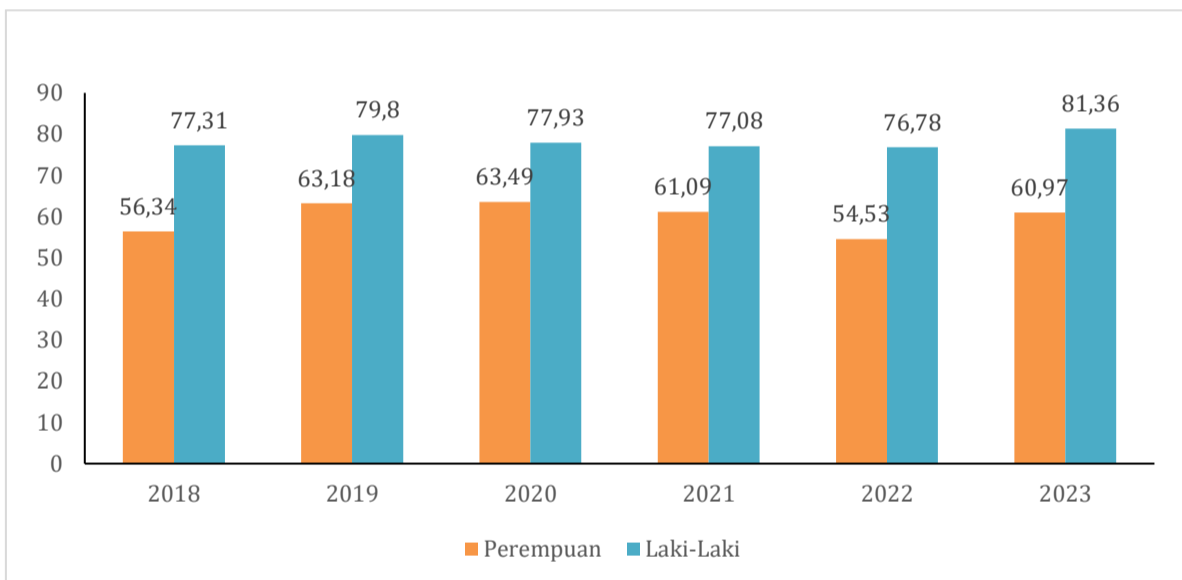
#### 2.3.2.1 Tingkat Pasrtisipasi Angkatan Kerja

Jumlah angkatan kerja di Kota Pematangsiantar dari Tahun 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan tren yang semakin menurun, namun di tahun 2023 jumlah angkatan kerja sebesar 148.460 orang meningkat bila dibandingkan tahun 2022 sebesar 130.588 orang. Beberapa hal penyebab menurunnya TPAK karena beberapa faktor yang kompleks dan beragam, seperti penambahan jumlah penduduk, jumlah penduduk yang masuk dalam usia tidak produktif dan terjadi perubahan struktur konomi, seperti alih profesi yang dulunya bekerja di sektor pertanian pindah untuk bekerja di sektor perdagangan sedangkan hal tersebut memerlukan keterampilan yang berbeda.



Gambar 2.28  
Kondisi TPAK Kota Pematangsiantar 2019-2023  
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar

Sedangkan untuk perbandingan TPAK antara laki-laki dan perempuan di Kota Pematangsiantar masih di dominasi oleh laki laki sebesar 81,36% sedangkan untuk perempuan hanya sebesar 60,97%



Gambar 2.29  
Rasio TPAK Antara Laki-Laki dan Perempuan Kota Pematangsiantar 2018-2023  
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar

### 2.3.2.2 Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan syarat utama yang harus ditempuh seseorang untuk dapat memasuki pasar kerja. Pendidikan yang diperoleh baik dari sekolah maupun dari luar sekolah akan memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan sehingga akan memudahkan penempatan seorang pencari kerja sesuai dengan kecakapannya. Tingkat pendidikan yang dimiliki seorang pencari kerja akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan dalam menghadapi suatu permasalahan yang timbul khususnya dalam masalah pekerjaan. Orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya lebih cepat mengatasi masalah yang dihadapi, daripada orang yang tingkat pendidikannya lebih rendah, Pendidikan mempunyai

fungsi untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja agar dapat lebih produktif, Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja karena pendidikan baik formal maupun non formal seseorang diharapkan memiliki kemampuan untuk lebih memahami dalam mengadaptasi perubahan-perubahan di lingkungan kerja dengan lebih cepat.

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Tahun 2023 penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan menengah atas, yaitu SMA/ MA/ Paket C sebanyak 31,51 % dan SMK/ MAK sebanyak 20,89%. Tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas cukup besar yaitu 26,02 %.

Tabel 2.21  
Literasi dan numerasi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan asesmen nasional Kota Pematangsiantar

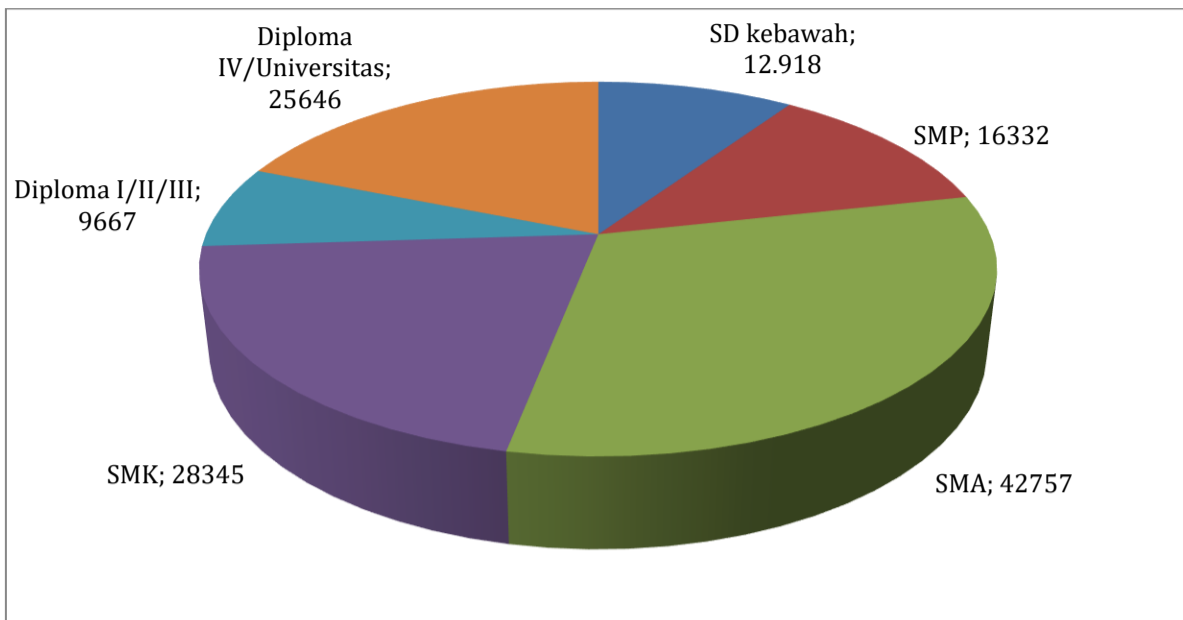
No.	Indikator	Satuan	Realisasi						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	1,84
2	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1,79	1,68
3	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1,88	1,91
4	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1,75	1,75

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar

Tingkat kompetensi literasi dan numerasi pada jenjang pendidikan SD dan SMP di Kota Pematangsiantar masih berada di bawah standar kompetensi minimum atau baru mencapai kompetensi minimum. Untuk meningkatkan kompetensi literasi, Pemerintah Kota Pematangsiantar telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 30 Tahun 2024 tentang Gerakan Literasi. Kebijakan ini diarahkan kepada satuan pendidikan dan masyarakat, dengan fasilitasi dari Pemerintah Daerah, pihak swasta, serta lembaga dan organisasi masyarakat.

Gerakan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip literasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini mencakup pengembangan perpustakaan di kelurahan, pembentukan dan pengelolaan taman bacaan

masyarakat, pojok baca, serta penyediaan sarana dan prasarana lain yang mendukung kegiatan literasi.



Gambar 2. 30  
Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Pematangsiantar yang Bekerja Tahun 2023  
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar Tahun 2024

Tantangan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Pematangsiantar antara lain, kualitas pendidikan yang kurang merata akibat kualitas guru yang tidak merata, kurikulum yang tidak mengikuti perubahan teknologi sehingga kurang relevan dengan dunia kerja saat ini. kecenderungan orang tua menyerahkan urusan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak sekolah, dalam pembentukan karakter anak, orang tua saat ini cenderung tidak terima apabila anaknya didisiplinkan oleh pihak sekolah, sehingga ada pembiaran dari pihak sekolah terhadap anak didik yang berperilaku buruk.

Untuk mengatasi gap keterampilan pada pencari kerja di Kota Pematangsiantar, dilakukan pelatihan keterampilan potensial yang memungkinkan untuk berkembang di Kota Pematangsiantar. Pelatihan keterampilan ini dilakukan dengan menggandeng lembaga pelathan pemerintah maupun swasta yang ada di Kota Pematangsiantar.

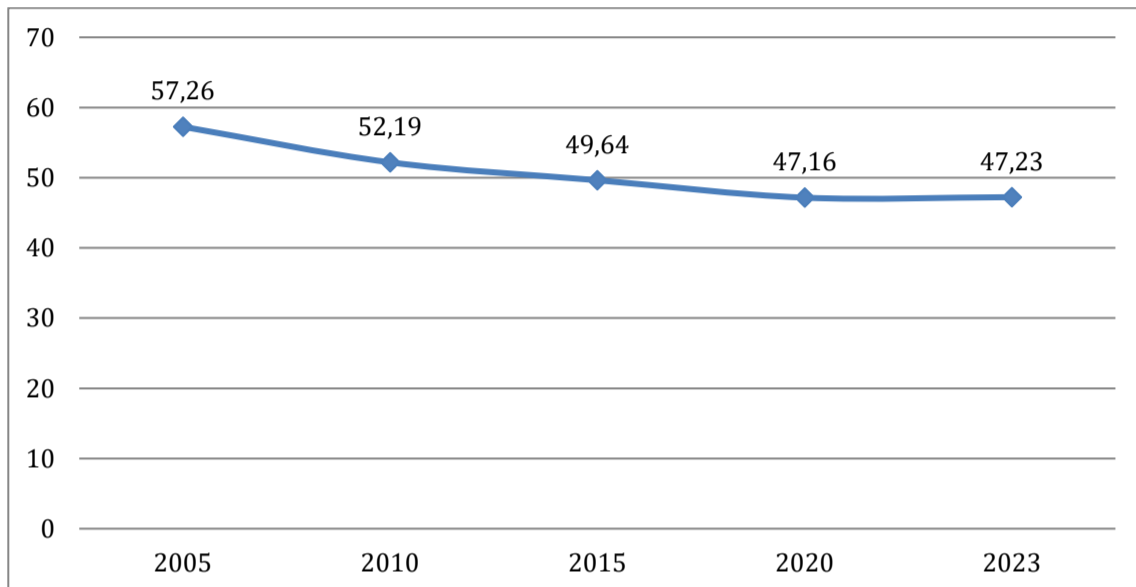
### 2.3.2.3 Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif dengan banyaknya penduduk usia produktif. Rasio ketergantungan menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif.

Kelompok usia produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 15-64 tahun, yang dianggap dapat bekerja dan berkontribusi secara ekonomi maupun sosial. Kelompok non produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 0 - 14 tahun dan 65 tahun ke atas, yang dianggap belum mampu

atau sudah tidak mampu bekerja sehingga tidak berkontribusi secara ekonomi maupun sosial.

Semakin besar rasio ketergantungan berarti semakin besar beban tanggungan bagi kelompok produktif. Angka ketergantungan dianggap rendah apabila kurang dari 30, sedang apabila antara 30-40 dan tinggi apabila lebih dari 40. Semakin rendah angka ketergantungan, mengindikasikan semakin baik kondisi perekonomian karena semakin rendah kelompok non produktif yang ditanggung secara ekonomi oleh kelompok produktif. Tanggungan dapat berbentuk jaminan sosial, bantuan pensiun dan fasilitas lain yang diperoleh kelompok non produktif.



Gambar 2.31  
Rasio ketergantungan Kota Pematangsiantar 2005-2023  
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tidak produktif. Hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa Kota Pematangsiantar dalam rasio ketergantungan dengan kategori tinggi, namun rasio ketergantungan di Kota Pematangsiantar dari tahun 2005-2022 menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2005 rasio ketergantungan Kota Pematangsiantar sebesar 57,26 menurun menjadi 47,23 pada Tahun 2023. yang menunjukkan bahwa 100 orang penduduk usia produktif di Kota Pematangsiantar harus menanggung 47,23 orang penduduk yang non produktif. Perubahan struktur umur penduduk usia kerja akan semakin meningkat dan hal ini tentu mendorong perekonomian daerah.

### 2.3.3 Aspek Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Ketersediaan fasilitas infrastruktur dalam satu wilayah kota sangat penting dan diperlukan bagi daya tarik dan perkembangan gerak perekonomian daerah tersebut. Pembangunan infrastruktur yang memadai dan terintegrasi merupakan salah satu faktor kunci dalam memperkuat daya saing ekonomi suatu wilayah.

Kota Pematangsiantar, dengan kondisi geografis yang strategis dan potensi pertumbuhannya yang relatif stabil, memiliki kesempatan untuk meningkatkan daya saingnya melalui pengembangan infrastruktur, terutama pada kawasan strategis seperti Tanjung Pinggir.

Kawasan ini, yang direncanakan sebagai kawasan industri berdasarkan Permen ATR/BPN No. 4 Tahun 2024, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat logistik regional. Untuk itu, pengembangan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, ketersediaan lahan, air bersih, dan listrik sangat penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Infrastruktur yang baik dan terintegrasi di Kota Pematangsiantar sangat mendukung peningkatan daya saing ekonomi daerah, khususnya dalam pengembangan kawasan strategis seperti Tanjung Pinggir. Aksesibilitas jalan utama yang memadai, ketersediaan lahan yang terencana untuk pengembangan kawasan industri, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih dan listrik, akan memperkuat posisi kawasan Tanjung Pinggir sebagai pusat logistik regional. Pengembangan kawasan ini sejalan dengan rencana tata ruang wilayah yang mencakup kawasan industri yang mampu mendukung sektor-sektor penting, seperti manufaktur dan distribusi barang, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung perekonomian kota secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan potensi infrastruktur yang ada serta memperhatikan rencana pengembangan yang tercantum dalam RTRW, kawasan Tanjung Pinggir akan menjadi pusat logistik yang efisien dan mampu meningkatkan daya saing Kota Pematangsiantar dalam perdagangan dan distribusi barang. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berikut fasilitas daerah yang dapat diharapkan dapat meningkatkan aktifitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pematangsiantar.

#### 2.3.3.1 Aksesibilitas

Luas Daerah Kota Pematangsiantar berdasarkan Permendagri No 119 tahun 2022 adalah 7.591,86 Km<sup>2</sup> dengan wilayah administratif terdiri dari 8 kecamatan dan 53 kelurahan. Untuk menghubungkan wilayah – wilayah tersebut telah tersedia jalan dengan total panjang jalan 580,548 Km dari jumlah tersebut sebagian besar jenis permukaannya aspal. Kondisi jalan di Kota Pematangsiantar Tahun 2023 dalam kondisi baik/mantap sebesar 91,35%, jalan dengan kondisi rusak ringan 4,78% dan rusak berat 3,87%.

Tabel 2.22  
Kondisi Jalan di Kota Pematangsiantar

NO	KONDISI JALAN	PERSENTASE (%)	PANJANG JALAN (KM)
1	BAIK	85,23	494,801
2	SEDANG	6,12	35,530
3	RUSAK RINGAN (RR)	4,78	27,750
4	RUSAK BERAT (RB)	3,87	22,467
5	TIDAK DIRINCI	-	-
JUMLAH		100	100

Sumber : Data PUTR Kota Pematangsiantar Tahun 2023

Aksesibilitas di Kota Pematangsiantar masih menghadapi tantangan terkait penyelesaian jalan lingkar yang hingga saat ini belum tuntas. Kondisi ini berdampak pada bercampurnya arus lalu lintas kendaraan lokal dan regional yang melintasi wilayah kota, sehingga mengakibatkan peningkatan kemacetan, penurunan efisiensi transportasi, serta potensi gangguan terhadap aktivitas perkotaan. Progres pembangunan jalan lingkar saat ini masih sekitar 24% pengerjaan yakni masih pada tahap pembebasan lahan, pengerjaan perkerasan jalan, serta pembangunan jembatan di beberapa titik. Percepatan penyelesaian jalan lingkar sangat penting untuk mendukung kelancaran mobilitas, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mengurangi beban lalu lintas di jalan utama Kota Pematangsiantar.

#### 2.3.3.2 Ketersediaan Lahan

Kota Pematangsiantar memiliki lokasi yang strategis dan berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan penduduk di Kota Pematangsiantar yang mencapai rata-rata 0,13% dalam kurun waktu tahun 2013-2023 (BPS Kota Pematangsiantar 2023). Pertumbuhan penduduk menyebabkan kebutuhan terhadap lahan meningkat, sementara ketersediaan lahan tidak berubah (tetap) dan memicu perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan seringkali terjadi pada lahan pertanian menjadi lahan terbangun dan berpengaruh pada peningkatan kebutuhan air bersih yang mengarah pada peningkatan limbah dan perubahan kualitas air sungai.

Rencana tata ruang wilayah yang dimiliki setiap kabupaten dan kota pada dasarnya berfungsi sebagai alat pengendali perubahan tata guna lahan. Namun dalam perjalanannya, terjadi alih fungsi lahan. Proses alih fungsi lahan merupakan suatu bentuk konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan transformasi perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang berkembang. Perkembangan yang dimaksud tercermin dari adanya :

- 1) Pertumbuhan aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam akibat meningkatnya permintaan kebutuhan terhadap penggunaan lahan sebagai dampak dari peningkatan jumlah penduduk dan pendapatan perkapita.
- 2) Adanya pergeseran kontribusi sektor-sektor pembangunan dari sector -sektor primer (sektor-sektor pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam) ke aktivitas sektor-sektor sekunder (industri manufaktur dan jasa).

Di wilayah Kota Pematangsiantar, Kawasan Tanjung Pinggir seluas 573 Ha ini merupakan kawasan yang direncanakan sebagai kawasan industri pada rencana pola ruang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar Tahun 2012 – 2032. Kawasan ini memiliki nilai strategis karena memiliki prospek pengembangan yang sangat besar untuk ke depannya, disamping cukup luas, kawasan ini juga masih merupakan lahan eks-HGU PTPN III di Kecamatan Siantar Martoba dan dekat dengan Terminal Tanjung Pinggir.

### 2.3.3.3 Ketersediaan Air Bersih

Wilayah Kota Pematangsiantar dialiri oleh beberapa sungai dimana sungai – sungai tersebut menjadi sumber air bagi penduduk guna memenuhi kehidupan sehari – hari antara lain sebagai sumber air baku, irigasi pertanian, MCK maupun kebutuhan lainnya. Penyediaan dan pengelolaan air bersih di Kota Pematangsiantar dilaksanakan oleh Perumda Tirta Uli Kota Pematangsiantar. Sumber air yang digunakan oleh Perumda Tirta Uli yang melayani Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun yang berbatasan dengan Kota adalah mata air dan sumur bor. Sumber air yang digunakan oleh Perumda Tirta Uli meliputi 12 lokasi mata air dan 18 lokasi sumur bor. Wilayah lokasi sumber mata air Perumda Tirta Uli sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Simalungun. Adapun sumber air yang dikelola oleh Perumda Tirta Uli dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 23  
Tabel Sumber Air Baku Perumda Tirta Uli Kota Pematangsiantar

NO	LOKASI SUMBER AIR	TAHUN PEMBUATAN	KAPASITAS SUMBER (Liter / Detik)	SISTEM PENGALIRAN
1	Mata Air Mual Goit	1977	275,00	Gravitasi
2	Mata Air Habonaran	1990	248,00	Gravitasi
3	Mata Air Nagahuta I & II	1953	33,88	Gravitasi
4	Mata Air Nagahuta III & IV	1971 & 1974	38,20	Gravitasi
5	Mata Air Pancur Lima	1959	33,00	Gravitasi
6	Mata Air Silomangi	2005	37,00	Gravitasi
7	Mata Air Bah Singkam		62,00	Gravitasi
8	Mata Air Nagahuta Batu V		35,40	Gravitasi
9	Mata Air Aek Nauli		75,00	Gravitasi
10	Mata Air Simarito	1916	27,10	Perpompaan
11	Mata Air Bah Rahu	2003	7,20	Perpompaan
12	Mata Air Simarimbun Dolok	1997	5,20	Perpompaan
13	Sumur Bor Jalan Raya	1959	16,00	Perpompaan
14	Sumur Bor Sabang Merauke	1940	11,00	Perpompaan (Tidak Aktif)
15	Sumur Bor PT. Anggi	1953	15,00	Perpompaan
16	Sumur Bor Jl. Kertas	1986	10,50	Perpompaan
17	Sumur Bor Jalan Asahan	1983	10,00	Perpompaan
18	Sumur Bor Nomensen	2004	5,00	Perpompaan
19	Sumur Bor Jl. Bakung	2004	6,50	Perpompaan
20	Sumur Bor Puskesmas Sigulang – gulang	2010	3,40	Perpompaan
21	Sumur Bor Komp Komp SMP I	2010	5,50	Perpompaan
22	Sumur Bor Perwira	2010	5,50	Perpompaan (Tidak Aktif)
23	Sumur Bor Jl. Handayani	2011	7,00	
24	Sumur Bor Mawar	2011	8,00	

NO	LOKASI SUMBER AIR	TAHUN PEMBUATAN	KAPASITAS SUMBER (Liter / Detik)	SISTEM PENGALIRAN
25	Sumur Bor Nagahuta V	2012	10,00	
26	Sumur Bor Kasper	2012	8,00	
27	Sumur Bor R. Sembiring	2012	8,00	
28	Sumur Bor Lau Cimba		6,00	
29	Sumur Bor Batu Permata		6,00	
30	Sumur Bor GKPS		5,00	

Sumber : Perumda Tirta Uli 2020

Sedangkan gambaran umum kondisi eksisting mata air Perumda Tirta Uli Kota Pematangsiantar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 24

Gambaran Kondisi Eksisting Mata Air Perumda Tirta Uli Kota Pematangsiantar

NO	MATA AIR	JENIS	DESAIN	TERPASANG	PRODUKSI	Efisiensi	KONDISI SAAT INI
			(Lt/dtk)	(Lt/dtk)	Riil (Lt/dtk)	(%)	
1	Mual Goit	Gravitasi	275,00	178,68	178,68	65%	Delapan mata air ini telah dimanfaatkan secara maksimal dan tidak terdapat limpasan/sisa/terbuang dari kapasitas yang telah terpasang. Ketidaksiapan kapasitas terpasang dengan kapasitas desain disebabkan sumber air baku memang tidak mencapai target yang diharapkan. Disebagian lokasi seperti di Nagahuta keterisian pipa transmisi cenderung setengah dari diameter pipa transmisi. Oleh karena itu perlu konservasi wilayah tangkapan mata air bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk
2	Habonaron	Gravitasi	248,00	176,71	176,71	71%	
3	Naga Huta I & II	Gravitasi	33,88	21,29	21,29	63%	
4	Nagahuta III & IV	Gravitasi	38,20	25,60	25,60	67%	
5	Pancur Lima	Gravitasi	33,00	19,60	19,60	59%	
6	Silumangi	Gravitasi	37,00	26,07	26,07	70%	
7	Bah Singkam	Gravitasi	62,00	56,07	56,07	90%	
8	Nagahuta Bt. 5	Gravitasi	35,40	30,77	30,77	87%	

NO	MATA AIR	JENIS	DESAIN	TERPASANG	PRODUKSI	Efisiensi	KONDISI SAAT INI
			(Lt/dtk)	(Lt/dtk)	Riil (Lt/dtk)	(%)	
							menjamin keberlangsungan debit mata air.
9	Aek Nauli	Gravitasi	75,00	66,46	66,46	89%	Bangunan penangkap mata air Aek Nauli - I telah beroperasi secara maksimal untuk mengalirkan air ke wilayah pelayanan. Namun air permukaan yang belum dimanfaatkan masih cukup besar dan potensial untuk dikembangkan. Diperkirakan Aek Nauli - 2 berpotensi untuk dikembangkan sebesar 50 - 100 lt/det.

Sumber :RISPAM Kota Pematangsiantar Tahun 2021

Dengan kondisi eksisting diatas, Perumda Tirta Uli Kota Pematangsiantar melayani sebanyak 57.688 pelanggan. Dari jumlah tersebut 55.277 adalah pelanggan rumah tangga, 1.276 adalah pelanggan industry dan niaga, sebanyak 565 adalah pelanggan tempat ibadah/sosial dan sebanyak 570 adalah pelanggan dari instansi. Rincian pelanggan dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.25

Jumlah Pelanggan Perumda Tirta Uli Pematangsiantar s.d Bulan Oktober 2023

NO	JENIS PELANGGAN	JUMLAH PELANGGAN	KELOMPOK PELANGGAN
1	Industri Besar (IB)	43	Industri dan Niaga
2	Industri Kecil (IK)	9	
3	Industri Sedang (IS)	25	
4	Niaga Besar (NB)	595	
5	Niaga Sedang (NS)	545	
6	Niaga Kecil (NK)	59	
	JUMLAH	1.276	
7	Instansi Pem (NN)	452	Instansi Pemerintah
8	Instansi Pem 1 (NN1)	118	
	JUMLAH	570	
9	R. Tangga 1 (RT 1)	63	Rumah Tangga
10	R. Tangga 2 (RT 2)	7.927	
11	R. Tangga 3 (RT 3)	37.069	
12	R. Tangga 4 (RT 4)	4.207	
13	R. Tangga 5 (RT 5)	866	
14	R. Tangga 6 (RT 6)	24	

NO	JENIS PELANGGAN	JUMLAH PELANGGAN	KELOMPOK PELANGGAN
15	RT. Usaha 1 (RU1)	2.787	
16	RT. Usaha 2 (RU2)	2.334	
	JUMLAH	55.277	
17	Sosial Khusus	34	Sosial
18	Sosial Umum 1 (SU1)	43	
19	Sosial Umum 2 (SU2)	488	
	JUMLAH	565	
	TOTAL	57.688	

Sumber : Data Perumda Tirta Uli Kota Pematangsiantar Tahun 2023

Rencana Pengembangan SPAM Air Minum Perumda Tirta Uli Kota Pematangsiantar didasarkan pada penanganan masalah yang ada dalam kerangka pemenuhan kebutuhan air minum kota. Dengan skema tahapan didasarkan pada :

1. Optimalisasi kapasitas dan jaringan pipa eksisting
2. Pengurangan atau penurunan kebocoran air atau Air Tak Berekening (ATR)
3. Pembangunan baru (peningkatan kapasitas produksi, perluasan system, dan pembangunan system baru)

Tahapan ini akan dilaksanakan per 5 (lima) tahunan dimulai dari tahun 2021 hingga 2040 dengan kegiatan mencakup ketiga hal diatas dengan tetap memperhatikan kondisi eksisting saat ini, kebutuhan masyarakat, tingkat social ekonomi masyarakat, kebutuhan pengembangan SPAM, kemampuan Pemerintah Daerah, kemampuan Perumda Tirta Uli, kemampuan Pemerintah Provinsi dan kemampuan Pemerintah Pusat. Dengan rencana tahapan tersebut, diharapkan Perumda Tirta Uli tetap dapat memenuhi kebutuhan air minum di Kota Pematangsiantar.

Hingga saat ini, capaian akses air minum Kota Pematangsiantar sudah pada kondisi yang sangat baik yakni 99,72% pada Tahun 2023. Namun terdapat tantangan untuk meningkatkan kualitas air minum ini menjadi air minum yang aman. Capaian air minum aman di Kota Pematangsiantar pada tahun 2023 yang masih berada pada angka 86%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat sejumlah warga yang bergantung pada sumber air non-perpipaan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, yang keamanannya belum terjamin.

#### 2.3.3.5 Kondisi Lingkungan Hidup

##### 2.3.3.5.1. Kinerja Layanan atau Jasa Lingkungan

Jasa lingkungan merupakan konsep sistem alami yang menyediakan aliran barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan yang dihasilkan oleh proses ekosistem alami. Sistem klasifikasi Jasa Lingkungan menggunakan standar dari Millennium Ecosystem Assessment (2005). Berdasarkan batasan konsep tersebut, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diukur dengan pendekatan jasa lingkungan. Jasa Lingkungan dapat dikelompokkan ke dalam empat macam manfaat yaitu:

- a. Layanan penyedia (provisioning services): Jasa/produk yang didapat dari ekosistem, seperti misalnya sumber daya genetika, makanan, air, dll.
- b. Layanan pengaturan (regulating services): Manfaat yang didapatkan dari pengaturan ekosistem, seperti misalnya aturan tentang pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengendalian dampak perubahan iklim.
- c. Layanan kultural (cultural services): Manfaat yang tidak bersifat material/terukur dari ekosistem, seperti misalnya pengayaan spirit, tradisi, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan.
- d. Layanan pendukung (supporting services): Jasa Lingkungan yang diperlukan manusia, seperti misalnya produksi biomassa, produksi oksigen, nutrisi, air, dll.

Berdasarkan kelompok tersebut, maka beberapa Jasa Lingkungan penting yang terkait dengan muatan dalam KLHS adalah Jasa Lingkungan terkait dengan air, pangan, iklim dan keanekaragaman hayati, bencana dan limbah. Berikut adalah kondisi Jasa Lingkungan penting di Kota Pematangsiantar.

#### 1. Jasa Lingkungan Penyedia Pangan

Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Ekosistem/lingkungan memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan.

Tabel 2.26  
Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kota Pematangsiantar

No	Kecamatan	Luas Jasa Lingkungan Penyedia Pangan (Ha)		
		Rendah	Sedang	Sangat Tinggi
1	Kec. Siantar Barat	331.76	0.00	
2	Kec. Siantar Marihat	171.43	58.54	542.26
3	Kec. Siantar Marimbun	222.31	365.36	1,144.70
4	Kec. Siantar Martoba	552.19	777.83	237.21
5	Kec. Siantar Selatan	196.26	1.23	6.23
6	Kec. Siantar Sitalasari	670.18	920.23	455.57
7	Kec. Siantar Timur	405.21	106.68	21.09
8	Kec. Siantar Utara	352.21	43.24	4.09
Total		2,901.54	2,273.11	2,411.15

Sumber : KLHS

Kinerja jasa lingkungan penyedia pangan di Kota Pematangsiantar termasuk ke dalam kategori rendah sebesar 2,901.54 Ha. Kecamatan yang memiliki jasa lingkungan penyedia pangan rendah yaitu Kecamatan Siantar Sitalasari. Kecamatan yang memiliki penyedia pangan sangat tinggi yaitu Kecamatan Siantar Marimbun sebesar 1,114.70 Ha. Semakin tinggi jasa lingkungan penyedia

pangan maka semakin banyak hasil hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan yang dapat diolah dan dikonsumsi oleh manusia terutama penduduk Kota Pematangsiantar.

## 2. Jasa Lingkungan Penyedia Air

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti penutup lahan.

Tabel 2.27  
Jasa Lingkungan Penyedia Air Kota Pematangsiantar

No	Kecamatan	Luas Jasa Lingkungan Penyedia Air (Ha)			
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Sangat Tinggi
1	Kec. Siantar Barat		309.66	22.09	
2	Kec. Siantar Marihat		176.70	595.53	
3	Kec. Siantar Marimbun		423.91	1,308.22	0.24
4	Kec. Siantar Martoba		538.24	1,028.98	
5	Kec. Siantar Selatan		183.25	20.47	
6	Kec. Siantar Sitalasari	0.07	741.17	1,304.74	
7	Kec. Siantar Timur		451.59	81.39	
8	Kec. Siantar Utara		322.51	77.04	
Total		0.07	3,147.03	4,438.46	0.24

Sumber : KLHS

Kinerja jasa lingkungan penyedia air di Kota Pematangsiantar termasuk ke dalam kategori sedang sebesar 4,438.46 Ha. Kecamatan yang memiliki jasa lingkungan penyedia pangan rendah dan sangat rendah yaitu Kecamatan Siantar Sitalasari sebesar 741.24 Ha. Kecamatan yang memiliki penyedia air sedang dan sangat tinggi yaitu Kecamatan Siantar Marimbun sebesar 1,308.24 Ha. Semakin tinggi jasa lingkungan penyedia air maka semakin banyak ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan manusia terutama penduduk Kota Pematangsiantar.

## 3. Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim

Secara alamiah ekosistem memiliki fungsi jasa lingkungan sebagai pengaturan iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung

pada pengurangan emisi carbon dioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas.

Tabel 2.28  
Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Kota Pematangsiantar

No	Kecamatan	Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim (Ha)	
		Rendah	Sedang
1	Kec. Siantar Barat	331.76	
2	Kec. Siantar Marihat	772.23	
3	Kec. Siantar Marimbun	1,732.37	
4	Kec. Siantar Martoba	1,567.22	
5	Kec. Siantar Selatan	203.72	
6	Kec. Siantar Sitalasari	2,045.91	0.07
7	Kec. Siantar Timur	532.98	
8	Kec. Siantar Utara	399.54	
Total		7,585.73	0.07

Sumber : KLHS

Kinerja jasa lingkungan pengaturan iklim di Kota Pematangsiantar termasuk ke dalam kategori rendah sebesar 7,585.73 Ha. Kecamatan yang memiliki jasa lingkungan pengaturan iklim rendah yaitu Kecamatan Siantar Sitalasari sebesar 2,045.91 Ha. Semakin banyak jasa lingkungan pengaturan iklim yang rendah maka semakin sedikit vegetasi sehingga menyebabkan suhu tinggi, kelembaban rendah dan hujan badai, angin puting beliung, efek gas rumah kaca dan penumpukan polutan karbon di Kota Pematangsiantar.

#### 2.3.3.5.2 Daya Dukung Air dan Pangan

##### 1. Daya Dukung Air

Daya dukung air di Kota Pematangsiantar dilakukan melalui analisis antara kebutuhan dan ketersediaan air di wilayah tersebut. Kebutuhan air dihitung berdasarkan kebutuhan standar layak untuk kebutuhan sehari-hari. Perhitungan ini mencakup kebutuhan air untuk rumah tangga, kebutuhan non-domestik dan lahan pertanian serta memperhatikan faktor kehilangan air selama pemanfaatan air secara domestik dan non-domestik. Berdasarkan hasil analisis terhadap kebutuhan air, diketahui bahwa Kecamatan Siantar Martoba merupakan kecamatan yang mempunyai kebutuhan air paling tinggi mencapai 74 juta m<sup>3</sup> per tahun. Hal ini karena secara populasi penduduk Kec. Siantar Martoba adalah yang paling besar diantara kecamatan lain. Selain itu kebutuhan air yang besar diantaranya untuk kebutuhan non domestik dan adanya kehilangan air yang tinggi.

Tabel 2.29  
Kondisi Daya Dukung Penyediaan Air Bersih di Kota Pematangsiantar  
berdasarkan Limpasan Air Hujan (2023)

No	Kecamatan	Ketersediaan Air
1	Kec. Siantar Barat	53,838,091.48
2	Kec. Siantar Marihat	55,909,537.93
3	Kec. Siantar Marimbun	107,249,985.72
4	Kec. Siantar Martoba	151,761,481.54
5	Kec. Siantar Selatan	33,132,670.08
6	Kec. Siantar Sitalasari	137,144,678.05
7	Kec. Siantar Timur	64,457,481.69
8	Kec. Siantar Utara	54,456,710.16
Total		657,950,636.64

Sumber : KLHS

Suplai/ketersediaan air di wilayah Kota Pematangsiantar adalah sebesar 657,950,636.64 m<sup>3</sup> per detik dengan sebaran per wilayah kecamatan terbesar di Kecamatan Siantar Martoba sebesar 151,761,481.54 m<sup>3</sup> per detik.

Tabel 2.30  
Kebutuhan Air Guna Lahan dan Kebutuhan Air Domestik Kota Pematangsiantar  
(2023)

No	Kecamatan	Kebutuhan Air Guna Lahan	Kebutuhan Air Domestik	Total Kebutuhan Air
1	Kec. Siantar Barat	493,803.84	61,486,400.00	61,980,203.84
2	Kec. Siantar Marihat	3,584,753.95	34,616,000.00	38,200,753.95
3	Kec. Siantar Marimbun	8,696,674.49	35,108,800.00	43,805,474.49
4	Kec. Siantar Martoba	6,931,375.24	68,017,600.00	74,948,975.24
5	Kec. Siantar Selatan	341,559.45	32,728,000.00	33,069,559.45
6	Kec. Siantar Sitalasari	11,459,306.73	57,939,200.00	69,398,506.73
7	Kec. Siantar Timur	1,296,048.93	72,676,800.00	73,972,848.93
8	Kec. Siantar Utara	753,910.63	67,955,200.00	68,709,110.63
Total		33,557,433.26	430,528,000.00	464,085,433.26

Sumber : KLHS

Berdasarkan ketersediaan air untuk kebutuhan air bersih total diperoleh daya dukung air bersih di Kota Pematangsiantar yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Status daya dukung air diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan air (SA) dan kebutuhan air (DA). Bila SA > DA , daya dukung air dinyatakan surplus. Bila SA < DA , daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui. Daya dukung air bersih pada tahun 2025 di Kota Siantar mengalami surplus di sebagian besar kecamatan yaitu lima kecamatan (Kecamatan Siantar Barat, Siantar Marihat, Siantar Marimbun, Siantar Martoba dan Siantar Sitalasari. Selain itu, untuk kecamatan yang memiliki daya dukung defisit ada tiga yaitu Kecamatan Siantar Selatan, Siantar Timur dan Siantar Utara. Sedangkan untuk akhir perencanaan yaitu di tahun 2045 terdapat empat kecamatan yang memiliki daya dukung air yang defisit yaitu Kecamatan Siantar Barat, Siantar Marihat, Siantar Timur dan Siantar Utara. Selain itu, untuk kecamatan yang memiliki daya dukung surplus ada tiga yaitu Kecamatan Siantar Marimbun, Siantar Martoba dan Siantar Marihat dan Siantar Sitalasari.

Tabel 2.31  
 Daya Dukung Air Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Ketersediaan Air	Tahun					
			Total Kebutuhan Air	2025	2030	2035	2040	2045
1	Kec. Siantar Barat	53,838,091.48	36,524,203.84	17,313,887.64	13,776,287.64	10,240,287.64	6,704,287.64	-12,646,112.36
2	Kec. Siantar Marihat	55,909,537.93	42,592,753.95	13,316,783.98	3,571,183.98	-6,174,416.02	-15,921,616.02	-15,921,616.02
3	Kec. Siantar Marimbun	107,249,985.72	43,043,874.49	64,206,111.23	60,156,511.23	56,106,911.23	52,058,911.23	52,058,911.23
4	Kec. Siantar Martoba	151,761,481.54	68,827,375.24	82,934,106.30	81,910,106.30	80,887,706.30	79,863,706.30	79,863,706.30
5	Kec. Siantar Selatan	33,132,670.08	63,578,359.45	-30,445,689.38	-18,647,289.38	-6,848,889.38	4,947,910.62	4,947,910.62
6	Kec. Siantar Sitalasari	137,144,678.05	87,464,106.73	49,680,571.32	41,362,171.32	33,045,371.32	24,726,971.32	24,726,971.32
7	Kec. Siantar Timur	64,457,481.69	69,846,448.93	-5,388,967.24	-6,723,367.24	-8,056,167.24	-9,390,567.24	-9,390,567.24
8	Kec. Siantar Utara	54,456,710.16	63,353,910.63	-8,897,200.47	-20,548,400.47	-32,201,200.47	-43,852,400.47	-43,852,400.47
Total		657,950,636.64	475,231,033.26	182,719,603.38	154,857,203.38	126,999,603.38	99,137,203.38	79,786,803.38

Sumber : KLHS

## 2. Daya Dukung Penyediaan Bahan Pangan

Kota Pematangsiantar merupakan daerah perkotaan dengan luas kawasan yang terbatas. Selain itu Kota Pematangsiantar bukan menjadi daerah produsen pertanian, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Meskipun demikian, kondisi daya dukung pangan dibutuhkan sebagai baseline awal dalam menentukan kebijakan terkait dengan ketahanan pangan. Guna melihat tingkat kebutuhan pangan maka dihitung kebutuhan pangan berdasarkan jumlah penduduk yang dibandingkan dengan ketersediaan pangan. Daya dukung penyediaan pangan dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan kkal pangan di Kota Pematangsiantar yang bersumber dari : tanaman padi/beras, umbi-umbian, jagung, kacang-kacangan, telur, daging ternak unggas hingga ternak besar. Ketersediaan pangan (energi Kkal) yang dihasilkan tanaman padi/beras, umbi-umbian, jagung, kacang-kacangan, telur, daging ternak unggas hingga ternak besar di Kota Pematangsiantar sebanyak 38,451,100,602.65 Kkal per tahun. Terbanyak di Kecamatan Siantar Martoba dan Kecamatan Siantar Sitalasari sebesar masing-masing 30%. Dengan menggunakan standar kebutuhan kalori per kapita sebesar 2100 Kkal/kapita, maka total kebutuhan pangan penduduk Kota Pematangsiantar sebesar 211,589,259,000.00 kkal/tahun (2025) dan pada akhir tahun perencanaan 2045 total kebutuhan pangan sebesar 279,158,533,500.00 kkal/tahun.

Tabel 2.32  
Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Kota Pematangsiantar 2025-2045

No	Kecamatan	Ketersediaan (Kkal)	Kebutuhan (Kkal/tahun)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Siantar Marihat	5,687,506,426.35	17,260,813,500.00	18,955,545,000.00	20,649,510,000.00	22,343,475,000.00	32,694,291,000.00
2	Siantar Marimbun	9,480,066,950.85	18,687,270,000.00	23,356,021,500.00	28,024,773,000.00	32,694,291,000.00	37,363,042,500.00
3	Siantar Selatan	61,116,863.00	16,454,455,500.00	18,394,467,000.00	20,334,478,500.00	22,273,723,500.00	24,213,735,000.00
4	Siantar Barat	9,099,258.80	29,652,052,500.00	30,142,612,500.00	30,632,406,000.00	31,122,966,000.00	31,613,526,000.00
5	Siantar Utara	5,411,988.20	30,294,379,500.00	24,642,208,500.00	18,990,037,500.00	13,338,633,000.00	13,338,633,000.00
6	Siantar Timur	122,907,435.45	36,411,049,500.00	40,396,083,000.00	44,380,350,000.00	48,365,383,500.00	52,350,417,000.00
7	Siantar Martoba	11,359,816,381.85	32,839,926,000.00	33,479,187,000.00	34,117,681,500.00	34,756,942,500.00	35,267,431,500.00
8	Siantar Sitalasari	11,725,175,298.15	29,989,312,500.00	35,570,965,500.00	41,153,385,000.00	46,735,038,000.00	52,317,457,500.00
Total		38,451,100,602.65	211,589,259,000.00	224,937,090,000.00	238,282,621,500.00	251,630,452,500.00	279,158,533,500.00

Sumber : KLHS

Secara umum Daya dukung pangan Kota Pematangsiantar mengalami defisit di setiap kecamatan. Daya dukung pangan yang defisit dimulai dari tahun 2025 (awal perencanaan) sampai tahun 2045 (akhir perencanaan). Hal ini disebabkan besarnya kebutuhan pangan yang tidak sebanding dengan produksi pangan atau lebih besar kebutuhan pangan daripada ketersediaan pangan di Kota Pematangsiantar.

Tabel 2.33  
Daya Dukung Pangan Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Daya Dukung				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	Siantar Marihat	-11573307074	-13268038574	-14962003574	-16655968574	-27006784574
2	Siantar Marimbun	-9207203049	-13875954549	-18544706049	-23214224049	-27882975549
3	Siantar Selatan	-16393338637	-18333350137	-20273361637	-22212606637	-24152618137
4	Siantar Barat	-29642953241	-30133513241	-30623306741	-31113866741	-31604426741
5	Siantar Utara	-30288967512	-24636796512	-18984625512	-13333221012	-13333221012
6	Siantar Timur	-36288142065	-40273175565	-44257442565	-48242476065	-52227509565
7	Siantar Martoba	-21480109618	-22119370618	-22757865118	-23397126118	-23907615118
8	Siantar Sitalasari	-18264137202	-23845790202	-29428209702	-35009862702	-40592282202

Sumber : KLHS

#### 2.3.3.4 Ketersediaan Listrik

Listrik merupakan salah satu kebutuhan vital yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar. Jumlah pelanggan PLN Cabang Pematangsiantar pada Tahun 2020 sebanyak 103.491 pelanggan. Jumlah KWh yang terjual sebesar 235.641.253 KWh dan penyaluran KWh Listrik terbesar kepada pelanggan rumah tangga sebesar 126.352.691 KWh. Rasio rumah tangga pengguna listrik di Kota Pematangsiantar sebesar 99,85%.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dimasa mendatang, menjadi tantangan tersendiri bagi PLN dan pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan energi listrik kepada masyarakat dan dunia usaha.

#### 2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Salah satu faktor yang menjadi penekanan dalam pembangunan ekonomi suatu kota adalah investasi. Investasi sendiri memiliki sebagai salah satu komponen dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi. Nilai investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kota Pematangsiantar, sebagai berikut :

Tabel. 2.34

Nilai Investasi PMA Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia di Kota Pematangsiantar Tahun 2019-2023

Deskripsi KBLI	Nilai Investasi (US\$. Ribu)				
	2019	2020	2021	2022	2023
(56-2020) Penyediaan Makanan Dan Minuman	0	2,3	0	0	0
(59-2020) Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi, Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik	0	1.041,70	600,6	0	9,4
(61-2020) Telekomunikasi	0	0	0	0	817,7
(86-2020) Aktivitas Kesehatan Manusia	0,6	12,6	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0,6</b>	<b>1.056,60</b>	<b>600,6</b>		<b>827,1</b>

Sumber : nswi.bkpm.go.id

Dari data di atas dapat tergambar sektor investasi yang menjadi minat PMA di Kota Pematangsiantar adalah lapangan usaha Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi, Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik, disusul sektor Telekomunikasi.

Tabel. 2.35

Nilai Investasi PMDN Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia di Kota Pematangsiantar Tahun 2019-2023

Deskripsi KBLI	Nilai Investasi (Rp. Juta)				
	2019	2020	2021	2022	2023
(12-2020) Industri Pengolahan Tembakau	0	0	128.900,00	12.925,20	20.243,30
(16-2020) Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0	0	0,00	61.901,00	7.761,50
(20-2020) Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia	0	0	3.200,00	0,00	0
(35-2020) Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	0	124.887,90		0	0
(42-2020) Konstruksi Bangunan Sipil	0	0	198,7	0	0
(45-2020) Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	0	0	0	6.679,00	3.500,00
(46-2020) Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	1039,3	286,2	3.504,40	23.736,10	3.924,00

Deskripsi KBLI	Nilai Investasi (Rp. Juta)				
	2019	2020	2021	2022	2023
(47-2020) Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	0	16.673,30	126,6	238,6	0
(52-2020) Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan	0	0	0	0	4.870,80
(55-2020) Penyediaan Akomodasi	0	0	0	25.000,00	2.500,00
(56-2020) Penyediaan Makanan Dan Minuman	0	0	183,3	1.000,00	8.805,90
(82-2020) Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor Dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya	0	0	600	0	0
(86-2020) Aktivitas Kesehatan Manusia	0	0	1226	25.853,10	48.975,70
(93-2020) Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya	0	0	0	0	6.800,00
<b>Total</b>	<b>1.039,30</b>	<b>141.847,40</b>	<b>137.939,00</b>	<b>157.333,00</b>	<b>107.381,20</b>

Sumber : nswi.bkpm.go.id

Dari data di atas dapat digambarkan sektor investasi dengan nilai terbesar di Kota Pematangsiantar adalah lapangan usaha Industri Pengolahan Tembakau, disusul Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin dan Aktivitas Kesehatan Manusia. Namun sektor investasi yang tetap menarik minat investor adalah lapangan usaha Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor. Berikut beberapa faktor penunjang yang berpengaruh pada minat investor dalam menanamkan modalnya.

#### 2.3.4.1 Keamanan dan Ketertiban

Keamanan dan ketertiban merupakan aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas daerah. Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat menggunakan indikator negatif, misalnya angka kriminalitas. Angka kriminalitas menjadi salah satu pertimbangan yang digunakan oleh pihak luar, seperti wisatawan dan investor untuk melakukan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Sehingga aktivitas yang dilakukan akan memberikan keuntungan di masa depan bagi pihak Investor dan menciptakan rasa aman tenteram bagi wisatawan. Disamping itu adalah jumlah demonstrasi/unjukrasa yang merupakan salah satu hal yang perlu dikendalikan dalam mendukung iklim investasi yang kondusif. Pemerintah Kota

Pematangsiantar` bersama dengan instansi vertikal (kepolisian dan kejaksaan) terus berupaya meningkatkan keamanan yang kondusif di masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat.

Tabel 2.36  
Angka Kriminalitas di Kota Pematangsiantar Tahun 2017 – 2023

NO	Tindak Pidana	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	TP Narkoba	132	133	157	117	115	90
2	TP Pembunuhan	0	1	2	1	0	3
3	TP Pencabulan	2	5	4	4	4	36
4	TP Penganiayaan	33	54	43	107	100	175
5	TP Pencurian	82	93	100	100	100	120
6	TP Penipuan	33	59	102	47	47	40
7	TP Pemalsuan Uang	0	0	0	1	0	0
Total Jumlah Tindak Pidana		282	345	408	377	366	464
Total Jumlah Penduduk		251.513	253.500	255.317	268.254	274.056	274.838
Indeks Kriminalitas		0,11	0,14	0,16	0,14	0,13	0,17

Sumber: Satpol PP Kota Pematangsiantar Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa sejak Tahun 2018 hingga Tahun 2023 tindak pidana di Kota Pematangsiantar didominasi oleh tindak pidana narkoba disusul tindak pidana pencurian dan tindak pidana penganiayaan. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah penduduk yang cukup besar. Beberapa faktor yang mempengaruhi tindak pidana tersebut antara lain permasalahan ekonomi, keluarga, pengaruh media sosial dan pergaulan. Perlunya upaya pemerintah untuk lebih meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, menambah lapangan pekerjaan dan sosialisasi atau penyuluhan bahaya narkoba dan sosialisasi pencegahan penyakit masyarakat. Untuk jumlah demonstrasi di Kota Pematangsiantar tahun 2018-2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 37  
Jumlah Demonstrasi di Kota Pematangsiantar Tahun 2018-2023

NO	URAIAN	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	Bidang Politik			1	1	1	1
2	Bidang Sosial	26	46	19	13	12	6
3	Bidang Ekonomi	4	5	5	6	5	-
Total Jumlah Demonstrasi		30	51	24	20	18	7

Sumber: Satpol PP Kota Pematangsiantar Tahun 2023,

Jumlah demonstrasi dari tahun 2018-2023 menunjukkan trend menurun. Demontrasi didominasi oleh bidang sosial mencapai 85,71% dari keseluruhan jenis demonstrasi. Dengan semakin rendahnya jumlah demonstrasi diharapkan dapat mendorong terwujudnya iklim investasi yang kondusif.

#### 2.3.4.2 Perizinan

Pelayanan publik yang memuaskan masyarakat adalah tujuan akhir dari reformasi birokrasi, sejalan dengan hal tersebut pemerintah Kota Pematangsiantar terus berupaya meningkatkan kualitas berbagai jenis pelayanan publik, termasuk di antaranya pelayanan di bidang perizinan baik berupa penyederhanaan proses pengurusan perizinan, pemberian informasi yang cepat dan akurat. Kebijakan ini perlu dilaksanakan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga proses penerbitan perizinan berusaha menjadi lebih cepat namun sesuai dengan standar pelayanan yang ada sekaligus memberikan kepastian waktu dan biaya yang diperlukan.

Kemudahan proses perijinan merupakan prasyarat bagi pengusaha untuk berinvestasi, karena perijinan merupakan titik kritis usaha akan dibangun. Jika perijinan tidak mampu menarik investor terdapat kecenderungan iklim usaha menjadi surut. Untuk kemudahan perizinan Kota Pematangsiantar, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupaya memberikan pelayanan perijinan menjadi lebih singkat dan cepat, Dalam perkembangannya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (online single submission-OSS). Sistem ini memungkinkan investor dan calon investor mengurus izin usaha secara online tanpa dibatasi waktu dan tempat, disamping juga memangkas birokrasi panjang dan memakan waktu yang semula diberlakukan.

Penyederhanaan pelayanan dan efisiensi waktu penyelesaian izin dapat diselesaikan paling lama 3 hari kerja jika syarat yang diperlukan lengkap, jelas, dan benar. Data rekapitulasi perizinan sebagai berikut:

Tabel 2. 38  
Rekapitulasi Perizinan di Kota Pematangsiantar Tahun 2018-2023

No	Jenis Izin	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Permohonan izin	2353	2290	1627	1096	2003	1943
2	Izin diterbitkan	2305	2213	1627	1071	2028	1893
3	Izin ditolak	48	77	0	0	0	0
4	Izin dalam proses	0	0	0	25	0	50

Sumber: DPM dan PTSP Kota Pematangsiantar Tahun 2024

Dilihat dari aspek daya saing daerah, ketersediaan infrastruktur di Kota Pematangsiantar cukup memadai dalam mendukung masuknya investasi. Infrastruktur yang baik menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan daya tarik daerah bagi investor, terutama dalam hal konektivitas, transportasi, dan utilitas dasar. Selain itu, kondisi keamanan yang relatif kondusif serta

terkendalinya potensi gangguan sosial, termasuk demonstrasi, memberikan kepastian dan stabilitas bagi dunia usaha.

Dari sisi kemudahan berusaha, birokrasi perizinan di Kota Pematangsiantar juga cukup baik dengan penerapan sistem Online Single Submission (OSS), yang mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi. Implementasi OSS ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam menciptakan lingkungan investasi yang lebih efisien dan transparan.

## **2.4. Aspek Pelayanan Umum**

### **2.4.1 Indeks Reformasi Birokrasi**

Reformasi birokrasi akan menjadi prasyarat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang harus semakin meningkat, sesuai dengan tuntutan dinamika global. Kepegawaian akan sangat terkait dengan reformasi birokrasi. Dalam rangka perwujudan good governance telah disusun Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 oleh pemerintah, yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif). Dalam bahasa yang lain, reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar mencakup beberapa area perubahan yaitu :

- 1) Penataan dan penguatan organisasi, dilaksanakan melalui evaluasi kelembagaan PD.
- 2) Penataan tatalaksana, dilaksanakan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), peningkatan Standar Manajemen Mutu (SMM)/Sertifikasi ISO.
- 3) Penataan sistem manajemen SDM aparatur, dilaksanakan melalui penyelenggaraan diklat aparatur, pengadaan CPNS Pemerintah Kota Pematangsiantar, tes kompetensi pejabat struktural, kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar, dan peningkatan kualitas PNS melalui fasilitasi tugas/izin belajar.
- 4) Penguatan pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal pada PD.
- 5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Tahun 2023 hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar memperoleh nilai 55,31 atau predikat CC. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Cukup”, yaitu implementasi AKIP sudah cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan

walaupun tidak mendasar khususnya pada unit kerja. Rincian penilaian SAKIP disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.39  
Nilai SAKIP Kota Pematangsiantar Tahun 2020 - 2023

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30	14,83	14,83	19,84	20,84
2	Pengukuran Kinerja	25	9,06	9,06	12,75	15,08
3	Pelaporan Kinerja	15	5,10	5,10	5,89	6,81
4	Evaluasi Internal	10	4,07	4,07	11,70	12,59
5	Capaian Kinerja	20	7,08	7,51	-	-
Nilai SAKIP		100	40,14	40,57	50,18	55,31
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			C	C	CC	CC

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Pematangsiantar, 2024

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, ada perubahan dalam komponen penilaian. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif, dan analisis yang holistik. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Pematangsiantar tahun 2020-2022 disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.40  
Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi  
Kota Pematangsiantar Tahun 2020-2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai		
			2020	2021	2022
A	Komponen Pengungkit				
	I. Pemenuhan	20,00	8,42	8,83	9,00
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,24	4,31	4,60
	III. Reform	10,00	2,06	4,94	4,03
	Total Komponen Pengungkit	60,00	14,72	18,08	17,63
B.	Komponen Hasil				
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	4,14	4,81	6,51
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,88	8,22	7,58
3	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,43	7,79	7,82
4	Kinerja Organisasi	10,00	5,30	3,49	6,09
	Total Komponen Hasil	40,00	25,75	24,31	28,00
	Indeks Reformasi Birokrasi	100,00	40,47	42,39	45,63

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Pematangsiantar, 2023

Untuk Tahun 2020-2022, Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Pematangsiantar berada dalam kategori “C”. Walau masih berada di kategori yang sama, tetapi ada peningkatan nilai dari tahun ke tahun. Pemerintah Kota Pematangsiantar telah berupaya untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan total komponen hasil. Namun demikian Pemerintah Kota Pematangsiantar perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi agar dapat mencapai target minimal indeks RB > 60 atau predikat B.

Tabel 2.41  
Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi  
Kota Pematangsiantar Tahun 2023

No	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	50,14
B	RB Tematik	20	4,68
C	Indeks RB	120	54,82
			CC

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Pematangsiantar, 2023

Untuk tahun 2023, Indeks RB Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2023 adalah 54,82 dengan kategori “CC”. Hasil evaluasi tahun 2023 “tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan.

Berdasarkan capaian indeks reformasi birokrasi pada Tahun 2023, Kota Pematangsiantar mencapai angka 54,82 atau kategori CC. dari komponen indeks RB tersebut terbagi dua yakni RB general dan RB tematik. Capaian RB general Kota Pematangsiantar sebesar 50,14 dari bobot 100. Sedangkan Capaian RB tematik sebesar 4,68 dari bobot 20.

Kendala implementasi RB Pemerintah Kota Pematangsiantar dari segi penataan yaitu bahwa Perkada tentang SOTK belum sepenuhnya mempedomani model penyederhanaan struktur organisasi untuk penyederhanaan birokrasi yang telah ditetapkan oleh MenpanRB sesuai surat MenpanRB Nomor B/467/KT.01/2021 tanggal 27 Mei 2021 Hal Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk itu perlu tindaklanjut terhadap mekanisme penyederhanaan struktur organisasi saat ini dengan berkoordinasi dengan KemenpanRB.

Kendala pada segi penguatan pengawasan yaitu bahwa tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas masih 0% (Kurang) dikarenakan belum pernah mengusulkan unit kerja untuk dievaluasi Zona Integritas oleh Tim Penilai

Nasional. Untuk itu perlu dibangun unit kerja berintegritas dan melayani pada Instansi Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Dari segi akuntabilitas kendalanya adalah pada cascading/penjenjangan kinerja yang disusun pada sebagian PD belum sepenuhnya dijabarkan sampai ke level operasional, serta belum sepenuhnya mempertimbangkan logical framework dan critical success factor dalam proses penyusunannya. Untuk itu perlu dilakukan reviu dan perbaikan dokumen cascading kinerja baik di level Pemerintah Daerah maupun PD untuk memastikan kualitas cascading (penjenjangan) kinerja dari level tertinggi hingga terendah dapat berorientasi outcome (hasil) sesuai dengan levelnya dengan memperhatikan logical framework dan critical success factor dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien dalam menyelesaikan isu strategis daerah.

#### 2.4.2 Indeks SPBE

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dalam penerapan SPBE, diperlukan tata kelola SPBE yang bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu, yang meliputi: Rencana Induk SPBE Nasional; Arsitektur SPBE; Peta Rencana SPBE; rencana dan anggaran SPBE; Proses Bisnis; data dan informasi; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE; dan Layanan SPBE.

Indeks SPBE Kota Pematangsiantar naik dari tahun ke tahun dan pada tahun 2023, Kota Pematangsiantar dapat mencapai indeks SPBE sebesar 2,84 (predikat Baik) dengan 4 domain yang dinilai yaitu Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola, Domain Manajemen dan Domain Layanan.

Tabel 2.42  
Nilai Domain SPBE Kota Pematangsiantar Tahun 2021-2023

No	Domain SPBE	2021	2022	2023
1	Kebijakan	1,53	2,60	3,30
2	Tata Kelola	1,00	1,40	2,50
3	Manajemen	1,09	1,00	1,00
4	Layanan	2,05	3,30	3,56
	Indeks SPBE	1,53	2,35	2,84

Sumber : Dinas Kominfo Pematangsiantar, 2023

Hal yang sangat diapresiasi dari penerapan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar adalah pemanfaatan Aplikasi Umum Berbagi Pakai untuk

Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik dari Pemerintah Pusat. Hal ini dapat meningkatkan Tingkat Kematangan, perbaikan kualitas layanan baik internal maupun Masyarakat, dan sekaligus efisiensi anggaran pengembangan sistem. Tahun-tahun berikutnya bisa dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala dan terencana terhadap layanan-layanan ini, serta hasil reviu ditindaklanjuti, sehingga Tingkat Kematangan maupun kualitas layanan bisa semakin paripurna. Berdasarkan dari Rata-rata Tingkat Kematangan yang diperoleh yaitu 2,84 dengan Predikat BAIK, menunjukkan masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Kebijakan Internal SPBE perlu dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala, dan ditindaklanjuti dengan mengeluarkan kebijakan yang memiliki kekuatan hukum tetap sehingga bisa mencapai Tingkat Kematangan yang Optimum.

Tata Kelola SPBE juga sangat perlu diperbaiki, terutama terkait dengan Rencana Anggaran SPBE, Inovasi Proses Bisnis SPBE, dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan. Perlu kelengkapan SOP dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan SOP tersebut yang tercatat dan terdokumentasi.

Pelaksanaan Manajemen SPBE dan Audit SPBE perlu dilakukan berdasarkan perencanaan yang ada pada Peta Rencana SPBE dan Rencana Keuangan dan Anggaran Tahunan, sehingga dapat dilaksanakan secara terencana, terarah dan berkesinambungan sesuai dengan pedoman yang ada.

Pelaksanaan Domain Layanan secara umum masih perlu dilakukan reviu dan evaluasi yang hasilnya ditindaklanjuti untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan kualitas layanan. Yang memerlukan fokus perhatian pada Domain Layanan ini adalah Pelaksanaan Layanan Data Terbuka yang masih ada pada Tingkat Kematangan 2. Perlu juga dipelajari kembali dan dilaksanakan terkait dengan Pedoman Penulisan Penilaian Mandiri yang ada pada Dokumen Pedoman MenpanRB Nomor 6 Tahun 2023, dengan justifikasi Tingkat Kematangan dari Tingkat Kematangan 1 sampai yang diklaim.

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Pematangsiantar menunjukkan dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik, untuk lebih meningkatkan layanan berbasis elektronik di tingkat kecamatan dan kelurahan, rekomendasi utama adalah memperkuat pelatihan bagi staf dalam mengoperasikan sistem SPBE, khususnya dalam pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, penting untuk memastikan infrastruktur yang memadai, seperti akses internet yang stabil dan perangkat yang memadai, untuk mendukung kelancaran layanan. Pengembangan aplikasi layanan publik yang terintegrasi akan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan secara efisien dan transparan.

Pemerintah Kota Pematangsiantar perlu melakukan evaluasi dan reviu berkala terhadap implementasi SPBE untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan.

Fokus juga harus diberikan pada penguatan keamanan data dan integrasi sistem antara tingkat kecamatan, kelurahan, dan kota, agar layanan berbasis elektronik dapat berjalan dengan optimal dan aman. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kualitas layanan publik dapat semakin meningkat dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

#### 2.4.3 Indeks Infrastruktur

Infrastruktur dibutuhkan oleh setiap negara di dunia, dimana infrastruktur yang baik adalah indikator kemandirian suatu bangsa. Infrastruktur yang penting ini, tidak serta merta selesai permasalahannya ketika sudah terbangun. Kita akan berhadapan dengan infrastruktur yang memiliki tingkat kinerja yang bervariasi. Tingkat kinerja infrastruktur yang rendah, baik infrastruktur 'keras' maupun infrastruktur 'lunak' (non fisik) berpotensi menghambat perekonomian suatu negara.

Indeks infrastruktur merupakan salah satu komponen City Development Index (CDI) yang menilai kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar ini. Indeks infrastruktur didapatkan dengan cara menjumlahkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi, persentase tingkat kemantapan jalan kota, persentase irigasi yang berkondisi baik, pengelolaan sampah dan rumah tidak layak huni (RTLH). Semakin tinggi indeks infrastruktur yang dimiliki oleh sebuah kota maka dapat dikatakan tingkat pembangunan di kota tersebut semakin baik.

Pada Tahun 2023 Capaian Indeks Infrastruktur Kota Pematangsiantar sebesar 0,86. Indeks ini dibentuk dari indikator persentase jalan dengan kondisi mantap sebesar 91,48%, persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak 99,72%, persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak sebesar 78,76%, persentase irigasi yang berkondisi baik sebesar 89,29, persentase pengelolaan sampah 96,39% dan rumah tidak layak huni 62,38%.

Ketersediaan infrastruktur dalam wilayah sangat mempengaruhi jumlah perpindahan penduduk dari desa ke kota atau yang lebih dikenal dengan istilah urbanisasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk memilih tinggal di wilayah dengan ketersediaan infrastruktur lebih lengkap dan memadai, karena potensi terciptanya lapangan kerja pada wilayah tersebut lebih besar daripada wilayah yang infrastrukturnya masih tertinggal.

Tabel 2.43  
Indeks Infrastruktur Kota Pematangsiantar Tahun 2023

NO.	INDEKS	CAPAIAN 2023 (%)
1	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan Kota	91,48
2	Persentase Irigasi Yang Berkondisi Baik	89,29
3	Akses Air Minum	99,72

NO.	INDEKS	CAPAIAN 2023 (%)
4	Pengelolaan Sampah	96,39
5	Akses Air Limbah	78,76
6	RTLH	62,38
NILAI INDEKS INFRASTRUKTUR (% rata-rata indeks / 100)		0,86

Sumber : Bappeda Kota Pematangsiantar, 2024

Berdasarkan capaian Indeks Infrastruktur Kota Pematangsiantar Tahun 2023, terdapat dua indikator yang membutuhkan perhatian serius, yaitu kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) sebesar 62,38% dan akses terhadap sanitasi layak yang hanya 78,76%. Namun terkait dengan akses sanitasi layak yang cukup baik, terdapat tantangan untuk meningkatkan kualitas sanitasi menjadi sanitasi aman. Capaian sanitasi aman di Kota Pematangsiantar masih rendah yakni Tahun 2019 sebesar 3,49% dan Tahun 2023 masih pada angka 7,67%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa aspek infrastruktur lainnya sudah berada pada tingkat yang baik, tantangan terkait kualitas RTLH dan sanitasi masih menjadi masalah. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan sanitasi antara lain adalah keterbatasan alokasi anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta ketidakmerataan pembangunan infrastruktur.

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan utama, di mana anggaran yang dialokasikan untuk program perbaikan rumah dan pembangunan fasilitas sanitasi tidak mencukupi, sehingga program rehabilitasi rumah dan pengembangan sistem sanitasi tidak dapat menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan, terutama di daerah pemukiman kumuh dan padat penduduk.

Selain itu, lemahnya koordinasi antara berbagai instansi yang terlibat dalam program rehabilitasi RTLH dan peningkatan sanitasi juga sering kali menghambat pelaksanaan program secara efektif. Kurangnya koordinasi ini dapat menyebabkan program berjalan secara terpisah-pisah dan tidak terintegrasi, sehingga dampaknya tidak optimal.

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang baik dan pemeliharaan rumah yang layak juga turut memperburuk kondisi RTLH dan sanitasi. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, program perbaikan rumah atau sanitasi seringkali tidak berkelanjutan dan kurang efektif.

Terakhir, ketidakmerataan pembangunan infrastruktur sanitasi, seperti yang terjadi di Kota Pematangsiantar, menyebabkan akses terhadap sanitasi yang layak hanya terbatas di kawasan tertentu, sementara sebagian besar wilayah lainnya masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh fasilitas sanitasi yang memadai. Pemerintah Kota Pematangsiantar perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dan pembangunan fasilitas sanitasi, dengan fokus pada kawasan-kawasan yang paling membutuhkan perbaikan. Selain itu, penting untuk memperkuat koordinasi antar organisasi

perangkat daerah (OPD) dalam merencanakan dan melaksanakan program perbaikan RTLH serta pembangunan sanitasi agar dapat berjalan secara terintegrasi dan efektif.

Program rehabilitasi RTLH dan pembangunan sanitasi harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dengan pendekatan yang berbasis pada kebutuhan dan kondisi lokal guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas program. Pemerintah juga perlu memprioritaskan percepatan pembangunan infrastruktur sanitasi, terutama di daerah-daerah yang masih kekurangan akses sanitasi, seperti wilayah kumuh dan padat penduduk.

#### 2.4.4 Indeks Resiko bencana

Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan.

Resiko bencana di Kota Pematangsiantar dari Tahun 2017 sampai dengan 2023 terlihat tetap yakni 167,2. Angka ini tentu cukup tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Utara. Berdasarkan prioritas yang menjadi titik berat untuk dibenahi adalah prioritas 1, prioritas 3 dan prioritas 4. Prioritas 1 menyangkut perkuatan kebijakan dan kelembagaan, prioritas 3 menyangkut pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, dan prioritas 4 menyangkut penanganan tematik kawasan rawan bencana.

Tabel 2.44  
Capaian Indikator Resiko Bencana Tahun 2017-2023

No	Indikator	Satuan	Realisasi						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Resiko Bencana	Indeks	167,2	167,2	167,2	167,2	167,2	167,2	167,2

Sumber : inaRISK

#### 2.4.5 Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan

hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.

Untuk melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan PermenpanRB Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan evaluasi kinerja unit penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja unit penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB, Berikut capaian penyelenggaraan pelayanan publik Kota Pematangsiantar.

Tabel 2.45

Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2017-2023

No.	Indikator	Satuan	Realisasi						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	B (3,305)	B (3,68)
2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	n/a	n/a	n/a	44	37,77	14,10	25,76
3	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	B (86,85)

Sumber: Kemenpan RB Tahun 2022-2023

Kinerja Pemerintah Kota Pematangsiantar pada periode 2022-2023 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2022 dilakukan penilaian terhadap pelayanan publik di Kota Pematangsiantar meliputi Dinas DPM-PTSP yang memperoleh nilai 3,44 atau kategori B. Namun jika dilihat dari peringkat secara nasional capaian ini berada pada peringkat 330. Selain Dinas DPM-PTSP penilaian juga dilakukan terhadap Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil dengan nilai 3,17 atau kategori B. secara nasional capaian ini berada pada peringkat 356.

Memasuki Tahun 2023, penilaian penyelenggaraan pelayanan publik kecamatan, Dinas Sosial, dan RSUD. Masing-masing hasil nilai penyelenggaraan publik yakni kecamatan dengan nilai 3,88, Dinas Sosial 3,9, RSUD 3,27. Capaian Kota Pematangsiantar pada Tahun 2023 yakni 3,68 atau kategori B. Secara nasional capaian ini masih berada pada peringkat 186. Hasil capaian ini menunjukkan

penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Pematangsiantar sudah cukup baik, namun masih diperlukan peningkatan untuk lebih baik lagi dimasa mendatang. Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik diantaranya penyederhanaan dan publikasi prosedur pelayanan, peningkatan profesionalisme ASN, peningkatan sarana prasarana pelayanan, penggunaan sistem informasi yang memudahkan pelayanan, penyediaan sarana konsultasi dan pengaduan, serta pemanfaatan inovasi dalam pelayanan publik.

Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Kota Pematangsiantar menunjukkan hasil yang cukup baik yakni 86,85% masyarakat merasa puas terhadap layanan dari pemerintah. Namun masih perlu peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar pembangunan dan pelayanan lebih dapat dinikmati masyarakat.

Selain penyelenggaraan pelayanan publik, Inovasi sebagai cara kreatif dan baru dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan urusan lainnya masih kurang berkembang di Kota Pematangsiantar ditandai dengan nilai indeks inovasi daerah Tahun 2023 masih pada angka 25,76 atau kategori kurang inovatif. Capaian ini naik jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar 14,10, namun belum membaik jika dibandingkan dengan nilai Tahun 2021 sebesar 37,77 atau kategori inovatif. Kondisi ini terjadi karena kurangnya inovasi yang dikembangkan dan didaftarkan pada BSKDN Kementerian Dalam Negeri. Selain itu indikator penilaian dari Kementerian dalam Negeri lebih banyak dan penilaian yang lebih ketat.

Dalam rangka mendorong peningkatan inovasi dan kreativitas di Kota Pematangsiantar, telah diterbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah. Peraturan ini menetapkan kewajiban bagi setiap perangkat daerah untuk menghasilkan minimal satu inovasi baru setiap tahun sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Untuk mendukung implementasi kebijakan ini dan menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan, direncanakan pelaksanaan kompetisi internal tahunan antar perangkat daerah. Kompetisi ini akan diselenggarakan dengan mengusung tema-tema spesifik yang relevan dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga mampu mendorong terciptanya solusi kreatif yang berdampak signifikan bagi masyarakat. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat menanamkan budaya inovasi di setiap perangkat daerah, meningkatkan kolaborasi lintas sektor, serta mempercepat transformasi pelayanan publik yang adaptif dan berdaya saing.

#### 2.4.6 Indikator Bidang Pendidikan

Pembangunan pendidikan memiliki nilai strategis bagi penciptaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkarakter baik. Kewenangan urusan pendidikan kabupaten/kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangannya antara lain:

- a. Pengelolaan pendidikan dasar.

- b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- c. Pengelolaan pendidikan non formal;
- d. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
- e. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota;
- f. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- g. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan
- h. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota.

Berikut penyajian capaian indikator pendidikan disajikan menurut sub urusan kewenangan.

Tabel 2.46  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2017-2023

No.	Indikator	Satuan	Realisasi						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,96	11,08	11,15	11,16	11,29	11,31	11,58
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,01	14,02	14,21	14,45	14,57	14,59	14,60
3	Persentase Guru Kualifikasi S1/D-IV	%	87,52	92,04	91,34	90,9	87,5	92,25	94,34
4	Persentase Pendidik PAUD yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	52,63	37,82	66,42	48,45	73,55	78,32	74,94
5	Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6	%	39,07	41,15	40,24	41,12	43,94	46,3	39,07
6	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-15	%	87,7	87,07	76,85	77,62	77,49	88,99	87,7
7	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	1,84
8	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1,79	1,68
9	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1,88	1,91

No.	Indikator	Satuan	Realisasi						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1,75	1,75

Sumber : BPS, Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar

Kinerja Urusan Pendidikan di Kota Pematangsiantar secara umum terus meningkat pada periode 2017-2023. Hal ini tergambar secara makro melalui pencapaian Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang diatas level Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional pada Tahun 2023 sebesar 1,68 atau jenjang cakup untuk ukuran murid. Untuk tingkatan SMP berada pada angka 1,91 atau jenjang cakup untuk ukuran murid. Untuk Rata-rata kompetensi Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional sebesar 1,68 atau jenjang dasar untuk ukuran murid, dan Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional sebesar 1,75 atau jenjang dasar untuk ukuran murid.

Pada tahun 2023, terdapat kesenjangan dalam capaian kompetensi literasi dan numerasi di Kota Pematangsiantar yang perlu menjadi perhatian. Berdasarkan data, capaian kompetensi literasi di jenjang SD menunjukkan bahwa sekolah swasta memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah negeri. Sebaliknya, di jenjang SMP, sekolah negeri menunjukkan capaian literasi yang lebih unggul daripada sekolah swasta. Dalam hal numerasi, SMP negeri juga menunjukkan keunggulan dibandingkan dengan SMP swasta.

Kondisi ini mengindikasikan adanya disparitas dalam kualitas pendidikan antara berbagai jenis satuan pendidikan di masing-masing jenjang, yang dapat disebabkan oleh faktor seperti akses terhadap sumber daya pendidikan, kualitas tenaga pendidik, dukungan fasilitas belajar, serta keterlibatan masyarakat dan orang tua dalam proses pendidikan.

Bagi para pemangku kepentingan pendidikan, baik di tingkat pemerintah, institusi pendidikan, maupun masyarakat, tantangan ini perlu dijadikan prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara merata.

Tabel 2.47

Capaian Literasi dan numerasi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan kategori sekolah swasta dan negeri Kota Pematangsiantar Tahun 2023

Kategori Sekolah	Status	Capaian	
		Literasi (jumlah sekolah)	Numerasi (jumlah sekolah)
SD Negeri	Baik	23	19
	Tidak Tersedia	48	48
	Kurang	14	36
	Sedang	33	15
Jumlah		118	118

Kategori Sekolah	Status	Capaian	
		Literasi (jumlah sekolah)	Numerasi (jumlah sekolah)
SD swasta	Baik	31	13
	Tidak Tersedia	4	4
	Kurang	10	19
	Sedang	15	24
Jumlah		60	60
SMP Negeri	Baik	5	1
	Tidak Tersedia	1	1
	Kurang	1	9
	Sedang	9	5
Jumlah		16	16
SMP swasta	Baik	15	5
	Tidak Tersedia	34	34
	Kurang	8	20
	Sedang	15	13
Jumlah		72	72

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, 2023

#### 2.4.7 Indikator Bidang Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Bahkan untuk mendapatkan penghidupan yang layak di bidang kesehatan, amandemen kedua UUD 1945, Pasal 34 ayat (3) menetapkan: "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak". Di era otonomi daerah amanat amandemen dimaksud, mempunyai makna penting bagi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang layak, tanpa ada diskriminasi sosial, budaya, ekonomi dan politik. Secara umum pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh Puskesmas dan Rumah Sakit. Pelayanan Puskesmas masih didukung oleh beberapa Puskesmas Pembantu untuk mengoptimalkan pelayanan bidang kesehatan. Selain itu juga terdapat Rumah Sakit Umum Daerah serta beberapa Rumah Sakit Swasta. Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Urusan Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 2.48  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2017-2022

No	Indikator	Satuan	Realisasi						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 Kelahiran Hidup	3	2,92	0	3,72	0,93	3,74	6,88
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 Kelahiran Hidup	112,6	72,96	109,14	87,45	185,87	187,05	132,4

No	Indikator	Satuan	Realisasi						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	Persentase Penduduk yang Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan	%	n/a	90,04	89,42	85,05	85,92	92,66	98,41
4	BOR (Bed Occupancy Rate) RSUD Dr. Djasamen Saragih	%	24,83	14,47	14,63	10,22	7,48	7,60	9,89%
5	Prevalensi stunting	%	n/a	n/a	n/a	n/a	15	14,3	7,7
6	Capaian SPM Kesehatan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	92

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar

Setelah mendapatkan tekanan yang cukup besar pada saat Pandemi Covid-19, sektor kesehatan sejak akhir tahun 2021 telah mulai berangsur-angsur pulih. Capaian Angka Harapan Hidup Kota Pematangsiantar tetap yang tertinggi di Provinsi Sumatera Utara dan di atas level Nasional. Secara umum kinerja urusan kesehatan menunjukkan angka yang positif kecuali pada indikator angka kematian bayi dari 3,74 per 1000 kelahiran hidup menjadi 6,88 per 1000 kelahiran hirup. BOR (Bed Occupancy Rate) RSUD Dr. Djasamen Saragih juga mengalami penurunan dari 24,83% pada Tahun 2017 menjadi hanya 9,89% pada Tahun 2023. Rendahnya minat masyarakat yang memanfaatkan jasa pelayanan RSUD dr. Djasamen Saragih menjadi penyebab menurunnya BOR.

Berdasarkan SPM bidang kesehatan, capaian SMP bidang kesehatan Tahun 2023 sebesar 92%. Tentu kondisi ini masih belum tercapai sesuai yang diharapkan yakni 100%. Tantangan pembangunan kesehatan salah satunya dapat dilihat dari indikator indeks keluarga sehat. Indeks keluarga sehat Kota Pematangsiantar berada pada angka 0,26 pada Tahun 2023. Capaian ini dikategorikan pada keluarga tidak sehat. Beberapa indikator indeks keluarga sehat diantaranya akses air bersih, sanitasi layak, program KB, persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap, bayi mendapatkan ASI eksklusif, pemantauan pertumbuhan balita, penderita TB paru berobat sesuai standar, penderita hipertensi berobat teratur.

#### 2.4.8 Indikator Bidang Perumahan dan Permukiman

Kewenangan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 5 sub urusan meliputi Perumahan, Kawasan Permukiman, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Sarana Prasarana dan Utilitas (PSU), Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pembangunan prasarana dasar permukiman pada hakekatnya

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dan menyediakan pelayanan dasar dan konsekuensi pertumbuhan penduduk dan seiring dengan perkembangan kemajuan zaman. Capaian indikator kinerja utama dan urusan perumahan dan kawasan permukiman sebagai berikut.

Tabel 2.49  
Capaian Indikator Kinerja Urusan PRKP Tahun 2017-2023

No.	Indikator	Satuan	Realisasi						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas Permukiman Kumuh	Ha	188,00	164,53	157,82	157,82	154,94	156,78	156,78
2	Persentase rumah layak huni.	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	60	83,53
3	Persentase ketersediaan PSU	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	60	100

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Pematangsiantar Tahun 2017-2022

Kinerja luas permukiman kumuh mengalami penurunan ditandai dengan menurunnya luas permukiman kumuh dari 188 Ha Tahun 2017 menjadi 156,78 Tahun 2023. Namun jika dibandingkan kondisi luas permukiman kumuh tahun 2021, terjadi kenaikan di tahun 2023, kondisi ini terjadi karena di tahun sebelumnya terdapat kawasan kumuh yang belum didata. Salah satu persoalan terkait penanganan kawasan kumuh adalah belum terintegrasinya penanganan kumuh disuatu kawasan yang mengakibatkan kawasan kumuh yang direhabilitasi tetap kumuh. Belum terintegrasinya penanganan kawasan kumuh ini disebabkan masalah legalitas lahan dan pendataan by name by address yang belum optimal. Selain itu seiring bertumbuhnya jumlah penduduk dan kebutuhan terhadap permukiman turut menyumbang permasalahan kawasan kumuh ini.

Selain kawasan kumuh, isu yang lainnya adalah ketersediaan rumah layak huni. Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni (UU PKP). Capaian ketersediaan rumah layak huni Kota Pematangsiantar Tahun 2023 masih sebesar 83,53 %. Penyebab permasalahan tersebut adalah masih kurangnya tingkat perekonomian dan kesadaran masyarakat untuk bertempat tinggal dirumah yang layak huni.

Agar kawasan permukiman tidak menjadi kumuh dan layak dihuni, ketersediaan Prasarana Sarana Umum (PSU) perlu terus dilengkapi. PSU dikawasan perumahan dan permukiman merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau.

#### 2.4.9 Indikator Bidang Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat

melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dari kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. PMKS merupakan permasalahan sosial yang tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja tetapi masyarakat dan dunia swasta. Berikut indikator kinerja urusan sosial.

Tabel 2.50  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2017-2023

No	Indikator	Satuan	Realisasi						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase capaian SPM bidang sosial	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
2	Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial per KPS	Jiwa	12.882	13.583	13.200	15.236	13.893	135.794	113.603

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar

Penanganan PMKS menjadi hal yang sangat penting dalam mengurangi penduduk miskin di Kota Pematangsiantar karena PMKS merupakan salah satu penyumbang angka kemiskinan. Data yang valid dan pemberian bantuan yang tepat sasaran menjadi kunci utama dalam penanganan PMKS. Secara umum PMKS mengalami kenaikan yang ditandai dengan meningkatnya jumlah PMKS. Tercatat hingga akhir Tahun 2023 jumlah PMKS yang terdaftar pada DTKS Kementerian Sosial sebanyak 113.603. jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Pematangsiantar Tahun 2023 sebesar 274.838 diperoleh angka 41,33%. Kondisi ini menunjukkan semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan bantuan akibat permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Pematangsiantar.

#### 2.4.10 Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan memegang peranan penting dan strategis seperti bidang parlemen, tenaga manajer, profesi, administrasi, teknis dan mendapat kesempatan dalam berbagai lapangan pekerjaan. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari indeks pemberdayaan gender, partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT dan lain sebagainya). Indikator

kinerja utama dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut.

Tabel 2.51

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PA Tahun 2018-2023

No.	Indikator	Satuan	Realisasi						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	IPM Gender	%	95,18	95,32	95,46	95,65	95,82	95,96	95,94
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100
3	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang mendapat layanan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100
4	Persentase Korban Kekerasan Anak yang mendapat layanan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan gender di Kota Pematangsiantar telah memberikan hasil yang baik. Hal ini terlihat dari pencapaian IPM Gender yang lebih baik dari Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Tercatat IPM Gender mengalami kenaikan dari 95,18 Tahun 2017 menjadi 95,94 Tahun 2023. Capaian Persentase anak korban kekerasan yang ditangani, Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang mendapat layanan, dan Persentase Korban Kekerasan Anak yang mendapat layanan tercapai 100%. Namun masih ditemukan kasus kekerasan berbasis gender di Kota Pematangsiantar sebanyak 11 kasus pada Tahun 2023 dari 69 kasus pada Tahun 2018.

#### 2.4.11 Indikator Bidang Lingkungan Hidup

Kewenangan urusan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 6 sub urusan meliputi Perencanaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

Tabel 2.52  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017-2023

No.	Indikator	Satuan	Realisasi						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Pengelolaan Sampah	%	72,80	73,00	92,39	93,00	93,81	93,42	96,39
2	IKLH	Indeks	58,16	58,32	58,49	58,77	59,29	61,10	63,72
3	Indeks kualitas air	Indeks	51,95	52,05	52,15	52,56	53,71	50	65
4	Indeks kualitas udara	Indeks	83,59	83,69	83,79	83,89	83,89	83,41	84,86
5	Indeks kualitas lahan	Indeks	21,78	22,18	22,58	22,96	23,38	38,88	22,44

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar

Seiring bertambahnya aktivitas dan jumlah penduduk di Kota Pematangsiantar mengakibatkan bertambahnya produk buangan berupa sampah. Kinerja pengelolaan sampah meningkat dari 72,8% Tahun 2017 menjadi 96,39% Tahun 2023.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai salah satu indikator kinerja bidang lingkungan hidup juga masih belum optimal ditandai dari skor IKLH Tahun 2023 masih sebesar 63,72%. Kondisi ini disebabkan antara lain Indeks kualitas air yang masih rendah yakni 65 dan indeks kualitas tutupan lahan yang juga masih rendah yakni 22,44. Rendahnya indeks kualitas air dan udara salah satunya disebabkan aktivitas masyarakat yang belum memiliki pengolahan limbah. Kesadaran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dinilai masih rendah dilihat dari banyaknya masyarakat yang membuang sampah pada sembarang tempat, selain itu persentase perusahaan yang memiliki instalasi pengolahan limbah juga masih rendah yakni 27,5%.

Overloadnya TPA juga memberikan dampak pada belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup. Kondisi ini dapat dilihat dari keberadaan TPA eksisting yang sudah tidak mampu menampung sampah yang masuk. Menurut data capaian pengelolaan sampah tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar jumlah timbulan sampah mencapai 56.549,74 ton (96,39%) Sampah yang dilakukan proses pengurangan sebesar 14.574,74 ton (24,84%), dan penanganan sebesar 41.975,00 ton (71,55%). Untuk data rata-rata harian timbulan sampah per hari mencapai 160,73 ton/hari dengan rata-rata 0,5 kg/org/hari, yang dilakukan penanganan sampah (diangkut/diolah di TPA) mencapai ± 115 ton/hari (71,55%), dan melalui proses pengurangan sampah (pengomposan, bank sampah, daur ulang, guna ulang, sektor informal/botot, produk kreatif,dll) sebanyak ± 39 ton/hari (24,84%), dan sampah yang tidak terkelola mencapai ± 5,8 ton/hari (3,61%) karena tidak terjangkau layanan, dibakar, dibuang ke sungai/drainase, proses alam. Jika melihat kondisi luasan lahan TPA saat ini ± 2,4 Ha, dengan jumlah timbulan sampah saat ini ± 720.000

m<sup>3</sup>, sehingga kondisi TPA saat ini sudah penuh (overload) sehingga perlu dilakukan pengolahan sampah untuk mengurangi timbunan.

Selain itu, rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga menjadi permasalahan tersendiri di Kota Pematangsiantar. Data eksisting jumlah luasan ruang terbuka hijau di Kota Pematangsiantar saat ini sekitar 84.184 m<sup>2</sup> atau 8,42 Ha dengan status RTH berupa taman fasilitas, taman kota, pemakaman, jalur hijau seperti jalur pejalan kaki, sempadan kereta api. Dengan luasan 8,42 Ha jika dibanding dengan luas wilayah Kota Pematangsiantar, maka persentase RTH Kota Pematangsiantar saat ini hanya 0,11%. Masih sangat jauh dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mensyaratkan luasan RTH sebesar 30%, terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Untuk itu perlu upaya peningkatan luasan RTH sesuai dengan RTRW Kota Pematangsiantar baik dengan cara pengadaan lahan untuk RTH baru, selain mempertahankan luasan RTH yang ada saat ini.

Pengambilan air tanah yang tidak terkendali juga dinilai mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Kondisi ini dapat dilihat dari meningkatnya penggunaan sumur baik itu sumur gali dengan pompa dan sumur bor dengan pompa. Menurut data dari Perumda Tirtauli Pematangsiantar, untuk sumur gali dengan pompa ada 48 sambungan rumah tangga (SR), dengan jumlah sebanyak 209 jiwa. Untuk sumur bor dengan pompa ada sebanyak 4.452 sambungan rumah tangga (SR) dengan jumlah 18.131 jiwa.

## 2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2012 Nomor 4). Dengan memperhatikan kondisi umum dan perkembangan, maka visi RPJPD Kota Pematangsiantar tahun 2005-2025 adalah :

“Mewujudkan Kota Pematangsiantar sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, yang Mantap, Maju dan Jaya, dengan dukungan sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pariwisata.

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada masa dua puluh tahun kedepan, Kota Pematangsiantar diharapkan menjadi suatu kota perdagangan dan jasa yang maju, layak huni, mampu memberikan suasana nyaman bagi masyarakatnya, dan didukung oleh budaya multikultur dan masyarakat yang beradab, serta memiliki kemampuan dalam mengikuti dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan dalam pemanfaatannya secara bijaksana.

Untuk mewujudkan visi di atas ditempuh melalui misi sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

- 2) Mendorong Terwujudnya Masyarakat Madani (Civil Society) dengan Budaya Politik dan Hukum yang Beradab dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional dan Budaya Multikultural.
- 3) Mendorong Pembangunan Masyarakat yang Berkualitas dan Mampu Menguasai serta Menerapkan Sains dan Teknologi Tanpa Mengabaikan Nilai-Nilai Budaya Lokal.
- 4) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Disertai dengan Upaya Perbaikan Pendapatan Masyarakat.
- 5) Mengembangkan Pembangunan Ruang dan Infrastruktur yang Berkelanjutan. Pelaksanaan RPJPD Kota Pematangsiantar direncanakan bertahap dengan lima tahunan pada setiap tahapan yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Berikut arah kebijakan RPJMD pada setiap tahapan.

#### 2.5.1 Arah Kebijakan RPJMD I (Periode Tahun 2005-2010)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar pada periode pertama diarahkan sebagai berikut:

- 1) Menghadirkan pemerintahan kota yang profesional dan merakyat dan dunia usaha yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman dan prinsip good governance.
- 2) Membangun dan mengembangkan Kota Pematangsiantar sebagai pusat informasi dan pintu gerbang pariwisata daerah kabupaten dan kota sekitarnya.
- 3) Mempertahankan dan melestarikan keragaman agama dan budaya kota yang menampilkan orkestra keragaman agama dan budaya.
- 4) Mengembalikan kehormatan Kota Pematangsiantar sebagai kota pendidikan bagi daerah kota dan kabupaten sekitarnya.
- 5) Mengembangkan dan membangun Kota Pematangsiantar sebagai kota agropolitan.
- 6) Membangun dan mengembangkan Kota Pematangsiantar sebagai pusat perdagangan dan distribusi regional.
- 7) Menghadirkan kawasan pemukiman yang aman, nyaman dan sehat.
- 8) Meningkatkan keamanan dan ketertiban.
- 9) Mengembangkan dan menyesuaikan tata ruang kota yang mendukung pencapaian misi lainnya.

#### 2.5.2 Arah Kebijakan RPJMD II (Periode Tahun 2010-2015)

Arah Kebijakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Periode kedua adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih.
- 2) Meningkatkan Kualitas Pendidikan.
- 3) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan.

- 4) Memperkuat Sistem Ekonomi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi.
- 5) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur.
- 6) Menata Sistem Pelayanan Publik Yang Lebih Baik Dan Profesional.
- 7) Menata Sistem Alokasi Dana Penggunaan Anggaran yang Efisien dan Pro Rakyat.

#### 2.5.3 Arah Kebijakan RPJMD III (Periode Tahun 2017-2022)

Arah kebijakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar periode ketiga adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Lanjut Kualitas Pelayanan Dasar bagi masyarakat.
- 2) Peningkatan daya saing dengan penguatan lembaga ekonomi masyarakat, koperasi dan sistem pendukung lainnya.
- 3) Pengembangan lanjut kompetensi SDM.
- 4) Pengembangan daya saing Regional Sektor Unggulan.
- 5) Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur menuju Kota Perdagangan dan Jasa yang unggul.

#### 2.5.4 Arah Kebijakan RPJMD IV (Periode Tahun 2022-2027)

Arah kebijakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar periode keempat adalah sebagai berikut:

- 1) Kualitas Pelayanan Dasar masyarakat yang mantap.
- 2) Pengembangan lanjut kompetensi SDM.
- 3) Pengembangan daya saing Regional dan Internasional Sektor Unggulan.
- 4) Pemeliharaan dan pengembangan lanjut Infrastruktur sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang unggul dan berdaya saing.

Dari hasil evaluasi RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025 dapat disimpulkan beberapa hal :

- a. Penetapan arah kebijakan dan sasaran pokok pada dokumen RPJPD tahun 2005-2025 tidak dilengkapi dengan penetapan target indikator sehingga menjadi relatif sulit untuk dievaluasi.
- b. Secara umum, capaian kinerja pembangunan jangka panjang Kota Pematangsiantar mampu mendorong realisasi atas visi dan misi dari RPJP Nasional.
- c. Beberapa capaian indikator pembangunan menunjukkan kinerja yang cukup baik seperti IPM, angka kemiskinan, Rasio Gini, dan beberapa aspek sosial, seni budaya, pelayanan umum, serta beberapa indikator pelayanan urusan pilihan. Namun, beberapa indikator lainnya memerlukan intervensi yang lebih masif terutama pada beberapa aspek ketenagakerjaan, sarana prasarana dan infrastruktur, serta tata kelola.
- d. Penyerapan Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan yang belum menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang tinggi sehingga relatif

membatasi ruang gerak fiskal daerah dalam memacu pembangunan untuk berjalan lebih kencang.

## 2.5.5 Pencapaian

### 2.5.5.1 Capaian Kinerja Indikator Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJPD Kota Pematangsiantar 2005-2025

Dokumen RPJPD Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025 masih menggunakan indikator kualitatif yang belum terukur. Untuk dapat mengukur capaian kinerja visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJPD Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025 dan sesuai arahan pada Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mengubah target sasaran pokok pada tiap periode/tahapan dan/atau arah kebijakan yang masih bersifat kualitatif tersebut menjadi data kuantitatif ke dalam indikator indikator makro pembangunan yang relevan.

Selanjutnya dari Tabel Capaian Kinerja Indikator Visi, Misi, Tujuan & Sasaran RPJPD Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025, dapat disimpulkan bahwa dari 7 (enam) indikator mengukur capaian kinerja berdasarkan realisasi diawal tahun perencanaan, terdapat 6 (lima) indikator yang kerjanya tercapai, yaitu Opini BPK, IPM, TPT, Angka Kemiskinan, PDRB Per Kapita dan Rasio Gini, sedangkan untuk indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi masih belum berhasil mencapai/melampaui realisasi pada tahun dasar perencanaan

Tabel 2.53  
Capaian Kinerja Indikator Visi, Misi, Tujuan & Sasaran RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025

Visi	Misi	Sasaran Pembangunan Jangka Panjang	Indikator	Kondisi Awal (2005)	Kondisi Akhir (2022)	Capaian (%)	Melampaui/Tercapai/Tidak Tercapai	Kriteria Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
wujudkan Kota Pematang Siantar sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, yang Mantap, Maju dan Jaya, dengan dukungan sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pariwisata	MISI 1 : Mengembangkan Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan yang prima dan bermutu pada berbagai sektor dan didukung oleh perangkat daerah yang memiliki profesionalitas dan kompetensi yang tinggi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dalam suasana politik, hukum, dan kamtibmas yang kondusif.	Opini BPK	TMP	WTP	100,00	Tercapai	Sangat Tinggi	Komitmen Kepala Pemerintahan dan seluruh apartur dalam mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat	Dinamika regulasi yang perlu penyesuaian dan tindak lanjut dalam tahapan implemtasi

	MISI 2 : Mendorong Terwujudnya Masyarakat Madani (Civil Society) dengan Budaya Politik dan Hukum yang Beradab dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional dan Budaya Multikultural	Terwujudnya masyarakat madani yang memiliki budaya politik dan hukum yang dewasa dan bermartabat dalam kerangka sistem hukum nasional dan budaya multikultural yang menjunjung tinggi nilai- nilai dalam peradaban global.	Tingkat Kemiskin an	10,96	7,88	139,09	Melampaui	Sangat Tinggi	Penyelenggaraa n pemerintahan yang taat hukum sehingga mendorong suasana yang konduusif	Belum optimalnya dorongan kebijakan dalam pemberian stimulan khususnya kepada usaha mikro
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-------	------	--------	-----------	------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	MISI 3 : Mendorong Pembangunan Masyarakat yang Berkualitas dan Mampu Menguasai serta Menerapkan Sains dan Teknologi Tanpa Mengabaikan Nilai-Nilai Budaya Lokal	Meningkatnya pembangunan masyarakat yang berkualitas melalui upaya pembangunan masyarakat secara komprehensif dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya dengan kemampuan menguasai dan menerapkan sains dan teknologi, serta melalui penggalan dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal.	IPM	75,81	79,7	105,13	Melampaui	Sangat Tinggi	Pemanfaatan sistem informasi berbasis elektronik oleh pemerintahan yang memudahkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Dinamika kebutuhan masyarakat yang memerlukan proses dalam pentapan regulasi dan implementasi
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	------	--------	-----------	------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	MISI 4 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Disertai dengan Upaya Perbaikan Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara efisien, efektif dan produktif melalui kegiatan perdagangan dan jasa secara optimal tanpa meninggalkan aktivitas ekonomi	Pertumbu han Ekonomi	5,77	3,47	60,14	Tidak Tercapai	Sedang	Letak geografis Kota Pematang Siantar sebagai daerah penghubung dari Medan ke Kawasan Danau Toba akan memberikan dampak positif terhadap sektor perdagangan dan pariwisata	Rasio kemandirian fiskal yang belum optimal sehingga membatasi kemampuan pemerintah dalam mendorong percepatan pembanguna n
			Pendapat an per Kapita	12.675. 545	71.030 .850	560,38	Melampaui	Sangat Tinggi		

		pelengkap dan pendukung lainnya yang mendukung peningkatan nilai tambah (added value) bagi perekonomian masyarakat serta memberikan perlindungan yang memadai terhadap sektor informal terutama bagi usaha skala mikro, kecil, dan menengah serta meningkatkan pendistribusian pendapatan yang semakin merata bagi seluruh masyarakat	Ketimpangan Pendapatan	0,333	0,321	103,74	Melampaui	Sangat Tinggi		
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	-------	-------	--------	-----------	---------------	--	--

	MISI 5 : Mengembangkan Pembangunan Ruang dan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Meningkatnya ruang kota, penyediaan infrastruktur yang memadai, dan pengembangan wilayah kota secara efektif dan efisien yang mendukung berbagai aktifitas masyarakat dengan melaksanakan prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development)	Tingkat Pengangg uran	15,12	9,36	161,54	Melampaui	Sangat Tinggi	Komitmen pemerintahan Kota yang tinggi dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan	Masih belum optimalnya penguatan sarana dan prasarana infrastruktur
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-------	------	--------	-----------	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

## 2.5.5.2 Capaian Periode RPJMD

### 2.5.5.2.1 Capaian RPJMD Kota Pematangsiantar 2005-2010

Pada periode ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan, penataan pelayanan publik yang semakin baik dan pemerataan pembangunan infrastruktur. Peningkatan perekonomian didukung oleh pembangunan sektor perdagangan dan jasa sebagai leading sector. Di lain pihak, Pemko Pematang Siantar juga berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan pelayanan birokrasi, demokrasi dan stabilitas daerah. Di samping itu, dilakukan upaya peningkatan pengelolaan sumber daya daerah serta mendorong tumbuh kembangnya investasi di daerah.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan pencapaian PDRB perkapita Kota Pematang Siantar meningkat dari Rp.11.085.733 tahun 2005 menjadi Rp.17.739.554 di tahun 2010. Sektor perdagangan sebagai leading sector juga mengalami pertumbuhan yang baik. Pada tahun 2005, nilai sektor perdagangan dalam PDRB ADHB Kota Pematang Siantar mencapai Rp.714 miliar, dan pada tahun 2010, tumbuh menjadi Rp.1.416 miliar. Pelaksanaan pelayanan publik yang semakin baik dengan menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik mengalami perubahan melalui peningkatan pencapaian SAKIP. Pembangunan Sumber Daya Manusia juga semakin membaik melalui peningkatan capaian IPM yang mengalami perubahan dari 75,81 (2005) menjadi 77,51 (2010). Dalam bidang investasi, jumlah Penanaman Modal di Kota Pematang Siantar mengalami pertumbuhan. Untuk nilai investasi pada tahun 2005 mencapai Rp.671,99 miliar dan pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp.1.542,93 miliar.

### 2.5.5.2.2 Capaian RPJMD Kota Pematangsiantar 2010-2015

Pada periode kedua RPJMD ini, Pemerintah Kota Pematangsiantar berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan tata pemerintahan, meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan, meningkatnya pelayanan dan derajat kesehatan serta menurunnya angka kemiskinan. Upaya lainnya yaitu memperkuat ekonomi UMKM, meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas infrastruktur, sinkronisasi RTRW terhadap pengembangan kawasan perkotaan, mendorong pergerakan sektor riil melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Selain itu, Pemerintah Kota juga berharap adanya peningkatan kerjasama ekonomi dan pengembangan pariwisata.

Kualitas pengelolaan tata pemerintahan jika ditinjau dari opini BPK belum menunjukkan adanya peningkatan, dimana tahun 2010 yang berpredikat WDP dan di tahun 2015 juga masih berpredikat WDP. Aksesibilitas pendidikan mengalami perbaikan yang ditandai dengan capaian rata-rata lama sekolah tahun 2010 dari 10,39 tahun meningkat di tahun 2015 menjadi 10,73 tahun. Perbaikan kualitas pendidikan juga dapat dilihat dari meningkatnya angka melek huruf sejak tahun 2010 hingga 2015 dari 99,45 persen menjadi 99,57 persen. Angka harapan

hidup meningkat sejak 2010 hingga 2015, dari 71,44 tahun menjadi 72,29 tahun, capaian ini mencerminkan adanya peningkatan pada pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat Pematang Siantar. Pemerintah Kota juga berkomitmen dalam pemberantasan kemiskinan, yang dapat dilihat dari turunnya angka kemiskinan dari 11,72 persen di tahun 2010 menjadi 10,47 persen pada tahun 2015. Perekonomian kota semakin menggeliat yang ditandai dengan meningkatnya kesempatan kerja dari 87,69 (2010) menjadi 89,66 persen (2015). Dari sisi infrastruktur, kondisi mantap jalan meningkat sejak 2010 hingga 2015 dari 73,07 persen menjadi 76,11 persen. Penguatan UMKM yang mendorong perekonomian sektor riil dicerminkan dari meningkatnya jumlah usaha industri kecil dari 529 unit usaha di tahun 2010 menjadi 537 usaha di tahun 2015. Disahkannya Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar Tahun 2012-2032 pada periode ini sebagai bentuk penyesuaian muatan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Pengembangan pariwisata di Pematang Siantar dapat mendorong sektor akomodasi dan makan minum untuk tumbuh dan berkembang dengan peningkatan kontribusi ekonomi dari 5,33 persen menjadi 5,93 persen. Jumlah wisatawan juga mengalami peningkatan dari 611.486 jiwa (2017) menjadi 753.000 jiwa di tahun 2021. Ada sebanyak 5 kegiatan pameran wisata di tahun 2021, dimana sebelumnya di tahun 2017 hanya 2 kegiatan pameran.

#### 2.5.5.2.3 Capaian RPJMD Kota Pematangsiantar 2017-2022

Pada periode ketiga ini diharapkan terjadinya peningkatan lanjut kualitas pelayanan dasar, peningkatan daya saing dengan penguatan lembaga ekonomi masyarakat, koperasi, dan sistem pendukung lainnya. Selain itu pada periode ini Pemerintah Kota berupaya untuk melakukan pengembangan lanjut kompetensi SDM, pengembangan daya saing regional sektor unggulan, dan pemeliharaan pengembangan infrastruktur menuju kota perdagangan dan jasa yang unggul. Berbagai indikator pelayanan dasar menunjukkan peningkatan pencapaian. Di antaranya indikator pendidikan seperti rata-rata lama sekolah dari tahun 2017 hingga 2022 yang meningkat dari 10,98 tahun menjadi 11,31 tahun. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 juga meningkat dari 84,13 persen di tahun 2017 menjadi 88,84 persen. Peningkatan capaian juga terjadi pada bidang kesehatan, antara lain ditunjukkan dengan penurunan angka kematian bayi dari 3/1000 KH (2017) menjadi 0,93/1000 KH (2021). Dari sisi infrastruktur masih terlihat kurang baik, antara lain tercermin dari rasio jalan dalam keadaan baik di tahun 2017 yang sebesar 90,18 persen, namun di tahun 2021 turun menjadi 81,12 persen. Bertambahnya jumlah koperasi aktif dari 100 unit (2017) menjadi 111 unit (2021) dan jumlah UKM dari 17.474 usaha (2017) menjadi 28.869 unit (2021) diharapkan dapat memperkuat daya saing perekonomian kota. Pengembangan kompetensi SDM belum terlihat memuaskan jika dilihat dari

jumlah tenaga kerja lulusan S1/S2/S3 yang sebanyak 180 orang di tahun 2017 dan hanya 1 orang yang ada di tahun 2021. Pandemi Covid-19 cukup dalam memengaruhi indikator ini. Kondisi pandemi justru menambah kompetensi SDM dari sisi kesehatan, dimana terjadi peningkatan rasio dokter dari 0,85 di tahun 2017 menjadi 0,88 per 1000 penduduk di tahun 2021. Ciri khas Kota Pematang Siantar sebagai kota perdagangan semakin tercermin dari meningkatnya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian. Pada tahun 2017 kontribusi sektor perdagangan sebesar 24,53 persen meningkat menjadi 26,79 di tahun 2022. Kinerja daya saing kota dalam perekonomian menunjukkan perkembangan yang cukup berarti, dengan capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2017 yang sebesar 4,41 persen kemudian meningkat hingga 4,82 persen. Munculnya pandemi membuat perekonomian berkontraksi -1,89 persen, dan mulai mengalami pemulihan hingga tahun 2022, dengan kinerja pertumbuhan sebesar 3,47 persen. Daya saing juga terlihat dari bertambahnya jumlah investasi PMDN dan PMA dari 216 unit di tahun 2017 menjadi 246 unit usaha pada tahun 2021. Namun jumlah industri kecil dan menengah di Pematang Siantar sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 606 unit di tahun 2017 menjadi 577 unit di tahun 2021. Sementara itu jumlah industri besar belum mengalami perkembangan berarti dengan penurunan jumlah dari 6 unit (2017) menjadi 5 unit (2021).

#### 2.5.5.3 Kemandirian fiskal dan pencapaian infrastruktur

Dengan masih menggunakan perhitungan yang lama, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2005, kapasitas fiskal Kota Pematangsiantar pada Tahun 2005 sebesar 0,7174 atau kategori sedang. Dan dengan menggunakan perhitungan baru, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023, Kapasitas Fiskal Kota Pematangsiantar Tahun 2023 sebesar 0,957 atau kategori rendah. Melihat capaian fiskal Kota Pematangsiantar yang demikian, Kota Pematangsiantar sangat tergantung dari dana perimbangan pusat untuk membiayai pembangunan. Untuk itu dibutuhkan penguatan rasio kemandirian fiskal Kota, baik dengan strategi ekstensifikasi maupun intensifikasi.

Strategi ekstensifikasi yang didapat dilakukan diantaranya memanfaatkan potensi sektor perdagangan dan jasa, melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya dengan memanfaatkan layanan digital untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025 masih terdapat beberapa indikator yang perlu intervensi yang lebih masif, diantaranya adalah sarana prasarana dan infrastruktur. Secara umum pencapaian sarana prasarana dan infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.54  
Capaian Sarana Prasarana dan Infrastruktur Tahun 2005 dan 2023  
Kota Pematangsiantar

No	Uraian	Capaian	
		2005	2023
1	Infrastruktur Jalan		
	Baik	74,09%	85,23%
	Sedang	6,58%	6,12%
	Rusak	12,93%	4,78%
	Rusak berat	6,39%	3,87%
2	Air minum		
	Pel. Rumah tangga	46295	68780
	Pel. Perusahaan/hotel	1578	1495
	Pel. Rumah ibadah	522	595
	Cakupan air bersih	80,72	98,96
3	Listrik		
	Produksi aliran listrik (kwh)	106.119.639	856.249.122,5
	Pelanggan	65.527	649.966

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar 2023

Dari tabel di atas dapat diambil gambaran pembangunan infrastruktur Kota Pematangsiantar pada 2005 dan 2023. Untuk infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebesar 74,09% di tahun 2005 dan 85,23% Tahun 2023. Dari segi jumlah panjang jalan, pada Tahun 2005 panjang jalan di Kota Pematangsiantar sepanjang 313.887 km, dan meningkat menjadi 580.548 km pada Tahun 2023 atau bertambah sebanyak 266.661 km dalam kurun waktu 2005-2023. Jumlah pelanggan Air bersih sebanyak 48.395 pada Tahun 2005 dan sebanyak 70.870 pada Tahun 2023 atau terjadi peningkatan sebanyak 22.475 pelanggan pada periode 2005-2023. Sedangkan dari sisi cakupan air bersih, pada Tahun 2005 cakupan sebesar 80,72% dan pada Tahun 2023 sebesar 98,96%. Untuk produksi aliran listrik, pada Tahun 2005 sebesar 106.119.639 kwh dan Tahun 2023 sebesar 856.249.122,5 kwh atau bertambah sebanyak 750129483,48 kwh dalam kurun waktu 2005-2023.

#### 2.5.6 Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan identifikasi faktor pendorong, penghambat, dan kesimpulan di atas, berikut hal-hal yang menjadi catatan rekomendasi untuk menjadi dasar dalam penyusunan dokumen RPJPD Kota Pematangsiantar periode mendatang:

- a. Penguatan kebijakan untuk perbaikan aspek ketenagakerjaan dengan memberikan stimulan, khususnya kepada usaha mikro dan kecil agar dapat beralih status menjadi usaha menengah serta beberapa upaya lain yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih baik.

- b. Memperkuat rasio kemandirian fiskal Kota, baik dengan strategi ekstensifikasi maupun intensifikasi.
- c. Percepatan pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur Kota baik fisik maupun digital yang mendukung dalam peningkatan interaksi perekonomian, penguatan Kota Pematangsiantar sebagai pusat distribusi regional, perbaikan, dan/atau penambahan fasilitas pendidikan, kesehatan, serta mendukung kota yang layak huni.
- d. Penguatan intervensi kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan, pemerataan sosial ekonomi, pembangunan inklusif dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif yang didukung dengan peningkatan SDM dalam pemenuhan ketiganya.
- f. Penguatan kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing, Unggul dan Berkarakter dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, perlindungan perempuan dan anak serta pelestarian budaya.

Tabel. 2.55  
 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pencapaian RPJPD 2005-2025  
 Kota Pematangsiantar

FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
Letak geografis Kota Pematangsiantar sebagai daerah penghubung dari arah Medan menuju Kawasan Destinasi Wisata Danau Toba serta adanya tol Medan-Tebing Tinggi semakin mendorong peningkatan UMKM untuk terlibat pada sektor pariwisata dan perdagangan.	Indikator pada aspek ketenagakerjaan yang kurang baik disebabkan beberapa hal, di antaranya yaitu belum optimalnya dorongan kebijakan dalam memberikan stimulan, khususnya kepada usaha mikro dan kecil agar dapat beralih status menjadi usaha menengah dan besar sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.
Penyelenggaraan pemerintahan yang taat hukum mendorong suasana kondusif di Kota Pematangsiantar .	Rasio kemandirian fiskal yang belum membaik berdampak kepada terbatasnya kemampuan keuangan dalam mendorong percepatan pembangunan.
Kemampuan aparatur dalam melayani masyarakat yang semakin meningkat mendorong peningkatan kepuasan masyarakat.	Masih minimnya capaian penguatan sarana prasarana dan infrastruktur berdampak kepada lemahnya dorongan terhadap peningkatan beberapa aspek penting pembangunan.
Pemanfaatan sistem informasi berbasis elektronik oleh aparatur dalam memberikan pelayanan mendukung perbaikan beberapa aspek kependudukan dan kesehatan.	Dinamika kebutuhan masyarakat yang menyebabkan penyesuaian regulasi pemerintahan atasan yang cukup cepat dan berdampak kepada proses tata kelola pemerintahan.
Komitmen Pemerintahan Kota yang tinggi dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan.	

Sumber : Evaluasi RPJPD 2005-2025 Kota Pematangsiantar

## 2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

### 2.6.1 Proyeksi Kependudukan

Proyeksi penduduk merupakan suatu penghitungan ilmiah yang didasarkan komponen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk dimasa yang akan datang. Komponen-komponen tersebut akan menentukan besaran jumlah penduduk dan struktur penduduk. Proyeksi penduduk perlu dilakukan karena dinamika struktur penduduk yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan struktur penduduk umumnya terjadi pada distribusi usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, serta kondisi penduduk di perkotaan dan perdesaan.

Pemahaman terhadap dinamika struktur penduduk diharapkan dapat memberi masukan bagi kebutuhan penyediaan jenis layanan sarana dan prasarana suatu wilayah. Dari data proyeksi struktur penduduk dan proyeksi kebutuhan tersebut kemudian diharapkan dapat disusun suatu rencana yang dapat memenuhi kebutuhan sesuai dinamika kependudukan. Salah satu target dari perencanaan kebutuhan ini adalah terjadinya pemerataan pembangunan yang dapat menekan ketimpangan dalam mengakses layanan maupun infrastruktur dasar. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pembangunan Indonesia Emas terkait upaya pengarusutamaan gender, dimana diharapkan Indeks Ketimpangan Gender dan Rasio Ketergantungan tidak meningkat atau bahkan dapat menurun hingga tahun 2045 di Kota Pematangsiantar.

#### 2.6.1.1 Proyeksi Perkembangan Jumlah penduduk

Pengkajian terhadap tingkat pertumbuhan penduduk dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik pertumbuhan jumlah penduduk per lima tahun sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk menentukan jumlah penduduk sampai dengan tahun 2045. Dengan mengamati karakteristik perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Kota Pematangsiantar maka dapat diperkirakan kecenderungan pola perkembangan penduduk secara umum sampai dengan tahun 2045 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

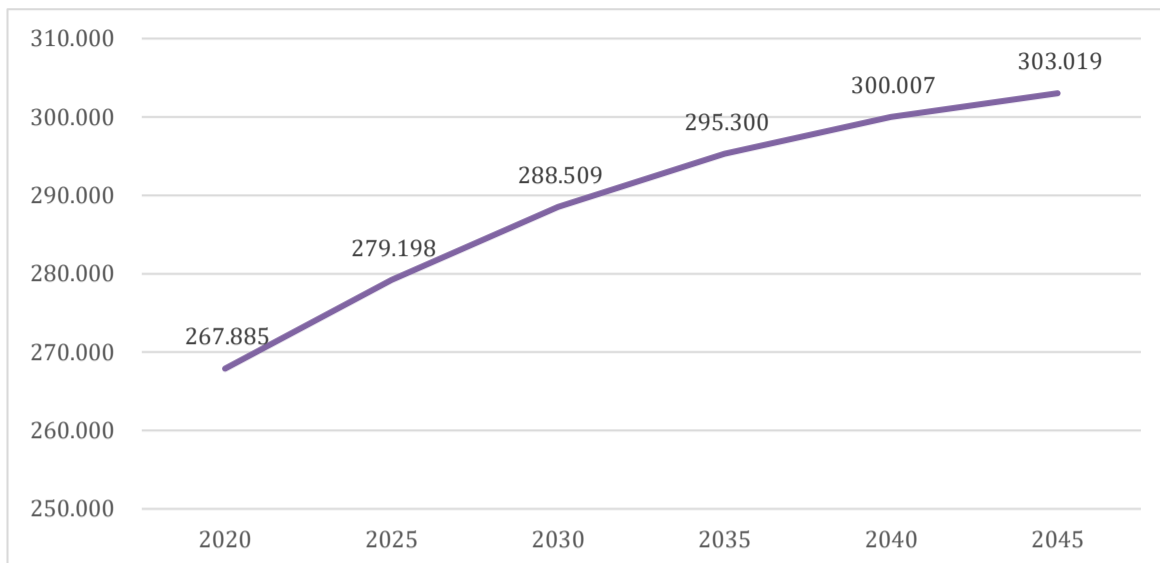
Tabel 2.56  
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Pematangsiantar Tahun 2020-2045

Kota	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Pematangsiantar	267.855	279.198	288.509	295.300	300.007	303.019

Sumber: BPS Kota Pematangsiantar, 2023

Berdasarkan data BPS Kota Pematangsiantar, pada tahun 2025 jumlah penduduk Kota Pematangsiantar diproyeksikan mencapai 279.198 jiwa, meningkat sebesar 3,33 % menjadi 288.509 jiwa pada tahun 2030. Selanjutnya, terjadi peningkatan sebesar 2,35% menjadi 295.300 jiwa pada tahun 2035, lalu meningkat lagi sebesar 1,59 % menjadi 300.007 jiwa pada tahun 2040. Peningkatan terakhir

terproyeksikan sebesar 1,00% pada tahun 2045, mencapai jumlah penduduk sebanyak 303.019 jiwa



Gambar 2.32  
 Grafik Proyeksi Penduduk Kota Pematangsiantar Tahun 2020-2045  
 Sumber : BPS Kota Pematangsiantar, diolah

#### 2.6.1.2 Proyeksi Kepadatan Penduduk

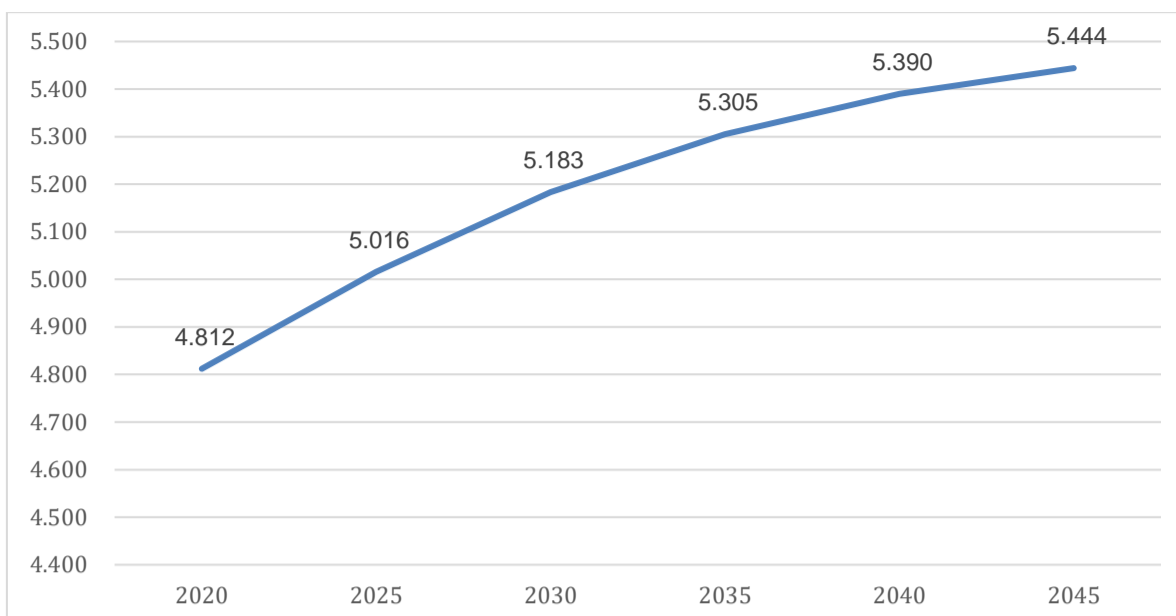
Angka kepadatan penduduk dilihat dari perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah suatu daerah Perhitungan tersebut sebagai dasar kebijakan pemerataan penduduk dalam program transmigrasi. Klasifikasi kepadatan penduduk menurut SNI 03- 6981-2004 disebut rendah ketika kepadatan penduduk kurang dari 150 jiwa/ha, sedang ketika diantara 151–200 jiwa/ha, tinggi ketika kepadatan antara 201–400 jiwa/ha dan sangat padat ketika lebih dari 400 jiwa/ha. Proyeksi distribusi penduduk dalam kurun waktu 2025-2045 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.57  
 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045

Kota	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Pematangsiantar	4812	5016	5183	5305	5390	5444

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dalam rentang waktu 20 tahun, mulai dari tahun 2025 hingga 2045, diproyeksikan bahwa kepadatan penduduk di Kota Pematangsiantar akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Pada tahun 2025, diperkirakan kepadatan penduduk di Kota Pematangsiantar mencapai 5,016 jiwa/km<sup>2</sup>. Selanjutnya, diprediksi bahwa angka ini akan terus meningkat setiap tahunnya, mencapai proyeksi kepadatan penduduk sebesar 5.444 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2045.



Gambar 2.33  
 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Pematangsiantar Tahun 2020-2045  
 Sumber : BPS Kota Pematangsiantar, diolah

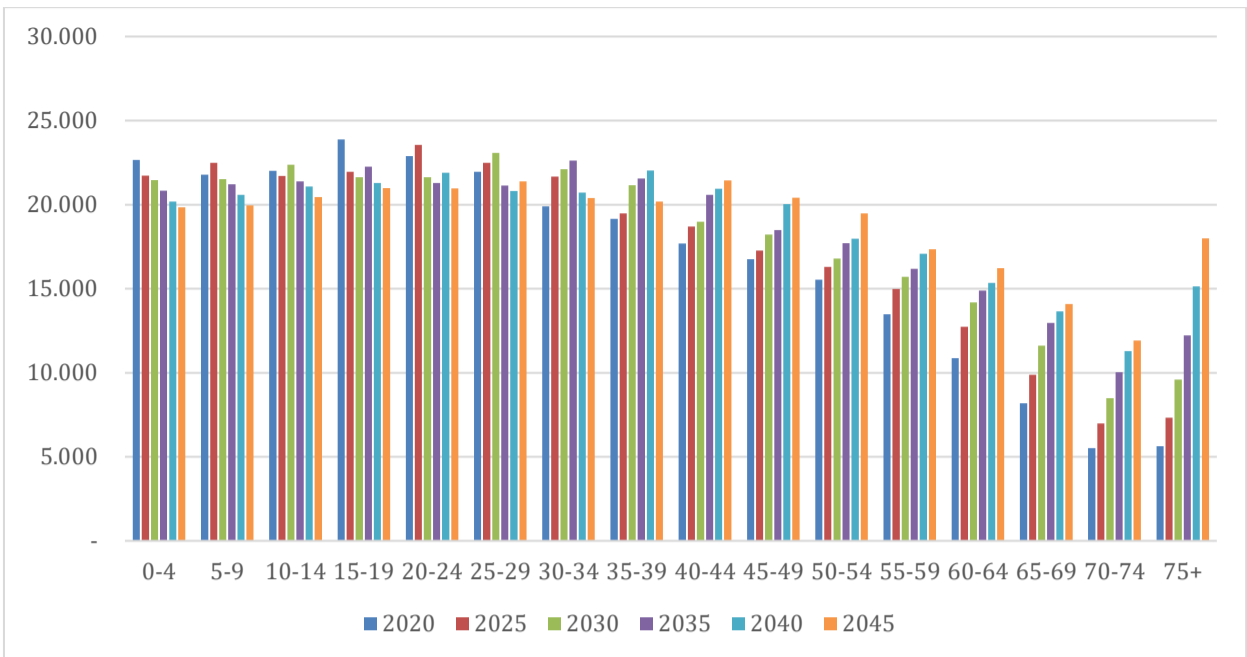
### 2.6.1.3 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Berdasarkan kelompok usia, proyeksi jumlah penduduk usia 0-29 tahun selama periode 2025-2045 menunjukkan kecenderungan penurunan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya angka kelahiran yang dipengaruhi oleh perubahan pola hidup masyarakat, terutama perempuan, baik dari segi pendidikan maupun pendapatan/pekerjaan. Sementara itu, proyeksi jumlah penduduk untuk kelompok usia 30-75+ cenderung mengalami kenaikan.

Tabel 2.58  
 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Pematangsiantar Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2020-2045

Kelompok Umur	2020	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	22.663	21.728	21.450	20.824	20.188	19.830
5-9	21.781	22.479	21.515	21.211	20.585	19.953
10-14	22.010	21.706	22.366	21.380	21.076	20.456
15-19	23.871	21.949	21.629	22.262	21.287	20.984
20-24	22.886	23.546	21.622	21.284	21.895	20.957
25-29	21.957	22.488	23.085	21.142	20.806	21.383
30-34	19.895	21.664	22.108	22.619	20.706	20.385
35-39	19.157	19.484	21.160	21.546	22.038	20.182
40-44	17.685	18.691	18.975	20.573	20.948	21.435
45-49	16.752	17.263	18.219	18.478	20.038	20.409
50-54	15.543	16.291	16.784	17.704	17.963	19.485
55-59	13.470	14.985	15.711	16.177	17.083	17.345
60-64	10.864	12.729	14.181	14.877	15.336	16.219
65-69	8.174	9.875	11.610	12.969	13.642	14.094
70-74	5.520	6.987	8.495	10.036	11.280	11.914
75+	5.627	7.333	9.599	12.218	15.136	17.988
<b>Jumlah</b>	<b>267.855</b>	<b>279.198</b>	<b>288.509</b>	<b>295.300</b>	<b>300.007</b>	<b>303.019</b>

Sumber : BPS Pematangsiantar, diolah



Gambar 2.34  
 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Pematangsiantar Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2020-2045  
 Sumber : BPS Kota Pematangsiantar, diolah

#### 2.6.1.4 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin

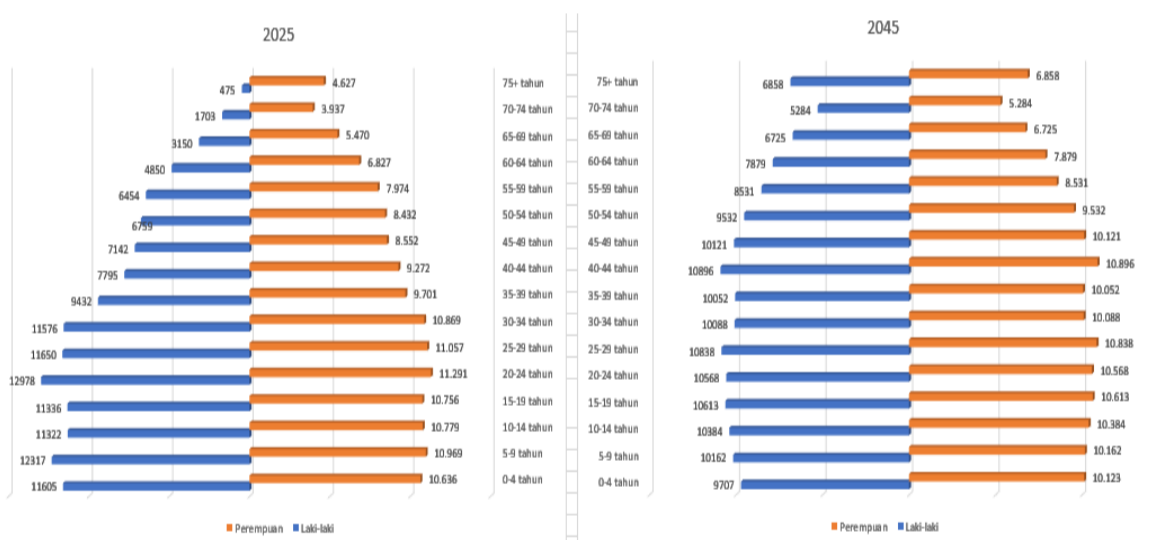
Komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin dari tahun 2025 hingga 2045 mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2025 hingga 2030 diproyeksikan piramida penduduk Kota Pematangsiantar berbentuk Piramida stasioner berbentuk granat atau segi empat dengan jumlah penduduk paling banyak pada usia produktif. Sedangkan memasuki tahun 2035-2045 piramida penduduk di Kota Pematangsiantar diproyeksikan berbentuk Piramida konstruktif memiliki bentuk seperti batu nisan atau guci terbalik dengan jumlah penduduk usia 40-44 tahun lebih besar dibanding penduduk usia lainnya. Pada tahun 2045 terlihat peningkatan jumlah penduduk usia di atas 75 tahun yang menunjukkan angka harapan hidup yang lebih baik.

Tabel 2.59  
 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Pematangsiantar Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2020-2045

Jenis Kelamin	Kelompok Umur	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	0-4	11.635	11.092	10.947	10.627	10.305	10.123
	5-9	10.998	11.510	10.960	10.801	10.480	10.162
	10-14	11.270	10.927	11.416	10.858	10.704	10.384
	15-19	12.459	11.193	10.844	11.319	10.764	10.613
	20-24	11.646	12.255	10.999	10.643	11.103	10.568
	25-29	11.054	11.431	12.005	10.752	10.401	10.838
	30-34	10.089	10.795	11.124	11.645	10.424	10.088
	35-39	9.670	9.783	10.435	10.730	11.230	10.052
	40-44	8.935	9.419	9.507	10.124	10.409	10.896
	45-49	8.106	8.711	9.166	9.240	9.841	10.121
	50-54	7.361	7.859	8.443	8.874	8.949	9.532
	55-59	6.361	7.011	7.482	8.037	8.456	8.531
	60-64	4.947	5.902	6.508	6.948	7.475	7.879
65-69	3.659	4.405	5.268	5.819	6.233	6.725	

Jenis Kelamin	Kelompok Umur	2020	2025	2030	2035	2040	2045
	70-74	2.289	3.050	3.685	4.422	4.911	5.284
	75+	1.962	2.706	3.694	4.719	5.849	6.858
	Jumlah	132.441	138.049	142.483	145.558	147.534	148.654
Perempuan	0-4	11.028	10.636	10.503	10.197	9.883	9.707
	5-9	10.783	10.969	10.555	10.410	10.105	9.791
	10-14	10.740	10.779	10.950	10.522	10.372	10.072
	15-19	11.412	10.756	10.785	10.943	10.523	10.371
	20-24	11.240	11.291	10.623	10.641	10.792	10.389
	25-29	10.903	11.057	11.080	10.390	10.405	10.545
	30-34	9.806	10.869	10.984	10.974	10.282	10.297
	35-39	9.487	9.701	10.725	10.816	10.808	10.130
	40-44	8.750	9.272	9.468	10.449	10.539	10.539
	45-49	8.646	8.552	9.053	9.238	10.197	10.288
	50-54	8.182	8.432	8.341	8.830	9.014	9.953
	55-59	7.109	7.974	8.229	8.140	8.627	8.814
	60-64	5.917	6.827	7.673	7.929	7.861	8.340
	65-69	4.515	5.470	6.342	7.150	7.409	7.369
	70-74	3.231	3.937	4.810	5.614	6.369	6.630
	75+	3.665	4.627	5.905	7.499	9.287	11.130
	Jumlah	135.414	141.149	146.026	149.742	152.473	154.365
TOTAL PENDUDUK		267.855	279.198	288.509	295.300	300.007	303.019

Sumber : BPS Pematangsiantar, diolah



Gambar 2.35  
Piramida Penduduk Kota Pematangsiantar Tahun 2025 dan 2045  
Sumber : BPS Kota Pematangsiantar, diolah

Jumlah penduduk Kota Pematangsiantar pada kelompok umur muda (0-14 tahun) lebih banyak laki-laki dibanding perempuan yang tercermin dari rasio jenis kelamin sebesar 103,54 pada tahun 2025 dan 103,72 pada tahun 2045. Artinya bahwa terdapat 104 penduduk laki-laki dari setiap 100 penduduk perempuan. Pada kelompok umur produktif yaitu 15-64 tahun lebih banyak perempuan dibanding laki-laki dengan rasio jenis kelamin sebesar 99,61 pada tahun 2025 dan 99,45 pada tahun 2045 yang artinya bahwa terdapat 100 penduduk laki-laki pada setiap 100 penduduk perempuan. Sementara di kelompok umur tua 65 tahun

keatas lebih banyak perempuan dibanding laki-laki dengan rasio jenis kelamin sebesar 72,40 pada tahun 2025 dan 75,08 pada tahun 2045 yang artinya bahwa terdapat 72 penduduk laki-laki pada setiap 100 penduduk perempuan di tahun 2025 dan terdapat 75 penduduk laki-laki pada setiap 100 penduduk perempuan di tahun 2045. Hal ini mengindikasikan bahwa akan semakin meningkat angkatan kerja laki-laki yang akan bersaing dalam memasuki dunia kerja. Budaya masyarakat yang lebih bertumpu kepada laki-laki untuk mencari nafkah memberi peluang lebih besar laki-laki untuk bekerja dibandingkan perempuan untuk bekerja.

Rasio ketergantungan menggambarkan beban tanggungan ekonomi yang harus ditanggung kelompok umur produktif terhadap kelompok umur muda dan tua. Semakin kecil angka rasio ketergantungan, semakin kecil pula beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk umur tidak produktif, dan begitu juga sebaliknya. Angka rasio ketergantungan Pematangsiantar tahun 2025 sebesar 47,65 artinya bahwa dari 100 penduduk umur produktif harus menanggung 48 penduduk umur tidak produktif baik itu dari kelompok anak-anak maupun usia produktif dari kelompok lansia pada tahun 2045 terjadi peningkatan dimana ratio ketergantungan sebesar 52,44 artinya bahwa dari 100 penduduk umur produktif harus menanggung 52 penduduk umur tidak produktif baik itu dari kelompok anak-anak maupun usia produktif dari kelompok lansia. Bila dilihat lebih rinci lagi, terlihat bahwa angka ketergantungan anak-anak lebih besar dibanding angka ketergantungan lansia. Hal ini dapat diartikan bahwa beban tanggungan anak-anak adalah yang paling berperan dalam besarnya beban tanggungan total. Di tahun 2045 angka ketergantungan lansia menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan akibat dari meningkatnya jumlah penduduk di atas 75 tahun.

Tabel 2.60  
Ratio Jenis Kelamin dan Ratio Ketegantungan Kota Pematangsiantar  
Tahun 2025 dan Tahun 2045

Kelompok Umur	Tahun 2025				Kelompok Umur	Tahun 2045			
	Jenis Kelamin		Jumlah	Ratio Jenis Kelamin		Jenis Kelamin		Jumlah	Ratio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan				Laki-laki	Perempuan		
<b>Usia Non Produktif</b>					<b>Usia Non Produktif</b>				
<b>0-14 tahun</b>	33.529	32.384	65.913	103,54	<b>0-14 tahun</b>	30.669	29.570	60.239	103,72
<b>65+</b>	10.161	14.034	24.195	72,40	<b>65+</b>	18.867	25.129	43.996	75,08
<b>Usia Produktif</b>					<b>Usia Produktif</b>				
<b>15-64 tahun</b>	94.359	94.731	189.090	99,61	<b>15-64 tahun</b>	99.118	99.666	198.784	99,45
<b>Ratio Ketergantungan</b>	46,30	49,00	47,65		<b>Ratio Ketergantungan</b>	49,98	54,88	52,44	
<b>Anak-anak</b>	35,53	34,19	34,86		<b>Anak-anak</b>	30,94	29,67	30,30	
<b>Lansia</b>	10,77	14,81	12,80		<b>Lansia</b>	19,03	25,21	22,13	

Sumber : BPS Kota Pematangsiantar, diolah

Kota Pematangsiantar saat ini tengah menikmati bonus demografi, yang ditandai dengan rasio ketergantungan yang berada di bawah 50%. Kondisi ini mencerminkan proporsi usia produktif yang tinggi dibandingkan dengan kelompok

usia tidak produktif. Namun, tantangan yang dihadapi adalah tingginya tingkat pengangguran akibat ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja produktif dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai.

Beberapa faktor penyebab pengangguran di Kota Pematangsiantar meliputi kurangnya lapangan kerja yang sebanding dengan jumlah lulusan sekolah, rendahnya keterampilan kerja pada sebagian angkatan kerja, tingginya persaingan dari tenaga kerja luar daerah, serta meningkatnya partisipasi ibu rumah tangga dalam mencari pekerjaan untuk mendukung perekonomian keluarga. Selain itu, terdapat kecenderungan lulusan perguruan tinggi menolak pekerjaan yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi atau bidang keahlian mereka.

Melihat proyeksi rasio ketergantungan di Kota Pematangsiantar pada masa mendatang, diperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas). Hal ini menuntut kebijakan yang berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang ramah lansia, penguatan perlindungan sosial bagi lansia, serta pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan permukiman yang inklusif dan mendukung kenyamanan lansia.

Sementara itu, kelompok usia nonproduktif (0-14 tahun) diproyeksikan mengalami penurunan. Namun, kebijakan pembangunan untuk kelompok ini tetap menjadi prioritas strategis sebagai persiapan memasuki usia produktif. Upaya yang dapat dilakukan meliputi:

1. Peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai, pelatihan guru, dan kurikulum berbasis keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
2. Peningkatan keterampilan anak-anak dan remaja melalui pelatihan vokasional sejak dini, akses terhadap teknologi, dan program pengembangan kreativitas.
3. Peningkatan kualitas kesehatan melalui layanan kesehatan yang menyeluruh, penyediaan gizi yang memadai, serta program edukasi kesehatan bagi anak dan keluarga.

#### 2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Proyeksi kebutuhan sarana prasarana dalam perencanaan jangka panjang Kota Pematangsiantar adalah langkah penting dalam upaya meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik di Kota Pematangsiantar. Tentunya dengan melalui proses yang kompleks dan membutuhkan kolaborasi yang erat antar berbagai pemangku kepentingan. Sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam perkembangan Kota Pematangsiantar yang merupakan salah satu Kota di Sumatera Utara. Sarana dan prasarana yang baik dapat berdampak positif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sarana Prasarana adalah infrastruktur atau fasilitas yang digunakan dalam pembangunan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Kebutuhan sarana dalam pembangunan dapat sangat bervariasi tergantung pada jenis proyek pembangunan, tujuan, dan konteks

geografis. Disajikannya identifikasi kebutuhan Sarana dan Prasarana tentunya juga mempertimbangkan kondisi di Kota Pematangsiantar dan tentunya dengan isu global serta nasional yang memiliki pengaruh pada proyeksi kedepannya sehingga disampaikan bahwa proyeksi kebutuhan sarana prasarana memuat antara lain Kebutuhan Hunian, Air Baku dan Air Minum, Energi/Kelistrikan, Pengelolaan Persampahan, Infrastruktur Pendidikan, dan Infrastruktur Kesehatan. Hal ini juga memerlukan pemantauan dan penyesuaian berkelanjutan seiring berjalannya waktu untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Pematangsiantar secara efektif.

#### 2.6.2.1 Proyeksi Kebutuhan Hunian

Dalam menghitung kebutuhan rumah, terdapat 2 (dua) pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

- a. Data demografi : berkaitan dengan proyeksi jumlah penduduk dan asumsi jumlah kepala keluarga yang menghuni tiap-tiap rumah
- b. Data backlog : dihitung dengan mengurangi jumlah rumah yang sudah ada dari jumlah kebutuhan rumah.

Dalam menghitung kebutuhan rumah penting untuk mempertimbangkan asumsi yang digunakan dan data yang akurat agar hasil perhitungan dapat menjadi dasar yang baik dalam perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Dengan asumsi rata-rata setiap rumah ditempati 4 (empat) jiwa maka proyeksi kebutuhan rumah di Kota Pematangsiantar pada tahun 2025 adalah 69.800 unit dengan jumlah penduduk Kota Pematangsiantar pada tahun 2025 adalah 279.198 jiwa. Sedangkan proyeksi kebutuhan rumah pada tahun 2045 adalah 75.750 unit untuk proyeksi penduduk Kota Pematangsiantar pada tahun 2045 adalah 303.019.

Tabel 2.61  
Proyeksi Kebutuhan Hunian (Unit) Tahun 2025 – 2045

Tahun	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	279.198	288.509	295.300	300,007	303,019
Kebutuhan Hunian (Unit)	69.800	72.127	73.825	75.002	75.755
Kondisi Eksisting Jumlah Hunian (unit)	65.996				
Kekurangan Jumlah Hunian (unit)	3.804	6.131	7.829	9.006	9.759

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan proyeksi kebutuhan hunian yang menunjukkan kekurangan rumah pada tahun 2025 sebesar 3.804 unit dan terus meningkat hingga 9.759 unit pada tahun 2045, terdapat gap yang signifikan antara jumlah hunian yang ada dan yang dibutuhkan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan kepadatan penduduk, krisis perumahan, serta berpotensi meningkatkan kualitas permukiman yang tidak memadai, seperti kawasan kumuh.

Adapun Strategi untuk mengatasi kekurangan hunian ini harus difokuskan pada pengembangan perumahan terjangkau dan peningkatan kualitas perumahan yang sudah ada, dengan prioritas pembangunan di kawasan yang memiliki permintaan tertinggi. Penyediaan hunian vertikal dapat menjadi solusi di daerah yang terdesak untuk lahan, terutama di pusat kota. Pemanfaatan kawasan perumahan di daerah pinggiran kota dengan akses fasilitas umum dan transportasi yang baik juga perlu diperhatikan.

#### 2.6.2.2 Proyeksi Kebutuhan Air Baku dan Air Minum

Proyeksi kebutuhan Air Baku/Air minum ini diperhitungkan berdasarkan kebutuhan air per kapita, pertumbuhan dan pengembangan penduduk, dan pengklasifikasian jenis kebutuhan. Kebutuhan air terdiri dari domestik dan non domestik. Kebutuhan domestik adalah kebutuhan yang berdasarkan jumlah penduduk dan pemakaian air per orang. Kebutuhan non domestik adalah kebutuhan air untuk kegiatan penunjang kota, yang terdiri dari kegiatan komersial yang berupa industri, perkantoran, dan lain-lain, maupun kegiatan sosial seperti sekolah, rumah sakit dan tempat ibadah. Kebutuhan non-domestik diasumsikan 20 persen dari kebutuhan domestik. Proyeksi kebutuhan air total merupakan penjumlahan kebutuhan air domestik dan non domestik ditambah sejumlah air untuk kehilangan yang tidak dapat ditanggulangi baik secara teknis maupun ekonomis. Dengan asumsi kebutuhan domestik adalah 20L/orang/hari, berdasarkan proyeksi jumlah penduduk maka dilakukan perhitungan proyeksi kebutuhan Air Baku dan Air Minum di Kota Pematangsiantar.

Pada tahun 2025 proyeksi kebutuhan Air Baku dan Air Minum di Sumatera Utara adalah 4.384,96 liter/detik dengan jumlah penduduk sebesar 15.785.839 jiwa. Sedangkan pada tahun 2045, proyeksi kebutuhan Air Baku dan Air Minum di Sumatera Utara 5.231,39 Liter/detik dengan jumlah penduduk sebesar 18.832.994 jiwa.

Tabel 2.62  
Proyeksi Kebutuhan Baku dan Air Minum Tahun 2025 – 2045

Tahun	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	279.198	288.509	295.300	300,007	303,019
Kebutuhan Air Baku dan Air Minum (L/hari)	33.503.750	34.621.080	35.436.000	36.000.840	36.362.280
Kondisi Eksisting Air Baku dan Air Minum (L/hari)	73.100.000				
Kelebihan Air Baku dan Air Minum (L/hari)	39.596.250	38.478.920	37.664.000	37.099.160	36.737.720

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Pemenuhan kebutuhan Air Baku dan Air Minum tersebut melalui kegiatan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana diatur dalam

PP Nomor 122 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan SPAM terdiri dari SPAM Jaringan Perpipaan (SPAM JP) yang dikelola PDAM/Pengembang/Kelompok Masyarakat ataupun SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) yang dikelola oleh masyarakat dengan memanfaatkan terutama sumber air tanah (sumur).

Tuntutan penyelenggaraan SPAM di masa depan sebagaimana diamanatkan dalam SDGs yang telah diinternalisasi ke dalam dokumen teknokratis RPJPN yakni air yang dikonsumsi masyarakat adalah air minum aman yang memiliki prinsip pemenuhan kebutuhan air minum 4K yakni : Kuantitas (sesuai dengan standar kebutuhan air minum); Kualitas (sesuai dengan standar kesehatan), Kontinuitas (mencukupi kebutuhan air selama 24 jam) dan Keterjangkauan (mudah diakses dengan biaya yang terjangkau).

Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan air minum sangat bergantung kepada ketersediaan air baku baik dari air permukaan (sungai, danau, waduk), air tanah, air tadah hujan bahkan air laut. Perencanaan penyelenggaraan SPAM yang terintegrasi dengan ketersediaan air baku menjadi menjadi suatu keharusan, sehingga diperlukan sinkronisasi program SPAM dengan Program pengelolaan sumber daya air di Kota Pematangsiantar.

#### 2.6.2.3 Proyeksi Kebutuhan Energi / Kelistrikan

Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur kelistrikan, perlu dilakukan perhitungan dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi/kelistrikan. Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan energi listrik yang memadai bagi masyarakat. Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik (kWh) Perhitungan proyeksi kebutuhan energi/kelistrikan perlu memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, jumlah rumah tangga, dan tingkat konsumsi energi listrik per kapita. Beberapa studi telah dilakukan untuk menganalisis kebutuhan energi/kelistrikan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kota Pematangsiantar.

Kebutuhan konsumsi listrik per 5 tahun sampai dengan tahun 2045 dapat dihitung menggunakan proyeksi kebutuhan energi listrik dengan menggunakan asumsi standar kebijakan penyediaan listrik Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN 2013-2022. Dengan asumsi kebutuhan domestik adalah 170 watt/jiwa, berdasarkan proyeksi jumlah penduduk maka dilakukan perhitungan proyeksi kebutuhan energi listrik di Kota Pematangsiantar. Pada tahun 2025 proyeksi kebutuhan energi listrik di Kota Pematangsiantar adalah 47.463,66 kWh dengan jumlah penduduk sebesar 279.198 jiwa. Sedangkan pada tahun 2045, proyeksi kebutuhan energi listrik di Kota Pematangsiantar 51.513,23 kWh dengan jumlah penduduk sebesar 303,019 jiwa.

Tabel 2.63  
 Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik (kWh) Tahun 2025 – 2045

Tahun	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	279.198	288.509	295.300	300,007	303,019
Kebutuhan Energi Listrik (kWh)	47.463,66	49.046,53	50.201	51.001,19	51.513,23
Kondisi Eksisting Energi Listrik (kWh)	61.600				
Kelebihan Energi Listrik (kWh)	14.136,34	12.553,47	11.399	10.598,81	10.086,77

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dilihat dari kondisi eksisting produksi listrik dari PLN yang ada di Kota Pematangsiantar dibandingkan dengan kebutuhan, didapati bahwa masih terdapat kelebihan energi. Namun dengan proyeksi keterbatasan sumber daya dimasa mendatang, perlu dilakukan diversifikasi sumber listrik yang berasal dari energi terbarukan seperti mikrohidro memanfaatkan aliran sungai yang ada di Kota Pematangsiantar maupun dari sumber tenaga surya.

#### 2.6.2.4 Proyeksi kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Kebijakan terkait pengelolaan sampah di Indonesia sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dimana setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Namun sebelumnya pengelolaan persampahan lebih banyak bertumpu pada konsep lama / konvensional yang bersifat “kumpul – angkut – buang” yang bertumpu pada pendekatan penanganan akhir. Perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini memperlihatkan munculnya paradigma baru yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di atas, dimana pendekatannya berkembang menjadi “kumpul – pilah – olah – angkut – buang” yang memperhatikan keberadaan proses pemilahan dan pengolahan untuk menghasilkan buangan yang sudah sangat minim untuk mengurangi risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Salah satu ciri penerapan paradigma ini antara lain melalui perkembangan prasarana dan sarana persampahan, termasuk dalam aspek keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi Tempat Pemrosesan / Pengelolaan Akhir Sampah (TPAS). Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Dalam menghadapi proyeksi pertumbuhan penduduk yang pesat di Kota Pematangsiantar, perencanaan infrastruktur persampahan menjadi sangat penting. Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, standar kebutuhan Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPAS) per-jumlah penduduk sesuai dengan SNI 03-1733-2004 adalah 1 (satu) unit TPA untuk lebih dari 480.000 penduduk. Pada tahun 2025, penduduk Kota Pematangsiantar diproyeksikan mencapai 279.198

jiwa dan Pada tahun 2045, penduduk Kota Pematangsiantar diproyeksikan 303,019 jiwa, Dengan standar tersebut, TPA Tanjung Pinggir masih dapat menampung dan mengelola sampah di Kota Pematangsiantar. Adapun penentuan banyaknya prasarana persampahan berupa TPS/TPA berdasarkan SNI 19-2454-2002 tentang tata cara Teknik operasional pengolahan sampah perkotaan yaitu :

- 2.500 jiwa membutuhkan 1 armada berupa gerobak sampah/bak sampah kecil
- 30.000 jiwa membutuhkan 1 armada berupa gerobak sampah/bak sampah besar,
- 120.000 jiwa membutuhkan 1 armada berupa mobil sampah/bak sampah besar, dan
- 480.000 jiwa membutuhkan 1 armada berupa bak sampah akhir/ tempat daur ulang sampah

Dengan dasar perhitungan di atas, kebutuhan armada per Wilayah Pengembangan di Kota Pematangsiantar dapat diproyeksikan sebagai berikut.

Tabel 2.64  
Proyeksi Kebutuhan Armada Persampahan di Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045

Tahun	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	279.198	288.509	295.300	300,007	303,019
Gerobak Sampah Kecil (armada)	112	115	118	120	121
Gerobak Sampah Besar (armada)	9	10	10	10	10
Kondisi Eksisting Gerobak Sampah (armada)	3				
Kekurangan Gerobak Sampah (armada)	6	7	7	7	7
Mobil Sampah (armada)	2	2	2	2	2
Kondisi Eksisting Mobil Sampah (armada)	1				
Kekurangan Mobil Sampah (armada)	1	1	1	1	1
Bak Sampah Akhir (armada)	1	1	1	1	1

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan data proyeksi kebutuhan armada persampahan dan kondisi eksisting yang ada, terlihat adanya ketidaksesuaian antara jumlah armada persampahan yang ada dengan jumlah penduduk yang terus berkembang. Salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kota Pematangsiantar saat ini sudah mengalami over kapasitas. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah dengan pengembangan sarana pengelolaan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pengelolaan sampah di Kota Pematangsiantar antara lain meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Selain itu, fasilitas pengolahan sampah, termasuk tempat pemrosesan akhir, perlu dikembangkan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan

aksesibilitas. Kolaborasi dengan sektor swasta juga penting dalam pengembangan teknologi serta solusi inovatif untuk pengelolaan sampah, seperti penerapan energi terbarukan dan pengolahan sampah yang lebih ramah lingkungan. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang benar, termasuk pemilahan sampah, harus dilakukan secara lebih intensif agar proses pengelolaan dapat berjalan dengan efisien. Selain itu, mendorong masyarakat untuk mengadopsi prinsip 5R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace, Replant) dalam kehidupan sehari-hari akan membantu mengurangi volume sampah yang dihasilkan dan memaksimalkan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya.

#### 2.6.2.5 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan

Proyeksi kebutuhan pendidikan dilakukan dengan berpedoman Permendikburistek No. 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Perhitungan dilakukan dengan membagi prediksi jumlah penduduk usia sekolah di masing-masing satuan pendidikan yang dibagi dengan standar jumlah siswa per rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar per satuan pendidikan.

##### Sekolah Dasar/MI

Perhitungan jumlah fasilitas SD/MI di Kota Pematangsiantar tahun 2045 didasarkan pada, asumsi :

- Prediksi jumlah penduduk di usia sekolah SD/MI (7-12 tahun) terhadap jumlah total penduduk proyeksi, yaitu: 10,41% (2025); 10,71% (2030); 10,91% (2035); 11,06% (2040); dan 11,16% (2045)
- Standar jumlah siswa per rombongan belajar di tingkat SD/MI ialah sebanyak 28 siswa
- Standar jumlah rombongan belajar per satuan pengelolaan pendidikan ialah sebanyak 6 rombongan belajar.

Tabel 2.65  
Proyeksi Kebutuhan SD/MI di Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045

Tahun	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	279.198	288.509	295.300	300,007	303,019
Jumlah Siswa (jiwa)	29.065	30.899	32.217	33.180	33.816
Jumlah Rombongan Belajar	1.038	1.104	1.151	1.185	1.208
Jumlah SD/MI (unit)	86	92	96	98	101
Kondisi Eksisting SD/MI (unit)	128				
Kelebihan Jumlah SD/MI (unit)	42	36	32	30	27

Sumber: Hasil Analisis, 2023

##### Sekolah Menengah Pertama/MTs

Perhitungan jumlah fasilitas SMP/MTs di Kota Pematangsiantar hingga tahun 2045 didasarkan pada, asumsi :

- Prediksi jumlah penduduk di usia sekolah SMP/MTs (13-15 tahun) terhadap jumlah total penduduk proyeksi, yaitu: 5,82% (2025); 6,01% (2030); 6,16%(2035); 6,21% (2040); dan 6,35 (2045)
- Standar jumlah siswa per rombongan belajar di tingkat SMP/MTs ialah sebanyak 32 siswa
- Standar jumlah rombongan belajar per satuan pengelolaan pendidikan ialah sebanyak 3 rombongan belajar.

Tabel 2.66  
Proyeksi Kebutuhan SMP/MTs di Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045

Tahun	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	279.198	288.509	295.300	300,007	303,019
Jumlah Siswa (jiwa)	16.249	17.340	18.190	18.630	19.241
Jumlah Rombongan Belajar	508	542	568	582	601
Jumlah SMP/MTs (unit)	56	60	63	64	66
Kondisi Eksisting SMP/MTs (unit)	43				
Kekurangan Jumlah SM/MTs (unit)	13	17	20	21	23

Sumber: Hasil Analisis, 2023

#### Sekolah Menengah Atas/MA

Perhitungan jumlah fasilitas SMA/MA di Kota Pematangsiantar hingga tahun 2045 didasarkan pada, asumsi :

- Prediksi jumlah penduduk di usia sekolah SMA/MA (13-15 tahun) terhadap jumlah total penduduk proyeksi, yaitu: 5,25% (2025); 5,36% (2030); 5,47% (2035); 5,76% (2040); dan 5,86% (2045)
- Standar jumlah siswa per rombongan belajar di tingkat SMA/MA ialah sebanyak 36 siswa
- Standar jumlah rombongan belajar per satuan pengelolaan pendidikan ialah sebanyak 3 rombongan belajar.

Tabel 2.67  
Proyeksi Kebutuhan SMA/MA di Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045

Tahun	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	279.198	288.509	295.300	300,007	303,019
Jumlah Siswa (jiwa)	1.465	1.546	1.615	1.728	1.775
Jumlah Rombongan Belajar	40	42	44	48	49
Jumlah SMA/MA	13	14	15	16	16

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Secara umum, Kota Pematangsiantar diproyeksikan mengalami surplus ruang kelas hingga tahun 2045 apabila dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada. Dengan demikian, fokus pengembangan di sektor pendidikan diarahkan pada optimalisasi sarana dan prasarana pendukung pembelajaran guna meningkatkan mutu pendidikan. Prioritas utama meliputi penyediaan laboratorium yang memadai dan berstandar, peningkatan akses terhadap perangkat teknologi

informasi seperti komputer, pengadaan buku-buku berkualitas dan relevan dengan kurikulum, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan berkelanjutan. Selain itu, perhatian khusus akan diberikan pada aspek pemeliharaan dan revitalisasi ruang kelas agar tetap memenuhi standar kenyamanan dan keamanan. Strategi ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mendukung pencapaian hasil belajar yang optimal, dan memperkuat daya saing pendidikan di Kota Pematangsiantar di masa depan.

#### 2.6.2.6 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan

Proyeksi kebutuhan kesehatan dilakukan dengan berpedoman pada SNI 03-1722-2004. Perhitungan dilakukan dengan membagi proyeksi jumlah penduduk secara total per kabupaten/kota dengan standar jumlah penduduk pendukung di setiap jenis sarana. Perhitungan jumlah puskesmas/balai pengobatan di Kota Pematangsiantar hingga tahun 2045 didasarkan pada, asumsi bahwa setiap 1 unit puskesmas melayani sejumlah 30.000 jiwa penduduk dengan lokasi yang dapat bergabung dengan lokasi kantor kecamatan.

Tabel 2.68  
Proyeksi Kebutuhan Puskesmas di Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045

Tahun	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	279.198	288.509	295.300	300,007	303,019
Jumlah Puskesmas (unit)	9	9	9	10	10
Kondisi Eksisting Puskesmas (unit)	19				
Kelebihan Puskesmas (unit)	10	10	10	9	9

Sumber: Hasil Analisis, 2023

#### Puskesmas Pembantu/Balai Pengobatan Lingkungan

Perhitungan jumlah puskesmas pembantu/balai pengobatan lingkungan di Kota Pematangsiantar hingga tahun 2045 didasarkan pada, asumsi bahwa setiap 1 unit puskesmas melayani sejumlah 10.000 jiwa penduduk dengan lokasi yang dapat bergabung dengan lokasi kantor kelurahan/desa

Tabel 2.69  
Proyeksi Kebutuhan Puskesmas Pembantu di Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045

Tahun	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	279.198	288.509	295.300	300,007	303,019
Jumlah Puskesmas Pembantu (unit)	27	28	29	30	30
Kondisi Eksisting Puskesmas Pembantu (unit)	8				
Kekurangan Puskesmas Pembantu (unit)	19	20	21	22	22

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil proyeksi dan analisis terhadap kondisi eksisting sarana kesehatan di Kota Pematangsiantar, diketahui bahwa jumlah puskesmas yang tersedia saat ini melebihi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Namun, masih terdapat kekurangan pada jumlah puskesmas pembantu (pustu) jika dibandingkan dengan kebutuhan berdasarkan proyeksi penduduk dan standar pelayanan kesehatan.

Dengan mempertimbangkan luas wilayah Kota Pematangsiantar yang relatif kecil, kebutuhan pelayanan kesehatan yang seharusnya ditangani oleh pustu dapat sebagian besar diakomodasi oleh kelebihan jumlah puskesmas yang ada melalui optimalisasi fungsi dan distribusi layanan. Meskipun demikian, penambahan pustu tetap diarahkan secara strategis ke wilayah-wilayah yang memiliki jarak cukup jauh dari puskesmas atau pustu yang sudah ada, untuk memastikan akses pelayanan kesehatan yang merata dan efisien bagi seluruh masyarakat.

Langkah ini akan diintegrasikan dengan peningkatan kualitas pelayanan di puskesmas dan pustu melalui pemenuhan tenaga kesehatan, penyediaan fasilitas penunjang yang memadai, serta penguatan sistem rujukan. Kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Pematangsiantar.

Kota Pematangsiantar memiliki 10 rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta, yang berfungsi sebagai fasilitas kesehatan rujukan. Jumlah ini dinilai memadai untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat secara umum. Namun, pengembangan fasilitas kesehatan rujukan ke depan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas layanan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan khusus.

Fokus utama pengembangan adalah penyediaan sarana dan prasarana yang ramah bagi difabel dan lansia, termasuk fasilitas aksesibilitas, alat bantu kesehatan, serta layanan medis yang disesuaikan dengan kondisi mereka. Selain itu, perlu dilakukan penambahan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang memiliki keahlian khusus dalam menangani pasien difabel dan lansia.

Di tingkat puskesmas, penyediaan fasilitas yang serupa juga menjadi prioritas, terutama di wilayah dengan konsentrasi lansia yang tinggi. Fasilitas ini meliputi ruang layanan khusus, alat bantu mobilitas, serta program kesehatan terpadu yang melibatkan pemeriksaan berkala, edukasi kesehatan, dan layanan rehabilitasi.

Strategi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kesehatan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung kesejahteraan difabel dan lansia. Selain itu, langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memastikan akses kesehatan yang merata dan memenuhi standar pelayanan kesehatan nasional.

## 2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Adapun tujuan penataan ruang adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya

mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan penataan ruang kota adalah mewujudkan kota sebagai pusat perdagangan dan jasa pada wilayah tengah Provinsi Sumatera Utara dengan didukung oleh sektor pendidikan, kesehatan, dan pariwisata dalam ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkesinambungan.

Kota Pematangsiantar sebagai kota kedua terbesar di Provinsi Sumatera Utara terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan sehingga memerlukan suatu mekanisme perencanaan wilayah yang ditetapkan dalam kebijakan penataan ruang Kota Pematangsiantar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar Ruang lingkup wilayah perencanaan tata ruang Kota Pematangsiantar meliputi seluruh wilayah kota dengan luas 7.592 (tujuh ribu lima ratus sembilan puluh dua) hektar.

Pengertian pusat pertumbuhan wilayah adalah kawasan dengan pertumbuhan sangat pesat sehingga layak menjadi pusat pembangunan untuk memengaruhi perkembangan daerah-daerah lain di sekitarnya. Pusat pertumbuhan wilayah dibangun agar kawasan di sekitarnya bisa ikut bergerak maju. Potensi pengembangan wilayah Kota Pematangsiantar berupa pengembangan kawasan budidaya, yakni dengan memanfaatkan lahan existing, lahan eks. HGU PTPN III seluas 573 Ha, dan kerja sama pemanfaatan lahan PTPN IV untuk pengembangan kawasan perdagangan dan jasa secara merata, pengembangan kawasan pendidikan, kesehatan dan pariwisata skala regional/nasional, pengembangan kawasan perumahan vertikal di pusat kota, pengembangan kawasan industri yang ramah lingkungan, pengembangan kawasan ruang publik yang memadai, pengembangan kawasan budidaya yang ramah lingkungan, dan pengembangan kawasan lain yang berkelanjutan.

Kota Pematangsiantar, sebagai salah satu kota terbesar di Sumatera Utara, memiliki peran strategis dalam perekonomian regional. Untuk merencanakan pengembangan yang efektif dan berkelanjutan, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis pusat-pusat pertumbuhan yang ada di kota ini. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), analisis pusat-pusat pertumbuhan Kota Pematangsiantar harus mencakup beberapa sektor utama seperti perdagangan, jasa, pendidikan, dan pariwisata, yang semuanya memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan daerah. Kota Pematangsiantar adalah salah satu kota yang memiliki potensi besar dalam berbagai sektor pembangunan, yang jika dikelola dengan baik dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pematangsiantar, pusat-pusat pertumbuhan yang ada akan menjadi motor penggerak pembangunan daerah. Dalam konteks RTRW, pusat-pusat pertumbuhan mencakup berbagai kawasan yang menjadi titik fokus untuk

pembangunan ekonomi, sosial, dan fisik. Pusat-pusat pertumbuhan yang signifikan bagi pembangunan daerah Kota Pematangsiantar terdiri dari sektor perdagangan, jasa, pendidikan, dan pariwisata.

#### 1. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan merupakan salah satu pusat pertumbuhan yang sangat penting dalam perekonomian Kota Pematangsiantar. Berdasarkan RTRW, pengembangan kawasan perdagangan memiliki tujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan memperluas basis perdagangan kota.

##### a. Pusat Perdagangan di Pusat Kota

- Jalan Merdeka dan Sekitarnya: Kawasan ini adalah pusat bisnis dan komersial utama Kota Pematangsiantar. Dengan adanya berbagai fasilitas perbelanjaan, pasar, dan perkantoran, kawasan ini menjadi pusat gravitasi ekonomi di kota. Pematangsiantar sebagai kota penghubung antara daerah-daerah di Sumatera Utara membutuhkan pusat perdagangan yang dapat mendukung interaksi ekonomi yang dinamis.
- Pasar Horas dan Pasar Baru: Sebagai pasar tradisional utama, pengembangan pasar-pasar ini akan mendukung kegiatan perdagangan barang kebutuhan sehari-hari, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan kepada konsumen. Pembangunan pasar yang lebih modern dan fasilitas yang lebih baik akan mendorong aktivitas perdagangan semakin efisien dan terorganisir.

##### b. Pusat Perdagangan Modern

- Kawasan Mal dan Pusat Perbelanjaan: Pengembangan pusat perbelanjaan modern seperti mal atau pusat perbelanjaan dapat menjadi pendorong utama ekonomi kota. Pusat-pusat komersial ini tidak hanya akan meningkatkan sektor ritel, tetapi juga memberikan ruang untuk sektor hiburan, restoran, dan kegiatan bisnis lainnya.
- Kawasan Perdagangan dan Industri di Pinggiran Kota: Di luar pusat kota, kawasan yang lebih besar untuk sektor perdagangan dan distribusi seperti kawasan industri dan logistik juga perlu dikembangkan. Hal ini akan memperkuat posisi Pematangsiantar sebagai pusat distribusi barang di Sumatera Utara.

Sektor jasa juga sangat penting dalam mendorong perkembangan ekonomi di Kota Pematangsiantar. Seiring dengan perkembangan sektor perdagangan dan industri, sektor jasa juga mengalami pertumbuhan yang pesat.

##### a. Sektor Perbankan dan Keuangan

- Kawasan Keuangan dan Perbankan: Seiring dengan pertumbuhan sektor perdagangan, permintaan akan layanan keuangan juga meningkat. Pengembangan kawasan perbankan di pusat kota dan pinggiran dapat mendukung kemudahan akses keuangan bagi masyarakat dan pelaku bisnis lokal. Pematangsiantar dapat memanfaatkan posisinya yang strategis

sebagai penghubung antara Medan dan daerah-daerah lainnya di Sumatera Utara untuk meningkatkan sektor keuangan.

b. Layanan Profesional

- Kawasan Layanan Kesehatan: Dengan berkembangnya jumlah penduduk dan kebutuhan akan layanan kesehatan yang berkualitas, kawasan layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan fasilitas medis harus diperluas. Pematangsiantar memiliki potensi untuk menjadi pusat layanan kesehatan bagi wilayah sekitar, dengan mengembangkan infrastruktur kesehatan yang modern dan akses yang lebih mudah.
- Kawasan Layanan Pendidikan dan Pelatihan: Sektor jasa juga terkait dengan pendidikan dan pelatihan. Pengembangan lembaga pendidikan tinggi, pelatihan vokasi, dan pusat-pusat pendidikan yang menyediakan keterampilan profesional akan meningkatkan kualitas tenaga kerja di kota ini, yang pada gilirannya akan mendukung sektor perdagangan, industri, dan pariwisata.

Dalam RTRW Kota Pematangsiantar Kawasan perdagangan dan jasa seluas kurang lebih 781 hektare meliputi:

- a. Kelurahan Sukadame, Kelurahan Bane, Kelurahan Martoba, Kelurahan Melayu, Kelurahan Baru, Kelurahan Kahean, Kelurahan Sigulang-gulang di Kecamatan Siantar Utara;
- b. Kelurahan Asuhan, Kelurahan Pardomuan, Kelurahan Siopat Suhu, Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Kebun Sayur, Kelurahan Merdeka, Kelurahan Tomuan di Kecamatan Siantar Timur;
- c. Kelurahan Aek Nauli, Kelurahan Karo, Kelurahan Toba, Kelurahan Martimbang di Kecamatan Siantar Selatan;
- d. Kelurahan Proklamasi, Kelurahan Timbang Galung, Kelurahan Dwikora di Kecamatan Siantar Barat;
- e. Kelurahan Nagahuta, Kelurahan Nagahuta Timur, Kelurahan Marihat Jaya, Kelurahan Simarimbun, Kelurahan Pematang Marihat, Kelurahan Tong Marimbun di Kecamatan Siantar Marimbun;
- f. Kelurahan Setia Negara, Kelurahan Bah Kapul, Kelurahan Gurilla, Kelurahan Bukit Sofa di Kecamatan Siantar Sitalasari;
- g. Kelurahan Tanjung Tengah, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kelurahan Nagapita, Kelurahan Nagapitu, Kelurahan Pondok Sayur, Kelurahan Sumber Jaya, Kelurahan Tambun Nabolon di Kecamatan Siantar Martoba; dan Kelurahan Mekar Nauli, Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Sukaraja, Kelurahan Parhorasan Nauli, Kelurahan Pardamean di Kecamatan Siantar Marihat.

3. Kawasan Pendidikan

Pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya akan mendorong kemajuan ekonomi dan sosial di Kota

Pematangsiantar. Pembangunan kawasan pendidikan harus selaras dengan kebijakan RTRW untuk menciptakan daerah yang lebih cerdas dan terampil.

a. Pusat Pendidikan Tinggi

- Universitas dan Institusi Pendidikan Tinggi: Pematangsiantar sudah memiliki beberapa institusi pendidikan tinggi seperti Universitas Simalungun, yang merupakan salah satu pilar pendidikan di kota ini. Namun, pengembangan lebih lanjut melalui pembangunan kampus-kampus baru dan pusat riset akan memberikan kontribusi signifikan dalam memajukan pendidikan dan pengetahuan di kota ini. Penambahan universitas atau fakultas baru yang fokus pada bidang-bidang yang relevan dengan kebutuhan industri dan perdagangan kota dapat mendorong Pematangsiantar sebagai pusat pendidikan di wilayah Sumatera Utara.

b. Pendidikan Dasar dan Menengah

- Keseimbangan Pendidikan: Selain pendidikan tinggi, pengembangan pendidikan dasar dan menengah juga perlu diperhatikan. Pematangsiantar harus memperhatikan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah, agar setiap lapisan masyarakat dapat memperoleh kesempatan yang setara dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini akan berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia yang siap bekerja dan berinovasi di berbagai sektor.

Dalam RTRW Kota Pematangsiantar untuk pengembangan kawasan pendidikan tinggi berada di Kelurahan Siopat Suhu dan Kelurahan Bah Kapul;

#### 4. Kawasan Pariwisata

Kota Pematangsiantar memiliki potensi besar di sektor pariwisata, terutama terkait dengan wisata alam dan wisata budaya. Sektor pariwisata dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi kota jika dikelola dengan baik.

a. Wisata Alam dan Budaya

- Danau Toba dan Sekitarnya: Lokasi yang dekat dengan Danau Toba memberikan peluang besar untuk mengembangkan sektor pariwisata. Pengembangan infrastruktur pariwisata seperti akomodasi, transportasi, dan fasilitas wisata di sekitar Danau Toba dapat menarik lebih banyak wisatawan. Pematangsiantar dapat berfungsi sebagai pintu gerbang utama menuju kawasan Danau Toba, yang menjadi salah satu tujuan wisata utama di Indonesia.
- Wisata Budaya Batak: Pematangsiantar, sebagai bagian dari wilayah etnis Batak, memiliki potensi besar dalam mengembangkan wisata budaya. Pusat budaya dan seni Batak, seperti rumah adat, tarian tradisional, dan festival budaya, bisa dijadikan daya tarik wisata. Pengembangan pusat-pusat budaya yang mengedepankan warisan budaya Batak dapat menarik wisatawan domestik maupun internasional.

Pengembangan Kawasan pariwisata dalam RTRW Kota Pematangsiantar seluas kurang lebih 6 (enam) hektare terdapat pada Kelurahan Simarimbun di Kecamatan Siantar Marimbun dan Kelurahan Teladan di Kecamatan Siantar Barat. Selain kawasan tersebut diatas juga terdapat pengembangan objek wisata meliputi:

- a. pusat jajanan Siantar Square di Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Selatan;
- b. kawasan Taman Merdeka di Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat;
- c. kawasan pemandian di Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Sitalasari;
- d. kawasan pemandian di Kelurahan Nagapita, Kecamatan Siantar Martoba;
- e. kawasan pemandian Sibatu-batu Kelurahan Tanjung Pinggir, di Kecamatan Siantar Sitalasari;
- f. kawasan wisata Rindam di Kelurahan Setia Negara, di Kecamatan Siantar Sitalasari; dan
- g. kawasan aliran sungai Bah Bolon di Kelurahan Sipinggol-pinggol, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat, dan Kelurahan Setia Negara, di Kecamatan Siantar Sitalasari.

Pusat-pusat pertumbuhan di Kota Pematangsiantar harus terintegrasi dengan baik, di mana setiap sektor saling mendukung. Sebagai contoh, pengembangan sektor perdagangan yang maju akan mendukung sektor jasa dan pariwisata. Begitu pula dengan sektor pendidikan, yang akan menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil untuk mendukung semua sektor ekonomi tersebut. Oleh karena itu, kebijakan RTRW harus dapat memastikan adanya konektivitas yang baik antara pusat-pusat pertumbuhan ini, sehingga perkembangan sektor ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan merata.

#### 2.7.1. Keterkaitan RTRW dengan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 4 Tahun 2024

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan utama dalam pengelolaan ruang dan pembangunan wilayah. Sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 4 Tahun 2024, RTRW harus mendukung pembangunan pusat pertumbuhan wilayah dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan, pengelolaan sumber daya alam, serta pemenuhan kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan. RTRW Kota Pematangsiantar memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat ekonomi regional.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 4 Tahun 2024 mengatur pedoman penyusunan dan implementasi RTRW yang mengarah pada pembangunan pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Dalam konteks ini, pusat pertumbuhan wilayah

mencakup kawasan yang dikembangkan dengan tujuan meningkatkan kapasitas ekonomi dan sosial suatu wilayah, seperti kawasan industri, kawasan perumahan, pusat perdagangan, serta kawasan wisata dan pendidikan. RTRW Kota Pematangsiantar harus mencakup strategi dan kebijakan yang mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ini sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam peraturan tersebut.

#### 2.7.1.1. Struktur Ruang dan Pola Ruang dalam RTRW Kota Pematangsiantar

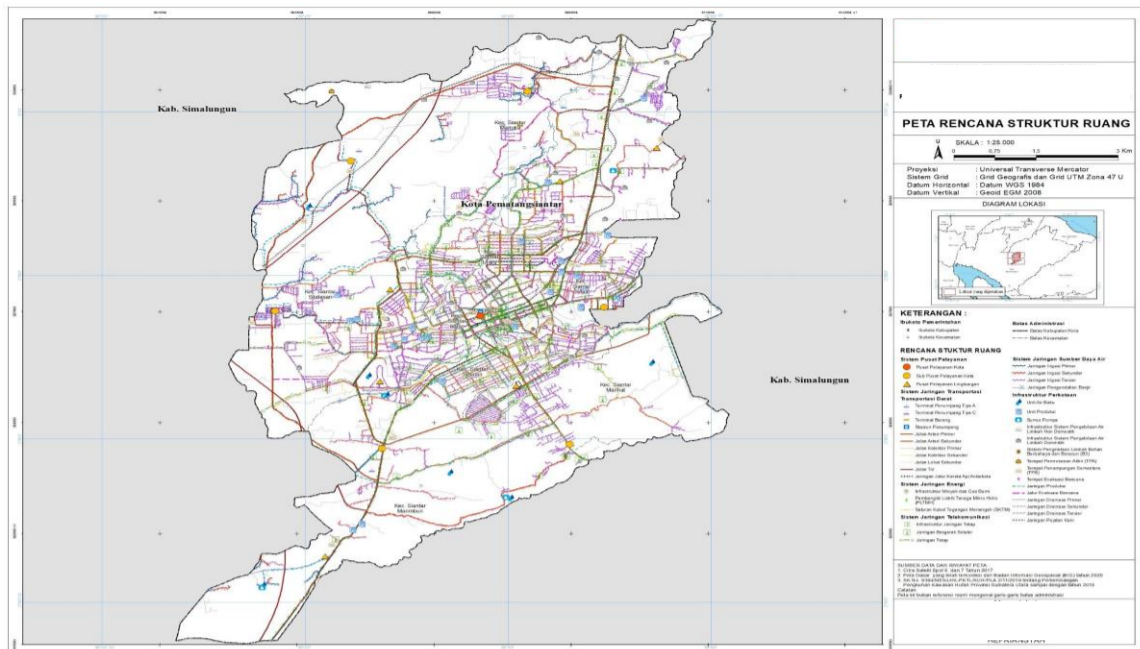
Struktur ruang Kota Pematangsiantar dalam RTRW mencakup pembagian ruang-ruang yang digunakan untuk pemukiman, peruntukan industri, area perdagangan, pendidikan, dan ruang terbuka hijau yang mendukung kelestarian lingkungan.

- Struktur ruang dalam RTRW Kota Pematangsiantar menekankan pada pola pembagian ruang yang berfungsi untuk mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan. Dalam hal ini, pengembangan kawasan industri ramah lingkungan, pusat-pusat perdagangan, dan kawasan hunian vertikal yang terintegrasi dengan transportasi publik menjadi prioritas utama.
- Pola ruang yang terintegrasi dengan infrastruktur transportasi dan pelayanan publik, seperti jalan utama dan akses ke kawasan wisata atau pusat pendidikan, menunjukkan pentingnya keterkaitan antara kawasan yang berbeda untuk menciptakan dinamika pembangunan wilayah yang saling mendukung.

Pola ruang di Kota Pematangsiantar yang tercantum dalam RTRW menunjukkan adanya kawasan budidaya dan kawasan lindung yang terperinci untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Misalnya, kawasan pusat pertumbuhan di kawasan Tanjung Pinggir, kawasan industri, serta kawasan perumahan vertikal yang dapat mengoptimalkan penggunaan lahan dengan baik tanpa merusak kawasan lindung seperti ruang terbuka hijau dan jalur hijau yang ada.

##### 2.7.1.1.1. Struktur Ruang dan Konektivitas Antarwilayah Kota Pematangsiantar Sesuai dengan RTRW

Struktur ruang suatu kota memiliki peranan vital dalam mendukung perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Kota Pematangsiantar, sebagai kota yang memiliki potensi strategis di Sumatera Utara, perlu memastikan bahwa pengembangan struktur ruangnya terintegrasi dengan baik, sehingga mampu mendukung pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.



Gambar 2.36  
Peta Rencana Struktur Ruang  
Sumber : Permen ATR No. 4 Tahun 2024

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pematangsiantar, struktur ruang kota mencakup beberapa komponen utama, yaitu sistem perkotaan, konektivitas antarwilayah, serta pengembangan jaringan transportasi, energi, dan komunikasi. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing komponen tersebut dan rencana pengembangannya.

#### 1. Sistem Perkotaan Kota Pematangsiantar

Pematangsiantar sebagai kota dengan status sebagai kota administratif memiliki peran sentral sebagai pusat ekonomi, perdagangan, dan layanan di wilayah Sumatera Utara. Sistem perkotaan Kota Pematangsiantar dalam RTRW berfokus pada pengembangan kawasan yang mampu mendukung kegiatan perkotaan dengan memperhatikan kebutuhan akan ruang untuk sektor perdagangan, jasa, pendidikan, dan pariwisata. Berikut adalah penjelasan mengenai elemen-elemen dalam sistem perkotaan Pematangsiantar:

##### a. Zonasi Wilayah

- **Kawasan Pusat Kota:** Sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, kawasan pusat kota mencakup area seperti Jalan Merdeka, Pasar Horas, dan sekitarnya. Kawasan ini akan terus dikembangkan untuk memperkuat perannya sebagai pusat perdagangan dan pelayanan publik.
- **Kawasan Permukiman:** Permukiman di Kota Pematangsiantar terdiri dari area padat penduduk yang terletak di pusat kota dan kawasan perumahan yang lebih luas di pinggiran kota. Pembangunan perumahan di pinggiran kota akan lebih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat dengan akses yang lebih baik menuju pusat kota.
- **Kawasan Industri dan Perdagangan:** Kawasan ini difokuskan untuk pengembangan industri dan kegiatan ekonomi, terutama yang terkait dengan sektor manufaktur, distribusi, dan sektor terkait lainnya. Ini juga mencakup

kawasan perdagangan dan logistik yang sangat penting untuk mendukung sistem ekonomi kota.

b. Kawasan Pengembangan Baru

- Kawasan Pendidikan dan Kesehatan: Mengingat pentingnya sektor pendidikan dan kesehatan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia, kawasan ini akan dikembangkan dengan fokus pada pembangunan universitas, lembaga pendidikan vokasi, serta rumah sakit dan pusat layanan kesehatan.
- Kawasan Pariwisata: Pematangsiantar juga memiliki potensi dalam sektor pariwisata, yang akan difokuskan di daerah sekitar Danau Toba, serta kawasan budaya Batak yang dapat menjadi daya tarik wisata lokal dan internasional.

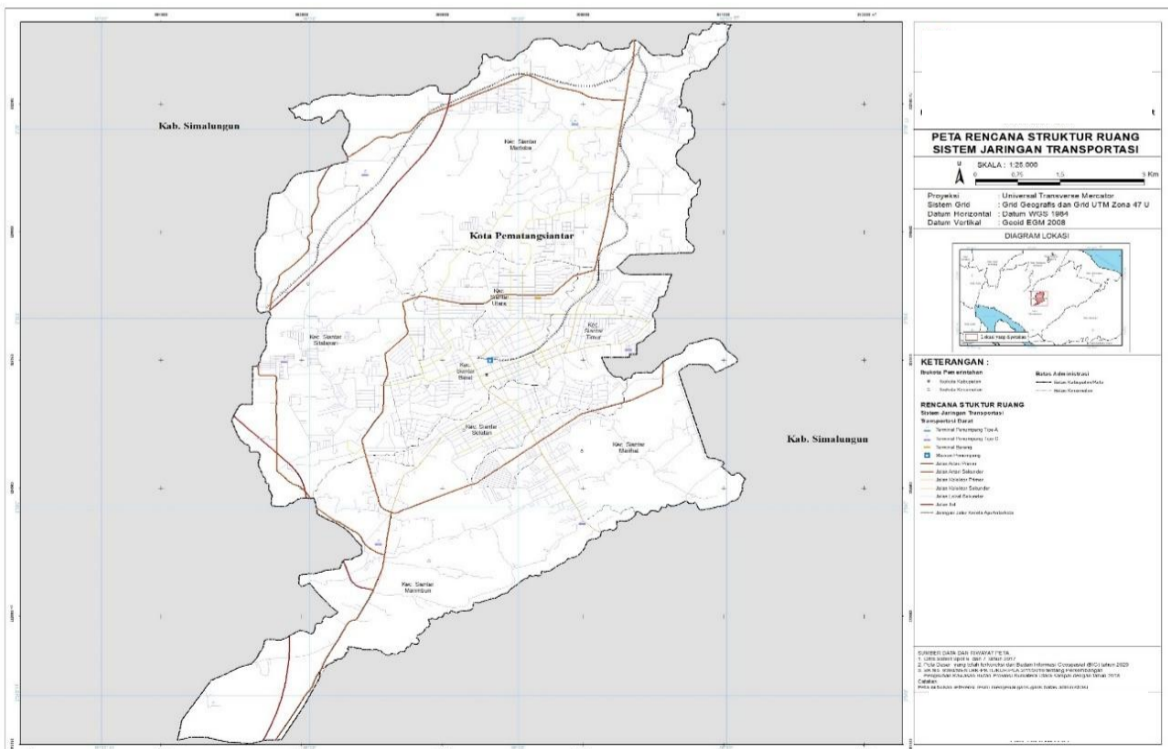
2. Konektivitas Antarwilayah

Konektivitas antarwilayah di Kota Pematangsiantar sangat penting untuk memastikan integrasi yang baik antara pusat-pusat pertumbuhan yang ada, serta mendukung mobilitas barang dan orang. Berdasarkan RTRW, pengembangan konektivitas ini mencakup aspek transportasi, energi, dan komunikasi.

a. Jaringan Transportasi

Transportasi yang efisien sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial di Kota Pematangsiantar. Jaringan transportasi yang baik akan memperlancar konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan dan daerah-daerah di sekitarnya. sistem jaringan transportasi meliputi perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:

1. pembangunan dan penataan jalan arteri primer;
2. penatan jalan kolektor primer; dan
3. penatan jalan kolektor sekunder



Gambar 2.37  
Peta Sistem Jaringan Transportasi  
Sumber : Permen ATR No. 4 Tahun 2024

Beberapa rencana pengembangan terkait jaringan transportasi adalah:

- Jalan Raya dan Infrastruktur Jalan: Pengembangan dan perbaikan jalan-jalan utama, seperti Jalan Merdeka, yang menghubungkan pusat kota dengan daerah pinggiran dan kota-kota tetangga. Pematangsiantar terletak di jalur utama yang menghubungkan Medan dan Danau Toba, sehingga jalan raya yang baik akan meningkatkan daya saing kota ini.
- Transportasi Umum: Pengembangan transportasi umum, seperti angkutan kota yang terintegrasi, akan sangat membantu mobilitas masyarakat, mengurangi kemacetan, dan mempercepat akses ke pusat-pusat pertumbuhan.
- Transportasi Antar Kota: Peningkatan konektivitas antar kota melalui pengembangan jaringan transportasi darat yang lebih baik, seperti bus antar kota dan angkutan logistik, akan meningkatkan hubungan Pematangsiantar dengan kota-kota besar lainnya di Sumatera Utara dan sekitarnya.

#### b. Jaringan Energi

Pengembangan Sistem jaringan energi Kota Pematangsiantar meliputi:

##### a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud merupakan infrastruktur minyak dan gas bumi berada pada Kelurahan Banjar di Kecamatan Siantar Barat

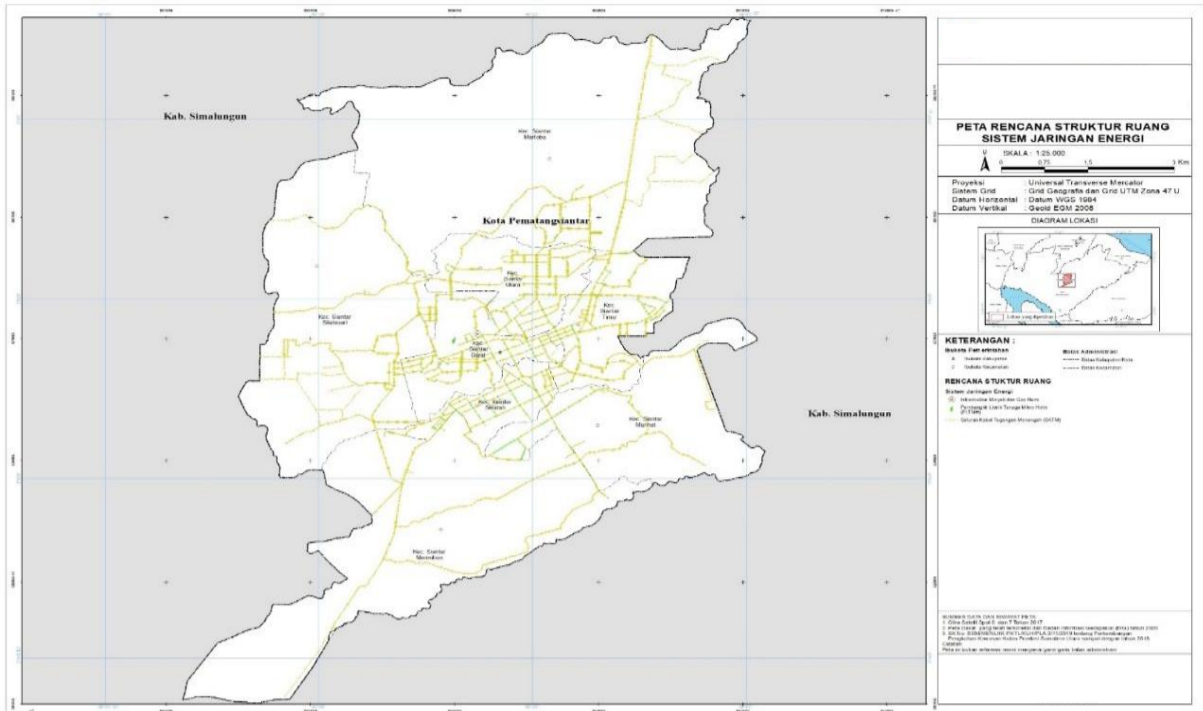
##### b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) pada Kelurahan Banjar di Kecamatan Siantar Barat; dan
- 2) jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung berupa saluran kabel tegangan menengah (SKTM) tersebar di seluruh wilayah kota.

Ketersediaan energi yang stabil dan terjangkau sangat penting untuk mendukung semua sektor yang ada di Kota Pematangsiantar. Rencana pengembangan jaringan energi di Pematangsiantar mencakup:

- Pembangunan Infrastruktur Listrik: Pengembangan dan penyempurnaan jaringan distribusi listrik yang dapat mendukung kebutuhan industri, bisnis, dan perumahan. Dalam hal ini, Pematangsiantar harus memastikan bahwa distribusi energi dapat mencakup kawasan pusat-pusat pertumbuhan yang ada, seperti kawasan perdagangan dan industri.
- Energi Terbarukan: Pengembangan potensi energi terbarukan, seperti tenaga surya atau biogas, perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi energi berkelanjutan kota ini, guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan memperbaiki keberlanjutan lingkungan.



Gambar 2.38  
Peta Sistem Jaringan Energi  
Sumber : Permen ATR No. 4 Tahun 2024

c. Jaringan Komunikasi

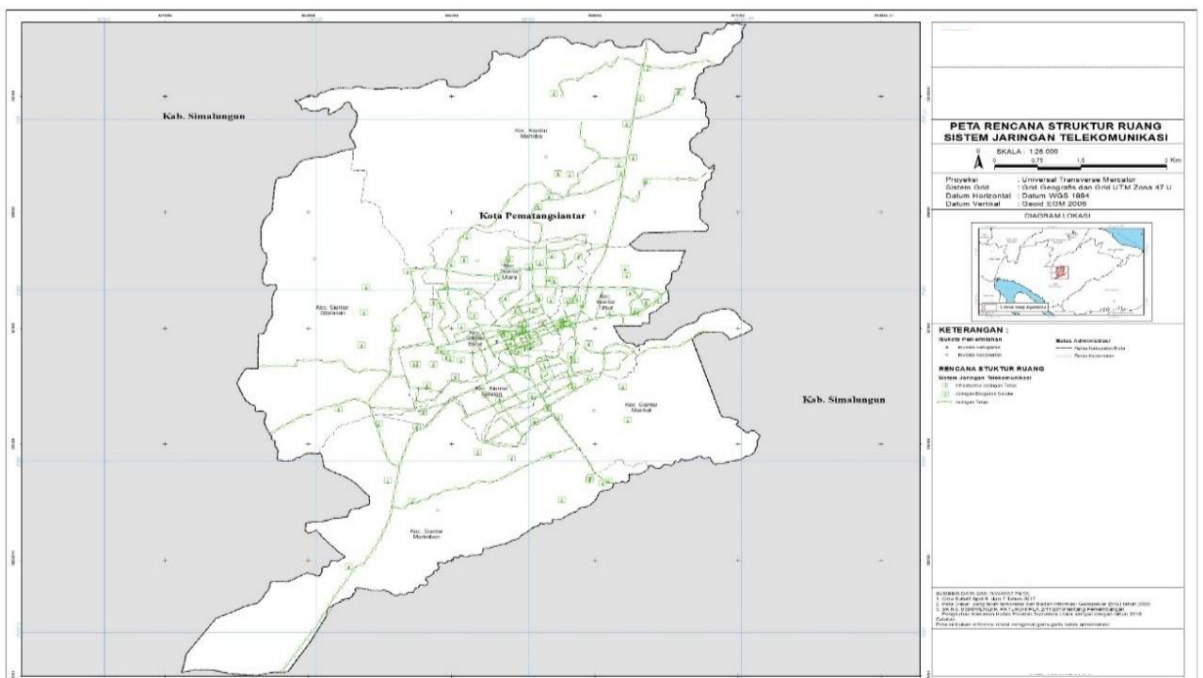
Sistem jaringan telekomunikasi meliputi:

a. Jaringan Tetap;

Jaringan tetap ini meliputi pengembangan jaringan telekomunikasi tetap secara merata di seluruh Kecamatan dan infrastruktur jaringan tetap berupa sentral telepon otomatis (STO) berada pada Kelurahan Proklamasi di Kecamatan Siantar Barat.

b. Jaringan Bergerak.

Jaringan bergerak berupa jaringan bergerak seluler berupa menara BTS (base transceiver station) berlokasi di seluruh wilayah Kecamatan yang ditetapkan berdasarkan sistem jaringan internet tertentu;



Gambar 2.39  
Peta Sistem Jaringan Telekomunikasi  
Sumber : Permen ATR No. 4 Tahun 2024

Ketentuan mengenai pengaturan pengembangan jaringan telekomunikasi yang meliputi perizinan, penataan, pengendalian, pengawasan dan penetapan zonasi diatur dengan peraturan tersendiri.

Jaringan komunikasi yang handal adalah aspek penting dalam mendukung pertumbuhan sektor jasa, perdagangan, pendidikan, dan pariwisata di Kota Pematangsiantar. Jaringan telekomunikasi yang baik mendukung kegiatan sehari-hari, memfasilitasi bisnis digital, serta memberikan akses informasi kepada masyarakat. Pengembangan infrastruktur digital, seperti perluasan jaringan internet berkecepatan tinggi di seluruh wilayah, akan mendukung kemajuan sektor pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Peningkatan akses teknologi di daerah-daerah pinggiran kota juga akan memperkecil kesenjangan digital dan memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing. Selain itu, pengembangan layanan komunikasi berbasis 5G di kawasan pusat bisnis dan industri dapat mendorong pertumbuhan sektor industri berbasis teknologi, serta membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan startup yang membutuhkan konektivitas cepat dan stabil.

#### 2.7.1.1.2. Integrasi Antarwilayah dan Dukungan terhadap Pusat Pertumbuhan Wilayah

Konektivitas komunikasi yang baik adalah salah satu pilar dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Beberapa langkah pengembangan terkait jaringan komunikasi di Kota Pematangsiantar adalah:

- Peningkatan Infrastruktur Telekomunikasi: Pengembangan jaringan telekomunikasi, baik jaringan internet maupun sistem komunikasi seluler, yang dapat meningkatkan akses informasi bagi masyarakat dan pelaku bisnis di kota ini. Infrastruktur komunikasi yang baik juga akan mendukung sektor perdagangan dan pariwisata, yang sangat bergantung pada akses informasi yang cepat dan efektif.
- Peningkatan Koneksi Digital untuk UMKM: Mengingat sektor perdagangan dan ekonomi digital yang terus berkembang, meningkatkan akses internet dengan kualitas tinggi di seluruh wilayah Kota Pematangsiantar sangat penting. Hal ini akan mendukung kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengakses pasar yang lebih luas, serta meningkatkan efisiensi dalam operasional bisnis.

Rencana pengembangan jaringan transportasi, energi, dan komunikasi di Kota Pematangsiantar, yang terintegrasi dengan baik dalam struktur ruang sesuai RTRW, sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial kota. Dengan adanya konektivitas yang baik antarwilayah dan sektor-sektor yang berkembang, Pematangsiantar akan menjadi kota yang lebih terhubung dan dapat berperan sebagai pusat pertumbuhan regional yang mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat

### 2.7.1.2. Pola Ruang Kota Pematangsiantar

Pola ruang Kota Pematangsiantar adalah hasil perencanaan spasial yang menggambarkan pemanfaatan dan pembagian lahan dalam suatu wilayah. Pola ruang ini mencakup dua kategori utama, yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung, yang memiliki fungsi dan tujuan yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan kota.

#### 1. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan kegiatan manusia, seperti pemukiman, industri, perdagangan, pertanian, dan lain-lain. Di Kota Pematangsiantar, kawasan budidaya mencakup beberapa zona yang terbagi berdasarkan fungsi lahan dan kebutuhan penduduk.

- **Pemukiman:** Kawasan ini meliputi area pusat kota dan pinggiran kota yang diperuntukkan untuk pembangunan rumah tinggal. Dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kawasan pemukiman di pusat kota semakin padat, sementara pengembangan pemukiman di sekitar kawasan pinggiran kota menjadi pilihan untuk memperluas kapasitas hunian. Dalam RTRW Kota Pematangsiantar, sebaran Kawasan pemukiman sebesar 3.637 ha yang meliputi :
  - a. **kawasan perumahan;**  
Pengembangan Kawasan perumahan tersebar di seluruh Kelurahan
  - b. **kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;**  
Pengembangan Kawasan umum dan fasilitas social ini tersebar di beberapa wilayah, yaitu :
    - 1) Kelurahan Martimbang, Kelurahan Toba, Kelurahan Kristen di Kecamatan Siantar Selatan;
    - 2) Kelurahan Tanjung Pinggir, Kelurahan Nagapita di Kecamatan Siantar Martoba;
    - 3) Kelurahan Dwikora di Kecamatan Siantar Barat;
    - 4) Kelurahan Simarimbun, dan Kelurahan Marihat Jaya di Kecamatan Siantar Marimbun;
    - 5) Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Kebun Sayur, Kelurahan Pardomuan, Kelurahan Siopat Suhu, Kelurahan Tomuan di Kecamatan Siantar Timur;
    - 6) Kelurahan Sukadame dan Kelurahan Bane di Kecamatan Siantar Utara;
    - 7) Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Sukamakmur di Kecamatan Siantar Marihat; dan
    - 8) Kelurahan Bah Kapul, Kelurahan Bukit Sofa dan Kelurahan Setia Negara di Kecamatan Siantar Sitalasari.
  - c. **kawasan infrastruktur perkotaan.**

Kawasan infrastruktur perkotaan berupa kawasan tempat pemrosesan akhir (TPA) pada Kelurahan Tanjung Pinggir di Kecamatan Siantar Martoba.

- Industri: Kawasan industri di Kota Pematangsiantar umumnya terletak di luar pusat kota, seperti di sekitar jalur transportasi utama dan jalan lingkar kota. Kawasan ini bertujuan untuk menampung aktivitas industri, perdagangan, dan usaha yang membutuhkan ruang besar dan akses yang efisien.

Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektare, terdapat di:

- 1) Kelurahan Tanjung Pinggir, Kelurahan Tanjung Tengah, Kelurahan Tambun Nabolon, Kelurahan Sumber Jaya, Kelurahan Nagapitu di Kecamatan Siantar Martoba;
  - 2) Kelurahan Asuhan, Kelurahan Siopat Suhu, Kelurahan Tomuan di Kecamatan Siantar Timur;
  - 3) Kelurahan Setianegara di Kecamatan Siantar Sitalasari; dan
  - 4) Kelurahan Banjar di Kecamatan Siantar Barat.
- Perdagangan dan Jasa: Kawasan perdagangan yang meliputi pasar tradisional dan pusat perbelanjaan biasanya terletak di kawasan pusat kota, dekat dengan fasilitas transportasi dan fasilitas umum. Hal ini mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat secara langsung.

Kawasan perdagangan dan jasa seluas kurang lebih 781 (tujuh ratus delapan puluh satu) hektare meliputi:

- 1) Kelurahan Sukadame, Kelurahan Bane, Kelurahan Martoba, Kelurahan Melayu, Kelurahan Baru, Kelurahan Kahean, Kelurahan Sigulang-gulang di Kecamatan Siantar Utara;
- 2) Kelurahan Asuhan, Kelurahan Pardomuan, Kelurahan Siopat Suhu, Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Kebun Sayur, Kelurahan Merdeka, Kelurahan Tomuan di Kecamatan Siantar Timur;
- 3) Kelurahan Aek Nauli, Kelurahan Karo, Kelurahan Toba, Kelurahan Martimbang di Kecamatan Siantar Selatan;
- 4) Kelurahan Proklamasi, Kelurahan Timbang Galung, Kelurahan Dwikora di Kecamatan Siantar Barat;
- 5) Kelurahan Nagahuta, Kelurahan Nagahuta Timur, Kelurahan Marihat Jaya, Kelurahan Simarimbun, Kelurahan Pematang Marihat, Kelurahan Tong Marimbun di Kecamatan Siantar Marimbun;
- 6) Kelurahan Setia Negara, Kelurahan Bah Kapul, Kelurahan Gurilla, Kelurahan Bukit Sofa di Kecamatan Siantar Sitalasari;
- 7) Kelurahan Tanjung Tengah, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kelurahan Nagapita, Kelurahan Nagapitu, Kelurahan Pondok Sayur, Kelurahan

Sumber Jaya, Kelurahan Tambun Nabolon di Kecamatan Siantar Martoba; dan

8) Kelurahan Mekar Nauli, Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Sukaraja, Kelurahan Parhorasan Nauli, Kelurahan Pardamean di Kecamatan Siantar Marihat.

- Pertanian: Meskipun Kota Pematangsiantar tidak memiliki sektor pertanian besar, namun kawasan budidaya pertanian terdapat di wilayah pinggiran kota, seperti Siantar Utara dan daerah sekitarnya. Kawasan ini digunakan untuk kegiatan pertanian skala kecil, seperti pertanian hortikultura dan perkebunan rakyat.

Kawasan pertanian seluas kurang lebih 1.965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima) hektare, meliputi:

a. kawasan tanaman pangan;

Pengembangan Kawasan tanaman pangan ini direncanakan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) ditetapkan seluas kurang lebih 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) hektare. tersebar di beberapa wilayah, yaitu :

- a) Kelurahan BP Nauli, Kelurahan Mekar Nauli dan Kelurahan Sukaraja, Kelurahan Parhorasan Nauli di Kecamatan Siantar Marihat;
- b) Kelurahan Tong Marimbun, Kelurahan Simarimbun, Kelurahan Marihat Jaya, Kelurahan Pematang Marihat, Kelurahan Nagahuta dan Kelurahan Nagahuta Timur di Kecamatan Siantar Marimbun;
- c) Kelurahan Pondok Sayur, Kelurahan Sumber Jaya dan Kelurahan Tanjung Pinggir di Kecamatan Siantar Martoba;
- d) Kelurahan Gurilla, Kelurahan Bah Sorma dan Kelurahan Bah Kapul di Kecamatan Siantar Sitalasari; dan
- e) Kelurahan Tomuan di Kecamatan Siantar Timur.

b. kawasan hortikultura;

Kawasan hortikultura ditetapkan seluas kurang lebih 343 (tiga ratus empat puluh tiga) hektare, terdapat di :

- a) Kelurahan Sukaraja di Kecamatan Siantar Marihat;
- b) Kelurahan Tanjung Tengah, Kelurahan Pondok Sayur, dan Kelurahan Tanjung Pinggir, di Kecamatan Siantar Martoba; dan
- c) Kelurahan Gurilla, Kelurahan Bah Sorma, dan Kelurahan Bah Kapul di Kecamatan Siantar Sitalasari.

## 2. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang memiliki fungsi ekologis dan harus dijaga kelestariannya untuk melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kawasan lindung ini terdiri dari beberapa komponen penting yang mendukung keseimbangan ekosistem kota. Kawasan lindung di Kota Pematangsiantar

merupakan bagian penting dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan mendukung kualitas hidup masyarakat. Kawasan lindung ini mencakup berbagai elemen yang memiliki fungsi ekologis dan sosial yang sangat penting. Berikut adalah penjelasan tentang tiga komponen utama kawasan lindung sesuai dengan RTRW Kota Pematangsiantar:

a. Badan Air

Badan air merupakan salah satu komponen penting dalam kawasan lindung di Kota Pematangsiantar. Badan air ini mencakup sungai, danau, rawa, atau sumber air lainnya yang memiliki peran vital dalam mendukung kehidupan manusia dan ekosistem.

Fungsi Badan Air:

1. Penyediaan Sumber Air: Badan air berfungsi sebagai sumber air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri. Sungai atau danau yang ada di Kota Pematangsiantar menjadi sumber utama pasokan air.
2. Pengendalian Banjir: Badan air juga berfungsi sebagai sistem pengatur aliran air, yang membantu dalam mencegah banjir dan mengatur aliran air hujan.
3. Keseimbangan Ekosistem: Selain menyediakan air untuk berbagai kegiatan manusia, badan air juga memiliki fungsi ekologis penting sebagai habitat bagi flora dan fauna akuatik.

RTRW Kota Pematangsiantar mengatur perlindungan badan air melalui pengaturan batasan dan pengawasan terhadap penggunaan lahan yang berdekatan dengan badan air. Kawasan di sekitar badan air harus dikelola dengan hati-hati, seperti menetapkan zona perlindungan yang menghindari pembangunan yang dapat merusak kualitas air, serta pengaturan terhadap aktivitas pertanian atau industri yang dapat mencemari air. Badan air sebagaimana dimaksud seluas kurang lebih 88 (delapan puluh delapan) hektare meliputi:

- a. sungai Bah Bolon;
- b. sungai Bah Biak;
- c. sungai Bah Sibarambang;
- d. sungai Bah Kapul;
- e. sungai Sigulang-Gulang;
- f. sungai Bah Sosopan;
- g. sungai Lau Batu-batu;
- h. sungai Bah Banal; dan
- i. sungai Bah Hapal.

b. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan yang dilindungi karena memiliki nilai ekologi yang penting bagi kelestarian lingkungan hidup atau keberlanjutan sosial dan ekonomi di suatu wilayah.

Fungsi Kawasan Perlindungan Setempat:

1. Melindungi Keanekaragaman Hayati: Kawasan perlindungan setempat memiliki potensi untuk mendukung keberagaman spesies flora dan fauna yang penting bagi ekosistem lokal.
2. Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Alam: Kawasan ini berfungsi untuk menjaga sumber daya alam yang esensial, seperti hutan, area pertanian, atau padang rumput yang menyediakan berbagai bahan kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.
3. Pengendalian Pencemaran: Kawasan perlindungan setempat juga berperan dalam mengurangi dampak negatif pencemaran yang dapat memengaruhi kualitas lingkungan secara keseluruhan.

RTRW Kota Pematangsiantar menetapkan kawasan perlindungan setempat dengan memperhatikan faktor-faktor ekologis dan sosial, serta membatasi aktivitas yang dapat merusak kawasan tersebut. Kawasan ini harus diawasi dengan ketat agar tidak terjadi alih fungsi lahan yang dapat merusak atau menghilangkan fungsi perlindungannya. Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud seluas kurang lebih 188 (seratus delapan puluh delapan) hektare meliputi:

- a. Kelurahan Dwikora, Kelurahan Teladan di Kecamatan Siantar Barat;
- b. Kelurahan BP Nauli, Kelurahan Mekar Nauli, Kelurahan Suka Makmur, Kelurahan Suka Maju, Kelurahan Sukaraja di Kecamatan Siantar Marihat;
- c. Kelurahan Marihat Jaya, Kelurahan Nagahuta, Kelurahan Pematang Marihat, Kelurahan Simarimbun, Kelurahan Tong Marimbun di Kecamatan Siantar Marimbun;
- d. Kelurahan Nagapita, Kelurahan Nagapitu, Kelurahan Pondok Sayur, Kelurahan Sumber Jaya, Kelurahan Tambun Nabolon, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kelurahan Tanjung Tonga di Kecamatan Siantar Martoba;
- e. Kelurahan Aek Nauli, Karo, Kelurahan Kristen, Kelurahan Martimbang, Kelurahan Toba di Kecamatan Siantar Selatan;
- f. Kelurahan Bah Kapul, Kelurahan Bah Sorma, Kelurahan Bukit Sofa, Kelurahan Gurilla, Kelurahan Setia Negara di Kecamatan Siantar Sitalasari;
- g. Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Tomuan di Kecamatan Siantar Timur; dan
- h. Kelurahan Bane, Sukadame di Kecamatan Siantar Utara.

c. Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan bagian dari kawasan lindung yang sangat penting dalam upaya menciptakan kota yang sehat, lestari, dan nyaman bagi penghuninya. RTH ini meliputi taman, hutan kota, jalur hijau, dan ruang terbuka

lainnya yang menyediakan ruang untuk rekreasi, interaksi sosial, dan fungsi ekologis.

Fungsi Ruang Terbuka Hijau:

1. Penyediaan Udara Bersih: RTH berfungsi sebagai "paru-paru kota" yang membantu memproduksi oksigen, menyerap karbon dioksida, dan mengurangi polusi udara.
2. Penyerap Air Hujan: RTH juga berfungsi untuk menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir, terutama di area perkotaan yang rentan terhadap genangan air.
3. Meningkatkan Kualitas Hidup: RTH menyediakan ruang bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas sosial, olahraga, dan rekreasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan mental.
4. Pelestarian Keanekaragaman Hayati: Ruang terbuka hijau juga berfungsi sebagai habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan, serta mendukung pelestarian keanekaragaman hayati di wilayah perkotaan.

RTRW Kota Pematangsiantar memberikan perhatian khusus pada pengembangan ruang terbuka hijau yang cukup di berbagai titik strategis kota. Ini termasuk pengembangan taman kota, jalur hijau, serta perlindungan terhadap ruang terbuka hijau yang sudah ada agar tidak dialihfungsikan menjadi area komersial atau permukiman. RTH sebagaimana dimaksud kurang lebih 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) hektare, meliputi:

a. rimba kota;

Rimba kota terdapat di beberapa wilayah, yaitu :

- a) Kelurahan Gurilla dan Kelurahan Setia Negara di Kecamatan Siantar Sitalasari;
- b) Kelurahan Tanjung Pinggir, Kelurahan Tambun Nabolon, dan Kelurahan Tanjung Tengah, di Kecamatan Siantar Martoba; dan
- c) Kelurahan Simarimbun dan Kelurahan Pematang Marihat di Kecamatan Siantar Marimbun.

b. taman kota;

Taman Kota terdapat di beberapa wilayah, yaitu :

- a) Kelurahan Proklamasi dan Kelurahan Timbang Galung di Kecamatan Siantar Barat;
- b) Kelurahan Tambun Nabolon di Kecamatan Siantar Martoba;
- c) Kelurahan Simarimbun di Kecamatan Siantar Marimbun; dan
- d) Kelurahan Pahlawan di Kecamatan Siantar Timur.

c. pemakaman;

Pemakaman terdapat di beberapa wilayah, yaitu :

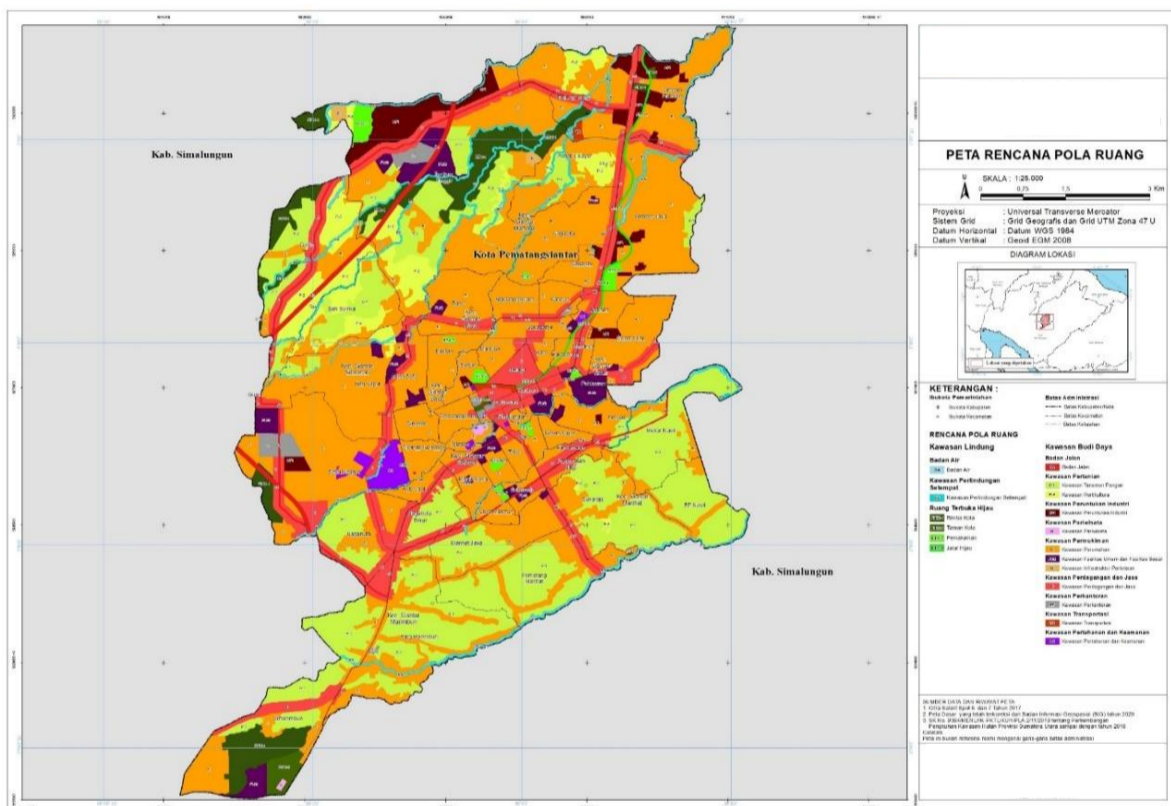
- a) Kelurahan Pahlawan di Kecamatan Siantar Timur;
- b) Kelurahan Suka Makmur dan Kelurahan Sukamaju di Kecamatan Siantar Marihat;

- c) Kelurahan Nagapita, Kelurahan Sumber Jaya, Kelurahan Tanjung Pinggir dan Kelurahan Pondok Sayur di Kecamatan Siantar Martoba;
- d) Kelurahan Kristen dan Kelurahan Karo di Kecamatan Siantar Selatan; dan
- e) Kelurahan Sipinggol-pinggol dan Kelurahan Banjar di Kecamatan Siantar Barat.

d. jalur hijau.

Wilayah Jalur hijau berada di beberapa wilayah, yaitu :

- a) Kelurahan Tambun Nabolon dan Kelurahan Sumber Jaya di Kecamatan Siantar Martoba;
- b) Kelurahan Melayu dan Kelurahan Baru di Kecamatan Siantar Utara;
- c) Kelurahan Dwikora di Kecamatan Siantar Barat; dan
- d) Kelurahan Asuhan, Kelurahan Pardomuan, Kelurahan Pahlawan di Kecamatan Siantar Timur.



Gambar 2.40  
Peta Pola Ruang  
Sumber : Permen ATR No. 4 Tahun 2024

Pola ruang Kota Pematangsiantar memiliki hubungan yang erat dengan proyeksi pertumbuhan penduduk dan kebutuhan prasarana. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, terdapat tekanan yang lebih besar terhadap ketersediaan lahan dan prasarana yang ada. Oleh karena itu, pola ruang yang baik harus mempertimbangkan hal ini agar kota dapat berkembang secara berkelanjutan.

- Proyeksi Kebutuhan Penduduk: Dengan pertumbuhan penduduk yang diperkirakan akan terus meningkat, terutama di kawasan pusat kota,

kebutuhan akan pemukiman, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ruang terbuka hijau juga akan meningkat. Kawasan budidaya yang terencana dengan baik harus dapat mengakomodasi kebutuhan ini tanpa mengorbankan fungsi ekologis kawasan lindung.

- Kebutuhan Prasarana: Selain kebutuhan akan lahan untuk pemukiman, sektor prasarana seperti transportasi, energi, air bersih, dan pengelolaan limbah juga perlu diperhatikan. Kawasan yang lebih dekat dengan pusat kota akan lebih padat dan membutuhkan jaringan transportasi yang lebih baik, seperti jalan utama dan transportasi publik yang efisien.

#### 2.7.1.3. Daya Dukung Wilayah dalam RTRW Kota Pematangsiantar

Daya dukung wilayah Kota Pematangsiantar sangat bergantung pada kemampuan ruang untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan yang ada. RTRW Kota Pematangsiantar harus mencakup analisis daya dukung wilayah untuk memastikan bahwa setiap rencana pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan batas kapasitas alam dan lingkungan yang ada.

- Daya Dukung mengacu pada kapasitas alam, seperti ketersediaan air, energi, dan infrastruktur pendukung lainnya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Dalam hal ini, RTRW harus mencakup rencana pengelolaan air, pengelolaan limbah, dan pengelolaan energi yang efisien.
- Pembangunan yang berkelanjutan harus menjadi prioritas dalam RTRW dengan mempertimbangkan daya dukung yang ada. Misalnya, dalam pengembangan kawasan industri ramah lingkungan, RTRW mengarahkan penggunaan teknologi ramah lingkungan dan sistem energi terbarukan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

#### 2.7.2. Arahan Kawasan Strategis Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 4 Tahun 2024

Arahan kawasan strategis dalam RTRW Kota Pematangsiantar sangat berkaitan dengan pemetaan kawasan yang memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan memperkuat konektivitas antarwilayah. Beberapa kawasan yang diarahkan sebagai kawasan strategis meliputi kawasan industri, kawasan perumahan, kawasan pendidikan, dan kawasan wisata.

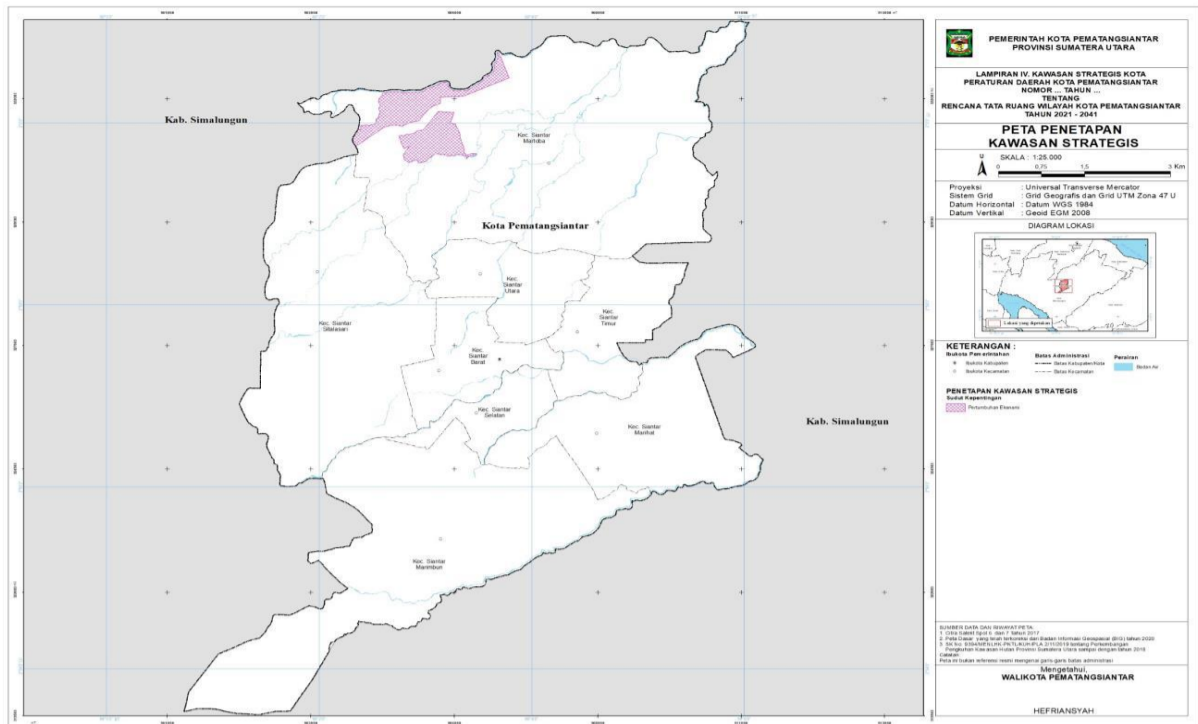
- Kawasan Industri: RTRW Kota Pematangsiantar mengidentifikasi kawasan Tanjung Pinggir dan beberapa kawasan industri lainnya sebagai prioritas untuk pengembangan industri ramah lingkungan. Kawasan ini dipilih karena aksesibilitasnya yang baik terhadap transportasi, baik jalan raya maupun jalur distribusi logistik lainnya.
- Kawasan Perumahan: Dalam mengantisipasi pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, RTRW mengarahkan pengembangan perumahan vertikal

di kawasan Tanjung Pinggir dan pusat kota untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang dan mengurangi tekanan terhadap kawasan lindung.

- Kawasan Pendidikan dan Wisata: Kawasan Siantar Timur yang memiliki potensi besar untuk pengembangan pendidikan tinggi dan Taman Hewan Pematangsiantar sebagai kawasan wisata strategis harus mendapat perhatian khusus. Kedua kawasan ini akan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menarik wisatawan, yang pada gilirannya akan mendongkrak perekonomian lokal.

RTRW Kota Pematangsiantar, sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 4 Tahun 2024, diharapkan dapat mendukung pembangunan jangka panjang dengan menciptakan struktur ruang dan pola ruang yang seimbang antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan terhadap lingkungan. RTRW harus mengarahkan pembangunan dengan prinsip keberlanjutan, memanfaatkan potensi wilayah secara optimal tanpa mengabaikan kelestarian sumber daya alam. RTRW harus memberikan arahan yang jelas mengenai kawasan-kawasan yang perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, baik dari sisi perumahan, infrastruktur, pendidikan, maupun pariwisata. Dalam pengembangan kawasan industri dan perumahan vertikal, RTRW harus memperhatikan keseimbangan antara peningkatan ekonomi dan perlindungan lingkungan, sesuai dengan arahan dalam peraturan tersebut.

Di wilayah Kota Pematangsiantar, kawasan Tanjung Pinggir seluas 573 Ha ini merupakan kawasan yang direncanakan sebagai kawasan industri pada rencana pola ruang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar Tahun 2012 – 2032. Kawasan ini memiliki nilai strategis karena memiliki prospek pengembangan yang sangat besar untuk ke depannya, disamping cukup luas, kawasan ini juga masih merupakan lahan eks-HGU PTPN III di Kecamatan Siantar Martoba dan dekat dengan Terminal Tanjung Pinggir. Selain diperuntukkan sebagai kawasan industri, kawasan tersebut juga direncanakan untuk pengembangan di sektor perdagangan dan jasa, perumahan, perkantoran, Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Tempat Pemakaman Umum (TPU).



Gambar 2.41  
Peta Penetapan Kawasan Strategis  
Sumber : Permen ATR No. 4 Tahun 2024

Dalam RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2045 Kota Pematangsiantar ditetapkan menjadi salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Fungsi yang diarahkan sesuai dengan PKW tersebut adalah Pemerintahan Kota, Perdagangan dan Jasa, Industri dan Pendidikan. Selain ditetapkan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah, Kota Pematangsiantar juga dicanangkan dan akan dikembangkan menjadi salah satu kawasan industri baik menengah dan besar di Provinsi Sumatera Utara, dan kawasan wisata minat khusus yaitu dengan adanya tujuan salah satu objek tujuan wisata Taman Hewan/Kebun Binatang Pematangsiantar.

### 2.7.3. Program dan Proyek Strategis Pusat Pertumbuhan Wilayah

Untuk mendukung pengembangan Kawasan di Kota Pematangsiantar, selain pengembangan Kawasan industri di wilayah Tanjung Pinggir, ada beberapa program atau proyek strategis lain yang sangat penting untuk dilaksanakan. Proyek-proyek ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas infrastruktur, tetapi juga memperkuat konektivitas antar kawasan, meningkatkan daya saing ekonomi, serta mendorong kemajuan sosial dan budaya di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa proyek strategis yang dapat dijadikan fokus utama dalam pembangunan Kota Pematangsiantar, beserta dampaknya terhadap pertumbuhan wilayah dan hubungan antar pusat pertumbuhannya.

#### 1. Pembangunan Jalan Lingkar Kota untuk Akses Kawasan Industri

Pembangunan jalan lingkar kota adalah proyek strategis yang sangat krusial untuk meningkatkan efisiensi transportasi dan aksesibilitas kawasan industri di

Kota Pematangsiantar. Jalan lingkar ini akan menghubungkan berbagai kawasan industri yang terletak di pinggiran kota dengan pusat-pusat perdagangan dan layanan yang ada, serta mempercepat distribusi barang dan bahan baku ke pasar.

- Dampak terhadap Pertumbuhan Wilayah: Pembangunan jalan lingkar akan mengurangi kemacetan di pusat kota, yang selama ini menghambat mobilitas barang dan orang, serta meningkatkan efisiensi distribusi produk dari kawasan industri. Hal ini akan menciptakan daya tarik lebih bagi investor untuk menanamkan modal di kawasan industri, memperluas lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Jalan lingkar juga akan membuka peluang pengembangan kawasan baru di sepanjang jalur tersebut, yang dapat menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
- Hubungan dengan Pusat Pertumbuhan Lainnya: Jalan lingkar kota akan menjadi jalur penghubung yang sangat penting antara kawasan industri dengan pusat-pusat perdagangan dan jasa di kota, serta meningkatkan aksesibilitas ke kawasan pariwisata dan pendidikan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur ini akan mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain, seperti perdagangan dan pariwisata, karena peningkatan transportasi akan mempermudah arus barang dan wisatawan.

## 2. Revitalisasi Pasar Tradisional

Pasar tradisional di Kota Pematangsiantar merupakan bagian penting dari ekonomi lokal. Revitalisasi pasar tradisional bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pasar ini, baik dari segi fasilitas, kebersihan, maupun kenyamanan bagi pengunjung dan pedagang. Revitalisasi ini dapat mencakup perbaikan infrastruktur pasar, penyediaan fasilitas parkir yang memadai, serta pengorganisasian ulang area pasar agar lebih tertata dan efisien.

- Dampak terhadap Pertumbuhan Wilayah: Revitalisasi pasar tradisional akan meningkatkan citra kota sebagai pusat perdagangan yang bersih dan modern, yang akan menarik lebih banyak pengunjung baik dari dalam maupun luar kota. Perbaikan ini juga akan meningkatkan kenyamanan bagi pedagang, meningkatkan pendapatan mereka, serta meningkatkan volume transaksi perdagangan. Hal ini berpotensi menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan dan sektor jasa yang mendukung pasar tersebut.
- Hubungan dengan Pusat Pertumbuhan Lainnya: Pasar tradisional yang telah direvitalisasi akan berfungsi sebagai pusat pertemuan bagi kegiatan perdagangan lokal, serta mendukung sektor pariwisata dengan menarik wisatawan yang tertarik untuk merasakan pengalaman berbelanja tradisional. Selain itu, keberadaan pasar yang terorganisir dan modern akan mendukung pengembangan kawasan perdagangan yang lebih luas di sekitar pusat kota.

### 3. Peningkatan Kapasitas Pendidikan Tinggi Berbasis Teknologi

Peningkatan kapasitas pendidikan tinggi berbasis teknologi bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang siap menghadapi tuntutan era digital dan ekonomi berbasis pengetahuan. Proyek ini mencakup pengembangan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas pengajaran, serta integrasi teknologi dalam kurikulum pendidikan tinggi di Pematangsiantar.

- Dampak terhadap Pertumbuhan Wilayah: Peningkatan kapasitas pendidikan tinggi berbasis teknologi akan menciptakan generasi muda yang lebih terampil, inovatif, dan siap bersaing di pasar kerja global. Ini akan meningkatkan daya tarik Kota Pematangsiantar sebagai tujuan pendidikan, yang pada gilirannya akan menarik mahasiswa dari luar daerah dan meningkatkan kegiatan ekonomi di sektor pendidikan. Lulusan dari universitas atau lembaga pendidikan tinggi juga akan memperkaya pasar tenaga kerja lokal dan mendorong tumbuhnya sektor-sektor berbasis teknologi seperti startup, digital marketing, dan industri kreatif.
- Hubungan dengan Pusat Pertumbuhan Lainnya: Dengan penguatan sektor pendidikan, Kota Pematangsiantar akan semakin terhubung dengan kawasan industri dan sektor jasa yang membutuhkan tenaga kerja terampil dan berpendidikan tinggi. Hal ini juga akan mendukung sektor pariwisata, karena banyaknya mahasiswa yang datang dari luar kota akan meningkatkan permintaan terhadap akomodasi, restoran, dan fasilitas lainnya. Sektor perdagangan juga akan mendapatkan dampak positif dari adanya permintaan barang dan jasa yang lebih beragam.

### 4. Pengembangan Kawasan Wisata di Taman Hewan

Pengembangan kawasan wisata di Taman Hewan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya tarik pariwisata Kota Pematangsiantar. Proyek ini meliputi peningkatan fasilitas wisata di taman hewan, seperti pembenahan area hiburan, edukasi, dan rekreasi keluarga, serta pembangunan fasilitas pendukung seperti restoran, tempat istirahat, dan area parkir.

- Dampak terhadap Pertumbuhan Wilayah: Pengembangan kawasan wisata ini akan menjadikan Kota Pematangsiantar sebagai destinasi wisata yang lebih menarik, tidak hanya bagi wisatawan lokal, tetapi juga wisatawan mancanegara. Peningkatan kualitas dan kuantitas wisatawan akan berdampak langsung pada sektor perdagangan, jasa, dan akomodasi, serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu, pengembangan wisata juga akan mendorong pelestarian alam dan kebudayaan lokal, memberikan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan.
- Hubungan dengan Pusat Pertumbuhan Lainnya: Pengembangan kawasan wisata akan meningkatkan hubungan dengan sektor-sektor lain seperti perdagangan dan jasa, dengan meningkatkan permintaan terhadap fasilitas akomodasi, restoran, transportasi, dan oleh-oleh khas. Kawasan wisata ini

juga dapat menjadi pusat edukasi, yang berhubungan langsung dengan sektor pendidikan, mengingat Taman Hewan dapat menjadi tempat untuk kegiatan belajar tentang flora dan fauna bagi pelajar.

Taman Hewan Pematangsiantar, sebagai salah satu destinasi wisata utama di kota ini, memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Kawasan wisata ini dapat menjadi penggerak ekonomi lokal jika dikelola dengan baik, mengingat semakin banyaknya minat masyarakat terhadap wisata alam dan edukasi.

- Fokus Pengembangan: Meningkatkan fasilitas wisata, seperti penataan ulang area Taman Hewan, pembangunan akomodasi wisata (hotel, homestay), dan pengembangan tempat wisata edukasi, seperti taman botani atau zona konservasi satwa.
- Fasilitas Pendukung: Pembangunan fasilitas penunjang wisata, seperti restoran, pusat oleh-oleh, serta fasilitas transportasi dan aksesibilitas yang mudah dijangkau oleh wisatawan.

Pengembangan kawasan wisata ini akan meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan internasional, yang berkontribusi pada peningkatan perekonomian kota, menciptakan lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, dan memperkenalkan Kota Pematangsiantar ke dunia luar sebagai destinasi wisata yang menarik.

Keempat proyek strategis ini – pembangunan jalan lingkar kota, revitalisasi pasar tradisional, peningkatan kapasitas pendidikan tinggi berbasis teknologi, dan pengembangan kawasan wisata di Taman Hewan – memiliki dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan wilayah Kota Pematangsiantar. Proyek-proyek ini akan saling mendukung satu sama lain, memperkuat konektivitas antar sektor, serta mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing ekonomi, dan pengembangan sosial budaya. Pembangunan infrastruktur yang baik, fasilitas pendidikan yang maju, serta sektor pariwisata yang berkembang akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan keberlanjutan ekonomi di masa depan.

#### 2.7.5. Rencana Program atau Proyek Strategis untuk Pengembangan Kawasan Tanjung Pinggir Kota Pematangsiantar

Kawasan Tanjung Pinggir di Kota Pematangsiantar memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi, hunian, dan rekreasi yang terintegrasi dengan konsep keberlanjutan dan ramah lingkungan. Beberapa program atau proyek strategis yang dapat dikembangkan di kawasan ini adalah:

##### 1. Industri Ramah Lingkungan di Tanjung Pinggir

Pengembangan industri ramah lingkungan di kawasan Tanjung Pinggir sangat relevan untuk mendukung perwujudan pembangunan berkelanjutan Kota Pematangsiantar. Kawasan ini, yang terletak di sepanjang jalur transportasi utama dan dekat dengan pusat kota, cocok untuk mengakomodasi berbagai jenis industri yang memprioritaskan efisiensi energi dan minimisasi dampak lingkungan.

- Jenis Industri: Fokus pada industri yang menghasilkan produk hijau dan ramah lingkungan, seperti pengolahan limbah, energi terbarukan (misalnya, tenaga surya atau biogas), serta produk berbasis teknologi hijau.
- Infrastruktur Pendukung: Pembangunan infrastruktur yang mendukung, seperti sistem transportasi logistik yang efisien, sistem pengolahan air limbah yang canggih, dan pengelolaan energi terbarukan.
- Dampak Pengembangan: Pengembangan industri ramah lingkungan ini tidak hanya akan menciptakan lapangan pekerjaan tetapi juga meningkatkan daya tarik kawasan ini bagi investor yang berfokus pada keberlanjutan. Selain itu, akan mendukung peningkatan kualitas udara dan pengurangan polusi lingkungan di sekitar kawasan industri.

## 2. Perumahan Vertikal di Tanjung Pinggir

Dengan meningkatnya populasi penduduk Kota Pematangsiantar dan keterbatasan lahan di pusat kota, pengembangan perumahan vertikal di kawasan Tanjung Pinggir menjadi solusi yang sangat relevan. Perumahan vertikal dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang terbatas, sambil mengurangi kebutuhan akan pembangunan horizontal yang bisa merusak kawasan terbuka hijau dan kawasan lindung.

- Desain dan Konsep: Perumahan vertikal yang dibangun dengan desain ramah lingkungan, seperti penggunaan bahan bangunan daur ulang, pengelolaan air hujan, dan sistem pendinginan alami.
- Konektivitas: Perumahan vertikal ini akan dilengkapi dengan fasilitas transportasi publik yang terintegrasi, seperti halte bus, stasiun kereta ringan, dan jalur sepeda.
- Fasilitas Penunjang: Setiap kawasan perumahan vertikal juga dapat dilengkapi dengan fasilitas sosial, seperti taman kota, area rekreasi, pusat olahraga, dan ruang publik yang mendukung interaksi sosial.
- Dampak Pengembangan: Selain memenuhi kebutuhan perumahan yang terus meningkat, pengembangan perumahan vertikal ini juga dapat mendorong peningkatan ekonomi lokal dan menciptakan pola hunian yang lebih teratur dan efisien.

## 3. Pengembangan Ruang Publik di Tanjung Pinggir

Tanjung Pinggir juga memiliki potensi untuk menjadi kawasan dengan ruang publik terbuka yang mendukung aktivitas sosial, rekreasi, dan interaksi antarwarga. Pengembangan ruang publik yang dapat digunakan oleh masyarakat akan memberikan kontribusi besar terhadap kualitas hidup di kota ini.

- Ruang Terbuka Hijau (RTH): Pembangunan taman, jalur hijau, dan area rekreasi di sepanjang sungai atau di area sekitar danau. Kawasan ini juga bisa diintegrasikan dengan ruang publik yang lebih luas, seperti pusat seni, pasar lokal, dan area untuk kegiatan komunitas.

- Fasilitas Publik dan Komersial: Pembangunan fasilitas publik yang mudah diakses seperti pusat komunitas, perpustakaan, dan ruang seni. Selain itu, pembangunan ruang komersial kecil seperti kafe atau kios pasar yang mendukung perekonomian lokal.
- Fungsi Ekologis: Ruang publik ini dapat dirancang dengan konsep keberlanjutan, dengan sistem pengelolaan limbah, pengolahan air hujan, dan tanaman penghijauan yang mendukung pelestarian ekosistem kota.

Selain kawasan Tanjung Pinggir, terdapat beberapa kawasan strategis lain di Kota Pematangsiantar yang memiliki potensi besar untuk mendorong pengembangan wilayah. Berikut adalah dua kawasan strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan:

Kawasan Siantar Timur memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan pendidikan tinggi dan riset di Kota Pematangsiantar. Dengan keberadaan universitas dan institusi pendidikan lainnya, kawasan ini dapat difokuskan untuk pengembangan kampus, fasilitas penelitian, dan area pendidikan yang dapat menarik lebih banyak mahasiswa dari luar kota.

- Fokus Pengembangan: Meningkatkan kapasitas pendidikan tinggi dengan fokus pada program berbasis teknologi dan keahlian yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja. Ini juga dapat mencakup pengembangan inkubator bisnis untuk mendukung startup teknologi dan perusahaan berbasis riset.
- Infrastruktur Penunjang: Pengembangan infrastruktur transportasi, seperti sistem angkutan massal yang terhubung langsung ke pusat kota dan area kampus, serta pengembangan fasilitas umum yang mendukung kehidupan kampus.
- Dampak Pengembangan: Pengembangan kawasan pendidikan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Pematangsiantar tetapi juga dapat menjadi daya tarik bagi investor dan tenaga kerja terampil. Selain itu, kawasan pendidikan juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor pendidikan dan riset.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

#### **3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah**

Masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Masalah juga digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Masalah biasanya dianggap sebagai suatu keadaan yang harus diselesaikan. Masalah adalah ketika kenyataan yang terjadi atau realita fakta yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dapat disimpulkan bahwa masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan serta harapan, juga antara realitas dan ekspektasi. Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait permasalahan daerah. Analisis permasalahan pembangunan daerah diawali dengan analisis data capaian pembangunan sampai dengan tahun 2023, yaitu dengan melakukan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025. Dari hasil analisis data tersebut dapat dirumuskan permasalahan, sebagai berikut:

##### **1. Bidang Infrastruktur**

Permasalahan terkait bidang infrastruktur terbagi atas Infrastruktur Perkotaan dan Permukiman, lingkungan hidup. Permasalahan kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman disebabkan belum optimalnya pengelolaan infrastruktur perkotaan dan permukiman karena belum selesainya jalan lingkar sehingga menyebabkan bercampurnya kendaraan lokal dan regional, masih rendahnya Akses Air Minum Aman, masih rendahnya kualitas sanitasi, belum optimalnya sistem drainase kota dan kurang optimalnya sarana dan prasarana pengendalian banjir dan masih adanya kondisi rumah tidak layak huni.

Akar permasalahan belum selesainya jalan lingkar sehingga menyebabkan bercampurnya kendaraan lokal dan regional dapat dilihat dari progress pembangunan jalan lingkar yang masih tahap pembebasan lahan, perkerasan, dan pembangunan jembatan pada beberapa titik. Penyelesaian jalan lingkar ini diharapkan akan memberikan dampak pada berkurangnya volume kendaraan yang melintas ditengah kota.

Akar permasalahan terkait masih rendahnya akses air minum aman di Kota Pematangsiantar dapat dilihat dari capaian akses air minum aman pada tahun 2023 yang masih berada pada angka 86%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat sejumlah warga yang bergantung pada sumber air non-perpipaan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, yang keamanannya belum terjamin. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan infrastruktur air bersih, perluasan

jaringan perpipaan, serta penguatan pengelolaan sumber daya air guna memastikan ketersediaan akses air minum yang aman, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Pematangsiantar.

Akar permasalahan masih rendahnya kualitas sanitasi yang dapat dilihat dari capaian sanitasi aman yang masih rendah yakni baru mencapai 7,67%. Dengan capaian ini meningkatkan resiko pencemaran tanah dan sumber air di Kota Pematangsiantar kedepannya jika tidak dikendalikan.

Akar permasalahan kurang optimalnya sarana dan prasarana pengendalian banjir dapat dilihat dari sarana dan prasarana pengendalian banjir pada wilayah tertentu yang tidak terpelihara dengan baik.

Akar permasalahan masih adanya kondisi rumah tidak layak huni dapat dilihat dari capaian rumah layak huni di Kota Pematangsiantar yang baru sebesar 62,38% pada Tahun 2023 atau rumah tidak layak huni sebesar 37,62% menunjukkan masih tingginya rumah yang tidak layak huni di Kota Pematangsiantar.

Permasalahan lingkungan hidup disebabkan Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup. Kondisi ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, meluasnya lahan perkerasan dan hilangnya lahan vegetatif, pepohonan dan lahan sawah/pertanian, overloadnya TPA, rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan pengambilan air tanah yang tidak terkendali.

Akar permasalahan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah pada sembarang tempat, selain itu persentase perusahaan yang memiliki instalasi pengolahan limbah masih rendah yakni 27,5%.

Akar permasalahan overloadnya TPA dapat dilihat dari keberadaan TPA eksisting yang sudah tidak mampu menampung sampah yang masuk. Menurut data capaian pengelolaan sampah tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar jumlah timbulan sampah mencapai 56.549,74 ton (96,39%) Sampah yang dilakukan proses pengurangan sebesar 14.574,74 ton (24,84%), dan penanganan sebesar 41.975,00 ton (71,55%). Untuk data rata-rata harian timbulan sampah per hari mencapai 160,73 ton/hari dengan rata-rata 0,5 kg/org/hari, yang dilakukan penanganan sampah (diangkut/diolah di TPA) mencapai ± 115 ton/hari (71,55%), dan melalui proses pengurangan sampah (pengomposan, bank sampah, daur ulang, guna ulang, sektor informal/botot, produk kreatif,dll) sebanyak ± 39 ton/hari (24,84%), dan sampah yang tidak terkelola mencapai ± 5,8 ton/hari (3,61%) karena tidak terjangkau layanan, dibakar, dibuang ke sungai/drainase, proses alam. Jika melihat kondisi luasan lahan TPA saat ini ± 2,4 Ha, dengan jumlah timbulan sampah saat ini ± 720.000 m<sup>3</sup>, sehingga kondisi TPA saat ini sudah penuh (*overload*) sehingga perlu dilakukan pengolahan sampah untuk mengurangi timbunan.

Akar permasalahan rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dilihat dari data eksisting jumlah luasan ruang terbuka hijau di Kota Pematangsiantar saat ini sekitar 84.184 m<sup>2</sup> atau 8,42 Ha dengan status RTH berupa taman fasilitas, taman kota, pemakaman, jalur hijau seperti jalur pejalan kaki, sempadan kereta api. Dengan luasan 8,42 Ha jika dibanding dengan luas wilayah Kota Pematangsiantar, maka persentase RTH Kota Pematangsiantar saat ini hanya 0,11%. Masih sangat jauh dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mensyaratkan luasan RTH sebesar 30%, terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Untuk itu perlu upaya peningkatan luasan RTH sesuai dengan RTRW Kota Pematangsiantar baik dengan cara pengadaan lahan untuk RTH baru, selain mempertahankan luasan RTH yang ada saat ini.

Akar permasalahan pengambilan air tanah yang tidak terkendali dapat dilihat dari meningkatnya penggunaan sumur baik itu sumur gali dengan pompa dan sumur bor dengan pompa. Menurut data dari Perumda Tirtauli Pematangsiantar, untuk sumur gali dengan pompa ada 48 sambungan rumah tangga (SR), dengan jumlah sebanyak 209 jiwa. Untuk sumur bor dengan pompa ada sebanyak 4.452 sambungan rumah tangga (SR) dengan jumlah 18.131 jiwa.

## 2. Bidang Ekonomi

Permasalahan terkait bidang ekonomi terbagi atas Nilai Tambah Produk Unggulan dan kebudayaan dan pariwisata. Permasalahan terkait nilai tambah produk unggulan disebabkan belum optimalnya inovasi dan kreativitas dalam memperkuat nilai tambah sektor industri, perdagangan dan produk unggulan daerah. Sedangkan permasalahan terkait kebudayaan dan pariwisata disebabkan masih rendahnya daya tarik wilayah.

Nilai tambah produk unggulan disebabkan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sesuai perkembangan zaman dalam dunia usaha (marketing dan keuangannya), Masih adanya ketergantungan ketersediaan bahan baku, kestabilan harga, belum optimalnya promosi industri produk/komoditi unggulan, belum optimalnya inovasi dan kreativitas dalam mendukung daya saing ekonomi

Akar permasalahan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sesuai perkembangan zaman dalam dunia usaha (marketing dan keuangannya), dapat dilihat dari pengelolaan keuangan usaha yang masih bersifat manual dan belum memanfaatkan teknologi informasi. Dalam bidang pemasaran juga belum memanfaatkan teknologi untuk dapat menjangkau konsumen yang lebih luas lagi. Akar permasalahan Masih adanya ketergantungan ketersediaan bahan baku, kestabilan harga dapat dilihat dari 55 usaha tenun ulos yang terdaftar di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan semuanya bergantung dengan kesediaan bahan baku benang yang ada tersedia dipasar lokal yang didatangkan dari luar kota pematangsiantar. sedangkan harga bergantung pada acara tertentu saja seperti acara pesta adat pernikahan ataupun dukacita

Akar permasalahan belum optimalnya promosi industri produk/komoditi unggulan dapat dilihat dari hasil tenun yang diproduksi oleh para pengrajin ulos saat ini masih memiliki keterbatasan dalam jangkauan pemasaran, di mana target utamanya hanya terbatas pada pasar lokal, seperti di Pasar Horas dan Pasar Dwikora.

Akar permasalahan belum optimalnya inovasi dan kreativitas dalam mendukung daya saing ekonomi dapat dilihat dari masih terbatasnya inovasi dan kreativitas yang diterapkan oleh para pelaku UMKM dalam mengembangkan produk. Sehingga menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan daya saing di pasar, terutama dalam menghadapi persaingan dengan produk luar. Produk yang dihasilkan oleh UMKM cenderung masih bersifat konvensional, baik dari segi desain maupun fungsi, serta kurang memiliki nilai tambah yang dapat menarik minat konsumen. Selain itu, aspek kemasan yang kurang menarik dan belum memenuhi standar pasar modern juga menjadi faktor yang menghambat peningkatan daya tarik produk.

Permasalahan masih rendahnya daya tarik wilayah dapat dilihat dari data BPS Kota Pematangsiantar lapangan usaha akomodasi dan makan minum dari 10 tahun terakhir menunjukkan trend yang stagnan, hanya berkontribusi 5,33% - 5.66% pada total PDRB Kota Pematangsiantar. Sejalan dengan data persentase tingkat hunian kamar yang berada pada kisaran 34% yang menunjukkan seberapa besar ketertarikan para wisatawan terhadap daerah yang dikunjungi, artinya semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah dapat diartikan bahwa daerah tersebut diminati oleh wisatawan. Kondisi ini disebabkan disebabkan oleh belum optimalnya kualitas dan kuantitas destinasi dan sarpras pendukung wisata, belum optimalnya pelestarian dan pemanfaatan budaya, dan Belum optimalnya pengelolaan situs sejarah dan kebudayaan.

Akar permasalahan belum optimalnya kualitas dan kuantitas destinasi dan sarpras pendukung wisata dapat dilihat dari minimnya objek wisata Kota Pematangsiantar yang menjadi daya tarik wisatawan. Kota Pematangsiantar memiliki berbagai objek wisata buatan namun sebagian besar pengelolaannya masih belum baik, kegiatan pariwisata tersebut tidak dikemas dengan berbagai rangkaian acara/kelender acara yang menarik seperti gelar budaya, perlombaaan dan lain sebagainya. Sehingga destinasi wisata masih bergantung pada wisata taman hewan untuk menarik wisatawan dari luar kota.

Akar permasalahan belum optimalnya pelestarian dan pemanfaatan budaya dapat dilihat dari baru terbentuknya tim ahli cagar budaya yang bertugas menilai cagar budaya. Selain itu situs budaya dan kebudayaan di Kota Pematangsiantar masih minim yang dikemas menjadi objek wisata.

Akar permasalahan Belum optimalnya pengelolaan situs sejarah dan kebudayaan dapat dilihat dari minimnya pengelolaan situs sejarah dan kebudayaan oleh pemerintah dan masyarakat yang ada di Kota Pematangsiantar.

### 3. Bidang Pemerintahan

Permasalahan terkait bidang pemerintahan disebabkan oleh Belum optimalnya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital, belum optimalnya kualitas pelayanan menuju WBK & WBBM, belum optimalnya implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, masih adanya gap informasi antara pemberi informasi (pemerintah) dan penerima informasi (masyarakat), dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Akar permasalahan belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital dapat dilihat dari angka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang masih kategori BAIK diangka 2,84 Tahun 2023 menunjukkan masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan SPBE ini.

Akar permasalahan belum optimalnya kualitas pelayanan menuju WBK dan WBBM dapat dilihat dari tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas masih 0% (Kurang) dikarenakan belum pernah mengusulkan unit kerja untuk dievaluasi Zona Integritas oleh Tim Penilai Nasional.

Akar permasalahan belum optimalnya implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dilihat dari capaian SAKIP Kota Pematangsiantar yang masih berada pada kategori CC yakni diangka 55,31 pada Tahun 2023 menunjukkan masih memerlukan banyak perbaikan dalam tata kelola pemerintahan.

Akar permasalahan masih adanya gap informasi antara pemberi informasi (pemerintah) dan penerima informasi (masyarakat) dapat dilihat dari rendahnya updating informasi pada website oleh perangkat daerah. Update informasi didominasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Pada Tahun 2023 jumlah konten yang diunggah Pemerintah Kota Pematangsiantar sebanyak 550 buah, sedangkan konten yang diunggah Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 234 buah atau 42,5%.

Akar permasalahan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dari swadaya masyarakat untuk mendukung program pembangunan masih minim dan hanya mengandalkan program dari pemerintah. Selain itu sikap masyarakat dalam menjaga fasilitas umum juga masih rendah.

### 4. Bidang Sosial Budaya

Permasalahan terkait bidang sosial budaya yakni kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan ini disebabkan oleh belum optimalnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender. Kondisi ini disebabkan belum meratanya akses dan kualitas pendidikan serta belum optimalnya partisipasi stakeholder pendidikan, masih rendahnya pemahaman dan perilaku hidup sehat, belum optimalnya perwujudan GESI (*Gender Equity Social Inclusion*), dan belum optimalnya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

Akar permasalahan belum meratanya akses dan kualitas pendidikan serta belum optimalnya partisipasi stakeholder pendidikan, dapat dilihat dari keberadaan sekolah yang masih terkonsentrasi di pusat kota, capaian hasil kompetensi literasi dan numerasi SD swasta yang lebih tinggi daripada SD Negeri, serta capaian hasil kompetensi literasi SMP Negeri yang lebih tinggi dari swasta, sedangkan numerasi SMP negeri lebih unggul dari SMP swasta. Partisipasi stakeholder pendidikan dalam dunia pendidikan yang masih belum berkolaborasi dengan optimal.

Akar permasalahan masih rendahnya pemahaman dan perilaku hidup sehat dapat dilihat dari masih rendahnya indeks keluarga sehat Kota Pematangsiantar yang berada pada angka 0,26 pada Tahun 2023. Capaian ini dikategorikan pada keluarga tidak sehat. Beberapa indikator indeks keluarga sehat diantaranya akses air bersih, sanitasi layak, program KB, persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap, bayi mendapatkan ASI eksklusif, pemantauan pertumbuhan balita, penderita TB paru berobat sesuai standar, penderita hipertensi berobat teratur.

Akar permasalahan belum optimalnya perwujudan GESI (*Gender Equity Social Inclusion*) dapat dilihat dari tingkat kemiskinan masih tinggi, masih ditemukannya kekerasan berbasis gender sebanyak 11 kasus pada Tahun 2023, kualitas hidup kelompok rentan menjadi rendah dan kurangnya pemberdayaan dan kesetaraan peluang.

Akar permasalahan belum optimalnya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dapat dilihat dari angka kemiskinan Kota Pematangsiantar pada Tahun 2023 sebesar 7,24%, dan angka pengangguran Kota Pematangsiantar Tahun 2023 sebesar 8,62%.

## 5. Stabilitas Wilayah

Permasalahan terkait stabilitas wilayah dapat dilihat dari data indeks kriminalitas dari Tahun 2018 sebesar 0,11 namun Tahun 2023 naik menjadi 0,17 atau naik 54,5%. Sejak Tahun 2018 hingga Tahun 2023 tindak pidana di Kota Pematangsiantar didominasi oleh tindak pidana narkoba disusul tindak pidana pencurian dan tindak pidana penganiayaan

Selain mengidentifikasi permasalahan dari analisis data capaian pembangunan berdasarkan evaluasi RPJPD, dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat tentang permasalahan pembangunan selama ini dan harapan capaian ke depan. Hasil penjaringan aspirasi masyarakat menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

### 1. Bidang Ekonomi.

Hasil penjaringan masyarakat bidang perekonomian mengidentifikasi kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, tenaga kerja terampil. Hal ini sejalan dengan data pengangguran yang masih tinggi, pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat, kemiskinan yang masih tinggi, ketimpangan pendapatan, serta tenaga kerja yang didominasi oleh tamatan SMA.

## 2. Bidang Sosial Budaya

Hasil penjangkaran masyarakat bidang sosial budaya mengidentifikasi kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan kualitas SDM, kreatifitas, kualitas pendidik, kualitas pelayanan, sarana prasarana kesehatan, penyalahgunaan narkoba. Hal ini sejalan dengan data dengan data Kota Pematangsiantar dengan rata-rata lama sekolah yang belum maksimal, tingkat kompetensi literasi dan numerasi masih berada di bawah standar kompetensi minimum atau baru mencapai kompetensi minimum, indeks inovasi daerah yang belum maksimal, kualitas tenaga pendidik yang masih didominasi tamatan S1, kualitas pelayanan kesehatan yang masih belum maksimal, sarana dan prasarana kesehatan yang perlu dijaga ketersediaannya, dan penyalahgunaan narkoba yang masih tinggi.

## 3. Bidang Infrastruktur

Hasil penjangkaran masyarakat bidang infrastruktur mengidentifikasi kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan jalan dan jembatan, sanitasi, kawasan kumuh, air bersih, ruang terbuka hijau, rambu-rambu lalu lintas, dan pengelolaan kebencanaan serta penataan ruang. Hal ini sejalan dengan data kemantapan jalan yang cukup tinggi namun masih membutuhkan pemeliharaan untuk mempertahankan, sanitasi aman yang masih rendah, kawasan kumuh yang masih tinggi, air bersih yang masih perlu peningkatan ke zona prima, ruang terbuka hijau yang masih kurang luasan serta pemeliharannya, rambu-rambu lalu lintas yang belum sepenuhnya terpenuhi, pengelolaan kebencanaan yang belum maksimal, penataan ruang yang masih belum maksimal.

Di samping itu, juga dilakukan pra Focus Group Discussion (FGD) serta FGD tematik yang melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait. Hasil FGD dipetakan dengan pendekatan kerangka logis masalah pokok, masalah dan akar masalah serta strategi untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan.

Dari hasil capaian pembangunan sampai Tahun 2023 dan evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, penjangkaran aspirasi masyarakat, Focus Froup Discussion (FGD) dapat diidentifikasi masalah pokok, masalah dan akar masalah pembangunan Kota Pematangsiantar, sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Identifikasi Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kualitas Infrastruktur Perkotaan dan Permukiman	Belum optimalnya kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman	1. Belum selesainya jalan lingkar sehingga menyebabkan bercampurnya kendaraan lokal dan regional. 2. Masih rendahnya Akses Air Minum Aman. 3. Masih rendahnya kualitas sanitasi 4. Belum optimalnya sistem drainase kota dan kurang optimalnya sarana dan prasarana pengendalian banjir.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			5. Masih adanya kondisi rumah tidak layak huni.
2.	Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Belum optimalnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum meratanya akses dan kualitas pendidikan serta belum optimalnya partisipasi stakeholder pendidikan</li> <li>2. Masih rendahnya pemahaman dan perilaku hidup sehat</li> <li>3. Belum optimalnya perwujudan GESI (<i>Gender Equity Social Inclusion</i>)</li> <li>4. Belum optimalnya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran</li> </ol>
3.	Nilai Tambah Produk Unggulan	Belum optimalnya inovasi dan kreativitas dalam memperkuat nilai tambah sektor industri, perdagangan dan produk unggulan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sesuai perkembangan zaman dalam dunia usaha (marketing dan keuangannya)</li> <li>2. Masih adanya ketergantungan ketersediaan bahan baku, kestabilan harga dan belum optimalnya promosi industri produk/komoditi unggulan</li> <li>3. Belum optimalnya inovasi dan kreativitas dalam mendukung daya saing ekonomi</li> </ol>
4.	Tata Kelola Pemerintahan	Belum optimalnya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital</li> <li>2. Belum optimalnya kualitas pelayanan menuju WBK &amp; WBBM</li> <li>3. Belum optimalnya implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</li> <li>4. Masih adanya gap informasi antara pemberi informasi (pemerintah) dan penerima informasi (masyarakat)</li> <li>5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan</li> </ol>
5	Lingkungan Hidup	Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup</li> <li>2. Overloadnya TPA karena belum optimalnya olah pilah sampah dari sumbernya</li> <li>3. Rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</li> <li>4. Pengambilan air tanah yang tidak terkendali</li> </ol>

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
6.	Stabilitas Wilayah	Tingginya angka kriminalitas dan potensi radikalisme	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terkikisnya Nilai-nilai kebangsaan</li> <li>2. Terindikasinya potensi radikalisme</li> <li>3. Menurunnya nilai toleransi sesuai hasil survey Setara Institute</li> <li>4. Kurangnya rasa aman karena tingginya angka pencurian dan kriminalitas</li> </ol>
7.	Kebudayaan dan Pariwisata	Masih rendahnya daya tarik wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas destinasi dan sarpras pendukung wisata</li> <li>2. Belum optimalnya pelestarian dan pemanfaatan budaya</li> <li>3. Belum optimalnya pengelolaan situs sejarah dan kebudayaan</li> </ol>
8.	Pembangunan Berkelanjutan	Belum terwujudnya sinkronisasi substansi dan periodisasi perencanaan pembangunan kota, provinsi dan nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya ketersediaan data level kecamatan dan data terpilah gender dalam analisis kondisi umum, permasalahan dan isu strategis daerah</li> <li>2. Kurangnya partisipasi pemangku kepentingan dalam menyampaikan fakta dan realitas terkait isu strategis tertentu dalam forum SKPD dan musrenbang</li> <li>3. Belum efektifnya pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah serta evaluasi berbasis data kinerja yang akurat</li> <li>4. Belum berkembangnya kerjasama daerah</li> <li>5. Kurang efektifnya koordinasi dan sinkronisasi antar bidang dalam perumusan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta penjabaran RPJMD kedalam Renstra SKPD terutama dalam hal cascading pohon kinerja.</li> </ol>

### 3.2 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan dipertanggungjawabkan. Analisis isu strategis disusun dengan mempertimbangkan

seluruh permasalahan, tantangan dan potensi yang dimiliki daerah, serta isu nasional dan global, dalam kerangka pembangunan ke depan.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

### 3.2.1 Isu Global

#### 3.2.1.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

#### 3.2.1.2 Demografi Global dan Bonus Demografi

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial yang memberikan tantangan peningkatan kebutuhan hidup masyarakat dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Pada tahun 2045 penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 324,05 juta jiwa. Berdasarkan proyeksi BPS jumlah penduduk Kota Pematangsiantar tahun 2045 mencapai 303.019 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 198.784 jiwa berada pada kategori usia produktif dan 104.235 jiwa berada pada kategori usia non produktif. Tingginya jumlah penduduk usia produktif memberikan tantangan penciptaan lapangan pekerjaan baru, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan pemberdayaan UMKM. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, jaminan sosial (kesehatan dan pendidikan), peluang lapangan kerja bagi generasi muda, dan pemberdayaan UMKM.

### 3.2.1.3 Geopolitik dan Geoekonomi

Salah satu target pembangunan Indonesia 2045 adalah menjadi bagian negara maju yang berdaya saing global lepas dari negara *middle income trap*. Dinamika geopolitik berpengaruh dalam perebutan pengaruh negara-negara adidaya baik dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi.

*Asean Free Trade Area* (AFTA) berpengaruh pada dinamika ekonomi dan perdagangan Kota Pematangsiantar. Dengan terbukanya pasar bebas di kawasan ASEAN, maka aliran perdagangan barang dan jasa, investasi, dan perpindahan tenaga kerja antar negara ASEAN tak ada lagi hambatannya.

### 3.2.1.4 Perkembangan Teknologi

Disrupsi teknologi merupakan perubahan besar teknologi yang berpengaruh pada perilaku masyarakat, pasar, industri, dan lain sebagainya. Disrupsi teknologi berkembang akibat munculnya inovasi-inovasi yang mendorong produktivitas, efektivitas, dan efisiensi sumber daya dan operasional. Beberapa perkembangan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat seperti Internet of Things (IOT), Kecerdasan Buatan (AI), rekayasa genetik, nanotechnology, dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi akan mempengaruhi sektor manufaktur, perkembangan pendidikan-kesehatan, dan berbagai sektor lainnya. Selain itu, teknologi membuka peluang baru pembangunan ekonomi, mendorong inovasi, dan transformasi tata kelola kinerja pelayanan publik (Bappenas, 2023).

Disrupsi teknologi juga akan berdampak signifikan terhadap Kota Pematangsiantar. Perlu dorongan kuat agar tercipta inovasi baru dalam sektor perdagangan, pariwisata, dan pendidikan di Pematangsiantar memanfaatkan teknologi.

Pada sektor perdagangan, peran UMKM menjadi sangat penting sebagai pelaku utama. Namun jika tidak diikuti dengan kemampuan adaptasi yang baik terhadap teknologi digital, hanya akan merugikan pelaku UMKM. Langkah adaptasi teknologi digital terhadap UMKM dapat dilakukan antara lain : meningkatkan akses infrastruktur digital, meningkatkan keterampilan digital, dan membuka akses ke sumber keuangan untuk penerapan teknologi.

Disrupsi teknologi selain berimbas pada sektor swasta, juga akan berdampak pada sektor pemerintahan. Peningkatan pelayanan masyarakat dengan menerapkan teknologi digital menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Untuk itu pemerintahan berbasis elektronik sudah harus diadopsi agar lebih baik dalam pengelolaan kota yang lebih efisien dan pelayanan publik yang lebih baik.

### 3.2.1.5 Perubahan Iklim

Dampak negatif dari krisis global akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. Dampak negatif tersebut dipengaruhi oleh tiga krisis global (*The Triple Planetary Crisis*) yaitu

perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Krisis global tersebut menjadi urgensi untuk mengarahkan praktik pembangunan yang berkelanjutan diberbagai sektor seperti sektor energi, industri, lahan, pertanian dan penerapan ekonomi sirkular.

Implementasi *Paris Agreement* diIndonesia dimulai dengan menetapkan *Nationally Determined Contributions* (NDCs) pada tahun 2016, yang mencakup komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan sebesar 41% dengan dukungan internasional pada 2030. Upaya ini termasuk pengendalian deforestasi, pengelolaan lahan berkelanjutan, pengembangan energi terbarukan, dan efisiensi energi. Kajian Bappenas (2019) menunjukkan capaian penurunan emisi GRK Indonesia dapat mencapai 43% di tahun 2030. Capaian baik tersebut perlu konsisten dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan langkah-langkah strategis, yaitu: (1) mendorong transisi ke sumber energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara; (2) peningkatan efisiensi energi; (3) penegakan penuh moratorium hutan, kelapa sawit, pertambangan, dan lahan gambut; (4) mematuhi komitmen konservasi sumber daya air, perikanan, dan keanekaragaman hayati; serta (5) peningkatan produktivitas lahan. Maka dari itu, ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon menjadi landasan penting arahan perencanaan pembangunan daerah Kota Pematangsiantar.

### 3.2.2 Isu Regional

Untuk mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia, pemerintah pusat membuat suatu terobosan melalui pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dimulai tahun 2014. Tujuan pengembangan KEK adalah (1) Menciptakan pertumbuhan ekonomi, (2) Pemerataan pembangunan, (3) Peningkatan daya saing bangsa.

Salah satu KEK yang ada di Provinsi Sumatera Utara adalah KEK Sei Mangkei yang terletak di Kabupaten Simalungun dan berjarak 45,6 Km dari Kota Pematangsiantar. Kegiatan utama KEK Sei Mangkei adalah industri pengolahan kelapa sawit, pengolahan karet, pariwisata dan logistik.

Selain KEK Sei Mangkei, di Provinsi Sumatera Utara juga sedang dibangun Kawasan Strategis Prioritas Nasional Danau Toba. Kawasan ini diperuntukkan sebagai destinasi pariwisata tingkat dunia. Untuk mendukung pengembangan kawasan ini dibangun Bandar Udara yang akan menjadi pintu gerbang lalu lintas pergerakan wisatawan dari dan ke Danau Toba. Selain bandar udara, untuk memudahkan pergerakan wisatawan, dibangun juga jalan tol yang akan menghubungkan Parapat ke Kota Medan.

Berkembangnya kawasan KEK Sei Mangkei dan Kawasan strategis Pariwisata Danau Toba terhadap Kota Pematangsiantar memberikan dampak positif bagi sektor perdagangan Kota Pematangsiantar karena letaknya yang strategis diantara dua kawasan tersebut. Peluang ini akan memberikan perkembangan yang kondusif bagi industri pendukung dan sentra logistik dan pusat perdagangan.

Dengan lancarnya arus lalu lintas imbas adanya jalan tol, akan meningkatkan jumlah wisatawan yang akan berkunjung Danau Toba atau sebaliknya. Kondisi ini menjadi ancaman tersendiri bagi Kota Pematangsiantar karena besar kemungkinan wisatawan tidak lagi singgah di Kota Pematangsiantar. Tantangan ini harus diantisipasi dengan kebijakan yang akan menarik wisatawan untuk singgah di Kota Pematangsiantar. Strategi menarik wisatawan untuk singgah di Pematangsiantar diantaranya mengembangkan destinasi pariwisata yang ada di Kota Pematangsiantar, mempromosikan budaya, alam, dan kuliner khas Kota Pematangsiantar. Fasilitas promosi pariwisata dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, pameran pariwisata dan bekerjasama dengan travel agen.

### 3.2.3 Isu Nasional

Isu nasional didasarkan atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. RPJPN Tahun 2025-2045 mampu merepresentasikan kondisi aktual dan cita-cita Indonesia jangka panjang ke depan. Visi RPJPN 2025-2045 adalah “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Visi Indonesia Emas 2045 ini dicerminkan dalam 5 sasaran yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan jangka panjang. Sasaran yang pertama, yaitu “Pendapatan per Kapita Suatu Negara Maju” dengan indikator meningkatnya GNI per Kapita menjadi USD 23.000-30.300; meningkatnya kontribusi PDB Maritim sebesar 15,0%; serta meningkatnya Kontribusi PDB Manufaktur sebesar 28,0% di tahun 2045. Selanjutnya, sasaran yang kedua yaitu “Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang” diterjemahkan dengan indikator menurunnya persentase Tingkat Kemiskinan menjadi 0,5-0,8%; menurunnya Rasio Gini menjadi 0,290-0,320; serta meningkatnya kontribusi Kawasan Timur Indonesia (KTI) terhadap PDB menjadi 28,5%. Sasaran yang ketiga, “Kepemimpinan dan Pengaruh Dunia Internasional Meningkat” diukur dengan meningkatnya Global Power Indeks menjadi 15 besar. Lalu, sasaran yang keempat melihat pada “Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat” dengan indikator meningkatnya dari Human Capital Indeks (HCI) menjadi 0,73. Sasaran yang terakhir berfokus pada keberlanjutan, yaitu “Intensitas Emisi GRK Menuju Net Zero Emission” dengan penurunan menjadi 93,5%.

Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 tersebut, ditetapkan 8 Misi yang dijabarkan dalam 17 Arah Pembangunan. Delapan misi atau delapan agenda perubahan RPJPN, meliputi: Pertama, Mewujudkan transformasi sosial; Kedua, Mewujudkan transformasi sosial; Ketiga, Mewujudkan transformasi tata kelola; Keempat, Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; Kelima, Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi; Keenam, Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; Ketujuh, Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan Kedelapan,

Mewujudkan kesinambungan pembangunan. Sedangkan 17 arah pembangunan, dirincikan di bawah ini.

Tabel 3.2  
Misi dan Arah Kebijakan Indonesia Emas 2045

Transformasi Indonesia		
Misi 1 Transformasi Sosial	1	Kesehatan untuk Semua
	2	Pendidikan Berkualitas yang Merata
	3	Perlindungan Sosial yang Adaptif
Misi 2 Transformasi Ekonomi	4	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
	5	Penerapan Ekonomi Hijau
	6	Transformasi Digital
	7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Digital
	8	Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Misi 3 Transformasi Tata Kelola	9	Regulasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
Landasan Transformasi		
Misi 4 Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial
	11	Stabilitas Ekonomi Makro
	12	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan
Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
	14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
	15	Lingkungan Hidup Berkualitas
	16	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
	17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Kerangka Implementasi Transformasi		
Misi 6 Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan		
Misi 7 Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah		
Misi 8 Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan		

Sumber: Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045

Langkah reformasi tidak akan cukup untuk pendekatan pembangunan Indonesia, melainkan perlu diperkuat dengan transformasi yang menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Tiga fokus utama transformasi ini meliputi “Transformasi Sosial”, “Transformasi Ekonomi”, dan “Transformasi Tata Kelola”. Ketiga transformasi ini dapat berjalan dengan baik dengan ditunjang oleh landasan stabilitas nasional yang kuat, yang meliputi “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia”. Selain itu, landasan transformasi “Ketahanan Sosial Budaya, dan Ekologi” juga diperlukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan ke depan.

Transformasi dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 tersebut akan diterjemahkan ke dalam pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, yang didukung penuh oleh pembangunan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta kaidah pelaksanaan untuk kesinambungan pembangunan.

Dalam dokumen tersebut juga dijabarkan arahan transformasi ekonomi untuk Wilayah Sumatera. Wilayah Sumatera diarahkan menjadi koridor “Mata rantai utama BioIndustri dan kemaritiman yang berdaya saing, berkelanjutan, serta Hub Ekonomi Biru di Kawasan Barat Indonesia”.

Jika dikaitkan dengan kondisi Kota Pematangsiantar, isu nasional Transformasi Sosial relevan dengan tantangan yang masih dihadapi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pematangsiantar masih memerlukan peningkatan guna mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pada sektor pendidikan, tingkat kompetensi literasi dan numerasi siswa pada jenjang SD dan SMP masih berada di bawah standar kompetensi minimum atau baru mencapai tingkat kompetensi minimum. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pendidikan melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik, perbaikan metode pembelajaran, dan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Di bidang kesehatan, sarana, prasarana, dan jumlah tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan untuk menjamin pelayanan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Upaya ini meliputi pembangunan fasilitas kesehatan yang sesuai standar, pemerataan distribusi tenaga kesehatan, serta pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi. Selain itu, sistem perlindungan sosial di Kota Pematangsiantar perlu disesuaikan dengan kondisi lokal untuk memberikan perlindungan yang memadai, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia, difabel, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Isu nasional terkait transformasi ekonomi memiliki relevansi yang kuat dengan kondisi Kota Pematangsiantar. Saat ini, perekonomian kota masih bertumpu pada beberapa sektor tertentu untuk mendorong pertumbuhan, sehingga diperlukan diversifikasi sektor ekonomi untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Selain itu, tingkat kesadaran sebagian pelaku ekonomi terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan masih rendah. Hal ini menuntut upaya untuk mendorong praktik ekonomi yang lebih inklusif dan berwawasan lingkungan, guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta menjaga kualitas lingkungan hidup.

Dari sisi geografis, letak strategis Kota Pematangsiantar memberikan potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan pertumbuhan wilayah. Dengan posisinya yang menghubungkan kawasan strategis di sekitarnya, kota ini memiliki peluang untuk menjadi simpul ekonomi regional. Oleh karena itu, perlu dirancang kebijakan dan program pengembangan infrastruktur, fasilitas perdagangan, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha untuk mendukung penguatan posisi kota sebagai pusat perdagangan dan penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah.

Isu nasional terkait transformasi tata kelola memiliki relevansi yang signifikan dengan kondisi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pematangsiantar, yang masih memerlukan upaya peningkatan kinerja untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Kinerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Pematangsiantar masih perlu diperkuat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Aspek ini mencakup penyederhanaan prosedur, penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian, dan penguatan budaya kerja yang berintegritas.

Selain itu, implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kota Pematangsiantar membutuhkan peningkatan, khususnya dalam hal penyusunan perencanaan yang lebih terintegrasi, pengukuran kinerja yang berbasis hasil (outcome), serta pelaporan yang transparan dan akuntabel. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pemerintah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga memerlukan pengembangan lebih lanjut. Hal ini mencakup peningkatan infrastruktur teknologi informasi, integrasi sistem antarinstansi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung digitalisasi pemerintahan. Transformasi SPBE yang berhasil akan mendorong efisiensi, mempercepat proses pelayanan publik, serta meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat.

Melalui peningkatan kinerja di bidang reformasi birokrasi, SAKIP, dan SPBE, Kota Pematangsiantar diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendorong percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

#### 3.2.4 Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara

Isu-isu strategis Sumatera Utara yang diharapkan dapat teratasi dalam pembangunan jangka panjang (2025–2045) diuraikan sebagai berikut:

##### a. Pembangunan sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan

Pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai masih menjadi persoalan pembangunan yang perlu direspon ke depan. Luasan permukiman kumuh, rumah tangga dengan akses air minum layak, rumah tangga dengan akses sanitasi layak infrastruktur SDA dalam kondisi baik, penanganan banjir merupakan isu-isu penyediaan infrastruktur yang perlu direspon dalam jangka panjang ke depan. Cakupan rumah tangga yang menempati hunian layak yang terpadu dengan akses air minum, sanitasi dan penanganan persampahan juga masih cukup rendah. Selain itu, kondisi kawasan perkotaan di Provinsi Sumatera Utara menghadapi perkotaan arah perkembangan yang tidak terstruktur (urban sprawl). Kelayakan dan keandalan perumahan yang dibangun secara swadaya juga perlu menjadi perhatian mengingat tingginya risiko bencana di Provinsi Sumatera Utara.

Layanan ketenagalistrikan Provinsi Sumatera Utara masih kekurangan pasokan daya atau beberapa sistem, atau cadangan di pembangkit eksisting yang tidak efisien serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar. Penyediaan tenaga listrik di Wilayah Sumatra masih belum menjangkau seluruh penduduk secara berkualitas. Fleksibilitas operasi masih belum optimum terutama saat kondisi di luar waktu beban puncak sebagai akibat dari minimum operasi PLTG. Infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari Sistem Interkoneksi Sumatra dan sistem-sistem yang terisolasi. Sistem transmisi ekstra tinggi belum tersambung untuk mengevakuasi daya energi yang tersebar di seluruh wilayah. Konsumen tenaga listrik masih didominasi oleh rumah tangga.

Jangkauan jaringan seluler di Provinsi Sumatera Utara belum diimbangi dengan pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan produktif (masih terbatas untuk penggunaan telekomunikasi). Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup merata dan hampir menjangkau seluruh area wilayah pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan.

Provinsi Sumatera Utara juga memiliki tantangan dalam penyediaan pelayanan dasar, yaitu belum terpenuhi dan meratanya penyediaan sarana dan prasarana dasar di seluruh daerah, khususnya di daerah afirmasi 3T. Permasalahan yang dihadapi di antaranya penyediaan air bersih, irigasi, banjir, dan abrasi. Jumlah kejadian bencana banjir masih tinggi terutama di Metropolitan Medan, pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara juga terdampak risiko abrasi akibat perubahan iklim tersebut.

#### b. Pembangunan antar daerah serta desa-kota

Keterkaitan antar daerah serta desa-kota di Provinsi Sumatera Utara belum mencerminkan keterkaitan tidak bisa mengabaikan rantai pasok, sehingga wilayah kota dan kawasan-kawasan perlu memiliki rantai nilai dengan wilayah-wilayah lain untuk mendorong perekonomian yang merata. Pembangunan wilayah Metropolitan Medan (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo) masih menghadapi permukiman kumuh seperti air bersih dan sanitasi, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan infrastruktur transportasi massal yang belum mendukung mobilitas penduduk. Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari urbanisasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berpusat di inti bisnis dan perdagangan. wilayah pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi pull factor manusia bermigrasi ke wilayah dengan ekonomi yang relatif baik.

#### c. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan

Dalam upaya pengelolaan SDA berkelanjutan menjadi perhatian terhadap pengelolaan investasi berbasis lahan yang belum seluruhnya mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik terutama kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Pengoptimalan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup

berkelanjutan juga berkaitan dengan: adaptasi perubahan iklim; pengawasan terhadap deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan dan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar; akses dan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal; dukungan dalam mewujudkan kelestarian dan kesejahteraan yang rendah; belum maksimalnya akses seluruh masyarakat terhadap energi, dan peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

d. Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing  
Transisi Demografi dihadapkan pada pembangunan kesehatan dengan meningkatnya mobilitas penduduk dan urbanisasi serta perilaku hidup tidak sehat, sehingga meningkatkan beban penyakit menular dan tidak menular termasuk permasalahan kesehatan penduduk lanjut usia dan kesehatan jiwa. Pola konsumsi tidak sehat menyebabkan kekurangan gizi mikro dan makro serta kelebihan gizi, serta adanya ketimpangan akses terhadap lingkungan sehat, fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan serta perlu peningkatan dan inovasi pembiayaan kesehatan. Selain itu Kualitas pendidikan juga masih rendah yang disebabkan oleh sarana-prasarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran yang belum memadai, kualitas, kuantitas dan distribusi guru masih terbatas dengan sedikitnya guru yang memiliki sertifikat pendidik pada semua jenjang pendidikan serta pendidikan non formal yang berkualitas yang belum memadai, kualifikasi pendidikan yang masih rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja.

Selanjutnya masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah, sementara itu bantuan sosial belum sepenuhnya terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi hal ini antara lain disebabkan pengguna data masih terfragmentasi dan belum termutakhirkan secara sistematis sehingga kesalahan sasaran masih cukup tinggi, daya ungkit bantuan sosial juga masih rendah dan lingkungan yang belum inklusif terhadap kelompok rentan, termasuk terhadap penyandang disabilitas dan Lanjut Usia (Lansia).

e. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur

Infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas dan sistem logistik berpotensi menekan aktivitas ekonomi berupa mahalnya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas menuju lokasi pengolahan dan pemasaran. Hal tersebut perlu diupayakan dengan upaya meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan

jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan.

#### f. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi persoalan pelayanan publik yang belum optimal kepada masyarakat. Ke depannya masih perlu dilakukan reformasi birokrasi dan peningkatan SDM yang profesional dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia, untuk perlu mendapatkan perhatian untuk dioptimalkan. Isu-isu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan lainnya ialah berkaitan dengan optimalisasi ketersediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ke seluruh wilayah dan ke semua lapisan masyarakat; transparansi dan akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang inklusif; perlunya optimalisasi manajemen kepegawaian, terutama setelah terjadinya restrukturisasi kelembagaan dan juga rekrutmen yang efektif dan efisien sehingga menjadi birokrasi yang ramping miskin struktur akan tetapi kaya fungsi berlandaskan *merit system*; dan optimalisasi implementasi reformasi birokrasi melalui penguatan pengawasan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam rangka meningkatkan konektivitas antarwilayah, Kota Pematangsiantar memiliki beberapa infrastruktur strategis yang menjadi jalur penghubung dengan wilayah sekitarnya. Keberadaan jalan tol dan jalur kereta api memberikan kemudahan dan percepatan dalam mobilitas masyarakat serta distribusi barang dari dan ke Kota Pematangsiantar. Kemudahan akses ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan ketersediaan barang kebutuhan masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat peran Kota Pematangsiantar sebagai pusat perdagangan dan distribusi regional.

Selain itu, konektivitas yang baik juga berdampak positif pada sektor pendidikan dan kesehatan. Akses yang lebih cepat dan mudah akan meningkatkan daya tarik Kota Pematangsiantar sebagai destinasi pendidikan unggulan, sekaligus sebagai pusat rujukan kesehatan bagi masyarakat di wilayah sekitarnya.

Untuk memanfaatkan potensi dari proyek strategis provinsi tersebut, diperlukan strategi pengembangan yang terintegrasi guna mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lokal di Kota Pematangsiantar. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan meliputi:

1. Pengembangan destinasi pariwisata kota dan budaya dengan mengoptimalkan potensi wisata sejarah, budaya, dan kuliner khas Pematangsiantar. Promosi wisata berbasis digital dan pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata juga menjadi prioritas.
2. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan, seperti pembangunan pusat perdagangan modern, pasar tradisional yang lebih representatif, serta logistik yang mendukung efisiensi distribusi barang.
3. Pengembangan Kota Pematangsiantar sebagai pusat rujukan kesehatan regional, melalui peningkatan kapasitas dan kualitas fasilitas kesehatan, pengadaan peralatan medis spesifik, serta penambahan tenaga kesehatan yang profesional.

4. Pengembangan Kota Pematangsiantar sebagai destinasi pendidikan, dengan memperkuat institusi pendidikan, menyediakan fasilitas pembelajaran yang inovatif, dan menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan di tingkat regional maupun nasional.
5. Pemberdayaan UMKM, melalui program pelatihan, pendampingan, akses permodalan, serta pengembangan jejaring pemasaran berbasis digital untuk meningkatkan daya saing produk lokal.

Implementasi strategi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan arus lalu lintas masyarakat dan barang dari dan ke Kota Pematangsiantar, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

### 3.2.5 Isu Strategis Dokumen Perencanaan Lainnya di Kota Pematangsiantar

#### 3.2.5.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045

Isu-isu strategis terhadap pencapaian indikator-indikator TPB yang diproyeksikan tidak mencapai target, dihasilkan TPB Prioritas dan Isu Strategis, meliputi:

##### 1. Penurunan kualitas lingkungan hidup

Penurunan kualitas hidup yang menjadi perhatian Kota Pematangsiantar, adalah meluasnya lahan perkerasan dan hilangnya lahan vegetatif, pepohonan dan lahan sawah/pertanian serta pencemaran badan air permukaan dan air tanah. Lahan sawah semakin berkurang karena beralih fungsi menjadi lahan perumahan yang dijual pemilik tanah atau yang mendirikan bangunan pada lahan. Hilangnya sawah umumnya dapat mengubah atau mengganggu aliran irigasi sehingga mengurangi ketersediaan air bagi petak lahan sawah lainnya.

Pengendalian pemanfaatan ruang dititik beratkan pada penyediaan ruang terbuka hijau, khususnya RTH publik, yang diantaranya dapat berasal dari komitmen kontribusi pengembang dalam bentuk fasilitas publik berupa ruang terbuka hijau. Jika tidak direalisasikan komitmen akan mengancam pencapaian kewajiban RTH seluas 30 % dari seluruh wilayah kota. Begitu alih fungsi lahan pertanian pangan basah dapat terancam jika tidak dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang maka ancaman peran pemasok ketahanan pangan akan menurun yang selanjutnya berdampak pada masalah lingkungan lainnya seperti hilangnya daya dukung pengendalian banjir yang ada pada persawahan, muka air tanah menurun, meningkatnya erosi (kondisi tanah erosi tinggi), kerusakan tanah meluas, pelepasan karbon meningkat dan kenaikan suhu kota.

Permasalahan kerusakan dan pencemaran sumber air dan badan air, selain permasalahan perluasan lahan perkerasan, hilangnya pepohonan, konversi lahan sawah dan pertanian, juga pengelolaan pengambilan air tanah yang tidak terkendali, pembuangan air limbah dan sampah (domestik, peternakan, pabrik, transportasi dan lainnya) yang belum dilaksanakan secara optimal sehingga menimbulkan pencemaran pada kualitas air sungai dan air tanah sehingga

menurunkan tingkat produktifitas tanah serta mengancam keanekaragaman hayati yang akhirnya menurunkan daya dukung penyediaan air bersih (air baku dari sungai dan sumur pompa dan mata air). dan daya tampung sungai untuk memulihkan pencemaran.

Pengelolaan penyediaan air bersih yang bersumber dari sistem air permukaan dan air tanah bagi dari pengelolaan sumber daya air berbasis daerah aliran sungai yang memerlukan koordinasi dan kerjasama lintas daerah dan mengancam kualitas layanan penyediaan air bersih dan sanitasi di tingkat rumah tangga.

Menghilangnya lahan bervegetasi dengan yang boros dan tidak terkendali, terutama tumbuhan pepohonan, akan menyebabkan pelepasan karbon (emisi karbon) dan meningkatkan suhu lokal, berkontribusi terhadap perubahan iklim. Kenaikan suhu lokal yang terus berlangsung mengurangi kenyamanan berkehidupan.

## 2. Kualitas hidup Keluarga

Pada aspek pengelolaan kualitas hidup keluarga sehat di Kota Pematangsiantar memiliki permasalahan di bidang kesehatan ibu hamil dan persalinannya kurang memperhatikan pola asuh ibu terhadap kesehatan dirinya sendiri, maupun bagi bayi dan anak balita, berupa pemberian pangan/makanan berkualitas. Begitu juga, ibu-ibu hamil masih banyak melakukan persalinan bukan pada fasilitas kesehatan. Permasalahan keluarga sehat lain adalah kondisi layanan air minum dan sanitasi terutama bagi rumah tangga orang miskin yang belum mendapatkan layanan air bersih menyebabkan beberapa persoalan terkait kebersihan dan kesehatan hunian.

## 3. Pengelolaan Pelayanan Dasar

Permasalahan layanan pendidikan terdapat pada kualitas sekolah, guru serta angka partisipasi (APK dan APM). Masih terdapat sekolah setingkat SD dan SMP yang belum mencapai akreditasi minimal B, terutama untuk sekolah setingkat SD. Ketidakmerataan kualitas layanan pendidikan kemungkinan terjadi beberapa sekolah negeri atau swasta. Disamping itu, jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik masih belum terpenuhi ikut mempengaruhi kualitas layanan. Begitu juga, angka partisipasi kasar murid setingkat SD belum tercapai pencapaian dapat disebabkan kualitas layanan sekolah tersebut dari pada ketidakmampuan atau ketidakmauan orang tua menyekolahkan anaknya. Pengendalian tingkat fertilitas belum diperhatikan para suami/istri.

Pelayanan kota yang masih belum terselesaikan adalah masih ada rumah tangga yang belum terlayani oleh sumber air minum. Rumah tangga yang belum terlayani ini dapat berupa penduduk yang di bawah garis kemiskinan dan wilayah yang belum terjangkau jaringan pipa air minum oleh PDAM Tirtauli. Begitu juga layanan jaringan utilitas kota lainnya, yaitu penerangan belum menjangkau sebagian rumah tangga merupakan penduduk di bawah garis kemiskinan.

Layanan transportasi angkutan umum semakin berkurang sejalan dengan penambahan kendaraan mobil yang dipergunakan masyarakat. Termasuk pengaruh masyarakat lebih memanfaatkan angkutan pribadi sewa berbagai (online)

untuk melakukan perjalanan. Dari sisi suplai, angkutan umum yang semakin dimanfaatkan masyarakat dapat disebabkan jangkauan dan kualitas layanan angkutan umum tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

Permasalahan layanan persampahan terutama terkait volume sampah yang terkelola tidak berkurang oleh kegiatan daur ulang sampah. Pengurangan sampah sejak dari produsen dan pemanfaatan daur ulang sampah, jika tidak didukung sistem pengelolaan persampahan yang memadai menyebabkan beban penanganan persampahan kota tetap meningkat.

#### 4. Pertumbuhan ekonomi kota

Perekonomian Kota Pematangsiantar dimotori oleh tiga sektor utama, yaitu: sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor; sektor industri pengolahan; dan sektor konstruksi dan transportasi dan pergudangan. Diluar, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan pengguna lahan terbesar, yaitu sekitar 60 % lahan wilayah kota, hanya berkontribusi pada 1,5 % dari PDRB kota.

Pertumbuhan ekonomi Kota Pematangsiantar mengalami peningkatan hampir di semua sektor, hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonominya baik. Akan tetapi, jika dilihat nilai PDRB per kapita walaupun masih menunjukkan laju pertumbuhan yang menaik, terlihat bahwa laju pertumbuhan PDRB per kapita menunjukkan penurunan (kategori SB). Hal ini sejalan dengan tingkat pengangguran yang menaik, baik tingkat pengangguran terbuka maupun tingkat setengah pengangguran. Begitu juga pekerja formal dan pekerja informal mengalami penurunan.

Kegiatan industri manufaktur menunjukkan laju pertumbuhan menurun. Sektor pariwisata bisa menjadi berpotensi menjadi motor perekonomian Kota Pematangsiantar. Walaupun kontribusi pariwisata terhadap PDRB belum memenuhi target nasional (8 %), akan tetapi telah mengalami pertumbuhan hingga pada tahun 2019 mencapai 5,8 %. Hal ini dapat digambarkan dengan penambahan jumlah wisatawan nusantara bertambah 200 % selama lima tahun, begitu juga jumlah wisatawan mancanegara bertambah hampir 300 % selama lima tahun juga. Potensi pariwisata dan dapat dikaitkan ketertarikan lembaga keuangan memberikan pinjaman/kredit UMKM yang semakin meningkat. Pihak lembaga keuangan mungkin melihat peran UMKM dalam peningkatan kegiatan potensi pariwisata di Kota Pematangsiantar.

Laju penurunan kegiatan industri manufaktur dapat terjadi pada perusahaan industri lama yang semakin sulit mendapatkan lahan pengembangan atau relokasi ke luar wilayah Kota Pematangsiantar. Dengan ditetapkan RTRW Kota Pematangsiantar yang mengarahkan lokasi kegiatan/kawasan industri ke lahan yang luas di wilayah Kecamatan Siantar Martoba dan pembangunan jalan arteri primer jalan lingkar luar barat kota, rencana jalur kereta api rute Raya-Saribudolok,

dan rencana jalan tol Tebing Tinggi-Parapat-Sibolga diharapkan akan meningkatkan kembali pertumbuhan kegiatan industri baru.

Dengan demikian, permasalahan yang terkait dengan isu pertumbuhan ekonomi di Kota Pematangsiantar, adalah selain peran sektor perdagangan dan jasa dominan, pengembangan sektor-sektor perekonomian yang perlu dipertahankan, seperti industri manufaktur yang lagi menurun agar perlu dikembalikan dengan implementasi rencana pengembangan kegiatan/kawasan industri baru, potensi pertumbuhan kegiatan pariwisata yang dapat terus ditingkatkan dan peran pelaku usaha UMKM yang semakin didorong sejalan dengan kepercayaan pihak lembaga keuangan memberikan pinjaman.

Dengan demikian, kesempatan kerja pada lapangan kerja formal dan informal semakin dipulihkan dari peningkatan jumlah pengangguran selama ini.

#### 5. Kesiapsiagaan penanganan bencana alam

Memang indeks risiko bencana alam di Kota Pematangsiantar masuk dalam kategori sedang. Jenis bencana alam yang terjadi selama beberapa tahun terakhir, seperti banjir dan longsor di daerah bantaran sungai pada level rendah di beberapa kecamatan-kecamatan di pusat dan selatan kota. Walaupun indeks risiko bencana alam semakin menurun, tetapi penurunan risiko masih dibawah yang diharapkan (target nasional menurun 30 % dari data 2016). Artinya masih perlu penanganan pada pengurangan faktor probabilitas ancaman, faktor kerentanan dan faktor kapasitas). Begitu juga, telah memiliki sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan dan dokumen strategis pengurangan risiko bencana alam, tetap perlu memastikan kesiapsiagaan dalam hal kota tangguh yang terbentuk atau pengurangan lokasi risiko bencana, terutama kecepatan respon bagi penduduk di bawah garis kemiskinan atau rentan terhadap bencana.

#### 6. Pemantapan tata kelola pemerintahan

Permasalahan tata kelola pemerintah terutama mencakup perlunya menyempurnakan terus menerus kualitas tata kelola pemerintahan, misalnya dapat dilihat dalam hal status kinerja peningkatan SAKIP saat ini C dapat ditingkatkan dan status penilaian (opini) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pematangsiantar, serta pengelolaan ketaatan hukum pada masyarakat terutama dalam mengurangi perilaku tidak sehat dan kekerasan pada masyarakat.

#### 3.2.5.2 Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar diterbitkan dengan maksud untuk mewujudkan keterpaduan sarana dan prasarana untuk mendukung kebijakana pengembangan Kawasan perumahan dan kawasan permukiman dan sebagai pedoman dan skenario pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perumahan dan permukiman.

Adapun Secara umum isu dan permasalahan penting terkait pengembangan wilayah Kota Pematangsiantar yang sifatnya strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Merupakan pintu gerbang ke lokasi objek wisata Danau Toba dan juga objek wisata lainnya.
2. Pengembangan kawasan Eks HGU sebagai pusat pemerintahan dan pusat sarana kota
3. Memiliki letak geografis kota yang strategis di sekitar perdagangan, hotel, restoran, pariwisata dan pertanian (Agribisnis)
4. Terdapat kawasan pemukiman yang kumuh di pusat kota dengan kondisi prasarana, sarana, dan utilitas yang minim
5. Konflik pemanfaatan lahan pemukiman swadaya (alami) dengan irigasi teknis. Lahan irigasi teknis tersebar pada Nagahuta, Simarimbun, Tong Marimbun, Marihat Jaya, Pematang Marihat, Bp. Nauli, Sukaraja, Tambun Nabolon, Tanjung Tonga, dan Sumber Jaya.
6. Pembangunan jalan lingkar baru yang berdampak pada perkembangan kawasan pemukiman baru dan pemenuhan infrastruktur pemukiman
7. Relokasi TPA karena TPK eksisting di Siantar Martoba tidak dapat menampung kebutuhan sampah. Relokasi TPA pada Kelurahan Gurilla Kecamatan Sitalasari dan lahan Eks PTPN III pada Kecamatan Siantar Martoba
8. Pada kawasan pinggir sungai terdapat 10 kelurahan yang membuang tinja ke sungai dan parit yang menimbulkan pencemaran sungai yang disebabkan oleh minimnya IPAL dan septik tank komunal.

### 3.2.5.3 Master Plan Persampahan Kota Pematangsiantar

Dokumen master plan persampahan kota Pematangsiantar ini bertujuan untuk menyiapkan rencana pendayagunaan segenap potensi sumber daya yang ada secara efisien dan efektif demi mewujudkan gagasan Pembangunan system pengelolaan sampah Kota Pematangsiantar yang berkualitas sesuai dengan kaidah-kaidah fungsional, struktural dan ekologis.

Pengoptimalan koordinasi dan kerja sama dengan instansi yang terkait serta kesadaran Masyarakat dapat menjadi tolak ukur untuk mempercepat dalam mencapai kota Pematangsiantar yang bersih dan asri, namun hal ini belum terwujud karena masih banyak kendala-kendala yang dihadapi.

Permasalahan-permasalahan ataupun hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar antara lain:

1. Keterbatasan tenaga-tenaga profesional dibidang persampahan;
2. Masih rendahnya disiplin warga untuk membuang sampah pada waktu yang telah ditentukan;
3. Kondisi truk sampah yang tidak layak untuk melayani pengangkutan sampah, sehingga setiap harinya tidak semua bisa terangkut;

4. Kondisi lahan TPA yang dimiliki kota Pematangsiantar saat ini yang masih bersifat sewa, jika berakhir masa sewanya akan menjadi permasalahan yang mendesak;
5. Minimnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan/kebersihan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar; dan
6. Keterbatasan dana APBD Kota Pematangsiantar.

#### 3.2.5.4 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2025

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2025 yang memuat visi pembangunan kepariwisataan Kota Pematangsiantar yakni “Kota Pematangsiantar sebagai destinasi pariwisata perkotaan berbasis sejarah, keragaman budaya dan agro yang berdaya saing dunia untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan misi pembangunan kepariwisataan Kota Pematangsiantar adalah :

1. Membangun destinasi pariwisata perkotaan yang memadukan keunggulan sejarah, keragaman budaya, dan potensi agro sebagai identitas pariwisata daerah yang berbudaya dan berkelanjutan, didukung aksesibilitas, fasilitas dan prasarana berstandar internasional.
2. Membangun industri pariwisata berdaya saing dunia yang berbudaya, berkelanjutan, dan mampu memenuhi kebutuhan wisatawan.
3. Membangun pemasaran pariwisata bertanggungjawab yang efektif dan kreatif untuk meningkatkan kunjungan wisatawan yang berkualitas.
4. Membangun kelembagaan kepariwisataan yang mampu mewujudkan keterpaduan dan percepatan pembangunan kepariwisataan yang berbudaya, berkelanjutan, dan berdaya saing dunia.

Pengembangan kepariwisataan Kota Pematangsiantar terbagi atas tiga perwilayahan, yakni :

1. Struktur perwilayahan pariwisata
2. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK)
3. Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSKP)

Struktur perwilayahan pariwisata meliputi pusat pelayanan primer pariwisata yakni Kelurahan Proklamasi, pusat pelayanan sekunder wilayah utara yakni Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba, dan pusat pelayanan sekunder wilayah selatan yakni Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun. KPPK terdiri atas 2 (dua) wilayah yakni KPPK rekreasi edukatif Siantar Sitalasari, dan KPPK pariwisata kreatif Siantar Utara dan Siantar Timur. KSPK terdiri atas 3 (tiga) wilayah yakni KSPK pariwisata sejarah perkebunan Siantar Martoba, KSPK kota tua Siantar dan sekitarnya, KSPK agrowisata Siantar Marimbun dan Siantar Marihat.

### **3.3 Potensi Daerah dan Inovasi Lokal**

Posisi geografis Kota Pematangsiantar yang strategis sebagai daerah penghubung dari arah Medan menuju destinasi wisata Danau Toba, serta dari arah Batu Bara menuju Kabupaten Karo, menjadikan kota ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat perdagangan, jasa, dan pusat distribusi regional. Letaknya yang berada di jalur transportasi utama menjadikannya simpul penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah, baik untuk mobilitas barang maupun orang.

Selain itu, Kota Pematangsiantar memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pendidikan dan rujukan kesehatan regional. Kehadiran institusi pendidikan dan fasilitas kesehatan yang representatif dapat dikembangkan lebih lanjut untuk melayani kebutuhan masyarakat dari kabupaten dan kota di sekitarnya. Hal ini sejalan dengan upaya memperkuat daya tarik kota sebagai pusat aktivitas masyarakat lintas wilayah. Sebagai kota yang dikelilingi oleh wilayah kabupaten, Pematangsiantar juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata kota yang menawarkan pengalaman unik, seperti wisata budaya, sejarah, dan kuliner khas. Upaya ini dapat didukung dengan perbaikan infrastruktur pendukung pariwisata, promosi destinasi lokal, dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata.

Selain itu, pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi prioritas strategis. Dengan menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif, memperluas akses pasar, dan memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM, kota ini dapat meningkatkan produktivitas ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru.

Dengan mengoptimalkan potensi geografis, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata, Kota Pematangsiantar dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan di wilayah Sumatera Utara. Strategi ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan menjadikan kota ini sebagai salah satu pusat unggulan regional.

### **3.4 Isu Strategis Kota Pematangsiantar**

#### **3.4.1 Kualitas Infrastruktur Kota dan Permukiman**

Penyelenggaraan infrastruktur dan penataan ruang terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi, rumah tangga dan transportasi menjadi salah satu isu strategis Kota Pematangsiantar. Penyediaan infrastruktur yang terpadu dengan penataan ruang perlu dicapai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur penting lakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beberapa Isu dalam penyelenggaraan infrastruktur dan penataan ruang di Kota Pematangsiantar ditunjukkan oleh kualitas dan kuantitas infrastruktur kota yang belum optimal, penanganan kawasan kumuh dan PSU permukiman yang belum optimal, dan pengelolaan transportasi belum optimal.

Salah satu cara untuk melayani masyarakat adalah dengan menyediakan infrastruktur yang memadai. Keberhasilan pemerintah dalam menyediakan akses infrastruktur untuk masyarakat diukur menggunakan Indeks infrastruktur

. Capaian indeks infrastruktur Kota Pematangsiantar Tahun 2023 adalah 0,86. Capaian tersebut diperoleh dari penyelenggaraan layanan air minum RT sebesar 99,72%. Selanjutnya capaian rumah tangga berakses sanitasi aman 5,03%. Kondisi ini disebabkan sanitasi aman masih belum populer di masyarakat. Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya sanitasi aman untuk menjaga agar lingkungan tidak tercemar perlu terus dilakukan. Selain itu regulasi terkait sanitasi aman menjadi krusial dilakukan agar masyarakat mengadopsi sistem tersebut.

Isu lainnya terkait infrastruktur adalah jalan yang akan memudahkan pergerakan masyarakat melakukan aktivitasnya. Pada Tahun 2023, capaian persentase kondisi jalan kondisi mantap Kota Pematangsiantar sebesar 91,48%. Jaringan jalan telah mampu menghubungkan seluruh permukiman di Kota Pematangsiantar. Pengembangan wilayah perlu diantisipasi seiring bertumbuhnya jumlah penduduk dan kebutuhan akan rumah dan aktivitas masyarakat juga meningkat. Selain itu masih juga ditemukan kurang optimalnya pemeliharaan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan pemerintah atasan.

Untuk menjamin pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berjalan sesuai dengan yang direncanakan, perlu melakukan pengendalian ruang. Kinerja pengendalian rencana struktur ruang kota agar sesuai RTRW di Kota Pematangsiantar sebesar 69%. Permasalahan yang terjadi terkait pengendalian ruang adalah RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Pematangsiantar yang masih dalam proses revisi.

Penanganan kawasan kumuh menjadi isu yang krusial karena masih adanya sekitar 156,78 Ha luas kawasan kumuh di Kota Pematangsiantar membuat pembangunan permukiman perlu diantisipasi. Salah satu persoalan terkait penanganan kawasan kumuh adalah belum terintegrasinya penanganan kumuh disuatu kawasan yang mengakibatkan kawasan kumuh yang direhabilitasi tetap kumuh. Belum terintegrasinya penanganan kawasan kumuh ini disebabkan masalah legalitas lahan dan pendataan *by name by address* yang belum optimal. Selain itu seiring bertumbuhnya jumlah penduduk dan kebutuhan terhadap permukiman turut menyumbang permasalahan kawasan kumuh ini.

Selain kawasan kumuh, isu yang lainnya adalah ketersediaan rumah layak huni. Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni (UU PKP). Capaian ketersediaan rumah layak huni Kota Pematangsiantar Tahun 2023 masih sebesar 62,38%. Penyebab permasalahan tersebut adalah masih kurangnya tingkat perekonomian dan kesadaran masyarakat untuk bertempat tinggal dirumah yang layak huni.

Isu lainnya terkait infratruktur adalah ketersediaan Prasarana Sarana Umum (PSU). PSU dikawasan perumahan dan permukiman merupakan kelengkapan fisik untuk

mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Kinerja penyediaan PSU perumahan dan permukiman Kota Pematangsiantar Tahun 2023 telah tercapai 100% namun dengan bertumbuhnya jumlah penduduk maka harus diantisipasi kedepannya..

Isu pengelolaan transportasi ditunjukkan melalui pengelolaan, penataan, dan penertiban parkir dan titik kemacetan yang terjadi di beberapa ruas jalan. Masalah pengelolaan, penataan dan penertiban parkir terjadi akibat masih digunakannya badan jalan sebagai lokasi parkir, perilaku pengemudi untuk memperoleh lokasi parkir masih fokus pada lokasi terdekat dan masih enggan mencari lokasi parkir yang sedikit jauh dari tempat tujuan. Selain itu banyak pemilik kendaraan masih memarkirkan kendaraannya ditrotar dari pada memarkirkan di lahan parkir.

Seiring berkembangnya aktivitas masyarakat menyebabkan kondisi transportasi Kota Pematangsiantar semakin padat yang menyebabkan terjadi kemacetan di beberapa ruas jalan. Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa hal yakni (1) Angkutan pedesaan di sekitar Kota Pematangsiantar langsung masuk ke pusat kota karena belum adanya terminal tipe C di pintu masuk utama kota, (2) volume kendaraan bertambah dan ruas jalan tetap, (3) belum maksimalnya fungsi halte sebagai tempat pemberhentian angkutan umum, (4) sistem kegiatan yang beragam di Jalan Sutomo dan Jalan Merdeka mengakibatkan kegiatan di pusat kota sangat tinggi, (5) banyaknya pedagang berjualan di badan jalan maupun di trotoar, dan (6) belum optimalnya penggunaan terminal Tipe A. Penyelesaian jalan lingkar untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas jalur strategis KEK Sei Mangkei dan kawasan strategis Danau Toba. Peningkatan penyediaan angkutan massal yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan serta sosialisasi dan promosi yang intensif untuk membiasakan masyarakat menggunakan angkutan massal sebagai pilihan utama transportasi perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dalam rangka mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan kualitas udara dan lingkungan hidup.

#### 3.4.2 Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu modal penting dalam meraih visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang dalam RPJP Nasional adalah Sumber daya manusia yang berkualitas. Pada tahun 2022 Kota Pematangsiantar memiliki kuantitas penduduk usia produktif yang mendominasi struktur penduduk sebesar 67,92%. Berdasarkan struktur kependudukan tersebut, Kota Pematangsiantar memasuki fase bonus demografi karena memiliki usia produktif yang lebih besar dari 50%. Namun untuk dapat menikmati bonus demografi tersebut maka perlu dilakukan persiapan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik dan dimulai dari sedini mungkin. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia didukung oleh berbagai macam aspek yang saling berkaitan, yaitu kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat dan pendidikan.

Salah satu indikator untuk mengukur ketercapaian kualitas sumber daya manusia di Kota Pematangsiantar adalah melalui angka indeks pembangunan manusia. IPM di

Kota Pematangsiantar pada tahun 2023 sebesar 80,46% berada di atas capaian provinsi dan nasional. Namun Kota Pematangsiantar masih menghadapi isu-isu kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh Pengelolaan pendidikan masih belum optimal menghasilkan lulusan yang berkualitas, Pengelolaan kesehatan masih belum optimal, Pengelolaan pelayanan sosial masyarakat masih belum optimal menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan, dan pelestarian budaya daerah masih belum optimal. Salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia adalah pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah Kota Pematangsiantar Tahun 2023 sebesar 11,58 tahun atau rata-rata penduduk telah bersekolah sampai tingkat menengah atas. Perlu dorongan yang lebih agar rata-rata lama sekolah ini terus meningkat kedepannya. Sedangkan harapan lama sekolah penduduk Kota Pematangsiantar sebesar 14,86 tahun. Persentase PAUD Holistik Integratif sebesar 2,44%, angka partisipasi kasar SD sebesar 93,32 dan angka partisipasi kasar SMP sebesar 110,36 menunjukkan Kota Pematangsiantar menjadi tujuan wilayah sekitar untuk mengenyam pendidikan. Dari aspek ketersediaan sekolah sudah merata ke semua kecamatan di Kota Pematangsiantar. Dari segi kelengkapan sarana prasarana masih perlu peningkatan karena berdasarkan data persentase satuan pendidikan SD yang memenuhi SNP sarana prasarana masih diangka 4,9%, sedangkan persentase satuan pendidikan SD yang memenuhi SNP sarana prasarana masih diangka 52,2%. Sedangkan guru berpendidikan diploma IV/S1 sudah diangka 97,34%. Perlu terus ditingkatkan kualitas pendidikan agar dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Cara yang lain untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan meningkatkan literasi masyarakat. Tahun 2023 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Pematangsiantar sebesar 60,30 atau kategori sedang. Perlu dilakukan upaya yang lebih lagi agar Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Pematangsiantar terus meningkat di masa mendatang untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.

Salah satu aspek penting yang menunjukkan kualitas sumber daya manusia adalah kondisi kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh derajat kesehatan. Tingkat derajat kesehatan masyarakat di Kota Pematangsiantar sudah baik ditandai usia harapan hidup tahun 2023 yang mencapai 74,75 tahun merupakan capaian tertinggi di Sumatera Utara. Namun masih ditemukan kasus Kematian Ibu sebesar 1 per 100 ribu kelahiran hidup, Kematian Bayi 5 per 1000 kelahiran hidup. Kasus prevalensi Stunting juga masih terdapat di Kota Pematangsiantar dengan nilai 14,3 dan Penemuan kasus (Insidensi) TBC.32,5%. Penyebab kematian ibu disebabkan beberapa faktor seperti risiko anemia, obesitas, kekurangan energi kalori. Sementara itu, penyebab kematian bayi didominasi afiksia dan berat badan lahir rendah (BBLR). Faktor penyebab kasus stunting adalah pola hidup dan pola asuh bayi dalam keluarga. Selanjutnya, masalah aspek kesehatan secara umum yang terjadi adalah peningkatan prevalensi

penyakit menular dan tidak menular yaitu HIV/AIDS, kasus ISPA, DBD dan darah tinggi. Pencegahan dan penanganan masalah-masalah kesehatan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, masih belum optimal dibuktikan dengan tingkat pelayanan pada sector kesehatan yang hanya bernilai rata-rata 81,55 atau kategori berkualitas baik dan nilai BOR RSUD dr. Djasamen Saragih hanya 9,89% Tahun 2023. Dari segi kecukupan tenaga medis (dokter, paramedis, dan bidan) di Kota Pematangsiantar telah mencukupi hanya perlu melakukan pemerataan dan peningkatan pelayanan.

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional sebagai gambaran jaminan kesehatan masyarakat telah mencapai 98,31% pada Tahun 2023. Masih diperlukan upaya dan inovasi untuk meningkatkan jaminan pelayanan kesehatan yang mengcover seluruh masyarakat di Kota Pematangsiantar.

Penanganan PMKS menjadi hal yang sangat penting dalam mengurangi penduduk miskin di Kota Pematangsiantar karena PMKS merupakan salah satu penyumbang angka kemiskinan. Secara umum PMKS mengalami kenaikan yang ditandai dengan meningkatnya jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial per-KPS dari 12882 jiwa Tahun 2017 menjadi 17729 jiwa Tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan bantuan akibat permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Pematangsiantar. Salah satu permasalahan penanganan PMKS di Kota Pematangsiantar adalah ketersediaan data yang valid agar pemberian bantuan tepat sasaran. Selain itu sarana prasarana penanganan PMKS belum optimal untuk memberikan pelayanan.

Kota Pematangsiantar terdiri dari multi etnis yang hidup berdampingan secara damai memiliki kekuatan dibidang Seni dan Budaya. Peran kebudayaan sangat sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan masyarakat. Sebagai kota yang kental dengan kebudayaan, pelestarian budaya menjadi isu strategis yang perlu terus di jaga dari infiltrasi budaya dari luar yang kurang sesuai. Pelestarian kebudayaan dapat dilakukan dengan dua pendekatan yakni *culture experience* dan *culture knowledge*. *Culture experience* merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung kedalam pengalaman kultural, sedangkan *culture knowledge* merupakan pelestarian kebudayaan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan.

Jumlah cagar budaya yang terdapat di Kota Pematangsiantar sebanyak 13 unit, namun baru satu situs yang dilakukan pemeliharaan. Sedangkan pagelaran festival seni budaya dilaksanakan sebanyak empat kali setahun. Tantangan terhadap pelestarian budaya kedepan adalah melakukan pendekatan yang inovatif dalam memperkenalkan budaya lokal ke dalam kurikulum sekolah, menghadirkan festival seni dan budaya secara lebih intens, menambah sarana prasarana pagelaran seni budaya yang kreatif dan dapat disaksikan oleh masyarakat luas. Selain itu melakukan pelestarian terhadap situs-situs dan benda cagar budaya yang ada di Kota Pematangsiantar.

Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan dari 17 TBP adalah kesetaraan gender. Kesetaraan gender dimaknai sebagai keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender adalah dengan membandingkan IPM perempuan terhadap IPM laki-laki atau disebut Indeks Pembangunan Gender. Selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kota Pematangsiantar tidak terlalu signifikan. Nilai IPG Kota Pematangsiantar Tahun 2022 sebesar 95,95 berada di atas Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Walaupun capaian IPG sudah cukup mencerminkan kesetaraan gender, namun capaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar lebih baik lagi kedepan.

Untuk dapat mengoptimalkan fungsi masyarakat dalam pembangunan, diperlukan keluarga yang tangguh dan harmonis. Namun terjadi peningkatan jumlah KDRT dari 2 kasus di Tahun 2017 menjadi 13 kasus pada Tahun 2022. Selain itu terdapat peningkatan Jumlah Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan dari 9 kasus di Tahun 2017 menjadi 75 kasus di Tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan kinerja penanganan yang dilakukan sudah cukup baik. Namun disisi lain kasus terkait tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat.

#### 3.4.3 Nilai Tambah Produk Unggulan

Kemakmuran masyarakat merupakan salah satu tujuan dari pembangunan. Agar pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, salah satu aspek yang perlu dipenuhi adalah pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Berbagai Kebijakan strategis pembangunan daerah bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan. Dalam pencapaian tujuan besar tersebut berbagai tantangan pembangunan dihadapi oleh Kota Pematangsiantar yaitu pertumbuhan ekonomi cenderung menurun dan pemerataan ekonomi yang belum optimal.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pematangsiantar kurun waktu 2016-2023 terus mengalami penurunan dari 6,34 tahun 2016 menjadi 4,22 tahun 2023. Penurunan terendah terjadi tahun 2020 sebesar -1,89 sebagai dampak dari pandemi covid-19.

Berdasarkan PDRB Kota Pematangsiantar, lapangan usaha dengan kontribusi terbesar adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberi peran sebesar 40,23% disusul sektor Industri Pengolahan memberi peran sebesar 19,3% dan sektor konstruksi memberi peran sebesar 10,58%. Namun jika dilihat trend, ketiga sektor tersebut cenderung melambat lima tahun terakhir. Dilihat dari peranan masing-masing ketiga sektor tersebut, sektor industri pengolahan terus mengalami penurunan. Deindustrialisasi sedang terjadi ditandai oleh penurunan produktivitas sektor industri sehingga sektor industri pengolahan tidak lagi menjadi signifikan berkontribusi terhadap perekonomian. Perkembangan penduduk dan ketersediaan lahan di Kota Pematangsiantar dianggap menjadi penyebab permasalahan tersebut yang berdampak pada pindahnya industri ke sekitaran Kota Pematangsiantar.

Untuk itu perlu dilakukan pengembangan beragam sektor ekonomi di daerah agar dapat meningkatkan peluang pendapatan dari berbagai sumber. Diversifikasi dapat mencakup pertanian, industri, jasa, pariwisata, dan sektor lainnya.

Dilihat dari usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi penopang ekonomi masyarakat dan serapan tenaga kerja, diperlukan strategi untuk meningkatkan kapasitas usaha dan inovasi produk. Proporsi jumlah usaha kecil terhadap usaha menengah di Kota Pematangsiantar sebanyak 15,93%. Diperlukan upaya menambah jumlah usaha kecil dengan meningkatkan kapasitas SDM yang berorientasi entrepreneur untuk membuka peluang inovasi dan pasar baru untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun tantangan kedepan yang harus dihadapi untuk pengembangan UMKM di Kota Pematangsiantar adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Transformasi Digital pada UMKM perlu dilakukan diiringi dengan pemetaan kebutuhan teknologi agar implementasi pada UMKM dapat meningkatkan daya saingnya.

Dengan melihat perkembangan wilayah di sekitar Kota Pematangsiantar yang diapit oleh dua proyek strategis nasional yakni Kawasan Strategis Danau Toba di sebelah barat dan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei di sebelah timur cukup menguntungkan untuk mengembangkan pusat sektor perdagangan. Namun pengembangan kedua proyek strategis tersebut diikuti oleh pembangunan jalan tol yang menghubungkan Kota Medan dan Parapat akan membuat pergerakan warga dari arah Parapat dapat langsung ke Kota Medan demikian sebaliknya tanpa singgah ke Kota Pematangsiantar. Salah satu strategi untuk tetap menjadikan Kota Pematangsiantar menjadi tujuan masyarakat sekitar, perlu melakukan pengembangan sarana dan prasarana serta kemudahan perijinan dalam berinvestasi pada sektor perdagangan dan jasa serta pengembangan Kota Pematangsiantar sebagai pusat distribusi regional.

Demikian juga untuk menarik wisatawan singgah di Kota Pematangsiantar, perlu melakukan pengembangan destinasi pariwisata kota yang ada di Kota Pematangsiantar, dengan mempromosikan budaya, alam, dan kuliner khas Kota Pematangsiantar.

Pertumbuhan ekonomi yang cenderung menurun juga diikuti oleh inflasi Kota Pematangsiantar di tahun 2023 sebesar 2,3% lebih tinggi dari provinsi Sumatera Utara dan lebih rendah dari inflasi Nasional. Inflasi Kota Pematangsiantar terutama disumbang dari indeks kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau. Sebagai kota dengan jumlah produksi makanan, dan minuman yang minim, kebutuhan tersebut tergantung dari pasokan luar wilayah Kota Pematangsiantar. Namun dari sisi ketersediaan pangan, skor Indeks Ketahanan Pangan Kota Pematangsiantar Tahun 2023 sebesar 78,42 atau masuk kategori 6. Artinya dari kategori keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, Kota Pematangsiantar sangat baik. Hal yang perlu di waspadai adalah isu perubahan iklim yang mempengaruhi produksi dan ketersediaan pangan di masa mendatang. Dengan proyeksi penduduk Kota Pematangsiantar sebanyak 303.019

jiwa pada Tahun 2045, dibutuhkan pasokan pangan yang cukup ditengah keterbatasan produksi.

Sebagai sebuah kota yang minim sumber daya, strategi yang dapat dilakukan untuk pengurangan ketergantungan pada pasokan pangan luar wilayah melalui pengembangan pertanian perkotaan dengan memanfaatkan lahan pekarangan, pengembangan pertanian kota memanfaatkan teknologi tepat guna, meningkatkan kaulitas prasarana pertanian (irigasi, jalan usaha tani, alat pengolahan), melindungi lahan pangan yang ada.

Pemerataan ekonomi yang ditunjukkan dengan capaian Gini Ratio Kota Pematangsiantar Tahun 2023 sebesar 0,329 atau kategori sedang. Namun data penduduk Kota Pematangsiantar yang terdaftar pada DTKS Kementerian Sosial sebanyak 113.470 jiwa (Juli 2023). Angka ini setara dengan 41,40% dari keseluruhan penduduk Kota Pematangsiantar. Sementara itu tingkat kemiskinan Kota Pematangsiantar Tahun 2023 sebesar 7,24%. Dengan perbandingan persentase warga yang terdaftar di DTKS dengan tingkat kemiskinan, dapat disimpulkan masih banyak warga yang tergantung pada bantuan dari pemerintah walaupun tidak dikategorikan sebagai penduduk miskin yang jika bantuan dihentikan, akan sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kota Pematangsiantar.

Salah satu pemicu kurang meratanya perekonomian adalah tingkat pengangguran terbuka Kota Pematangsiantar sebesar 8,62 % pada Tahun 2023 dan merupakan tingkat pengangguran tertinggi kedua di Provinsi Sumatera Utara. Rendahnya peluang kerja di Kota Pematangsiantar diikuti ketidaksesuaian antara pendidikan dan keterampilan dengan pasar kerja yang ada menyebabkan pengangguran tinggi. Pasar kerja di Kota Pematangsiantar dominan diisi tamatan SMP, SMA dan SMK. Sedangkan Diploma/Universitas hanya menyumbang 14,60% dari pasar kerja. Secara keseluruhan, angkatan kerja yang terserap ke pasar kerja sebesar 90,64%. Kondisi ini merupakan tantangan kedepan ditengan bonus demografi dan bertambahnya jumlah usia produktif di Kota Pematangsiantar ditambah dengan urbanisasi yang terus meningkat dari luar wilayah.

Ditinjau dari PDRB per kapita, penduduk Kota Pematangsiantar Tahun 2023 sebesar 59,046 juta. Jika di konversi kedalam dollar, angka ini setara dengan \$ 3.809,42. Menurut kategori Bank Dunia, angka ini masih berada pada kategori penghasilan menengah ke bawah. Sasaran pada RPJP Nasional menargetkan Indonesia memiliki pendapatan perkapita setara dengan negara maju sekitar US\$ 23.000-30.300. Tantangan ini tentu menjadi PR besar bagi Kota Pematangsiantar kedepan.

#### 3.4.4 Tata Kelola Pemerintahan

Untuk menjamin pembangunan daerah tercapai dengan maksimal, dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik karena berkaitan dengan aspek kontrol dan pengawasan terhadap banyak bidang dalam mencapai tujuan pembangunan. Salah satu ukuran dalam menilai kinerja pemerintah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pematangsiantar Tahun 2023 dengan nilai CC atau masih perlu perbaikan agar mencapai kategori sesuai yang diharapkan.

Dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan, Kota Pematangsiantar masih dihadapkan pada isu tata kelola pemerintahan masih belum efektif dan efisien, Pengelolaan Keuangan belum akuntabel, Penyelenggaraan pemerintahan masih belum optimal dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, Aparatur pemerintah kurang profesional, dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan belum optimal.

Salah satu tujuan dari tata kelola pemerintahan adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem, proses dan prosedur kerja. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan menjadi acuan dan dalam integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan. Pada Tahun 2023 capaian SPBE Kota Pematangsiantar sebesar 2,84 atau kategori baik. Untuk lebih mendukung pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi, perlu dilakukan upaya peningkatan.

Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan, digunakan alat ukur yang dikembangkan oleh kementerian terkait yakni Indeks Reformasi Birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan. Di dalam sistem ini menganut filosofi setiap rupiah yang dibelanjakan, memiliki manfaat untuk pembangunan. Berdasarkan capaian indeks reformasi birokrasi pada Tahun 2023, Kota Pematangsiantar mencapai angka 54,82 atau kategori CC. dari komponen indeks RB tersebut terbagi dua yakni RB general dan RB tematik. Capaian RB general Kota Pematangsiantar sebesar 50,14 dari bobot 100. Sedangkan Capaian RB tematik sebesar 4,68 dari bobot 20. Kondisi ini mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang masih perlunya perbaikan dari Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Pada Tahun 2023, capaian nilai Sakip Kota Pematangsiantar adalah kategori CC atau cukup (memadai). Artinya AKIP sudah cukup baik namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja. Perlu dilakukan upaya yang terus menerus dan sistematis agar tercapai efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan kedepan. Transformasi pemerintahan perlu dilakukan untuk mempercepat perbaikan iklim penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pematangsiantar agar tercipta pemerintahan yang lebih efektif, efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memberikan pengertian bahwa bentuk tanggungjawab keuangan negara dapat diwujudkan dalam tiga aspek pertanggungjawaban, yaitu aspek ketertiban administrasi keuangan, aspek kinerja dan aspek hukum. Dari sisi aspek ketertiban administrasi keuangan, Pemerintah Kota Pematangsiantar telah mendapatkan kategori WTP terhadap laporan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun 2022. Dari aspek kinerja sebagaimana dijelaskan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja pengelolaan keuangan diwujudkan dalam SAKIP. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Sakip Kota Pematangsiantar masih dalam kategori cukup (memadai). Pengukuran lainnya tentang akuntabilitas keuangan di wujudkan dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat enam dimensi yang digunakan untuk melakukan penilaian IPKD yakni dimensi 1 kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, dimensi 2 pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, dimensi 3 transparansi keuangan daerah, dimensi 4 penyerapan anggaran, dimensi 5 kondisi keuangan daerah, dimensi 6 opini BPK atas LKPD. Capaian IPKD Kota Pematangsiantar Tahun 2023 adalah 55,159 atau kategori B peringkat perlu perbaikan.

Untuk membiayai belanja pembangunan diperlukan anggaran yang diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan. Semakin tinggi persentase DDF, menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan PAD semakin baik. Pada Tahun 2023, DDF Kota Pematangsiantar sebesar 15,56%.

Salah satu unsur penting dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan adalah pelayanan publik. Indeks Pelayanan Publik Kota Pematangsiantar Tahun 2023 mendapatkan nilai 81,55 atau kategori B. Penyebab rendahnya indeks pelayanan publik tersebut adalah karena masih lemahnya kompetensi pelaksana pelayanan, kepatuhan terhadap prosedur juga masih lemah. Masih ada juga ditemukan adanya maladministrasi dan belum maksimalnya saluran pengaduan.

Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan aparatur yang kompeten dan menguasai bidangnya agar dapat terlaksana dengan baik. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penyelenggara negara dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugas dan perannya menyelenggarakan pemerintahan. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan ASN di

Indonesia melakukan pengukuran kualitas dan profesionalitas ASN yang diukur dengan empat kategori yaitu Kualifikasi bobot 25%, Kompetensi bobot 40%, Kinerja bobot 30% dan Disiplin bobot 5%. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Kota Pematangsiantar Tahun 2023 adalah 55,24 atau kategori sangat rendah. Kondisi ini disebabkan oleh kompetensi yang masih rendah, kinerja dan kualifikasi yang belum optimal.

Inovasi dalam tata kelola pemerintahan bertujuan untuk menghadapi tantangan yang terus berkembang dalam masyarakat, termasuk meningkatkan pelayanan publik, mengelola sumber daya dengan lebih efisien, dan meningkatkan keterbukaan serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan berfokus pada inovasi, pemerintah dapat menghadapi masalah-masalah tersebut dengan cara yang lebih adaptif dan responsif. Pada tahun 2023 Kota Pematangsiantar masuk dalam kategori Kurang Inovatif sehingga menjadi tugas kedepan bagaimana inovasi dapat dikembangkan lebih baik di setiap OPD. Melalui Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah.

Unsur penyelenggaraan pemerintahan lainnya adalah pengawasan. Pengawasan dimaksudkan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Agar pengawasan dapat berjalan dengan baik dilaksanakan suatu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2023 Nilai maturitas SPIP Kota Pematangsiantar adalah 2,294 atau kategori berkembang. Kategori capaian ini memiliki arti bahwa praktik pengendalian tidak terdokumentasi dengan baik dan belum ada evaluasi efektifitasnya.

Salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing Kota Pematangsiantar adalah melalui transformasi digital di bidang pemerintahan dan administrasi publik serta inovasi dalam pelayanan publik. Transformasi ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Implementasi teknologi digital dapat diterapkan pada berbagai aspek, antara lain: pelayanan kependudukan, perizinan dan pelayanan publik, analisis data dan pengambilan keputusan, penyediaan informasi digital, pengaduan dan partisipasi masyarakat, dan pengelolaan pendapatan daerah.

#### 3.4.5 Lingkungan Hidup

Untuk menjamin pembangunan berkelanjutan diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang bertanggung jawab. Target permbangunan berkelanjutan yang dicanangkan

pemerintah pusat perlu dilaksanakan di tingkat daerah. Pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu isu dalam perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Pematangsiantar. Beberapa isu strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah manajemen pengelolaan lingkungan hidup yang belum optimal, dan mitigasi bencana yang juga belum optimal.

Pada tahun 2023, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Pematangsiantar sebesar 63,72 (kategori sedang) dengan komponen Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 84,86 (kategori sedang), Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 65 (kategori sedang), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 22,44 (kategori rendah).

Salah satu permasalahan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). RTH existing Kota Pematangsiantar seluas 5,47% dari total luas Kota Pematangsiantar. Kondisi ini terjadi karena Pemerintah Kota Pematangsiantar belum memiliki lahan yang cukup untuk dijadikan RTH. Peraturan Menteri ATR KBPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau mengatur bahwa luas RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah kota atau kawasan perkotaan dengan rincian 20% bersifat RTH publik dan 10% bersifat RTH privat.

Untuk meningkatkan kualitas kota sebagai lingkungan yang layak huni, keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan elemen yang sangat penting untuk menciptakan kenyamanan dan keseimbangan tata ruang. Peningkatan luasan RTH harus direncanakan secara strategis agar memenuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan, seperti proporsi minimum RTH publik dan privat sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pengembangan RTH perlu mengadopsi konsep terpadu yang mengintegrasikan berbagai fungsi, antara lain: fungsi ekologis, fungsi pendidikan, fungsi rekreasi dan sosial, fungsi olahraga, fungsi planologis, fungsi ekonomis, fungsi pengelolaan sumber daya air, fungsi peredam kebisingan

Selain ketersediaan RTH, permasalahan selanjutnya adalah penanganan sampah. Capaian penanganan sampah di Kota Pematangsiantar Tahun 2023 sebesar 71,55% sedangkan pengurangan sampah 24,84%. Untuk dapat mengelola sampah dengan baik dan tidak mencemari lingkungan diperlukan pengelolaan sampah dengan menerapkan pola *Reduce, Reuse dan Recycle*. Untuk itu diperlukan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah sebagai tempat melakukan pengelolaan sampah. Namun sampai saat ini Kota Pematangsiantar belum memiliki TPA permanen. TPA yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar merupakan milik pihak ketiga yang disewa.

Pengawasan terhadap aktivitas perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perlu juga mendapat perhatian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar mencatat masih

27,5% perusahaan yang beroperasi di Kota Pematangsiantar yang memiliki unit pengolahan limbah sendiri.

Tantangan utama dalam pengelolaan persampahan ke depan adalah menciptakan sistem yang mampu melibatkan partisipasi aktif masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam mengelola sampah di lingkungannya, termasuk dalam kegiatan pengurangan, pemilahan, daur ulang, dan pengolahan sampah. Sementara itu, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta perlu berperan sebagai motivator, fasilitator, dan penyedia infrastruktur yang mendukung, seperti pengadaan tempat pengelolaan sampah terpadu, program edukasi, serta kebijakan yang mendorong praktik ramah lingkungan. Pendekatan ini membutuhkan sinergi antara berbagai pihak untuk memastikan pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, sehingga mampu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Perubahan iklim yang terjadi berpotensi menyebabkan bencana. Kota Pematangsiantar memiliki potensi kebencanaan yang sedang (BNPB, 2022), yaitu gempa bumi, cuaca ekstrem, banjir, dan longsor. Indeks Risiko Bencana di Kota Pematangsiantar berada pada skor 91,20. Indeks risiko bencana gempa bumi 2022 skor 21,60 atau kategori tinggi. Indeks risiko kebakaran 2022 skor 33,60 atau kategori tinggi. Indeks risiko tanah longsor skor 11,20 atau kategori sedang, indeks risiko bencana kekeringan skor 11,20 atau kategori sedang. Indeks risiko cuaca ekstrem dengan skor 13,60 atau kategori tinggi. Mitigasi dan adaptasi terhadap bencana menjadi upaya untuk meminimisir potensi kerugian bencana. Tantangan adaptasi dan mitigasi kebencanaan di Kota Pematangsiantar yaitu kualitas lingkungan hidup yang menurun, kapasitas masyarakat dan aparatur pemerintah dalam manajemen kebencanaan yang belum optimal, serta masih terbatasnya akses informasi rawan bencana bagi masyarakat.

**BAB IV**  
**VISI DAN MISI DAERAH**

Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan dokumen perencanaan sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Gambaran cita-cita dan harapan pembangunan daerah di masa depan merupakan landasan dalam merumuskan visi pembangunan. Visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau *stakeholder* pembangunan daerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

**4.1 Visi**

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai dalam 20 tahun mendatang. Perumusan visi mempertimbangkan faktor internal (modal dasar dan kelemahan), faktor eksternal (peluang dan tantangan), serta menggambarkan nilai-nilai penting yang perlu dilaksanakan. Perumusan visi pembangunan Kota Pematangsiantar Tahun 2025 - 2045 didasarkan pada masalah utama atau isu strategis pembangunan, sesuai pembahasan pada bab sebelumnya sebagai berikut.

1. Kualitas Infrastruktur Kota dan Permukiman
2. Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat
3. Nilai Tambah Produk Unggulan
4. Tata Kelola Pemerintahan
5. Lingkungan hidup

Tabel di bawah ini menunjukkan perumusan pokok-pokok visi berdasarkan masalah utama atau isu strategis pembangunan Kota Pematangsiantar.

Tabel 4. 1  
Perumusan Visi RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045

No	Masalah Utama	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1	Kualitas Infrastruktur Kota dan Permukiman	Indah	MEWUJUDKAN KOTA PEMATANGSIANTAR IDAMAN (INDAH, MAJU DAN BERKELANJUTAN)
2	Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat	Maju	
3	Nilai Tambah Produk Unggulan		
4	Tata Kelola Pemerintahan		
5	Lingkungan hidup	Berkelanjutan	

Dengan mendasarkan pada gambaran kondisi pencapaian pembangunan daerah periode sebelumnya, isu dan tantangan global, serta dengan memperhatikan rancangan dokumen RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045, maka disampaikan rancangan Visi Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045, yaitu::

### **PEMATANGSIANTAR INDAH, MAJU DAN BERKELANJUTAN (IDAMAN)**

Penjelasan kata kunci yang menunjukkan arah pembangunan Kota Pematangsiantar yaitu IDAMAN (Indah, Maju, Berkelanjutan) adalah sebagai berikut:

#### **KOTA PEMATANGSIANTAR INDAH**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti dalam keadaan enak dipandang; cantik; elok biasanya kabar selalu melebihi keadaan sebenarnya; Indah dalam Visi Kota Pematangsiantar tahun 2025-2045 dimaknai Mewujudkan kondisi Infrastruktur publik kota yang baik, berkualitas, modern serta penataan ruang yang nyaman, aman dan berestetika.

#### **KOTA PEMATANGSIANTAR MAJU**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti berjalan ke muka; tampil ke muka, mendesak ke depan, pergi atau keluar ke medan perang, menjadi lebih baik, berkembang, lulus, telah mencapai atau berada pada tingkat peradaban yang tinggi, cerdas; berkembang pikirannya; berpikir dengan baik; Maju dalam Visi Kota Pematangsiantar tahun 2025-2045 dimaknai bahwa pembangunan Kota Pematangsiantar diwujudkan dengan perekonomian yang tumbuh berkelanjutan, sumber daya manusia sehat, kompeten, inovatif dan mampu beradaptasi terhadap perubahan di era teknologi informasi, berdaya saing yang didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik

#### **KOTA PEMATANGSIANTAR BERKELANJUTAN**

Berkelanjutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti berlangsung terus-menerus; berkesinambungan; Berkelanjutan dalam Visi Kota Pematangsiantar tahun 2025-2045 dimaknai sebagai Komitmen Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk membangun dan menjamin pelaksanaan tahapan pembangunan selanjutnya secara berkesinambungan dan berwawasan lingkungan.

Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2025-2045 Kota Pematangsiantar diharapkan selaras dan sejalan dengan Visi RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045. Sandingan Visi sebagai berikut:



Gambar 4. 1  
Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera Utara dan RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045

Visi pembangunan Kota Pematangsiantar tahun 2025–2045 merupakan wujud Pematangsiantar yang ingin dicapai untuk rentang waktu 20 tahun kedepan. Visi tersebut diharapkan mampu menjawab permasalahan strategis masyarakat yang berkembang, seiring dengan perubahan dan perkembangan lingkungan, Visi pembangunan Kota Pematangsiantar Indah, Maju dan Berkelanjutan mendukung perwujudan visi nasional NKRI yang Bersatu, Berdaulat dan Berkelanjutan dan Visi Provinsi Sumatera Utara Unggul Maju dan Berkelanjutan;

**Indah;** melalui melalui pembangunan Infrastruktur publik kota Pematangsiantar yang baik, berkualitas, modern serta penataan ruang yang nyaman, aman dan berestetika mendukung perwujudan ketersediaan infrastruktur daerah yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan dan mendukung pembangunan Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu Provinsi maju dengan posisi empat besar dalam perekonomian nasional, sejahtera, merata dan berkeadilan sosial,

**Maju;** melalui pembangunan perekonomian daerah Kota Pematangsiantar yang tumbuh berkelanjutan, sumber daya manusia sehat, kompeten, inovatif dan mampu beradaptasi terhadap perubahan di era teknologi informasi, berdaya saing dan tata kelola pemerintahan yang baik mendukung perwujudan pembangunan Indonesia sebagai negara maju, yang memiliki daya saing dan unggul dan mendukung pembangunan Provinsi Sumatera Utara untuk berperan penting ditingkat nasional dengan daya saing global dalam sumber daya manusia, pemerintahan, pengembangan bioindustri dan pariwisata kelas dunia

**Berkelanjutan;** Kota Pematangsiantar mendukung sepenuhnya pelaksanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara dengan komitmen untuk menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, menjamin bahwa setiap pelaksanaan tahapan pembangunan secara berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan keberlangsungan kehidupan saat ini dan generasi mendatang.

#### 4.2.1 Sasaran Visi

Visi Kota Pematangsiantar Indah, Maju dan Berkelanjutan yang telah dijelaskan diatas kemudian dirincikan ke dalam sasaran visi yang harus selaras dengan sasaran Visi RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025. Sasaran Visi sebagai berikut:

##### 1. Peningkatan Pendapatan Per Kapita

Pemerintah Kota Pematangsiantar menekankan upaya untuk peningkatan pendapatan yang diterima oleh masyarakat yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan ekonomi secara merata di seluruh lapisan masyarakat Kota Pematangsiantar. Sasaran visi Kota Pematangsiantar ini menunjukkan pentingnya distribusi ekonomi yang merata serta peningkatan daya beli masyarakat secara umum. Peningkatan pendapatan per kapita diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antara kelompok masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Peningkatan pendapatan per kapita tidak hanya memandang peningkatan pendapatans secara nominal tetapi juga mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, fokusnya adalah pada peningkatan pendapatan yang tidak hanya bersifat sementara tetapi juga memberikan dampak positif jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan akses terhadap pendidikan dan keterampilan, serta penguatan sektor ekonomi yang berdaya saing, sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan mereka secara berkelanjutan. Peningkatan pendapatan per kapita juga memiliki dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya. Hal ini dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta mengurangi tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial-ekonomi. Peningkatan pendapatan per kapita juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan konsumsi domestik dan investasi. Semakin tinggi pendapatan per individu, semakin besar juga daya beli mereka, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya. Sasaran visi pembangunan "pendapatan per kapita penduduk meningkat" merupakan landasan penting dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan meningkatkan pendapatan per kapita, tidak hanya menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih luas, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, implementasi sasaran visi ini membutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat.

## 2. Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan

Sasaran visi pembangunan menurunnya tingkat kemiskinan dan ketimpangan menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata dalam hal distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya. Fokus utamanya adalah pada pengurangan kemiskinan ekstrem serta pengurangan kesenjangan sosial ekonomi antara berbagai kelompok masyarakat. Sasaran visi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya dan peluang, tanpa terkecuali. Penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan merupakan Langkah krusial dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dengan mengurangi jumlah individu yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, masyarakat dapat mencapai stabilitas ekonomi yang lebih kokoh dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi juga penting untuk memperkuat kohesi sosial dan stabilitas politik, yang merupakan elemen kunci dalam pembangunan yang berkelanjutan. Sasaran visi ini tidak hanya melibatkan upaya untuk mengurangi kemiskinan secara langsung melalui program-program perlindungan sosial dan kesejahteraan, tetapi juga melibatkan upaya untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan, seperti akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, serta layanan kesehatan yang terjangkau.

Dengan pendekatan yang holistik, sasaran visi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan seluruh anggota masyarakat secara menyeluruh. Pengurangan ketimpangan juga memiliki implikasi positif yang luas, termasuk peningkatan stabilitas ekonomi dan sosial, peningkatan akses terhadap peluang ekonomi, serta peningkatan keadilan dan keberlanjutan. Ketika kesenjangan ekonomi mengecil, masyarakat memiliki lebih sedikit hambatan untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan mobilitas sosial dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Sasaran visi pembangunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan berkurang merupakan aspek penting dalam upaya mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan, masyarakat dapat mencapai stabilitas ekonomi dan sosial yang lebih besar, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, implementasi sasaran visi ini membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya menciptakan kesempatan yang sama bagi semua individu dan kelompok.

## 3. Peran dan posisi kepemimpinan kepala daerah di tingkat nasional dan global meningkat

Meningkatnya peran dan posisi kepemimpinan kepala daerah di tingkat nasional dan global meningkat menandakan pentingnya memperkuat peran serta posisi kepala daerah dalam menghadapi tantangan dan peluang di tingkat nasional dan global.

Sasaran ini mencerminkan pengakuan akan peran penting kepala daerah sebagai agen perubahan dalam pembangunan, baik dalam konteks domestik maupun internasional. Penguatan peran dan posisi kepemimpinan kepala daerah adalah langkah strategis dalam meningkatkan perekonomian dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan sasaran visi ini diharapkan memberikan kepercayaan dan dukungan yang lebih besar kepada kepala daerah, untuk mencapai transformasi pembangunan Kota Pematangsiantar melalui dialog dengan para *multi-stakeholder* akan mendorong peningkatan kerjasama dan investasi kedaerah sehingga daya saing Kota Pematangsiantar semakin meningkat dan masyarakat yang sejahtera.

#### 4. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia

Sasaran visi pembangunan meningkatnya daya saing sumber daya manusia menekankan pada pentingnya memperkuat kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi tantangan global. Sasaran visi ini mencerminkan pengakuan akan peran kunci SDM dalam memperkuat daya saing suatu bangsa dalam konteks ekonomi, teknologi, dan inovasi. Peningkatan daya saing sumber daya manusia melibatkan berbagai aspek, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan kerja, akses terhadap kesehatan, serta pengembangan keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Dengan memperkuat SDM secara holistik, masyarakat dapat lebih siap menghadapi persaingan global dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Meningkatkan daya saing SDM juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. SDM yang terampil, terdidik, dan terlatih memiliki potensi untuk menciptakan inovasi, mendorong produktivitas, dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi. Hal ini memberikan dampak positif dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat ketahanan ekonomi suatu negara. Selain itu, peningkatan daya saing SDM juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi. Dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan pelatihan kerja yang berkualitas, masyarakat dapat meningkatkan mobilitas sosial dan memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam konteks global, meningkatnya daya saing SDM juga dapat meningkatkan reputasi dan citra suatu bangsa di mata dunia. SDM yang terampil dan terlatih dapat menjadi aset penting dalam memperkuat kerja sama internasional, menarik investasi asing, serta mempromosikan pertukaran pengetahuan dan teknologi antarnegara. Sasaran visi pembangunan daya saing sumber daya manusia meningkat merupakan landasan penting dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan memperkuat kualitas dan kapasitas SDM, masyarakat dapat lebih siap menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan terkoordinasi dari pemerintah,

sektor swasta, dan masyarakat dalam mendukung sasaran visi ini untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

#### 5. Menurunnya emisi gas rumah kaca

Sasaran visi pembangunan menurunnya emisi rumah kaca menekankan pentingnya untuk mengatasi perubahan iklim global. Misi ini mencerminkan kesadaran akan dampak negatif yang dihasilkan dari aktivitas manusia terhadap lingkungan, serta komitmen untuk menjaga keberlanjutan planet ini bagi generasi mendatang. Penurunan emisi rumah kaca merupakan langkah krusial dalam mengurangi dampak negative perubahan iklim, seperti kenaikan suhu global, cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan air laut. Dengan mengurangi emisi tersebut, diharapkan dapat memperlambat laju perubahan iklim dan melindungi ekosistem bumi serta kehidupan manusia. Sasaran visi ini melibatkan berbagai sektor, termasuk industri, transportasi, energi, pertanian, dan pengelolaan limbah. Upaya-upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca meliputi penggunaan energi terbarukan, penghematan energi, pengelolaan limbah yang efisien, penanaman kembali hutan, serta pengembangan teknologi bersih. Pentingnya penurunan emisi rumah kaca juga terkait dengan komitmen global, seperti yang tercantum dalam Persetujuan Paris. Negara-negara di seluruh dunia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengatasi perubahan iklim global. Selain memberikan manfaat lingkungan, penurunan emisi rumah kaca juga dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Penerapan teknologi hijau dan penggunaan energi terbarukan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kemandirian energi suatu negara, serta meningkatkan kualitas udara dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Sasaran visi pembangunan emisi rumah kaca menurun merupakan langkah penting dalam menjaga keberlanjutan planet ini dan melindungi lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Dengan mengurangi emisi tersebut, masyarakat dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi perubahan iklim global dan menciptakan dunia yang lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk mencapai tujuan ini demi kebaikan bersama. Adapun penyelarasan sasaran visi RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Sumatera Utara dan RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

Tabel 4.2  
Penyelarasan Sasaran Visi, Indikator dan Target

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD PROVINSI SUMATERA UTARA 2025-2045				RPJPD KOTA PEMATANGSIANTAR 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	a. GNI Per Kapita (US\$)	5.500-5.520	30.300	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	64.05	444.70	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per Kapita (ADHB) Rp.Juta	63,72	200
		b. Kontribusi PDB Maritim (%)	8.1	15.0		b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia	12.79	17.79		b. Kontribusi PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	27.42	33.06
		c. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0		c. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	18.87-19.54	31.50-32.00		c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	20,01	25,82
2	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	7.0	0.5 -0.8	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	5.96-5.57	0.62- 0.23	Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	6.1	2.5
		b. Rasio Gini (indeks)	0.379-0.382	0,290-0.320		b. Rasio gini (Indeks)	0.328-0.318	0.266-0.277		b. Rasio Gini (Indeks)	0.310	0.240
		c. Kontribusi PDRB KT! (%)	21.4	28.5		c. Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota (%)	1.44-1.52	1.62-1.67		c. Kontribusi PDRB Kota (%)	1.56	1.7
		-	-	-		d. Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.37-4.90	4.59-5.53		d. Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.22-4-54	7.08
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	<i>Global Power Index</i> (peringkat)	34	15 besar	Peran dan posisi di tingkat nasional dan global meningkat	a. Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	39,25-41,25	79.01-89.01	Peran dan Posisi Kepemimpinan Kepala Daerah di Tingkat Nasional dan Global Meningkat	a. Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	35	72
						b. Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	4.16	4.86		b. Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3.78	4.38
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	0.56	0.73	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	a. Indeks Modal Manusia (Indeks)	0.54-0.57	0,70-0.77	Meningkatnya daya saing Sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	81	90
						b. Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	81.19-83.40	88.41-91.41		-	-	-
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38.6	93.5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	a. Penurunan emisi GRK (ton CO2eq)	87.238,52	684.304,39	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca	a. Penurunan Emisi GRK (ton CO2eq)	1	50
		b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (indeks)	76.49	83.00		b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (indeks)	71.59	74.99		b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (indeks)	71.59	75.03

Sumber: RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 20225-2045

## 4.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi sampai dengan Tahun 2045. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Perumusan misi RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 3  
Perumusan Misi RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045

No	Masalah Utama	Pernyataan Visi	Masalah Pokok	Misi	Penjelasan Misi
1	<i>Kulaitas infrastruktur Kota dan permukiman</i>	<i>Kota Pematangsiantar Indah, Maju dan Berkelanjutan (IDAMAN)</i>	<p>Kualitas dan kuantitas infrastruktur kota belum optimal.</p> <p>Penanganan kawasan kumuh dan psu pemukiman belum optimal.</p> <p>Pengelolaan transportasi belum optimal.</p>	<i>Misi 1 : Mewujudkan Kota Layak Huni melalui Transformasi Infrastruktur</i>	<i>Transformasi Infrastruktur diartikan pembangunan kota Pematangsiantar yang terpadu, dilakukan melalui pendekatan kewilayahan dengan berpedoman pada penataan ruang serta pemenuhan layanan sarana dan sarana transportasi yang terintegrasi</i>
2	<i>Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat</i>		<p>Kualitas pendidikan belum optimal.</p> <p>Kualitas kesehatan masyarakat belum optimal.</p> <p>Standart pelayanan minimal bid sosial belum optimal.</p> <p>Pemberdayaan perempuan dan anak belum optimal.</p>	<p><i>Misi 2 : Mewujudkan Transformasi Sosial untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing, Unggul dan Berkarakter</i></p> <p><i>Misi 7: Mewujudkan Pelestarian Sosial Budaya</i></p>	<p><i>Transformasi sosial yang berdaya saing diartikan sebagai masyarakat yang sehat lahir dan batin, berilmu dan terampil, disiplin, ekonomi memadai dan berakhlak mulia dan sebagai masyarakat yang memiliki kemampuan untuk bersaing/berkompetisi untuk dapat tumbuh dan berkembang secara baik.</i></p> <p><i>Pelestarian budaya diartikan sebagai pelestarian seni dan budaya lokal yang mendukung pengembangan aktivitas pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat</i></p>
3	<i>Nilai tambah produk unggulan</i>		<p>Pertumbuhan ekonomi cenderung menurun.</p> <p>Pemerataan ekonomi belum optimal</p>	<i>Misi 3 : Mewujudkan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif</i>	<i>Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diartikan sebagai ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan,</i>

No	Masalah Utama	Pernyataan Visi	Masalah Pokok	Misi	Penjelasan Misi
					<i>meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.</i>
4	<i>Tata Kelola Pemerintahan</i>		<p>Tata kelola pemerintahan kurang efektif dan efisien.</p> <p>Pengelolaan keuangan belum akuntabel.</p> <p>Pelayanan publik belum optimal.</p> <p>Aparatur pemerintah kurang profesional.</p> <p>Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan belum optimal.</p>	<p><i>Misi 4 : Mewujudkan Transformasi tata kelola Pemerintahan yang profesional, berbasis digital untuk mendukung pelayanan prima</i></p> <p><i>Misi 6 : Mewujudkan Masyarakat Demokratis dan Penciptaan Lingkungan yang Aman</i></p> <p><i>Misi 8 : Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan</i></p>	<p><i>Tata kelola pemerintahan yang profesional, diartikan sebagai pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, berhasil mencapai tujuan pembangunan, memiliki kemampuan dan keunggulan untuk kompetensi di segala bidang, serta berbudaya melayani.</i></p> <p><i>Masyarakat Demokratis dan Penciptaan Lingkungan yang Aman diartikan untuk mewujudkan masyarakat yang berwawasan kebangsaan, demokratis dan peningkatan ketentraman dan ketertiban pada masyarakat</i></p> <p><i>Kesinambungan pembangunan diwujudkan melalui sinkronisasi substansi dan periodisasi perencanaan pembangunan antara Kota Pematangsiantar dengan Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional. Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perwujudan RPJP Provinsi Sumatera Utara dan RPJP Nasional</i></p>

No	Masalah Utama	Pernyataan Visi	Masalah Pokok	Misi	Penjelasan Misi
5	Lingkungan hidup		Manajemen pengelolaan lingkungan belum optimal.  Mitigasi bencana belum optimal.	<i>Misi 5 : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan</i>	<i>Lingkungan Hidup yang berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup untuk menjamin kemampuan , kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan</i>

Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045

Dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan Kota Pematangsiantar untuk periode Tahun 2025-2045 telah selaras dengan setiap misi (agenda) pembangunan RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara dalam setiap pentahapan pembangunan transformasi.

Kota Pematangsiantar memiliki sumber daya masyarakat yang sehat lahir dan batin, berilmu dan terampil, disiplin yang mendukung perwujudan misi pertama transformasi sosial, untuk misi kedua transformasi ekonomi secara inklusif Kota Pematangsiantar akan menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah Untuk misi ketiga Transformasi tata kelola, Kota Pematangsiantar mendukung dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dan berbudaya melayani. Pada misi keempat Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, Kota Pematangsiantar mendukung untuk menegakkan kepastian hukum dan kehidupan yang demokratis dengan membangun wawasan kebangsaan masyarakat yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, dan terus menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, misi Kelima Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, Kota Pematangsiantar akan pelestarian seni dan budaya lokal yang mendukung pengembangan aktivitas pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat, dalam mendukung misi keenam Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan dan misi ketujuh Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, pembangunan infrastruktur Kota Pematangsiantar akan dilakukan secara terpadu melalui pendekatan kewilayahan yang sesuai penataan ruang serta pemenuhan layanan sarana dan sarana transportasi yang terintegrasi serta berwawasan lingkungan dan terakhir pada misi ke delapan Kestinambungan Pembangunan, Kota Pematangsiantar berkomitmen untuk mengawal pencapaian misi yang dilaksanakan melalui sinkronisasi substansi dan periodisasi perencanaan pembangunan antara dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Berikut ditampilkan penyelarasan misi RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera dan RPJPD Kota Pematangsiantar.

Tabel 4. 4  
Penyelarasan Misi RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Sumatera Utara,  
RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045

No.	RPJP Nasional	RPJPD Provinsi Sumatera Utara	RPJPD Kota Pematangsiantar
<b>TRANSFORMASI INDONESIA</b>			
1	Misi 1; Transformasi Sosial	Misi 1; Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki kesehatan prima, pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan sejahtera	Misi 2 : Mewujudkan Transformasi Sosial untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing, Unggul dan Berkarakter
2	Misi 2: Transformasi Ekonomi	Misi 2: Mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global serta perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Misi 3 : Mewujudkan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif
3	Misi 3: Transformasi Tata Kelola	Misi 3; Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan pelayanan publik yang berkualitas dan prima	Misi 4; Mewujudkan Transformasi tata kelola Pemerintahan yang profesional, berbasis digital untuk mendukung pelayanan prima
<b>LANDASAN TRANSFORMASI</b>			
4	Misi 4: Supremasi hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Misi 4; Mewujudkan masyarakat demokratis dengan penciptaan lingkungan aman dan stabilitas ekonomi makro	Misi 6: Mewujudkan Masyarakat Demokratis dan Penciptaan Lingkungan yang Aman
5	Misi 5: Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Misi 5; Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi dengan penciptaan ketangguhan individu, keluarga, komunitas masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan	Misi 7; Mewujudkan Pelestarian Sosial Budaya
<b>KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI</b>			
6	Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Misi 6; Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan adil berbasis karakteristik wilayah	Misi 1: Mewujudkan Kota Layak Huni melalui Transformasi Infrastruktur
7	Misi 7: Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Misi 7; Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Misi 5: Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
8	Misi 8: Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan	Misi 8; Mewujudkan kesinambungan pembangunan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan, peningkatan akuntabilitas pemerintah, dan pengembangan pembiayaan inovatif	Misi 8: Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan

Sumber: RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045

## **BAB V**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH**

#### **5.1 Arah Kebijakan**

Visi dan Misi RPJPD Kota Pematangsiantar dalam periode 20 tahun diterjemahkan dalam arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok. Arah kebijakan pembangunan RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045 diturunkan ke dalam 4 tahap berdasarkan periode jangka menengah dengan tema setiap periode yaitu:

1. Tahap I Periode 2025-2029 yang merupakan Tahapan Penguatan Transformasi;
2. Tahap II Periode 2030-2034 yang merupakan Tahapan Akselerasi Transformasi;
3. Tahap III Periode 2035-2039 yang merupakan Tahapan Ekspansi dan Transformasi Digital;
4. Tahap IV Periode 2040-2045 yang merupakan Tahapan Perwujudan Kota Pematangsiantar Indah Maju dan Berkelanjutan.

Arah kebijakan setiap periode dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut yang merupakan penterjemahan untuk arah kebijakan pembangunan 5 tahunan Kota Pematangsiantar.

##### **5.1.1 Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029) Tahapan Penguatan Transformasi**

Arah kebijakan pembangunan pada 5 tahun periode pertama RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kota Layak Huni melalui Transformasi Infrastruktur; Pada tahapan ini diarahkan untuk dilakukan penguatan infrastruktur dasar, konektivitas kota (sarana dan prasarana): seperti jaringan jalan, jembatan, drainase, sanitasi, irigasi dan transportasi, pengentasan kawasan kumuh, sarana dan prasarana umum perumahan, penyelesaian peraturan daerah tentang RTRW dan RDTR Kota Pematangsiantar serta mendukung transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola pemerintahan .
2. Mewujudkan Transformasi Sosial untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing, Unggul dan Berkarakter; Pada tahapan ini diarahkan untuk penguatan fondasi yang kuat bagi perubahan sosial di masyarakat dengan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar dibidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang adaptif, sehingga menciptakan sumberdaya manusia yang berdaya saing, unggul dan berkarakter
3. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif; Pada tahapan ini diarahkan untuk penguatan perekonomian daerah sesuai dengan karakteristik daerah Kota Pematangsiantar seperti; Penguatan ekonomi lokal melalui digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penguatan koperasi sebagai lembaga keuangan mikro, pembangunan sarana dan prasarana Pariwisata, penguatan kompetensi dan ketrampilan tenaga kerja dan didukung penguatan iklim investasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan Transformasi tata kelola Pemerintahan yang profesional, berbasis digital untuk mendukung pelayanan prima; Pada tahapan ini diarahkan untuk

- penguatan kualitas ASN, penguatan regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan penerapan riset dan inovasi
5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan: Pada tahapan ini diarahkan untuk penguatan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki Kota Pematangsiantar dengan menjaga kualitas air, udara dan tutupan lahan, pengelolaan sampah, penyusunan regulasi tentang lingkungan, meningkatkan partisipasi masyarakat menjaga lingkungan serta mitigasi bencana
  6. Mewujudkan Masyarakat Demokratis dan Penciptaan Lingkungan yang Aman: Pada tahapan ini diarahkan untuk penguatan literasi demokrasi dan partisipasi masyarakat dengan penguatan kerukunan hidup bberagama, dengan hidup bertoleransi saling tolong menolong, penguatan penegakan hukum
  7. Mewujudkan Pelestarian Sosial Budaya; Pada tahapan ini diarahkan untuk penguatan pelestarian budaya dan tradisi lokal daerah Simalungun, penggunaan kurikulum Pendidikan bahasa daerah Simalungun, pagelaran budaya, pemberdayaan komunitas lokal serta melakukan dialog budaya antar masyarakat
  8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan; Pada tahapan ini diarahkan untuk penguatan sinkronisasi perencanaan pembangunan,, penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko, untuk memperkuat aspek pembangunan berkelanjutan.

#### **5.1.2 Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034) Tahapan Akselerasi Transformasi**

Arah kebijakan pembangunan pada 5 tahun periode kedua RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kota Layak Huni melalui Transformasi Infrastruktur; Pada tahapan ini diarahkan untuk masuk dalam tahapan percepatan pembangunan infrastruktur kota, implementasi pembangunan kota berdasarkan RTRW dan RDTR, pengembangan transportasi massal yang ramah lingkungan
2. Mewujudkan Transformasi Sosial untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing, Unggul dan Berkarakter; Pada tahapan ini diarahkan untuk percepatan pemenuhan fasilitas pelayanan dasar dibidang kesehatan, pendidikan dan pemenuhan perlindungan sosial
3. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif; Pada tahapan ini diarahkan untuk percepatan pembangunan perekonomian daerah melalui diversifikasi produk UMKM, pemasaran produk secara digital
4. Mewujudkan Transformasi tata kelola Pemerintahan yang profesional, berbasis digital untuk mendukung pelayanan prima; Pada tahapan ini diarahkan untuk percepatan peningkatan kualitas ASN, peningkatann digitalisasi pelayanan publik, serta peningkatan penerapan riset dan inovasi
5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan: Pada tahapan ini diarahkan untuk percepatan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki Kota Pematangsiantar dengan menjaga kualitas air, udara dan tutupan lahan, pengelolaan sampahmelalui pembangunan Pembangunan TPST/TPS3R, implementasi regulasi tentang

lingkungan, meningkatkan partisipasi masyarakat menjaga lingkungan serta mitigasi bencana

6. Mewujudkan Masyarakat Demokratis dan Penciptaan Lingkungan yang Aman: Pada tahapan ini diarahkan untuk percepatan literasi demokrasi dan partisipasi masyarakat dengan penguatan kerukunan hidup beragama, dengan hidup bertoleransi saling tolong menolong, penguatan penegakan hukum
7. Mewujudkan Pelestarian Sosial Budaya; Pada tahapan ini diarahkan untuk percepatan pelestarian budaya dan tradisi lokal daerah Simalungun, penggunaan kurikulum Pendidikan bahasa daerah Simalungun,, pagelaran budaya, pemberdayaan komunitas lokal serta melakukan dialog budaya antar masyarakat
8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan; Pada tahapan ini diarahkan untuk penguatan sinkronisasi perencanaan pembangunan, penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko, untuk memperkuat aspek pembangunan berkelanjutan.

### **5.1.3 Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039) Tahapan Ekspansi dan Transformasi Digital**

Arah kebijakan pembangunan pada 5 tahun periode ketiga RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kota Layak Huni melalui Transformasi Infrastruktur; Pada tahapan ini diarahkan untuk masuk dalam tahapan pemantapan pembangunan infrastruktur kota
2. Mewujudkan Transformasi Sosial untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing, Unggul dan Berkarakter; Pada tahapan ini diarahkan untuk pemantapan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar dibidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang adaptif
3. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif; Pada tahapan ini diarahkan untuk pemantapan pembangunan perekonomian daerah
4. Mewujudkan Transformasi tata kelola Pemerintahan yang profesional, berbasis digital untuk mendukung pelayanan prima; Pada tahapan ini diarahkan untuk pemantapan peningkatan kualitas ASN, peningkatann digitalisasi pelayanan publik, serta peningkatan penerapan riset dan inovasi
5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan: Pada tahapan ini diarahkan untuk pemantapan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki Kota Pematangsiantar dengan menjaga kualitas air, udara dan tutupan lahan, pengelolaan sampah, penyusunan regulasi tentang lingkungan, meningkatkan partisipasi masyarakat menjaga lingkungan serta mitigasi bencana
6. Mewujudkan Masyarakat Demokratis dan Penciptaan Lingkungan yang Aman: Pada tahapan ini diarahkan untuk pemantapan literasi demokrasi dan partisipasi masyarakat dengan penguatan kerukunan hidup beragama, dengan hidup bertoleransi saling tolong menolong, penguatan penegakan hukum
7. Mewujudkan Pelestarian Sosial Budaya; Pada tahapan ini diarahkan untuk

- pemantapan pelestarian budaya dan tradisi lokal daerah Simalungun, penggunaan kurikulum Pendidikan bahasa daerah Simalungun,, pagelaran budaya, pemberdayaan komunitas lokal serta melakukan dialog budaya antar masyarakat
8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan; Pada tahapan ini diarahkan untuk pemantapan sinkronisasi perencanaan pembangunan,, penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko, untuk memperkuat aspek pembangunan berkelanjutan.

#### **5.1.4 Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045) Tahapan Perwujudan Kota Pematangsiantar Indah Maju dan Berkelanjutan**

Arah kebijakan pembangunan pada 5 tahun periode keempat RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kota Layak Huni melalui Transformasi Infrastruktur; Pada tahapan ini diarahkan untuk perwujudan Kota Pematangsiantar sebagai Kota yang layak hudi
2. Mewujudkan Transformasi Sosial untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing, Unggul dan Berkarakter; Pada tahapan ini diarahkan perwujudan sumber daya manusia yang yang berdaya saing, unggul dan berkarakter
3. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif; Pada tahapan ini diarahkan untuk perwujudan ekonomi daerah yang inklusif
4. Mewujudkan Transformasi tata kelola Pemerintahan yang profesional, berbasis digital untuk mendukung pelayanan prima; Pada tahapan ini diarahkan untuk perwujudan tata kelola pemerintahan yang profesional, berbasis digital untuk dan pelayanan prima
5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan: Pada tahapan ini diarahkan untuk perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan
6. Mewujudkan Masyarakat Demokratis dan Penciptaan Lingkungan yang Aman: Pada tahapan ini diarahkan untuk perwujudan masyarakat yang demokratis dan lingkungan yang aman
7. Mewujudkan Pelestarian Sosial Budaya; Pada tahapan ini diarahkan untuk perwujudan pelestarian sosial dan budaya
8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan; Pada tahapan ini diarahkan untuk perwujudan pembangunan Kota Pematangsiantar yang berkesinambungan.

#### **5.2 Sasaran Pokok**

Sasaran pokok RPJPD merupakan gambaran rangkaian kinerja dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD Tahun 2025-2045 yang pada setiap tahapan diukur dengan tingkat indikator dampak dan bersifat progresif. Sasaran pokok ini menjadi fokus dalam perumusan kebijakan dan tahapan pembangunan lima tahun selama periode tersebut. Sasaran pokok ini membantu pemerintah daerah Kota Pematangsiantar untuk fokus pada prioritas-prioritas kunci yang dianggap penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan

berkelanjutan di Kota Pematangsiantar. Indikator pembangunan tidak hanya menyediakan kerangka evaluasi yang objektif untuk mengukur kemajuan dalam berbagai sektor, tetapi juga memberikan landasan yang kuat bagi perencanaan yang strategis. Dengan memiliki indikator yang jelas dan terukur, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menetapkan tujuan yang konkret dan terukur untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Sasaran pokok tersebut dicapai melalui pelaksanaan 8 (delapan) misi yang disebut agenda transformasi, landasan transformasi, dan implementasi transformasi yang telah diuraikan sebelumnya dan pencapaiannya diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang terdiri dari 17 (tujuh belas) arah pembangunan daerah yang disebut dengan 17 Indonesia Emas (17 IE). Sasaran pokok dimaksud sebagai berikut:

Tabel 5.1  
Penyelarasan Misi Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan  
RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045

No.	Misi/Agenda RPJPN	Misi RPJPD Kota Pematangsiantar	Sasaran Pokok RPJPD Kota Pematangsiantar	Arah Pembangunan RPJPD Kota Pematangsiantar
1	Misi 1; Transformasi Sosial	Misi 2 : Mewujudkan Transformasi Sosial untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing, Unggul dan Berkarakter	Kesehatan untuk semua masyarakat Kota Pematangsiantar	1) IE1. Kesehatan Untuk Semua
			Pendidikan masyarakat Kota Pematangsiantar yang unggul dan merata	2) IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata
			Masyarakat Kota Pematangsiantar yang sejahtera dan terlindungi	3) IE3. Perlindungan sosial yang adaptif
2	Misi 2: Transformasi Ekonomi	Misi 3 : Mewujudkan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif	Masyarakat Kota Pematangsiantar yang produktif dan inklusif	4) IE4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
				5) IE5. Penerapan Ekonomi Hijau
				6) IE6. Transformasi Digital
				7) IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional
				8) IE8. Perkota sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
3	Misi 3: Transformasi Tata Kelola	Misi 4; Mewujudkan Transformasi tata kelola Pemerintahan yang profesional, berbasis digital untuk mendukung pelayanan prima	Pemerintahan Kota Pematangsiantar yang berintegritas dan Adaptif	9) IE.9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
4	Misi 4: Supremasi hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Misi 6: Mewujudkan Masyarakat Demokratis dan Penciptaan Lingkungan yang Aman	Masyarakat Kota Pematangsiantar yang demokratis dan aman	10) IE10. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Daerah
				11) IE11. Stabilitas Ekonomi Makro
				12) IE12. Kerjasama Daerah yang Tangguh
5	Misi 5: Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Misi 7; Mewujudkan Pelestarian Sosial Budaya	Masyarakat Kota Pematangsiantar yang berbudaya	13) IE13. Meningkatkan kehidupan berbudaya dan harmonis
				14) IE14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
6	Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Misi 1: Mewujudkan Kota Layak Huni melalui Transformasi Infrastruktur	Infrastruktur Kota Pematangsiantar yang nyaman	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur
				Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan PSU pemukiman
				Pengelolaan transportasi terintegrasi

No.	Misi/Agenda RPJPN	Misi RPJPD Kota Pematangsiantar	Sasaran Pokok RPJPD Kota Pematangsiantar	Arah Pembangunan RPJPD Kota Pematangsiantar
7	Misi 7: Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Misi 5: Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Masyarakat Kota Pematangsiantar yang peduli lingkungan	15) IE15. Lingkungan hidup yang berkualitas
				16) IE16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan 17) IE17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
8	Misi 8: Mewujudkan Kesisinambungan Pembangunan	Misi 8: Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan	Pembangunan Kota Pematangsiantar yang berkesinambungan	Pembangunan yang Berkesinambungan

### 5.2.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur

Perwujudan penataan kualitas dan kuantitas infrastruktur dilaksanakan melalui peningkatan infrastruktur kota secara berkelanjutan, selanjutnya akan terus dilakukan mediasi untuk mengembalikan luas wilayah Kota Pematangsiantar yang berkurang, melakukan percepatan penetapan RTRW dengan peraturan daerah, serta melakukan pengawasan terhadap implementasinya sehingga rencana struktur ruang kota sesuai dengan RTRW/RDTR. Untuk infrastruktur air minum akan dilakukan upaya peningkatan produksi sehingga seluruh rumah tangga mempunyai akses terhadap air minum. Setiap rumah tangga di Pematangsiantar ditargetkan dapat terlayani oleh prasarana air minum secara menyeluruh (100%) pada tahun 2045. Menjaga keseimbangan produksi dengan pertumbuhan permintaan air minum dan mengantisipasi penurunan produksi mata air dengan melakukan perencanaan pengolahan air sungai. Untuk sanitasi sampai dengan tahun 2023, rumah tangga berakses sanitasi aman hanya mencapai 5%, maka perlu disusun regulasi, pembangunan dan pelayanan limbah terjadwal bagi sanitasi aman sehingga persentasenya dapat meningkat secara signifikan.

Tabel 5.2  
Arah Pembangunan, Indikator dan Target  
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		2025	2045
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penguatan Pembangunan Infrastruktur kota yang berkualitas, merata dan mendukung investasi</li> <li>▪ Penguatan Implementasi RTRW dan pengembangan luas wilayah Kota Pematangsiantar</li> <li>▪ Penguatan Pemetaan pembangunan sanitasi aman dan Penyusunan Regulasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Percepatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kota yang modern</li> <li>▪ Percepatan regulasi pengelolaan air limbah domestik,</li> <li>▪ Percepatan Pemanfaatan lahan kota yang sesuai dengan peruntukannya</li> <li>▪ Penegakan RTRW</li> <li>▪ Percepatan Penanganan Kawasan Kumuh</li> <li>▪ Percepatan Pengawasan Penggunaan Lahan sesuai dengan tata ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemantapan sarana dan prasarana Infrastruktur Kota</li> <li>▪ Pemantapan Monitoring dan evaluasi sanitasi aman, digitalisasi RTRW</li> <li>▪ Pemantapan Pemanfaatan lahan kota,</li> <li>▪ Pemantapan Pengamanan Sumber Air Minum dan Pengentasan Kawasan Kumuh,</li> <li>▪ Pemantapan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan regulasi, pembangunan dan pelayanan limbah terjadwal secara digital bagi sanitasi aman.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perwujudan sarana dan prasarana infrastruktur kota yang berkualitas, merata dan mendukung investasi</li> <li>▪ Perwujudan implementasi RTRW</li> <li>▪ Perwujudan implemnatasi peraturan air limbah domestik,</li> <li>▪ Perwujudan pelayanan air minum rumah tangga</li> </ul>	Indeks Infrastruktur (%)	0,86	0,93
				Persentase rencana struktur ruang kota sesuai RTRW (%)	57	90
				Persentase layanan air minum aman (%)	86	90
				Rumah tangga berakses sanitasi aman (%)	7	90

### 5.2.2 Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan PSU pemukiman

Kesejahteraan masyarakat dalam bertempat tinggal diharapkan dapat meningkat seiring pemenuhan kebutuhan infrastruktur rumah tangga terpenuhi. Penanganan dan rehabilitasi permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni menjadi upaya dalam memberikan kualitas tempat hidup yang layak bagi seluruh masyarakat. Pada tahun 2045, ditargetkan sudah tidak ada lagi kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni di Kota Pematangsiantar. Pengentasan kawasan kumuh dilakukan secara terintegrasi dengan rumah tidak layak huni serta menjamin ketersediaan sarana dan prasarana umum di lingkungan permukiman. Pengendalian dan pengawasan pertumbuhan permukiman menjadi konsentrasi yang perlu diperhatikan melihat perkembangan jumlah penduduk yang pesat dapat mempengaruhi jumlah ketersediaan lahan permukiman juga semakin menipis.

Tabel 5.3  
Arah Pembangunan, Indikator dan Target  
Mewujudkan Penanganan Kawasan Kumuh dan PSU Pemukiman

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		2025	2045
<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKP), Peningkatan Produksi Air minum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percepatan pengentasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni yang terintegrasi disertai peningkatan pengawasan penggunaan lahan perumahan yang selaras dengan tata ruang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantapan pengentasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni terintegrasi disertai peningkatan pengawasan penggunaan lahan perumahan yang selaras dengan tata ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perwujudan Pengendalian dan pengawasan pertumbuhan kawasan permukiman.</li> </ul>	Luas permukiman kumuh (Ha)	153	133
				Persentase rumah layak huni.(%)	63	85
				Persentase ketersediaan PSU(%)	63	80

### 5.2.3 Pengelolaan transportasi terintegrasi

Transportasi yang terintegrasi diwujudkan melalui rencana pembangunan infrastruktur jalan dan sarana transportasi massal. Pengembangan kapasitas jalan ditargetkan dapat meningkatkan proporsi jalan dalam kondisi baik menjadi 100% pada tahun 2045 sehingga dapat meningkatkan kualitas keamanan dan keselamatan dalam berkendara. Sarana transportasi berbasis massal juga sepatutnya dapat dikembangkan secara menyeluruh di seluruh wilayah Pematangsiantar. Ketersediaan terminal dan stasiun sebagai hub-hub transportasi ditargetkan dapat menjadi solusi kemacetan di kawasan perkotaan dan mampu menjangkau seluruh wilayah.

Tabel 5.4  
Arah Pembangunan, Indikator dan Target  
Pengelolaan Transportasi

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		2025	2045
<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan perencanaan transportasi yang optimal dan terintegrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percepatan perencanaan, pengadaan lahan dan pengembangan sistem transportasi massal ramah lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantapan perencanaan, pengadaan lahan dan pengembangan sistem transportasi massal ramah lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perwujudan Integrasi transportasi perkotaan, dengan transportasi pedesaan, AKDP, AKAP dengan sistem transportasi massal.</li> </ul>	Persentase ketersediaan prasarana transportasi (%)	59	90

### 5.2.4 Kesehatan Untuk Semua (IE 1)

Sasaran pokok kesehatan untuk semua dilakukan melalui peningkatan upaya kesehatan promotif dan preventif, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, percepatan penurunan stunting, penurunan penyakit menular dan tidak menular, penguatan kesehatan mental masyarakat serta peningkatan kesejahteraan dan kompetensi tenaga kesehatan

Tabel 5.5  
Arah Pembangunan, Indikator dan Target  
Kesehatan Untuk Semua (IE 1)

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		2025	2045
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Deteksi Dini Penyakit.</li> <li>▪ Penguatan Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan</li> <li>▪ Penguatan Pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat</li> <li>▪ Penguatan Pengendalian penyakit menular dan tidak menular</li> <li>▪ Penguatan Pemenuhan akses jaminan Kesehatan bagi masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Percepatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Deteksi Dini Penyakit.</li> <li>▪ Percepatan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan</li> <li>▪ Percepatan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat</li> <li>▪ Percepatan ELiminasi penyakit menular dan tidak menular</li> <li>▪ Percepatan Pemenuhan akses jaminan Kesehatan bagi masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemantapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Deteksi Dini Penyakit.</li> <li>▪ Pemantapan sarana dan prasarana kesehatan</li> <li>▪ Pemantapan kebutuhan gizi masyarakat</li> <li>▪ Pemantapan eliminasi penyakit menular dan tidak</li> <li>▪ Percepatan Pemenuhan akses jaminan Kesehatan bagi masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perwujudan masyarakat Kota Pematangsiantar yang sehat.</li> <li>▪ Perwujudan sarana dan prasarana kesehatan yang baik</li> <li>▪ Perwujudan kebutuhan gizi masyarakat yang optimal</li> <li>▪ Perwujudan masyarakat yang tangguh terhadap penyakit menular dan tidak menular.</li> <li>▪ Perwujudan Percepatan Pemenuhan akses jaminan Kesehatan bagi masyarakat</li> </ul>	Usia Harapan Hidup (tahun)	75,05-75,35	79,95-80,05
				Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)/ (Tahun)	5	1
				Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	5,7	0
				Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90	100
				Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	100
				Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	99	100

### 5.2.5 Pendidikan Berkualitas yang Merata (IE 2)

Sasaran pokok pendidikan unggul dan merata dilakukan melalui percepatan wajib belajar, pemerataan dan peningkatan akses pendidikan usia dini dan dasar, peningkatan kesejahteraan, kualitas dan kompetensi tenaga pendidik, penurunan jumlah anak tidak sekolah dan putus sekolah serta peningkatan pendidikan karakter dan budi pekerti.

Tabel 5.6  
Arah Pembangunan, Indikator dan Target  
Pendidikan Berkualitas yang Merata (IE 2)

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		2025	2045
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Kurikulum dan pendidikan karakter.</li> <li>• Penguatan Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan</li> <li>• Penguatan Pemenuhan akses pendidikan bagi keluarga tidak mampu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan Kurikulum dan pendidikan karakter.</li> <li>• Percepatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan</li> <li>• Percepatan pemenuhan akses pendidikan bagi keluarga tidak mampu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan Kurikulum dan pendidikan karakter.</li> <li>• Pemantapan sarana dan prasarana pendidikan</li> <li>• Pemantapan akses pendidikan bagi keluarga tidak mampu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perwujudan masyarakat Kota Pematangsiantar yang unggul dan berdaya saing.</li> <li>• Perwujudan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas</li> <li>• Perwujudan pendidikan yang inklusif.</li> </ul>	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
				i) Literasi Membaca (%)	95,50	100
				ii) Numerasi (%)	92,97	97,77
				Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	11,9	13,3
Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,8	16,72				

### 5.2.6 Perlindungan sosial yang adaptif (IE 3)

Sasaran pokok perlindungan sosial dan adaptif dilakukan penurunan beban

pengeluaran masyarakat miskin, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas dan peningkatan ekonomi masyarakat miskin yang inklusif.

Tabel 5.7  
Arah Pembangunan, Indikator dan Target  
Perlindungan sosial yang adaptif (IE 3)

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		2025	2045
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan ekonomi masyarakat yang inklusif.</li> <li>• Penguatan Pemenuhan akses perlindungan sosial</li> <li>• Penguatan perlindungan Sosial bagi kelompok disabilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan penguatan ekonomi masyarakat yang inklusif</li> <li>• Percepatan pemenuhan akses perlindungan sosial</li> <li>• Percepatan peningkatan perlindungan sosial bagi kelompok disabilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan ekonomi masyarakat yang inklusif.</li> <li>• Pemantapan akses perlindungan sosial</li> <li>• Pemantapan perlindungan Sosial bagi kelompok disabilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perwujudan ekonomi masyarakat Kota Pematangsiantar yang sejahtera</li> <li>• Perwujudan akses perlindungan sosial</li> <li>• Perwujudan perlindungan sosial bagi kelompok disabilitas</li> </ul>	Tingkat Kemiskinan (%)	6,1	2,5
				Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	53-55,5	85,8-90,3
				Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	27,25-28,5	59,7-62,2

### 5.2.7 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi (IE 4)

Peningkatan pemanfaatan IPTEK, inovasi, dan peningkatan produktivitas ekonomi dilakukan melalui peningkatan produktivitas sektor jasa dan perdagangan; peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi;; pengembangan industri kepariwisataan dan ekonomi kreatif; pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal; dan peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja. Penguatan pemanfaatan iptek dan inovasi menjadi pendorong dan mempercepat produktivitas ekonomi di Kota Pematangsiantar. Kota Pematangsiantar yang merupakan pusat perdagangan dan jasa perlu didasarkan pada pengembangan industri kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang holistik juga didukung dengan peran UMKM dan koperasi yang menjadi penopang ekonomi. Peningkatan peran UMKM dan koperasi juga diarahkan pada penguatan kontribusi melalui kemitraan usaha, akselerasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Selain UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas tenaga kerja diharapkan juga dapat dibentuk menjadi tenaga kerja berkeahlian yang tangguh, adaptif, inovatif, kompeten, dan memiliki daya saing di pasar kerja lokal dan nasional.

Tabel 5.8  
Arah Pembangunan, Indikator dan Target  
Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi (IE 4)

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		2025	2045
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan IPTEK, Inovasi dan produktivitas ekonomi industri pengolahan (padat karya), ekonomi kreatif (Pariwisata/UMKM)</li> <li>• Penguatan kepariwisataan yang holistik (sarana dan prasarana, Atraksi, Paket Wisata)</li> <li>• Penguatan koperasi sebagai alternatif pembiayaan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan penggunaan IPTEK, Inovasi dan produktivitas ekonomi industri pengolahan (padat karya), ekonomi kreatif (Pariwisata/UMKM)</li> <li>• Percepatan Pengembangan industri pengolahan dan industri ekonomi kreatif</li> <li>• Percepatan Perluasan akses pembiayaan kredit usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan penggunaan IPTEK, Inovasi dan produktivitas ekonomi pada industri pengolahan (padat karya), ekonomi kreatif/pariwisata /UMKM</li> <li>• Pemantapan Peningkatan kapasitas, akses informasi UMKM dalam peningkatan produktivitas, pemasaran produk lewat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perwujudan produktivitas ekonomi daerah</li> </ul>	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	18,87-19,54	30,66-32,19
				Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum (%)	5,51-5,69	8,23-8,64
				Jumlah Tamu Asing Hotel Berbintang (orang)	132	2.212
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,55-6,52	5,30 -4,98
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,56-63,68	74,06-78,8
				Indeks Inovasi Daerah (predikat)	35 (Inovatif)	72 (sangat inovatif)

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		2025	2045
akses pembiayaan kredit bagi UMKM • Penguatan Pemetaan kebutuhan Pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan dan meningkatkan kesempatan kerja	• Percepatan kepariwisataan yang holistik • Percepatan Implementasi kebijakan untuk pembangunan ekonomi daerah	digital platform • Pemantapan kepariwisataan yang holistik • Pemantapan Peningkatan Kualitas Produk unggulan daerah.				

### 5.2.8 Penerapan Ekonomi Hijau (IE 5)

Transformasi ekonomi melalui penerapan ekonomi hijau di Kota Pematangsiantar juga didukung oleh Pengembangan Lapangan Usaha sektor ekonomi unggulan yang ramah lingkungan, melalui produktivitas perdagangan dan jasa sektor potensial lainnya agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tabel 5.9  
Arah Pembangunan, Indikator dan Target  
Penerapan Ekonomi Hijau (IE 5)

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		2025	2045
• Penguatan lapangan usaha industri dan diversifikasi produk serta peningkatan nilai tambah	• Percepatan penguatan kontribusi lapangan usaha industri dan diversifikasi produk dan nilai tambah	• Pemantapan kontribusi lapangan usaha industri dan diversifikasi produk dan nilai tambah	• Perwujudan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	Kontribusi PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	27,42	33,06

### 5.2.9 Transformasi Digital (IE 6)

Peningkatan digital Kota Pematangsiantar kedepan melalui peningkatan pemanfaatan jaringan internet oleh masyarakat secara menyeluruh. Untuk mencapai hal tersebut harus dilakukan peningkatan kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya.

Tabel 5.10  
Arah Pembangunan, Indikator dan Target  
Transformasi Digital (IE 6)

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		2025	2045
• Penguatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam penggunaan informasi dan teknologi digital	• Percepatan Peningkatan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan digitalisasi dalam aspek perekonomian masyarakat	• Pemantapan masyarakat yang melek digital dalam seluruh aspek kehidupan	• Perwujudan masyarakat yang melek digital dalam seluruh aspek kehidupan	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	51,98	77,88

### 5.2.10 Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional (IE 7)

Integrasi ekonomi domestik dan regional akan mendorong peningkatan produktivitas perekonomian daerah yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dunia usaha. Penguatan integrasi ekonomi dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama ekonomi, integrasi konektivitas antar daerah/kawasan pertumbuhan ekonomi, membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru baik di sector industri, pariwisata, pertanian dan sektor unggulan lainnya, memaksimalkan daya saing pusat pertumbuhan ekonomi

yang sudah serta mendorong kebijakan daerah yang ramah investasi.

Tabel 5.11  
Arah Pembangunan, Indikator dan Target  
Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional (IE 7)

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		2025	2045
<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan, integrasi ekonomi konektivitas antar daerah/kawasan pertumbuhan ekonomi</li> <li>Penguatan penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru dibidang industri/pariwista</li> <li>Penguatan daya saing pusat pertumbuhan ekonomi yang sudah ada</li> <li>Penguatan landasan kebijakan dan sistem investasi daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percepatan integrasi ekonomi, konektivitas antar daerah/kawasan pertumbuhan ekonomi</li> <li>Percepatan penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru dibidang industri/pariwista</li> <li>Percepatan implementasi kebijakan dan sistem investasi daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantapan integrasi ekonomi, konektivitas antar daerah/kawasan pertumbuhan ekonomi</li> <li>Pemantapan penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru dibidang industri/pariwista</li> <li>Pemantapan implementasi kebijakan dan sistem investasi daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perwujudan integrasi ekonomi/kerja sama dan peningkatan investasi daerah</li> </ul>	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	24-23	30
				Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	1,00-3,00	8,00-10,00

### 5.2.11 Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi (IE 8)

Dalam mewujudkan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan maka Pemerintah Kota Pematangsiantar perlu menyusun strategi Pemenuhan layanan dasar masyarakat miskin dengan arah kebijakan penyediaan tempat tinggal yang layak huni dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah dan meningkatkan sarana dan prasarana lapangan usaha unggulan serta lapangan usaha yang potensial.

Tabel 5.12  
Arah Pembangunan, Indikator dan Target  
Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi (IE 8)

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		2025	2045
<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan sarana dan prasarana sektor lapangan usaha</li> <li>Penguatan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni secara kolaboratif, terutama untuk kelompok MBR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percepatan pembangunan sarana dan prasarana sektor lapangan usaha</li> <li>Percepatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantapan pembangunan sarana dan prasarana sektor lapangan usaha</li> <li>Pemantapan penyediaan rumah layak huni melalui pemanfaatan teknologi dan implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perwujudan pertumbuhan ekonomi dari lapangan usaha potensial di Kota Pematangsiantar</li> <li>Perwujudan penyediaan rumah layak huni melalui pemanfaatan teknologi dan implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif</li> </ul>	Proporsi kontribusi PDRB Kota (%)	1,56	1,7
				Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau (%)	84,02	93,81

### 5.2.12 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif (IE 9)

Tata kelola pemerintahan merupakan proses formulasi dan implementasi peraturan melalui interaksi antara negara/pemerintah, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi. Atau secara singkat merupakan cara mengelola urusan-urusan publik. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dilakukan melalui penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja. Sehingga akuntabilitas kinerja pemerintah kota dapat dipantau dan dikendalikan mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja sampai dengan evaluasi kinerja. Hal-hal yang

terkait dengan tugas, pokok, dan fungsi (Tupoksi) harus disesuaikan dan dibuat pemahaman yang sama antara satu sama lain agar setiap pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Teknologi informasi juga perlu dimanfaatkan dalam mempermudah pekerjaan. Mewujudkan birokrasi kelas dunia dengan mentransformasikan prinsip-prinsip dan semangat wirausaha ke dalam sektor pelayanan publik (mewirauaskan birokrasi/reinventing government). Untuk mencapai transformasi tata kelola yang diagendakan dalam pembangunan Kota Pematangsiantar, dilakukan upaya transformatif berikut ; Perwujudan ASN produktif di instansi pemerintah daerah dan penguatan upaya pencegahan korupsi, Regulasi yang efektif, Digitalisasi pelayanan publik, Peningkatan penerapan riset dan inovasi

Tabel 5.13  
Arah Pembangunan, Indikator dan Target  
Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif (IE 9)

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		2025	2045
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kualitas ASN,</li> <li>• Penguatan Regulasi yang efektif,</li> <li>• Penguatan digitalisasi pelayanan publik serta peningkatan penerapan riset dan inovasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan Transformasi melalui kelembagaan kolaboratif, SDM ASN yang berkualitas, inovasi daerah yang unggul dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan Daya Saing melalui kelembagaan adaptif SDM ASN kompetitif, regulasi adaptif berbasis teknologi informasi, serta keterlibatan masyarakat secara mandiri dalam pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perwujudan Regulasi dan Tata Kelola yang baik dan dinamis serta adaptif dan penerapan layanan berbasis digital.</li> </ul>	Indeks Reformasi Hukum (indeks)	98	100
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (indeks)	3,187	4
				Indeks Pelayanan Publik (indeks)	3	5
				Survei Penilaian integritas (%)	74	100

### 5.2.13 Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Daerah (IE 10)

Untuk mencapai kehidupan masyarakat yang demokratis dengan penciptaan lingkungan aman dan stabilitas daerah, dilakukan upaya transformatif berikut: Peningkatan kualitas kebebasan masyarakat untuk berdemokrasi; Penguatan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat; Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan daerah serta pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan; Peningkatan sinergitas antar Lembaga keamanan, penegak hukum, dan kelompok masyarakat, Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. (Sasaran pokok IE 10 merupakan hasil dari penyesuaian sasaran nasional “Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh dan Demokrasi Substansial” dengan kondisi daerah Kota Pematangsiantar).

Tabel 5.14  
Arah Pembangunan, Indikator dan Target  
Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Daerah (IE 10\*)

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		2025	2045
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penguatan keamanan dan ketertiban wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Percepatan penguatan keamanan dan ketertiban.</li> <li>▪ Percepatan penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemantapan keamanan dan ketertiban</li> <li>▪ Pemantapan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perwujudan Kota Pematangsiantar yang aman, tertib dan tentram dan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila.</li> </ul>	Indeks Kriminalitas (%)	0,16	0,11
				Ormas yang Dibina (Jumlah)	158	218

### 5.2.14 Stabilitas Ekonomi Makro (IE 11)

Stabilitas ekonomi adalah tidak adanya fluktuasi berlebihan dalam ekonomi makro. Perekonomian dengan pertumbuhan output yang cukup konstan dan inflasi yang rendah dan stabil akan dianggap stabil secara ekonomi, maka untuk menjaga Stabilitas Ekonomi Makro harus dilakukan penguatan pengelolaan pendapatan daerah, peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi, dan pengendalian inflasi daerah.

Tabel 5.15  
Arah Pembangunan, Indikator dan Target  
Stabilitas Ekonomi Makro (IE 11)

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		2025	2045
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan regulasi dan tata Kelola,</li> <li>▪ Penguatan intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah,</li> <li>▪ Penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah,</li> <li>▪ Penguatan kualitas belanja daerah,</li> <li>▪ Penguatan sinergi perencanaan dan penganggaran daerah</li> <li>▪ Penguatan pengelolaan keuangan daerah</li> <li>▪ Penguatan stabilisasi harga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Percepatan penguatan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan regulasi dan tata Kelola,</li> <li>▪ Percepatan intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah,</li> <li>▪ Percepatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah,</li> <li>▪ Percepatan kualitas belanja daerah,</li> <li>▪ Percepatan sinergi perencanaan dan penganggaran daerah</li> <li>▪ Percepatan pengelolaan keuangan daerah</li> <li>▪ Percepatan stabilisasi harga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemantapan kemandirian, Kapasitas fiskal daerah</li> <li>▪ Pemantapan intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah,</li> <li>▪ Pemantapan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah,</li> <li>▪ Pemantapan kualitas belanja daerah,</li> <li>▪ Pemantapan perencanaan dan penganggaran daerah</li> <li>▪ Penguatan pengelolaan keuangan daerah</li> <li>▪ Pemantapan stabilisasi harga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel</li> <li>▪ Perwujudan pengendalian inflasi</li> </ul>	PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)	15,5	19,99
				Pajak Daerah Terhadap PAD (%)	63,38	73,54
				Retribusi Daerah terhadap PAD (%)	8,25	9,6
				Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	51,99	70,98
				Tingkat Inflasi (%)	2,5+1	2,5+1

### 5.2.15 Kerjasama daerah yang tangguh (IE 12)

Kerjasama daerah merupakan usaha/kegiatan yang dilakukan pemerintahan daerah dalam mendukung peningkatan pelayanan dan pembangunan daerah. Kerjasama daerah diharapkan menjadi suatu jembatan yang dapat mengubah potensi konflik kepentingan antar daerah menjadi sebuah potensi pembangunan yang saling menguntungkan. Dengan cara membangun komunikasi/jaringan antar daerah untuk berbagi informasi, pengalaman, dan sumber daya guna sehingga terjalin kolaborasi antara dua atau lebih pemerintah daerah dengan komitmen membangun daerah masing-masing dan saling menguntungkan. (Sasaran pokok IE 12 merupakan hasil dari penyesuaian sasaran nasional “Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan” dengan kondisi daerah Kota Pematangsiantar).

Tabel 5.16  
Arah Pembangunan, Indikator dan Target  
Kerjasama Daerah yang Tangguh (IE 12)

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		2025	2045
• Penguatan kelembagaan dan kapasitas dalam	• Peningkatan Kerjasama Daerah dalam	• Pemantapan Kerjasama Daerah dalam	• Perwujudan Kerjasama Daerah	Jumlah kerjasama wajib yang	1	10

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		2025	2045
penyusunan regulasi tentang kerjasama daerah	rangka peningkatan ekonomi, sosial budaya dan Pelayanan Publik	rangka peningkatan kesejahteraan Masyarakat		dilaksanakan (jumlah)		

### 5.2.16 Meningkatkan kehidupan berbudaya dan harmonis (IE 13)

Dalam mewujudkan kehidupan berbudaya dan harmonis Pemerintah Kota Pematangsiantar akan melakukan penetapan objek cagar budaya, pelestarian cagar budaya, revitalisasi cagar budaya dan perlindungan cagar budaya sehingga Indeks Pembangunan Kebudayaan meningkat disamping itu terus membangun kehidupan masyarakat yang berbudaya dan harmonis. (Sasaran pokok IE 13 merupakan hasil dari penyesuaian sasaran nasional “Beragama Maslahat dan Bekebudayaan Maju” dengan kondisi daerah Kota Pematangsiantar)

Tabel 5.17  
Arah Pembangunan, Indikator dan Target  
Meningkatkan Kehidupan Berbudaya dan Harmonis (IE 13\*)

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		2025	2045
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan Pancasila</li> <li>▪ Penguatan Penetapan objek cagar budaya.</li> <li>▪ Penguatan dialog antar forum umat beragama dan masyarakat untuk aktif dalam pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Percepatan implementasi nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan Pancasila</li> <li>▪ Percepatan Pelestarian cagar budaya.</li> <li>▪ Percepatan dialog antar forum umat beragama dan masyarakat untuk aktif dalam pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemantapan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan Pancasila</li> <li>▪ Pemantapan Revitalisasi cagar budaya.</li> <li>▪ Pemantapan dialog antar forum umat beragama dan masyarakat untuk aktif dalam pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perwujudan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan harmonis</li> <li>▪ Perwujudan Kota Pematangsiantar sebagai kota toleran</li> </ul>	Persentase benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (%)	23,81	100
				Indeks Kota Toleran (indeks)	5,8	6,1

### 5.2.17 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif (IE 14)

Kesetaraan gender memiliki banyak pentingnya dalam masyarakat. Penting untuk mencapai kesetaraan gender bukan hanya untuk kepentingan perempuan, tetapi juga untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kesetaraan gender menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Kesetaraan gender adalah prinsip dasar hak asasi manusia yang menjamin bahwa setiap individu, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki hak yang sama dalam segala aspek kehidupan. Ini termasuk hak pendidikan, kesehatan, pekerjaan, partisipasi politik, dan perlindungan dari kekerasan. Dengan mencapai kesetaraan gender, masyarakat dapat mengoptimalkan potensi seluruh anggota masyarakat, termasuk perempuan, dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kesetaraan gender berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki. Ketika perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya, mereka dapat mencapai potensi sepenuhnya.

Tabel 5.18  
Arah Pembangunan, Indikator dan Target  
Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif (IE 14)

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		2025	2045
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penguatan partisipasi gender sebagai angkatan kerja,</li> <li>▪ Penguatan kelembagaan kesetaraan gender dan perlindungan anak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan kapasitas gender dalam pekerjaan dan keterwakilan dalam pemerintahan dan kelembagaan perlindungan anak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemantapan kapasitas gender dalam pekerjaan dan keterwakilan dalam pemerintahan dan kelembagaan perlindungan anak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perwujudan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak</li> </ul>	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (indeks)	65,19	97,75
				Indeks Ketimpangan Gender (indeks)	0,317	0,191

**5.2.18 Lingkungan Hidup yang Berkualitas (IE 15)**

Pembangunan kewilayahan dapat diwujudkan dengan pemaduan penataan ruang agar mampu menciptakan integrasi pusat-pusat kegiatan melalui pembangunan serta pengendalian tata ruang yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat secara adil melalui peningkatan kapasitas sarana prasarana yakni fasilitas sosial dan fasilitas umum secara merata. Selanjutnya lingkungan hidup yang berkualitas dapat diwujudkan melalui perubahan perilaku masyarakat ke arah gaya hidup yang berkelanjutan; peningkatan pengelolaan limbah (padat dan cair); peningkatan kualitas air dan udara; dan pengelolaan lahan secara berkelanjutan. Selain itu dilakukan pula perkuatan pembangunan infrastruktur untuk mencegah dan meminimalkan kerusakan alam serta penguatan efektivitas tata kelola kawasan konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Tabel 5.19  
Arah Pembangunan, Indikator dan Target  
Lingkungan hidup yang berkualitas (E15)

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		2025	2045
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Pelayanan Persampahan</li> <li>• Pengolahan sampah berbasis teknologi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan, Pengembangan pembangunan TPST/TPS3R dan pengelolaan sampah berbasis teknologi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan kualitas air, udara dan tutupan lahan, Peningkatan Kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat dengan liam pilar STBM, Pemantapan pembangunan TPST/TPS3R dan peningkatan pengelolaan sampah berbasis teknologi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perwujudan kualitas air, udara dan tutupan lahan, Peningkatan Kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat dengan liam pilar STBM, Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir berbasis Lingkungan dan Edukasi berbasis teknologi</li> </ul>	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (indeks)	0,562	0,75
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)	71,59	74,99
				Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	30	90
				Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	100	100

**5.2.19 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan (IE 16)**

Ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan diwujudkan melalui diversifikasi dan konservasi energi untuk meningkatkan ketahanan pasokan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, konservasi sumber daya air; dan transformasi sistem pangan menjadi berkelanjutan.

Tabel 5.20  
Arah Pembangunan, Indikator dan Target  
Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan (E 16)

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		2025	2045
• Penguatan	• Percepatan	• Pemantapan	• Perwujudan	Konsumsi listrik per kapita (kWh)	1.488	1.988

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		2025	2045
pengembangan ketenagalistrikan untuk pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan</li> <li>• Penguatan produktivitas pertanian dan regenerasi SDM pertanian</li> <li>• Penguatan pengelolaan sumber mata air, serta produksi dan pelayanan air minum aman</li> </ul>	pengembangan ketenagalistrikan untuk pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia <ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan</li> <li>• Percepatan pengelolaan produktivitas pertanian</li> <li>• Percepatan pengelolaan sumber mata air, serta produksi dan pelayanan air minum aman</li> </ul>	pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan pengelolaan produktivitas pertanian dan penerapan tata kelola sistem pangan nasional</li> <li>• Pemantapan pengelolaan sumber-sumber mata air,</li> <li>• Pemantapan Kualitas dan Kuantitas air minum aman, dan rehabilitasi jaringan pipa distribusi dan ketersediaan reservoir</li> </ul>	ketahanan energi air dan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (indeks)	88,69	97,69
				Kapasitas Air baku	786	950
				Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	99,22	100

### 5.2.20 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (IE 17)

Resiliensi terhadap perubahan iklim dilakukan dengan pembangunan rendah karbon untuk mencapai penurunan emisi GRK. Resiliensi dilakukan melalui adaptasi yang positif dan fleksibel, serta pertahanan kompetensi yang dimiliki dan untuk penanggulangan bencana didasarkan pada karakteristik daerah.

Tabel 5.21  
Arah Pembangunan, Indikator dan Target  
Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (IE17)

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		2025	2045
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Pengelolaan resiko bencana</li> <li>• Meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya</li> <li>• Penguatan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi,</li> <li>• Memadukan sistem masa tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan pengelolaan resiko bencana</li> <li>• Percepatan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya,</li> <li>• Percepatan pemerataan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan Pengembangan resiko bencana dan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini secara digitalisasi,</li> <li>• Pemantapan kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perwujudan pengelolaan resiko bencana</li> </ul>	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	167,2	130,2
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan implementasi Penurunan emisi gas rumah kaca.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perwujudan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam pembangunan</li> </ul>	Penurunan Angka Emisi GRK (CO2 Ekuivalen) (%)	1	50

### 5.2.21 Pembangunan yang Berkesinambungan

Pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan, hasil yang dicapai hari ini tidak terlepas dari apa yang dilakukan di masa lalu, maka untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan dapat dilakukan melalui komitmen bersama seluruh *stakeholders* Kota Pematangsiantar dimulai dari sinkronisasi perencanaan pembangunan, peningkatan akuntabilitas pemerintah, dan pengembangan yang pembiayaan inovatif.

Tabel 5.22  
Arah Pembangunan, Indikator dan Target  
Pembangunan yang Berkesinambungan

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		2025	2045
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penguatan Sinkronisasi perencanaan pembangunan,</li> <li>▪ Penguatan akuntabilitas pemerintah, dan penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko, untuk memperkuat aspek pembangunan berkelanjutan</li> <li>▪ Penguatan inovasi pembiayaan dan regulasi untuk investasi di sektor produktif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan perencanaan pembangunan,</li> <li>▪ Peningkatan akuntabilitas pemerintah, dan penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko, untuk memperkuat aspek pembangunan berkelanjutan</li> <li>▪ Peningkatan inovasi pembiayaan dan regulasi untuk investasi di sektor produktif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemantapan perencanaan pembangunan</li> <li>▪ Pemantapan peningkatan akuntabilitas pemerintah, dan penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko, untuk memperkuat aspek pembangunan berkelanjutan</li> <li>▪ Pemantapan inovasi pembiayaan dan regulasi untuk investasi di sektor produktif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perwujudan perencanaan pembangunan</li> <li>▪ Perwujudan akuntabilitas pemerintah, dan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko, untuk memperkuat aspek pembangunan berkelanjutan</li> <li>▪ Perwujudan inovasi pembiayaan dan regulasi untuk investasi di sektor produktif</li> </ul>	Indeks Reformasi Birokrasi	B	AA

### 5.3 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah

Arah kebijakan pembangunan wilayah Kota Pematangsiantar merupakan perwujudan dari tahapan implementasi transformasi infrastruktur untuk pembangunan jangka panjang yang akan memberikan dampak nyata terhadap pencapaian berbagai indikator dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pematangsiantar secara menyeluruh. Berdasarkan karakteristik wilayah Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara menetapkan Kota Pematangsiantar sebagai salah satu dari Pusat Kegiatan Wilayah sebagai hub logistik regional yang mendukung pengolahan hasil pertanian dan manufaktur ringan dengan pertimbangan volume lalu lintas tinggi dan berperan sebagai koridor transportasi utama disamping itu Kota Pematangsiantar juga sebagai pintu masuk Kawasan pariwisata nasional Danau Toba. Untuk konsep pengembangan wilayah kedepan adalah mewujudkan Kota Pematangsiantar sebagai kota yang hijau, yang nyaman untuk tinggal, berbisnis, berwisata dan belajar.

Tabel 5.23  
Arah Pengembangan Wilayah Pembangunan Kota Pematangsiantar

ARAH KEBIJAKAN			
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penguatan Kota Pematangsiantar menjadi kota hijau yang nyaman untuk tinggal, berbisnis, berwisata dan belajar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Percepatan Kota Pematangsiantar menjadi kota hijau yang nyaman untuk tinggal, berbisnis, berwisata dan belajar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemantapan implementasi Kota Pematangsiantar menjadi kota hijau yang nyaman untuk tinggal, berbisnis, berwisata dan belajar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perwujudan Kota Pematangsiantar menjadi kota hijau yang nyaman untuk tinggal, bisnis, wisata dan belajar.</li> </ul>

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kaidah Pelaksanaan**

RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah Kota Pematangsiantar dalam dua puluh tahun ke depan, juga dijadikan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kota Pematangsiantar untuk turut andil dalam pembangunan Kota Pematangsiantar selama kurun waktu dua puluh tahun ke depan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kaidah pelaksanaan akan didukung oleh sistem elektronik terpadu yang mengintegrasikan data dari perangkat daerah dan memanfaatkan data analitik untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, dan mekanisme perubahan. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman (*safeguarding*) untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJP Daerah 2025-2045 sesuai dengan cita-cita masyarakat Kota Pematangsiantar.

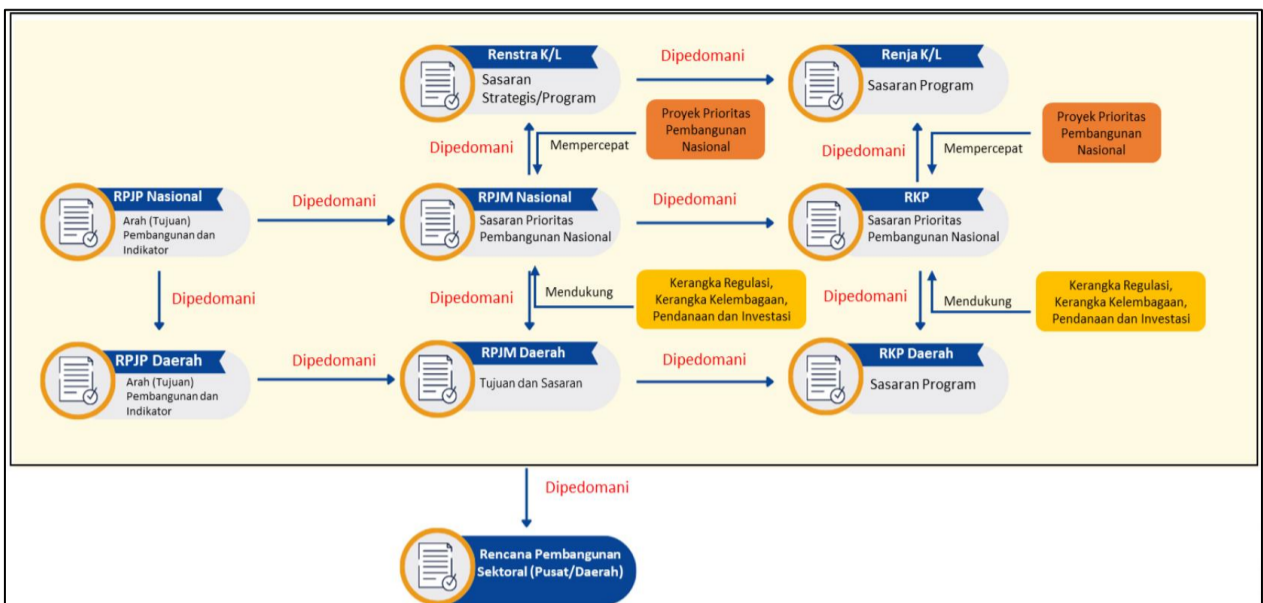
##### 6.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan. Pemerintah Kota Pematangsiantar akan mengadakan forum lintas sektoral secara tahunan untuk memastikan keselarasan antara RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang melibatkan Pemerintah, masyarakat dan swasta serta legislatif, untuk mengevaluasi prioritas pembangunan dan alokasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

##### 6.1.2. Keterkaitan RPJP Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pusat

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, yang memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah, menjadi pedoman bagi dokumen

perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat diperhatikan pada Gambar 6.1. berikut;



Gambar 6.1  
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan  
Sumber: Bappenas

1. Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan mengacu pada RPJP Nasional. Dan Periodisasi RPJPD Provinsi. Substansi misi (agenda) pembangunan berikut upaya transformatif prioritas menjadi bagian dari muatan utama RPJP Daerah yang disesuaikan dengan kondisi daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah bersifat jangka panjang sehingga memberikan arah pembangunan jangka panjang dan khusus memuat arah kebijakan yang mendukung Visi Indonesia Emas 2045. Hal-hal lain yang bersifat rencana strategis 5 tahunan daerah dimuat ke dalam RPJM Daerah.
3. Penyusunan RPJP Daerah seperti penentuan sasaran, arah kebijakan, dan indikator pembangunan mempedomani arah (tujuan) pembangunan dan indikator yang tercantum dalam RPJP Nasional dan RPJP Provinsi.
4. Tujuan dan sasaran pada RPJM Daerah Tingkat Provinsi berpedoman pada sasaran dan indikator prioritas pembangunan pada RPJM di tingkat Nasional. Selain itu RPJM Tingkat Provinsi menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RKP, serta sasaran dan indikator strategis/program pada rencana strategis organisasi perangkat daerah (OPD).
5. Sasaran dan indikator strategis/program Renstra OPD menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada rencana kerja organisasi perangkat daerah (Renja OPD), sedangkan tujuan dan sasaran pada RPJM Daerah menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun sasaran program RKP Daerah.
6. Sasaran program RKP Daerah berpedoman pada sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RKP. RKP Daerah juga menjadi pedoman dalam

menyusun sasaran dan indikator program Renja OPD. Indikator prioritas pembangunan daerah dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD yang pada gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja OPD.

7. Dokumen RPJPD menjadi pedoman visi, misi, dan program bagi pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah.
8. Pencapaian sasaran pembangunan daerah juga harus didukung dengan kebijakan kelembagaan, regulasi, serta pendanaan dan investasi. Sebagai upaya mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah juga ditentukan sasaran program pada RPJM Daerah dan RKP. Sasaran program daerah tersebut dilengkapi dengan ukuran keberhasilan yang mendukung tercapainya sasaran program pembangunan daerah.

#### 6.1.3. Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJP perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun nonpemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, pemerintah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari TKD (Transfer ke Daerah), Pendapatan Asli Daerah (PAD), KPBU dan Non-APBN/APBD untuk penganggaran pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

#### 6.1.4. Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti (*evidence-based planning*). Pengendalian RPJP Daerah dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan daerah terbagi menjadi dua bagian.

##### 1. Pengendalian perencanaan.

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain sasaran program pembangunan daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun

nonpemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

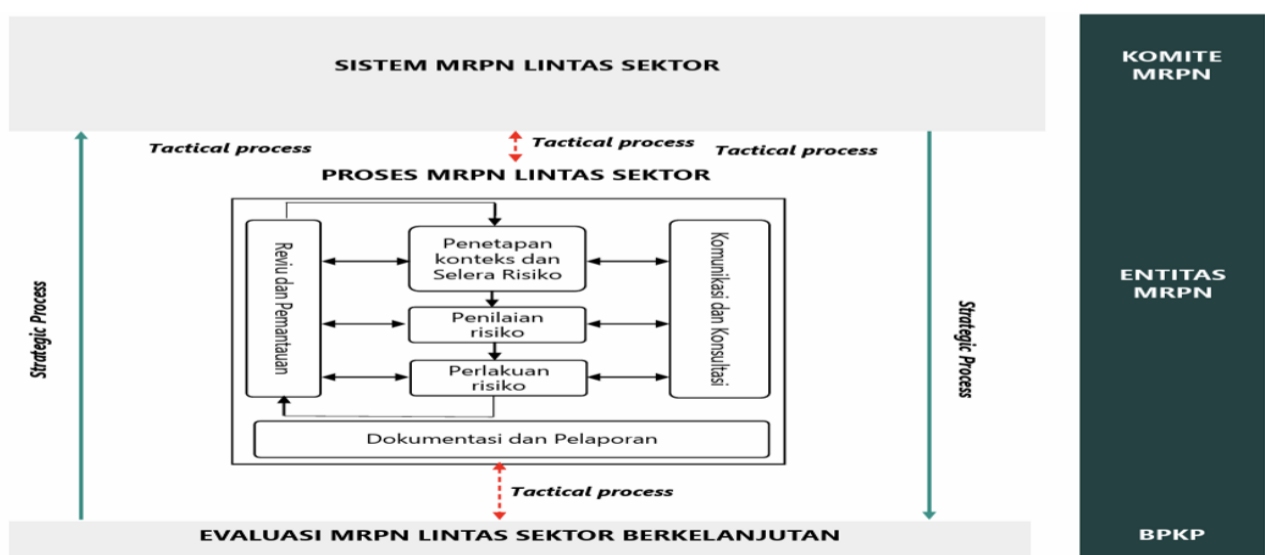
2. Pengendalian pelaksanaan.

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja Pemerintah Daerah dan OPD terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal Pemerintah Daerah dan OPD.

Pengendalian perencanaan dan pelaksanaan akan dilakukan secara berkala akan dilakukan secara tahunan dan lima tahunan dan hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Daerah dan disampaikan kepada publik.

6.1.5. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

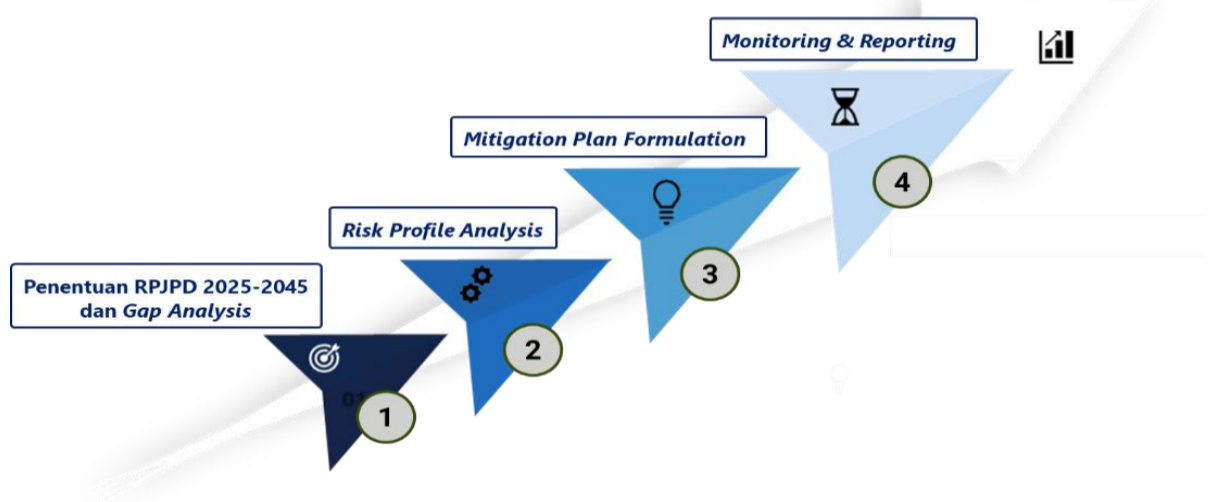
Manajemen risiko pembangunan nasional (MRPN) adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan, mengendalikan dan mengelola risiko pada program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan dan/atau jenis risiko tertentu yang bersifat lintas sektor yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional. MRPN mengkolaborasikan eksisting Manajemen Risiko Organisasi ke dalam sebuah Pengendalian Manajemen Risiko Lintas Sektor yang secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2023. Adapun Kerangka Kerja MRPN dapat dilihat pada Gambar 6.2 berikut.



Gambar 6.2.  
Kerangka Kerja MRPN  
Sumber: Bappenas /BPKP

Sebagai salah satu entitas MRPN, pemerintah daerah perlu menerapkan MRPN sejak tahap perencanaan pembangunan daerah. Penerapan MRPN di daerah dilakukan dengan pembentukan komite manajemen risiko dan penyusunan kebijakan manajemen risiko. Proses yang dilakukan untuk menerapkan MRPN antara lain perencanaan kinerja prioritas pembangunan, penentuan objek dan entitas MRPN, dan proses asesmen risiko. Proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan dari manajemen risiko sangat diperlukan dalam meningkatkan probabilitas pencapaian tujuan dan mengurangi dampak merugikan pada suatu kejadian bagi entitas MRPN.

Penyusunan RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045 harus berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang antar periode serta menjaga sinkronisasi periodisasi dan substansi yang mengacu pada RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional. Langkah ini sangat penting dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari visi Indonesia Emas Tahun 2045. Dalam rangka percepatan pembangunan di berbagai sektor sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan, diperlukan tahapan dan integrasi manajemen risiko yang menyeluruh serta pembentukan dasar hukum yang memastikan integrasi tersebut dalam penyelenggaraan manajemen risiko.



Gambar 6.3  
Tahapan Manajemen Risiko untuk Mencapai Target RPJPD  
Sumber: Bappenas

Tahapan manajemen risiko untuk membantu tercapainya target RPJPD dapat diperhatikan pada Gambar 6.3. berikut.

- i. Penentuan RPJPD periode 2025-2045 dengan menetapkan arah kebijakan dan target yang akan dicapai pada tahun 2045. Hal ini mencakup penetapan visi, misi, serta sasaran pembangunan jangka panjang yang diharapkan dapat membawa Kota Pematangsiantar menuju pencapaian Indonesia Emas tahun 2045. Hal tersebut perlu dilakukan melalui gap analysis terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJPD periode sebelumnya. Gap analysis dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara pencapaian yang diharapkan dengan kinerja yang telah tercapai, sehingga

langkah-langkah strategis dapat ditentukan untuk mengatasi perbedaan tersebut dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dalam RPJPD.

- ii. *Risk Profile Analysis* dilakukan dengan proses identifikasi dan assesment risiko. Proses identifikasi risiko mencakup pengenalan dan penilaian terhadap berbagai potensi risiko yang mungkin timbul, baik dari internal maupun eksternal, yang dapat menghambat pencapaian target dalam RPJPD periode 2025-2045. Selanjutnya, dilakukan assesment risiko untuk mengevaluasi kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood*) dan dampak serius (*severity*) dari risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Penilaian ini membantu untuk memahami tingkat urgensi dan tingkat risiko yang harus dihadapi, sehingga tindakan pencegahan dan mitigasi yang sesuai dapat diambil dalam penyusunan RPJPD.
- iii. Penyusunan Rencana Mitigasi (*Mitigation Plan Formulation*) yang dilakukan bersama dengan Kementerian/ Lembaga/ Daerah terkait dalam proses perumusan rencana mitigasi. Proses ini mencakup identifikasi risiko yang diprioritaskan untuk ditangani dan menetapkan jadwal yang jelas untuk pelaksanaan rencana mitigasi. Dengan demikian, rencana mitigasi dapat disusun secara sistematis dan efektif untuk mengatasi risiko yang dihadapi dalam penyusunan RPJPD periode 2025-2045.
- iv. Melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan untuk memastikan bahwa implementasi RPJPD berjalan dengan baik, memungkinkan evaluasi berkala terhadap pencapaian target, serta memastikan partisipasi dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembangunan daerah. Proses tersebut mencakup pemantauan secara internal terhadap implementasi RPJPD Kota Pematangsiantar periode 2025-2045 dan mengikutsertakan pihak eksternal, seperti lembaga pengawas, organisasi masyarakat, atau pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan RPJPD, sekaligus mendapatkan masukan yang diperlukan dari berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan implementasi RPJPD,

Adapun identifikasi risiko terhadap misi atau tujuan pembangunan yang telah ditetapkan RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045 yaitu;

1. Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada transformasi sosial, terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus di bidang Kesehatan melalui pemenuhan fasilitas kesehatan yang memadai, memenuhi standar dan terintegrasi serta peningkatan kuantitas dan kualitas SDM tenaga medis serta pemanfaatan bioteknologi dan digitalisasi bidang Kesehatan, peningkatan gizi masyarakat untuk mencegah stunting, peningkatan peran lintas sektor, pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat, serta pemantapan perilaku hidup sehat dan pemenuhan jaminan kesehatan nasional secara berkelanjutan. Dibidang Pendidikan melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana serta sumber daya manusia bidang pendidikan. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan secara kolaboratif, Pemerataan tenaga pendidik, peningkatan soft skill

peserta didik dan Peningkatan manajemen pengelolaan Pendidikan, Peningkatan kemampuan literasi dan matematika, pembelajaran kewirausahaan, serta penguasaan teknologi dalam penerapan akademik. Untuk bidang sosial fokus pada penyandang disabilitas di luar panti, kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar sektor melalui peningkatan SDM dan optimalisasi sistem pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan penguatan kelembagaan anak, pemberdayaan masyarakat & lingkungan yang aman untuk anak.

2. Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada transformasi ekonomi, beberapa aspek menjadi fokus utama meningkatkan produktivitas sektor unggulan yang kuat, berdaya saing, dan berlandaskan ekonomi inklusif melalui penataan penguatan regulasi atau kebijakan, mapping pelatihan ketenagakerjaan, penguatan peran lembaga keuangan untuk ekonomi daerah, peningkatan kualitas produk unggulan daerah dan peningkatan jaringan pemasaran. Pengarustuamaan transformasi digital dalam mendorong produktivitas dan efisiensi kegiatan ekonomi secara keberlanjutan yang disertai dengan penguatan talenta digital, Diversifikasi sektor ekonomi potensial melalui penguatan ekonomi lokal dengan mendorong UMKM serta pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dalam rangka membuka lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja, sekolah vokasi, dan penguatan kewirausahaan bagi angkatan kerja produktif.
3. Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada transformasi tata kelola, beberapa aspek menjadi fokus yaitu penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja, peningkatan kompetensi aparatur, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, mentransformasikan prinsip-prinsip dan semangat wirausaha ke dalam sektor pelayanan publik (mewirausakan birokrasi/reinventing government) dan peningkatan pengawasan untuk mencegah segala kecurangan dan tindak pidana korupsi
4. Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah, beberapa aspek utama dipertimbangkan. Pertama, adalah terwujudnya kelembagaan demokrasi yang transformatif, dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Selain itu, terwujudnya stabilitas sistem keuangan dengan meningkatnya inklusi keuangan dengan pengelolaan keuangan daerah secara tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta terwujudnya kesetaraan masyarakat pada sektor politik, ekonomi, dan sosial juga harus diperhatikan dalam upaya menciptakan daerah yang tangguh dan stabil secara menyeluruh.
5. Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada transformasi ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, beberapa aspek kunci perlu dipertimbangkan. Pertama, percepatan pemenuhan akses sanitasi aman untuk masyarakat.

Selanjutnya, penerapan ekonomi sirkular dari sumber domestik secara partisipatif perlu diperhatikan, dengan reformasi tata kelola sampah yang efektif dan efisien untuk mengurangi dampak negatif lingkungan. Pengembangan pangan lokal melalui peningkatan produksi pangan lokal juga menjadi penting dalam memenuhi kecukupan konsumsi pangan. Selain itu, pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) terintegrasi dari hulu ke hilir perlu diperhatikan untuk memastikan ketersediaan air bersih yang memadai bagi masyarakat. Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana serta peningkatan kinerja program perlindungan dan pengelolaan kualitas lingkungan hidup juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam upaya mencapai transformasi ketahanan sosial, budaya, dan ekologi yang berkelanjutan.

Dengan mengidentifikasi dan merancang strategi manajemen risiko yang tepat di setiap aspek tersebut, rencana pembangunan dalam jangka panjang dapat berjalan lebih efektif serta meminimalkan risiko yang mungkin ditimbulkan

#### 6.1.6. Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan nonpemerintah, seperti dunia usaha, lembaga penelitian, dan kelompok masyarakat lainnya. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan daerah.

Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah dan OPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro pusat dan daerah, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Kedepan Pemerintah Kota Pematangsiantar akan memberi kemudahan bagi para *pelaku pembangunan nonpemerintah, seperti dukungan regulasi untuk* pengurangan pajak dan retribusi untuk investasi di sektor strategis, penyederhanaan perizinan bagi pelaku usaha UMKM, serta penghargaan kepada komunitas masyarakat yang berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan.

#### 6.1.7. Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang, target RPJP Daerah dapat dimutakhirkan melalui RPJM Daerah. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Revisi RPJPD harus melalui

kajian teknis yang melibatkan akademisi dan masyarakat melalui media konsultasi publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat serta persetujuan DPRD untuk memastikan penyesuaian tetap sesuai dengan prinsip pembangunan jangka panjang..

Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJP Daerah Tahun 2025-2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

#### 6.1.8. Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik RPJP Daerah 2025-2045 berprinsip “tidak ada yang tertinggal” (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Kedepan Pemerintah Kota Pematangsiantar akan membangun *platform digital* yang menyediakan media informasi dan komunikasi tentang kebijakan dan program pembangunan daerah termasuk komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media massa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora/perantau, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia sehingga memudahkan masyarakat memahami dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, dan saran. Disamping itu akan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan musyawarah pembangunan pada tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat Kota serta pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.

Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan informasi, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

## 6.2. Pembiayaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan Visi Kota Pematangsiantar 2045 memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan,

penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber - sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup: (i) penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi: penataan regulasi daerah dan pembentukan kelembagaan daerah yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*); (ii) perluasan kerja sama bilateral, multilateral dan kerja sama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya; (iii) penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model *private financial initiative* yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial; (iv) penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri daerah dan mendorong alih teknologi; (v) optimalisasi pemanfaatan aset melalui daur ulang aset (*asset recycling*), tukar guling aset (*asset offset*) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan di suatu kawasan (*asset value capture*). Kedepan Pemerintah Kota Pematangsiantar akan mengoptimalkan investasi daerah melalui skema pembiayaan yang saling menguntungkan (KPBU/AP/tarif) melalui proyek pembangunan strategis daerah; seperti : pembangunan infrastruktur sistim air minum yang terintegrasi, sistim penghantaran kabel bawah tanah, pembangunan rumah sakit bertaraf internasional, pendirian univestitas/perguruan tinggi negeri dan proyek strategis lainnya yang mendukung program lingkungan berkelanjutan.

Sedangkan untuk peningkatan kapasitas pembiayaan sektor nonpublik dilakukan melalui: (i) pemanfaatan instrumen pendanaan jangka panjang (antara lain: dana pensiun, asuransi, instrumen di pasar modal, dan dana abadi daerah), (ii) inovasi produk pembiayaan syariah yang disusun berdasarkan prinsip sewa-menyewa, jual beli, dan bagi hasil, (iii) inovasi pembiayaan untuk merespon perubahan iklim yang mencakup berbagai jenis pembiayaan hijau, biru dan sirkular, (iv) produk pembiayaan berbasis transaksi, seperti bursa karbon, bursa plastik ataupun bursa tematik lainnya, (v) serta penguatan bauran pendanaan (*blended financing*) melalui pemanfaatan dana yang bersifat katalitik seperti dana filantropi, dana sosial korporasi maupun dana keagamaan, termasuk jaminan, yang seluruhnya ditujukan untuk mengurangi risiko finansial bagi partisipasi sektor non publik dalam pembangunan daerah.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan nonpublik perlu diikuti dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pembiayaan yang ada dapat digunakan secara optimal. Beberapa langkah penguatan manajemen investasi publik tersebut mencakup: (i) penajaman identifikasi investasi publik dalam setiap periode

jangka menengah; (ii) penyempurnaan proses penyiapan dan penilaian proyek investasi publik; (iii) penyesuaian prioritas investasi publik skala daerah; (iii) modernisasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan investasi publik; (iv) pelibatan swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik; (v) penyempurnaan kerangka regulasi, tata kelembagaan dan organisasi serta kapasitas sumber daya manusia manajemen investasi publik; dan (vi) penguatan transparansi dan akuntabilitas atas seluruh aspek investasi publik.

### **6.3. Kesimpulan**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dokumen RPJPD menjabarkan visi, misi, dasaran pokok dan arah kebijakan daerah serta indikator kinerja selama kurun waktu 20 tahun yang menjawab tantangan permasalahan serta isu-isu strategis daerah sehingga dapat dicapai visi yang telah dirumuskan. RPJPD ini juga menjadi acuan dan pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar dengan periodisasi 5 tahunan serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar dengan periodisasi tahunan.

### **6.4. Saran**

RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045 merupakan dokumen yang berperan penting dalam keberhasilan Pembangunan jangka panjang Kota Pematangsiantar untuk pencapaian visi daerah yaitu: “Kota Pematangsiantar Indah, Maju dan Berkelanjutan”. Keberhasilan tersebut perlu didukung oleh 1) Komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; 2) Konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; 3) Keberpihakan pembangunan kepada masyarakat; dan 4) Peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Pematangsiantar serta menjaga keseimbangan Pembangunan dan menjaga kesinambungan perencanaan.

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

WESLY SILALAH

**SALINAN Sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**EDI SUTRISNO, S.H.**

**PEMBINA**

**196903131989031004**